



PEMERINTAH
KOTA DUMAI



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman



PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029



RPJMD

KOTA DUMAI TAHUN 2025 - 2029



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan
WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berpedoman kepada RPJP Nasional.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
14. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
15. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah yang selanjutnya disingkat RIPJPID adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
23. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
24. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
25. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
26. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
27. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
28. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

29. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
30. Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
31. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
32. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
33. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
34. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja
35. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
36. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
37. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
38. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi
39. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
40. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/ jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
41. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
42. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

43. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
44. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
45. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
46. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD
47. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
48. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
49. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih masa jabatan tahun 2025-2029.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan, Analisis Isu-Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 dan Pedoman Transisi serta kaidah pelaksanaan.

- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III : Visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
 - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (4) Kerangka Pendanaan dan Target Kinerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat indikatif.
- (5) Dokumen RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJM Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah dan bersifat indikatif.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi mencakup kesesuaian antara capaian indikator kinerja pembangunan daerah dengan target yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi merekomendasikan terjadinya penyesuaian indikator kinerja pembangunan daerah tanpa merubah substansi RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), maka penyesuaian indikator kinerja pembangunan daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Walikota menyampaikan penyesuaian indikator hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPRD.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH

Pasal 5

Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan perundang- undangan; dan/atau
- c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup bencana alam, guncangan politik krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perubahan nama indikator dan program dalam RPJM Daerah yang disebabkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak merubah ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan pada peraturan mengenai RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 19 Agustus 2025



PAISAL KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 21 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



ANDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 8 SERI D
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.29.A/2025)



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas rahmat karunia-Nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 disusun untuk mengetahui tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, pengembangan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan, permasalahan dan isu strategis, visi dan misi daerah serta arah kebijakan dan sasaran pokok perencanaan pembangunan Kota Dumai selama Tahun 2025-2029 atau dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD selama periode RPJMD Tahun 2025-2029.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,



WALI KOTA DUMAI,

PAISAL, SKM., MARS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	IX
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-7
1.3.1. Hubungan Terhadap RPJPN Tahun 2025-2045	I-8
1.3.2. Hubungan Terhadap RPJMN Tahun 2025-2029	I-9
1.3.3. Hubungan Terhadap RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045	I-11
1.3.4. Hubungan Terhadap RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	I-12
1.3.5. Hubungan Terhadap RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045	I-12
1.3.6. Hubungan Terhadap RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039	I-15
1.3.7. Hubungan Terhadap RKPD Kota Dumai	I-16
1.3.8. Hubungan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	I-16
1.3.9. Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Daerah Tahun 2025-2029	I-21
1.3.10. Hubungan Terhadap Dokumen Lainnya	I-22
1.4. Maksud dan Tujuan	I-22
1.4.1. Maksud	I-22
1.4.2. Tujuan	I-22
1.5. Sistematika Penulisan RPJMD	I-23
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-1
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam	II-12
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-18
2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-24
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas	II-32
2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-38
2.1.7. Demografi	II-46
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-55
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	II-55

2.2.2.	Kesehatan Untuk Semua	II-71
2.2.3.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-123
2.2.4.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-140
2.2.5.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-143
2.2.6.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-149
2.3.	Aspek Daya Saing Daerah	II-168
2.3.1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-168
2.3.2.	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	II-172
2.3.3.	Transformasi Digital	II-180
2.3.4.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-186
2.3.5.	Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-188
2.3.6.	Stabilitas Ekonomi Makro	II-195
2.4.	Aspek Pelayanan Umum	II199
2.4.1.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-199
2.4.2.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II-204
2.4.3.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-205
2.4.4.	Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah	II-206
2.5.	Gambaran Keuangan Daerah	II-234
2.5.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	II-235
2.5.2.	Proyeksi Keuangan Daerah 5 Tahun Mendatang	II-250
2.6.	Permasalahan dan Isu Strategis	II-253
2.6.1.	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	II-254
2.6.2.	Pemusatan Permasalahan Pembangunan Daerah	II-261
2.6.3.	Isu Strategis Daerah	II-265

BAB III | VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III-1
3.1.1.	Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029	III-1
3.1.2.	Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029	III-5
3.1.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029	III-10
3.2.	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas	III-20
3.2.1.	Strategi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029	III-20
3.2.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029	III-27
3.2.3.	Program Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029	III-38

BAB IV | PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAM KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

4.1.	Rencana Program Perangkat Daerah	IV-1
4.1.1.	Rincian Program Perangkat Daerah	IV-1

4.1.2.	Rekap Anggaran Perangkat Daerah	IV-100
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	IV-103
4.2.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-103
4.2.2.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	IV-104

BAB V | PENUTUP

5.1.	Kaidah Pelaksanaan	V-2
5.2.	Skema Monitoring dan Evaluasi	V-2
5.3.	Manajemen Risiko	V-5

LAMPIRAN | METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA RPJMD KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

DAFTAR TABEL

BAB I | PENDAHULUAN

Tabel 1. 1 Hubungan antara RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045	I-9
Tabel 1. 2 Hubungan antara RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029	I-10
Tabel 1. 3 Hubungan antara RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045	I-11
Tabel 1. 4 Hubungan antara RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	I-12
Tabel 1. 5 Hubungan antara RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045	I-13
Tabel 1. 6 Hubungan antara RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029	I-17
Tabel 1. 7. Intergasi Rekomendasi KLHS RPJM terhadap RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029	I-18

BAB II | GAMBARAN UMUM DAERAH

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2024	II-2
Tabel 2. 2 Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2025	II-4
Tabel 2. 3 Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024	II-5
Tabel 2. 4 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024	II-8
Tabel 2. 5 Daya Dukung Air per Kecamatan di Kota Dumai	II-9
Tabel 2. 6 Suhu dan Kelembaban Udara Kota Dumai Tahun 2024	II-10
Tabel 2. 7 Perkembangan Jumlah Hari Hujan di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-10
Tabel 2. 8 Peruntukan Penggunaan Lahan di Kota Dumai Tahun 2019-2039	II-11
Tabel 2. 9 Produktivitas Tanaman Padi Tahun 2020-2024	II-13
Tabel 2. 10 Luas, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-14
Tabel 2. 11 Populasi dan Produksi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-15
Tabel 2. 12 Produksi Perikanan Laut (Kg) Tahun 2020-2024	II-17
Tabel 2. 13 Kebutuhan Beras Kota Dumai	II-19
Tabel 2. 14 Ketersediaan Beras Kota Dumai	II-19
Tabel 2. 15 Daya Dukung Pangan Kota Dumai	II-20
Tabel 2. 16 Ketersediaan Air Kota Dumai	II-20
Tabel 2. 17 Kebutuhan Air Tahun Kota Dumai	II-21
Tabel 2. 18 Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air	II-22
Tabel 2. 19 Perhitungan DDL Permukiman	II-23
Tabel 2. 20 Cadangan Ketersediaan Air Kota Dumai	II-24
Tabel 2. 21. Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-27
Tabel 2. 22 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-29
Tabel 2. 23 Konsumsi Listrik Kota Dumai Tahun 2021-2023	II-30
Tabel 2. 24 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-30
Tabel 2. 25 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-31
Tabel 2. 26 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020—2024	II-33
Tabel 2. 27 Capaian Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Riau terhadap Baseline Tahun 2010-2024	II-34
Tabel 2. 28 Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-35
Tabel 2. 29 Perkembangan Penyediaan Sanitasi Rumah Tangga Tahun 2020-2024	II-37
Tabel 2. 30 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-37
Tabel 2. 31 Indeks Risiko Bencana Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-39
Tabel 2. 32 Perkembangan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020-2024	II-43
Tabel 2. 33 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-44

Tabel 2. 34 Tingkat Risiko Multibahaya di Kota Dumai	II-45
Tabel 2. 35 Tingkat Risiko berdasarkan Jenis Bencana	II-46
Tabel 2. 36 Indikator Kependudukan Tahun 2020-2024	II-47
Tabel 2. 37 Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Dumai dan Kecamatan Tahun 2020-2024	II-48
Tabel 2. 38 Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-50
Tabel 2. 39 Perkembangan Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-52
Tabel 2. 40 Proyeksi Penduduk Kota Dumai Tahun 2025-2030	II-54
Tabel 2. 41 Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-55
Tabel 2. 42 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2. 43 Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-58
Tabel 2. 44 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Juta) Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-60
Tabel 2. 45 Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-61
Tabel 2. 46 Perkembangan Kontribusi PDRB Kota Dumai Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-62
Tabel 2. 47 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Dumai dan PDRB Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-66
Tabel 2. 48 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-67
Tabel 2. 49 Indeks Pembangunan Manusia di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-68
Tabel 2. 50 Indeks Gini Tahun 2019-2024	II-70
Tabel 2. 51 Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-70
Tabel 2. 52 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-71
Tabel 2. 53 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-72
Tabel 2. 54 Prevalensi Stunting Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-72
Tabel 2. 55 Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-74
Tabel 2. 56 Perkembangan Angka Balita Gizi Kurang Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-77
Tabel 2. 57 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-78
Tabel 2. 58 Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-81
Tabel 2. 59 Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-83
Tabel 2. 60 Perkembangan Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-84
Tabel 2. 61 Perkembangan Rasio Posyandu per 1.000 Balita Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-86
Tabel 2. 62 Perkembangan Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-87
Tabel 2. 63 Rasio Tenaga Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-89
Tabel 2. 64 Rasio Tenaga Kesehatan, Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-90
Tabel 2. 65 Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2024	II-91
Tabel 2. 66 Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-97
Tabel 2. 67 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-99
Tabel 2. 68 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kota Dumai Tahun 2024	II-101
Tabel 2. 69 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-103
Tabel 2. 70 Persentase Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-105
Tabel 2. 71 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-107
Tabel 2. 72 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019 - 2024	II-110
Tabel 2. 73 Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2024	II-111
Tabel 2. 74 Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-111
Tabel 2. 75 Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-112
Tabel 2. 76 Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2024	II-113

Tabel 2. 77 Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam Tahun 2024	II-115
Tabel 2. 78 Perkembangan Penerima Batuan Iuran (PBI) dari APBD Kota Dumai dan APBN Tahun 2020-2024	II-120
Tabel 2. 79 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-124
Tabel 2. 80 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-125
Tabel 2. 81 Rata-rata Kemampuan Literasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2021-2024	II-126
Tabel 2. 82 Persentase Kemampuan Literasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kota Dumai Tahun 2023-2024	II-126
Tabel 2. 83 Rata-rata Kemampuan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kota Dumai Tahun 2021-2024	II-127
Tabel 2. 84 Persentase Kemampuan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kota Dumai Tahun 2023-2024	II-128
Tabel 2. 85 Indeks Pembangunan Literasi Kota Dumai Tahun 2023 dan Tahun 2024	II-128
Tabel 2. 86 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2. 87 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-131
Tabel 2. 88 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Tahun 2021-2024	II-133
Tabel 2. 89 Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-133
Tabel 2. 90 Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2023-2024	II-136
Tabel 2. 91 Proporsi Guru Paud dengan Kualifikasi S1/D4 Kota Dumai Tahun 2021-2024	II-137
Tabel 2. 92 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Siswa terhadap Ruang kelas di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-137
Tabel 2. 93 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai 2020-2024	II-138
Tabel 2. 94 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-140
Tabel 2. 95 Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-142
Tabel 2. 96 Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Dumai	II-144
Tabel 2. 97 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-146
Tabel 2. 98 Jumlah Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-147
Tabel 2. 99 Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024	II-149
Tabel 2. 100 <i>Total Fertility Rate</i> Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2. 101 <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR) Kota Dumai Tahun 2021 – 2024	II-155
Tabel 2. 102 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-157
Tabel 2. 103 Cakupan <i>Contraceptive Prevalence Rate (CPR)</i> , PUS bukan peserta KB, <i>Unmetneed</i> dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan Tahun 2020-2024	II-159
Tabel 2. 104 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Dumai Tahun 2021-2024	II-160
Tabel 2. 105 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kota Dumai Tahun 2021-2024	II-160
Tabel 2. 106 Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2024	II-161
Tabel 2. 107 Objek Diduga Cagar Budaya Kota Dumai Tahun 2024	II-167
Tabel 2. 108 Cagar Budaya Kota Dumai Tahun 2024	II-168
Tabel 2. 109 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-169
Tabel 2. 110 Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-172
Tabel 2. 111 Perkembangan Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-173
Tabel 2. 112 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-174
Tabel 2. 113 Perkembangan Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-175
Tabel 2. 114 Perkembangan Rasio Pinjaman UMKM Terhadap PDRB ADHB Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-176
Tabel 2. 115 Rasio Kewirausahaan Kota Dumai Tahun 2020 - 2024	II-177
Tabel 2. 116 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-178
Tabel 2. 117 Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022-2024	II-179
Tabel 2. 118 Aplikasi Fungsional yang Digunakan Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2024	II-180
Tabel 2. 119 <i>Website</i> Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-184
Tabel 2. 120 Capaian Indeks SPBE di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-185

Tabel 2. 121 Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-186
Tabel 2. 122 Ekspor Perdagangan Luar Negeri Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-188
Tabel 2. 123 Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-189
Tabel 2. 124 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-189
Tabel 2. 125 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2020-2024	II-191
Tabel 2. 126 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2020-2024	II-191
Tabel 2. 127 Perkembangan Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Penduduk dan Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-192
Tabel 2. 128 Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-192
Tabel 2. 129 Kawasan Kumuh Kota Dumai Tahun 2024	II-193
Tabel 2. 130 Rasio Elektrifikasi Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-194
Tabel 2. 131 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-196
Tabel 2. 132 Perkembangan Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-197
Tabel 2. 133 Perkembangan Inflasi Sektoral Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-198
Tabel 2. 134 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2024	II-199
Tabel 2. 135 Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2020-2024	II-200
Tabel 2. 136 Capaian Indeks SPBE di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-201
Tabel 2. 137 Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-203
Tabel 2. 138 Persentase Penegakan PERDA dan Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-204
Tabel 2. 139 Indeks Daya Saing Daerah di Kota Dumai Tahun 2022-2024	II-205
Tabel 2. 140 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-207
Tabel 2. 141 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-208
Tabel 2. 142 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-209
Tabel 2. 143 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-210
Tabel 2. 144 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-210
Tabel 2. 145 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-211
Tabel 2. 146 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-212
Tabel 2. 147 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-213
Tabel 2. 148 Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-214
Tabel 2. 149 Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-214
Tabel 2. 150 Permasalahan Pertanahan yang Sudah Diselesaikan Tahun 2024	II-215
Tabel 2. 151 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-215
Tabel 2. 152 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-216
Tabel 2. 153 Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-216
Tabel 2. 154 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-217
Tabel 2. 155 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) dan Penumpang Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-217
Tabel 2. 156 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2020-2024	II-218
Tabel 2. 157 Aspek Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-219
Tabel 2. 158 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-220
Tabel 2. 159 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-220
Tabel 2. 160 Perkembangan Penyediaan PJU Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-221
Tabel 2. 161 Pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-221
Tabel 2. 162 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-222

Tabel 2. 163	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-222
Tabel 2. 164	Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-223
Tabel 2. 165	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-224
Tabel 2. 166	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-224
Tabel 2. 167	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-224
Tabel 2. 168	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-225
Tabel 2. 169	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2020 - 2024	II-225
Tabel 2. 170	Jumlah Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Kota Dumai Tahun 2024	II-226
Tabel 2. 171	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-227
Tabel 2. 172	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-227
Tabel 2. 173	Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2020-2024	II-228
Tabel 2. 174	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-228
Tabel 2. 175	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-228
Tabel 2. 176	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-229
Tabel 2. 177	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2020-202	II-230
Tabel 2. 178	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan dan Kelitbangan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-230
Tabel 2. 179	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-230
Tabel 2. 180	Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin dan Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM) Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-231
Tabel 2. 181	Capaian Kinerja Urusan Pendukung Pemerintahan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-231
Tabel 2. 182	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-233
Tabel 2. 183	Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2020-2024	II-234
Tabel 2. 184	Kinerja APBD Kota Dumai	II-236
Tabel 2. 185	Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-238
Tabel 2. 186	Kapasitas Fiskal Daerah Kota Dumai tahun 2020-2024	II-241
Tabel 2. 187	Realisasi Belanja Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-242
Tabel 2. 188	Perkembangan Neraca Daerah Kota Dumai	II-245
Tabel 2. 189	Rasio Keuangan Kota Dumai Tahun 2020-2024	II-249
Tabel 2. 190	Proyeksi Keuangan Daerah Kota Dumai	II-251
Tabel 2. 191	Perumusan Isu Strategis RPJMD Kota Dumai	II-280

BAB III | VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 3. 1	Keterkaitan Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	III-9
Tabel 3. 2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029	III-13
Tabel 3. 3	Penahapan Pembangunan RPJMD	III-28
Tabel 3. 4	Rumusan Arah Kebijakan RPJMD	III-31
Tabel 3. 5	Program Prioritas Provinsi Riau Tahun 2025-2029	III-42
Tabel 3. 6.	Program Prioritas Kota Dumai Tahun 2025-2029	III-47
Tabel 3. 7	Keterkaitan Program Prioritas Kota Dumai dengan Prioritas Di atasnya	III-100

BAB IV | PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAM KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 4. 1	Program Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029	IV-3
Tabel 4. 2	Total Pagu Anggaran Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029	IV-101
Tabel 4. 3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Dumai Tahun 2025-2029	IV-103
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029	IV-105

BAB V | PENUTUP

Tabel 5. 1	Skema Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029	V-3
Tabel 5. 2	Jenis Forum Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029	V-4

DAFTAR GAMBAR

BAB I | PENDAHULUAN

Gambar 1. 1 Konstelasi dan Posisi Dokumen RPJMD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran	I - 8
Gambar 1. 2 Pentahapan RPJPD Kota Dumai 2025-2045	I - 13

BAB II | GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Dumai	II - 3
Gambar 2. 2 Peta Daya Dukung Air Kota Dumai Tahun 2024	II - 22
Gambar 2. 3 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai	II - 40
Gambar 2. 4 Peta Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi	II - 41
Gambar 2. 5 Peta Rawan Bahaya Kegagalan Teknologi	II - 42
Gambar 2. 6 Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	II - 43
Gambar 2. 7 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2024	II - 49
Gambar 2. 8 Jumlah dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024	II - 52
Gambar 2. 9 Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2024	II - 53
Gambar 2. 10 Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Kota Dumai Tahun 2024	II - 59
Gambar 2. 11 Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Kota Dumai Tahun 2024	II - 61
Gambar 2. 12 Posisi Kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai dan Kabupaten Kota terhadap Provinsi Riau Tahun 2024	II - 63
Gambar 2. 13 Tren Pertumbuhan IPM Kota Dumai Tahun 2019-2024	II - 68
Gambar 2. 14 Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019—2024	II - 76
Gambar 2. 15 Perkembangan Angka Balita Gizi Kurang di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II - 77
Gambar 2. 16 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II - 78
Gambar 2. 17 Perkembangan Angka Kematian Bayi Absolut dan Per 1000 Kelahiran Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019-2024	II - 80
Gambar 2. 18 Pertumbuhan per Tahun Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019—2024	II - 80
Gambar 2. 19 Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2020-2024	II - 81
Gambar 2. 20 Perkembangan Angka Kematian Balita Absolut dan per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019-2024	II - 82
Gambar 2. 21 Pertumbuhan per Tahun Angka Kematian Balita Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019—2024	II - 82
Gambar 2. 22 Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019-2024	II - 91
Gambar 2. 23 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di RS Kota Dumai Tahun 2020-2024	II - 92
Gambar 2. 24 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun 2020-2024*	II - 93
Gambar 2. 25 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II - 95
Gambar 2. 26 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II - 96
Gambar 2. 27 Cakupan Pelayanan Tuberkulosis (%) di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II - 98
Gambar 2. 28 Nilai Absolut Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019–2024	II - 100
Gambar 2. 29 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II - 102
Gambar 2. 30 Nilai Absolut Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019–2024	II - 104
Gambar 2. 31 Nilai Absolut Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II - 105
Gambar 2. 32 Cakupan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II - 107
Gambar 2. 33 Cakupan Pelayanan Usia Lanjut di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II - 109
Gambar 2. 34 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Tahun 2019-2024.	II - 141

Gambar 2. 35 Indeks Pembangunan Gender Kota Dumai Tahun 2020-2024	II - 150
Gambar 2. 36 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Dumai Tahun 2020-2024	II - 152
Gambar 2. 37 Indeks Ketimpangan Gender Kota Dumai Tahun 2020-2024	II - 153
Gambar 2. 38 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2024	II - 170
Gambar 2. 39 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Dumai dari Tahun 2020-2024	II - 239
Gambar 2. 40 Grafik Struktur Pendapatan Daerah Kota Dumai tahun 2020-2024	II - 240
Gambar 2. 41 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kota Dumai dari Tahun 2020-2024	II - 243
Gambar 2. 42 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Dumai dari Tahun 2020-2023	II - 243
Gambar 2. 43 Komponen untuk Merumuskan Isu Strategis Kota Dumai	II - 266

BAB III | VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Gambar 3. 1 Keterkaitan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan lain	III - 4
Gambar 3. 2 Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029	III - 5
Gambar 3. 3 Diagram Alir Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Indikator pada Misi 1	III - 23
Gambar 3. 4 Diagram Alir Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Indikator pada Misi 2	III - 24
Gambar 3. 5 Diagram Alir Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Indikator pada Misi 3	III - 25
Gambar 3. 6 Diagram Alir Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Indikator pada Misi 4	III - 26
Gambar 3. 7 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029	III - 28
Gambar 3. 8 Kawasan Provinsi Riau dalam RPJMN Tahun 2025-2029	III - 39
Gambar 3. 9 Program Prioritas Nasional & 8 Program Hasil Terbaik Cepat	III - 41



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB I

PENDAHULUAN

INDONESIA
EMAS

2045

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA DUMAI TAHUN 2025 - 2029



BAB I | PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan utama dari pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (UUD 1945). Sejalan dengan itu, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan konsep Otonomi Daerah, pembangunan di daerah harus tetap selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Prinsip inilah yang menjadi landasan dalam menyusun rencana pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (Dua Puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (Lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kota Dumai merupakan salah satu kota di Provinsi Riau yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Tahun 2024. Setelah kepala daerah terpilih dilantik, kepala daerah ini memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan. Saat ini, proses penyusunan RPJMD Kota Dumai telah memasuki tahap penyusunan RPJMD, yang memerlukan analisis mendalam mengenai kondisi eksisting Kota Dumai. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran capaian pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta menguraikan isu-isu strategis yang mungkin



dihadapi dalam lima tahun mendatang sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD 2025-2029.

Lebih lanjut, petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setelah dilantiknya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemerintah daerah harus segera menetapkan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berpedoman pada Pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen RPJMD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan, meliputi:

- a. **Pendekatan Teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. **Pendekatan Partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. **Pendekatan Politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. **Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.



RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal RPJPD Kota Dumai Tahun 2025–2045 "Penguatan Fondasi Transformasi" yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025–2045. Dokumen ini disusun untuk melaksanakan visi dan misi Walikota Dumai yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, sebagai kelanjutan dari kepemimpinan yang telah dimulai pada periode sebelumnya.

Mengingat pentingnya dokumen RPJMD sebagai pedoman pembangunan sekaligus instrumen penilaian kinerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun masa bakti kepala daerah periode 2025-2029, maka peran aktif dari seluruh Perangkat Daerah di Kota Dumai sangat dibutuhkan. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan analisis setiap urusan pembangunan, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan.

Oleh sebab itu, sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah harus memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keberlangsungan sumber daya yang tersedia tersebut serta harus mampu menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhannya terhadap pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 mencakup beberapa peraturan yang berasal dari tingkat nasional, provinsi, hingga daerah. Secara lebih rinci, dasar hukum RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rancangan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



- Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Koedifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 105);
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



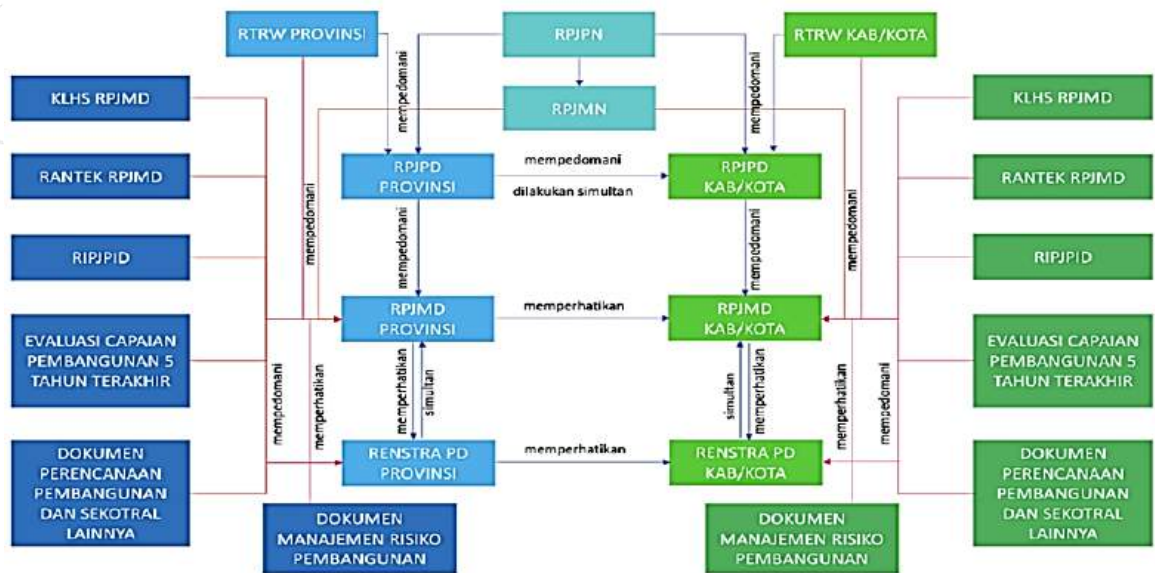
Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri E).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.

Dokumen RPJMD Kota Dumai ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045, dan RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan rekomendasi dari KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). RPJMD akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Gambaran singkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Konstelasi dan Posisi Dokumen RPJMD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran

Sumber: <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/647>

1.3.1. Hubungan Terhadap RPJPN Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. RPJPN 2025-2045 mengusung visi Indonesia Emas 2045 yaitu "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", yang sejalan dengan visi RPJMD Kota Dumai sebagai "Kota Industri yang Unggul, Sejahtera dan Berbudaya Melayu tahun 2029".

Visi Kota Dumai tersebut mendukung pencapaian visi nasional melalui pengembangan sektor industri yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di dunia internasional, dengan kemiskinan mendekati 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang, yang sejalan dengan upaya Kota Dumai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.

RPJPN 2025-2045 menetapkan pendekatan transformatif dalam pembangunan nasional. Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif, melalui 3 (tiga) area perubahan, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola. Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2025– 2029 dengan

visi dan misi RPJPN Tahun 2025–2045 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Hubungan antara RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN Tahun 2025-2045	RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029
VISI	
“INDONESIA EMAS 2045: NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN”	“VISI : KOTA INDUSTRI YANG UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU TAHUN 2029”
MISI	
Misi 1: Transformasi Sosial	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berdaya Saing
Misi 2: Transformasi Ekonomi	Misi 3: Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
Misi 1: Transformasi Sosial	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berdaya Saing
Misi 2: Transformasi Ekonomi	Misi 3: Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkelanjutan
Misi 3: Transformasi Tata Kelola	Misi 4: Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel
Misi 4: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	
Misi 5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berdaya Saing
Misi 8: Mewujudkan Kesyntambungan Pembangunan	

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

1.3.2. Hubungan Terhadap RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional yang tertuang pada RPJMN Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045 sebagai perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional melalui telaah terhadap isu-isu strategis dan prioritas nasional serta target yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta memperhatikan RPJPD Provinsi Riau terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kota Dumai.

Berdasarkan analisis prioritas pembangunan dengan RPJMN Tahun 2025-2029, Kota Dumai disebutkan sebagai salah satu wilayah pertumbuhan di Provinsi Riau dengan fokus sebagai Kawasan Perkotaan Dumai dan Kawasan Pengembangan Industri Dumai. Selanjutnya, Analisis isu strategis dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi diintegrasikan dengan isu yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih sebagai bahan penyusunan isu strategis RPJMD. Hasil analisis tersebut ditindaklanjuti untuk penjabaran visi dan misi dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Dumai tahun 2025–2029.

Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2025– 2029 dengan visi dan misi RPJMN Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Hubungan antara RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029
	VISI
"BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045"	"KOTA INDUSTRI YANG UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU TAHUN 2029"
	MISI
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berdaya Saing
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif
Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirasusahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, Dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkelanjutan
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berdaya Saing
Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif
Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkelanjutan
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba	Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berdaya Saing

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

1.3.3. Hubungan Terhadap RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045

Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2025– 2029 dengan visi dan misi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025– 2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 3 Hubungan antara RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045

RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045	RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029
VISI	
" RIAU MAJU DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU YANG AGAMIS "	" KOTA INDUSTRI YANG UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU TAHUN 2029 "
MISI	
Transformasi Sosial Untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berdaya Saing
Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau	Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif
Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel
Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkelanjutan
	Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif
Mewujudkan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berdaya Saing
	Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif
Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Antar Kabupaten/Kota	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkelanjutan
Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkelanjutan
Kesinambungan Pembangunan untuk Mewujudkan Riau Maju	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkelanjutan
	Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

1.3.4. Hubungan Terhadap RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2025– 2029 dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025– 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. 4 Hubungan antara RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029

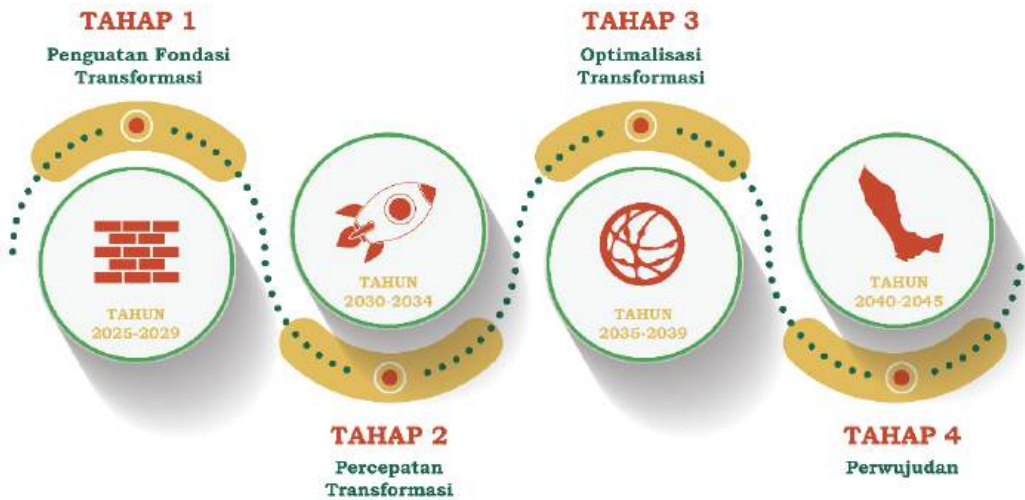
RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029
VISI	
RIAU BERBUDAYA MELAYU, DINAMIS, EKOLOGIS, AGAMIS DAN MAJU	"KOTA INDUSTRI YANG UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU TAHUN 2029"
MISI	
Misi 1 : Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berdaya Saing
Misi 2: Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan	Misi 3: Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif
Misi 3: Memperkuat infrastruktur yang handal, guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah	Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkelanjutan
Misi 4: Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berdaya Saing
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju world class government	Misi 4: Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel
Misi 6: Memperkuat riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui public private partnership, kerjasama antar daerah maupun kerjasama antar global	Misi 4: Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel
Misi 7: Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai nilai kearifan lokal serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua	Misi 4: Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

1.3.5. Hubungan Terhadap RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045

RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 mengacu pada Dokumen RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Tahapan periodisasi

pembangunan jangka menengah daerah dalam RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 dimanifestasikan ke dalam 4 (empat) tema besar sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 1. 2 Pentahapan RPJPD Kota Dumai 2025-2045

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

Sesuai dengan hal tersebut, periode tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 yang diarahkan pada penguatan fondasi transformasi antara lain Penguatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; Penguatan hilirisasi sektor industri pengolahan dan usaha menengah kecil dan mikro dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penguatan riset dan inovasi daerah; Penguatan Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil; Penguatan Regulasi dan Ketahanan Sosial Ekologi serta Pembangunan Kewilayahan yang Terintegrasi.

Sasaran pokok tahap pertama RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 dijadikan acuan penyusunan isu strategis RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029. Keterkaitan dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Hubungan antara RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045

RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045	RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029
VISI	
"KOTA IDAMAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN"	"KOTA INDUSTRI YANG UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU TAHUN 2029"

RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045	RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029
MISI	
Mewujudkan Masyarakat Dumai Yang Sehat, Berkualitas Dan Sejahtera Melalui Transformasi Sosial	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berdaya Saing
Mewujudkan Perekonomian Kota Dumai Yang Maju Melalui Transformasi Ekonomi	Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Melalui Transformasi Tata Kelola	Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel
Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkelanjutan

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029, 2025

Mengacu pada RPJPD Kota Dumai 2025-2045, maka tema RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 adalah “Penguatan Fondasi Tranformasi” yang merupakan fondasi awal untuk mewujudkan Visi RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 yaitu Kota Idaman, Maju dan Berkelanjutan. Adapun arti dan maksud Visi Kota Dumai dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) **KOTA IDAMAN** merupakan akronim dari **KOTA** Industri, ber**D**aya saing dengan pemerintahan yang **AMAN**ah. Akronim ini menggambarkan harapan Kota Dumai yang memiliki peran *signifikan* dalam pembangunan ekonomi di pantai Timur Sumatera dengan dukungan Pemerintahan daerah yang dikelola dengan prinsip-prinsip *good governance*.
- 2) **MAJU** dalam arti Kota Dumai yang maju bermakna pembangunan yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan Masyarakat dengan PDRB per kapita penduduk mencapai USD 23.000-30.300 tahun 2045.
- 3) **BERKELANJUTAN** dalam arti sebagai kota yang berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka arah pembangunan akan menyeimbangkan pembangunan sosial, ekonomi dan pembangunan lingkungan hidup.

RPJPD Kota Dumai 2025-2045 memuat 5 (lima) Sasaran Visi yang menjadi landasan untuk pengembangan dan pembangunan serta menjadi agenda jangka panjang Kota Dumai menuju Kota Idaman, Maju dan dan berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Sasaran Visi Kota Dumai adalah sebagai berikut:



- Meningkatnya pendapatan per kapita;
- Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan;
- Meningkatnya Peran Kepemimpinan Daerah untuk mencapai Visi Daerah;
- Meningkatnya daya saing Sumber daya manusia; dan
- Menurunnya emisi GRK menuju *net zero emission*.

1.3.6. Hubungan Terhadap RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039

Penyusunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang terkait dengan rencana pelaksanaan pembangunan sektoral, wilayah, dan daerah, dimana RTRW tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW, bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang mencakup rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi pemanfaatan ruangnya, sehingga tujuan pembangunan akan tercapai, kesenjangan wilayah berkurang tetapi tetap sesuai dengan tata kelola fungsi keruangan, yang akan mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan, dan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

Penyusunan RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai Tahun 2019-2039, yang mengamanatkan hal-hal yang harus diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah dan sektoral sebagai berikut:

1. Menetapkan Kota Dumai sebagai **Pusat Kegiatan Nasional (PKN)** dan **Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN)** serta pusat industri pengolahan dan perdagangan regional yang mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dumai.
2. Mendorong **keterpaduan pengembangan wilayah dengan daerah sekitar**, khususnya integrasi dengan kawasan industri dan pelabuhan di Provinsi Riau serta aksesibilitas dengan negara tetangga melalui laut.



3. Pengembangan kota yang produktif melalui **penyediaan ruang untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas industri, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (perumahan, pelayanan publik)**. Selain itu, Kota Dumai juga merencanakan **Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)** untuk menjaga ketahanan pangan dan keseimbangan tata ruang wilayah.
4. Mewujudkan kota yang nyaman dan berkelanjutan melalui **penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal sebesar 30%** dari total luas wilayah kota, guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Mengakomodir **kebijakan strategis nasional**, termasuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta arahan dalam Peraturan Presiden mengenai pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing wilayah.

1.3.7. Hubungan Terhadap RKPD Kota Dumai

RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 nantinya akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai sebuah dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimuat dalam pasal 75 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

1.3.8. Hubungan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa aspek lingkungan hidup terintegrasi secara menyeluruh dalam penyusunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029. Hubungan antara RPJMD dan KLHS bersifat sinergis dan saling memperkuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 1. 6 Hubungan antara RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029

Isu KLHS RPJMD	Isu RPJMD
Peningkatan Kesejahteraan dan SDM	Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Menghadapi Era Globalisasi
Peningkatan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	
Penguatan Sektor Ekonomi Unggulan Lokal	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Penguatan Karakter dan Budaya Lokal	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi Pelayanan Publik
Ketahanan Pangan	Penguatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Energi Berkelanjutan sebagai Fondasi Pembangunan
Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Optimalisasi Penataan Ruang Kota yang Terintegrasi, Harmonis, dan Berkelanjutan
Ancaman Degradasi Lingkungan, Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak, Ketahanan dan Mitigasi Bencana	Mitigasi Risiko Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Kota Tangguh

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

Hubungan yang harmonis antara RPJMD dan KLHS menjadi sangat penting mengingat Kota Dumai memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir dengan aktivitas industri yang intensif. Integrasi kedua dokumen ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan yang dicanangkan telah melalui kajian mendalam terhadap dampak lingkungan, sehingga dapat meminimalkan risiko kerusakan ekosistem dan memaksimalkan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Tanpa adanya sinergi ini, pembangunan yang dilaksanakan berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang yang justru akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, hubungan sinergis antara RPJMD Kota Dumai 2025-2029 dan KLHS bukan hanya merupakan pemenuhan terhadap amanah peraturan perundang-undangan, melainkan juga manifestasi komitmen nyata Pemerintah Kota Dumai dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan implementasi kedua dokumen ini secara terintegrasi akan menjadi kunci utama dalam menciptakan Kota Dumai yang sejahtera, berkeadilan, dan lestari bagi seluruh stakeholder pembangunan.

Tabel 1. 7. Intergasi Rekomendasi KLHS RPJM terhadap RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029

1	Laporan KLHS RPJMD	Rekomendasi
		- Perbaikan Dan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan Universal - Peningkatan Kualitas Dan Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan

		- Pemerataan Dan Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar Dan Menengah - Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Guru Dan Tenaga Kependidikan			
	Dokumen RPJMD	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
		Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Yang Sejalan Dengan Penambahan Penduduk Dan Arus Urbansiasi.	A. Kesehatan Untuk Semua B. Pendidikan Berkualitas Yang Merata	- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Merata Dan Berkaulitas - Peningkatan Pelayanan Pendidikan Masyarakat Yang Merata Dan Berkaulitas	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
2	Laporan KLHS RPJMD	Rekomendasi			
		- Pemetaan Potensi Unggulan Daerah - Peningkatan Kualitas Produk Lokal Unggulan - Pemberdayaan UMKM Dan Diversifikasi Ekonomi			
	Dokumen RPJMD	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
		Terwujudnya Perekonomian Kota Dumai Yang Maju Dan Berdaya Saing	A. Produktivitas Ekonomi B. Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global C. Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Dari Pusat Kota Hingga Ke Kelurahan	- Percepatan Tumbuh Kembang Dunia Usaha Dan Dunia Industri - Peningkatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Daerah - Peningkatan Peran UMKM Dalam Rantai Nilai Industri Domestik Dan Global - Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi - Peningkatan Sarana Penunjang Aktivitas Ekonomi Daerah - Peningkatan Pembangunan Ekosistem Digital	- Program Pengembangan Umkm - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
3	Laporan KLHS RPJMD	Rekomendasi			
		- Pembangunan Dan Pemeliharaan Instalari Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat - Edukasi Kesehatan Lingkungan Permukiman (Kumuh)			
	Dokumen RPJMD	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
		Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	A. Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan - Pelaksanaan transfer Anggaran Yang Pro Lingkungan	- Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4	Laporan KLHS RPJMD	Rekomendasi			
		- Implementasi Sistem Smart Dan Good Governance Di Seluruh Instansi Pemerintah Daerah - Penerapan Sistem Transparansi Dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan - Penguatan Partisipasi Dan Peran Aktif Masyarakat Di Pemerintahan			
	Dokumen RPJMD	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah

		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas	A. Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegritas Dan Adaptif	- Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	- Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
5	Laporan KLHS RPJMD	Rekomendasi			
		- Program Jaring Pengaman Sosial - Akses Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha - Pendidikan Ketrampilan Dan Kesesuaian Pelatihan Kerja			
	Dokumen RPJMD	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
		Terwujudnya Masyarakat Yang Tangguh	A. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender Dan Masyarakat Inklusif	- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat - Peningkatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Dan Pembinaan Nilai-Nilai Sosial -	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja
6	Laporan KLHS RPJMD	Rekomendasi			
		- Peningkatan Jaringan Jalan Dan Jembatan, Baik Pemeliharaan Jalan Ataupun Pembuatan Jalan Baru Untuk Konektivitas Antar Wilayah - Penanganan Permukiman Kumuh Dan Pembangunan Rumah Layak Huni			
	Dokumen RPJMD	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
		Terwujudnya Stabilitas Daerah	A. Peningkatan Infrastruktur Wilayah	- Optimalisasi Peran Seluruh Stakeholder Dalam Pembangunan Daerah	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
7	Laporan KLHS RPJMD	Rekomendasi			
		- Konservasi Kawasan Hutan Dan Perlindungan Sumber Air - Pengendalian Dan Pencegahan Pencemaran Air Dan Udara - Pengendalian Alih Fungsi Lahan Hijau			
	Dokumen RPJMD	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
		Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	A. Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan - Pelaksanaan transfer Anggaran Yang Pro Lingkungan	- Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
8	Laporan KLHS RPJMD	Rekomendasi			
		- Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik - Peningkatan Kapasitas ASN Dengan Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia - Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Proses Pelayanan Publik			
	Dokumen RPJMD	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas	A. Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegritas Dan Adaptif	- Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	- Program Kepegawaian Daerah - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Laporan KLHS RPJMD	Rekomendasi			
		- Pengembangan Pertanian Berkelanjutan Dan Proteksi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) - Penguatan Petani Atau Produsen Pangan Daerah - Diversifikasi Pangan Dan Produk Pangan			
	Dokumen RPJMD	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
		Terwujudnya Perekonomian Kota Dumai Yang Maju Dan Berdaya Saing	Produktivitas Ekonomi	- Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Peningkatan Diversifikasi Dan

				Perkebunan Berkelanjutan	Ketahanan Pangan Masyarakat
10	Laporan KLHS RPJMD	Rekomendasi			
		- Peningkatan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat - Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Komunitas - Program Perlindungan Perempuan Dan Anak			
	Dokumen RPJMD	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
		Terwujudnya Masyarakat Yang Tangguh	A. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender Dan Masyarakat Inklusif	- Peningkatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Dan Pembinaan Nilai-Nilai Sosial Kemasyarakatan	- Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum - Program Perlindungan Perempuan - Program Pemenuhan Hak Anak - Program Pengelolaan Data Gender Dan Anak
11	Laporan KLHS RPJMD	Rekomendasi			
		- Penataan Dan Penguatan Pembangunan Infrastruktur Sampah Terpadu - Pemberdayaan Masyarakat Atau Komunitas Dalam Pengelolaan Sampah Termasuk Bank Sampah - Integrasi Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Dengan IPAL Dan Sanitasi Lingkungan			
	Dokumen RPJMD	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
		Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	A. Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan - Pelaksanaan transfer Anggaran Yang Pro Lingkungan	- Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
12	Laporan KLHS RPJMD	Rekomendasi			
		- Perencanaan Dan Penanggulangan Bencana Daerah - Penguatan Kampung Iklim Dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca - Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas			
	Dokumen RPJMD	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
		Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	C. Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim	- Program Penanggulangan Bencana
13	Laporan KLHS RPJMD	Rekomendasi			
		- Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Dengan Dokumen Rencana Pembangunan - Penerapan Sistem Informasi Tata Ruang Yang Dapat Diakses Publik - Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau Dan Taman Kota - Perlindungan Kawasan Lindung Dan Kawasan Rawan Bencana			
	Dokumen RPJMD	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
		Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	A. Lingkungan Hidup Yang Berkualitas B. Berketahanan Air, Energi Dan Kemandirian Pangan C. Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim	-Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan - Pelaksanaan transfer Anggaran Yang Pro Lingkungan - Peningkatan Upaya Dan Koordinasi Serta Sinergitas Sektor Untuk Ketersediaan Air, Energi Dan Pangan Daerah Peningkatan Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim	- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2025

1.3.9. Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Daerah Tahun 2025-2029

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Daerah. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, serta prioritas pembangunan daerah, yang menjadi acuan strategis dalam merumuskan arah kebijakan riset dan inovasi, termasuk pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan daerah.

Secara hierarkis, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat umum dan strategis. Dokumen ini menetapkan arah kebijakan pembangunan secara menyeluruh, termasuk prioritas pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sementara itu, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK merupakan dokumen teknis yang lebih spesifik, yang menjabarkan langkah-langkah konkret dalam memajukan IPTEK daerah sesuai dengan arah dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023, penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK dilakukan secara harmonis dan sinergis dengan RPJMD, untuk memastikan keselarasan arah kebijakan. Proses ini memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, guna memperkuat integrasi kebijakan dan efektivitas implementasi.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal ini mencakup kontribusi IPTEK dalam peningkatan daya saing daerah, kualitas pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan.

Dengan demikian, keberadaan RPJMD menjadi payung besar yang membimbing penyusunan dan pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK, agar seluruh upaya pengembangan IPTEK tetap berada

dalam koridor pembangunan daerah yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

1.3.10. Hubungan Terhadap Dokumen Lainnya

Penyusunan RPJMD Kota Dumai 2025-2029 juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain *SDGs*, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Kota Dumai 2025-2029 adalah memberikan dasar penyusunan arah pembangunan jangka menengah Kota Dumai untuk 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan capaian pembangunan terkini dan isu strategis pembangunan serta kemampuan keuangan daerah lima tahun kedepan. Selain itu, penyusunan ini juga bermaksud untuk menjabarkan visi misi kepala daerah terpilih melalui turunan sasaran hingga program-program prioritas dan indikator kinerja utama daerah.

1.4.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kota Dumai 2025-2029, yaitu:

- 1) Menelaah kinerja pembangunan Kota Dumai periode lalu.
- 2) Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
- 3) Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.
- 4) Merumuskan isu-isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kota Dumai.
- 5) Merumuskan visi misi Kota Dumai yang memperhatikan visi misi kepala daerah terpilih serta masukan yang disusun secara runtut dari perangkat daerah hingga masyarakat umum.
- 6) Merumuskan sasaran, strategi dan arah kebijakan, pentahapan pembangunan hingga program prioritas Kota Dumai 5 (lima) tahun mendatang.

- 7) Merumuskan program perangkat daerah dan indikator kinerja yang mencakup indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, dan indikator kinerja kunci Kota Dumai dalam pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan RPJMD

Penyusunan RPJMD Kota Dumai 2025-2029 memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah, serta rekomendasi oleh para teknokrat untuk rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPJMD, Proses penyusunan RPJMD, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi Kota Dumai, mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah. Selain itu, bab ini juga akan mengulas pencapaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Dumai selama periode RPJMD Tahun 2025-2029. Lebih lanjut, bab ini akan menguraikan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta proyeksi keuangan daerah, yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai kapasitas finansial untuk mendukung pendanaan pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029. Sebagai landasan penyusunan strategi, bab ini juga akan mengidentifikasi berbagai permasalahan daerah yang diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan, serta tantangan nasional dan global, termasuk isu-isu kampanye kepala daerah terpilih. Identifikasi permasalahan ini akan menjadi dasar perumusan isu strategis daerah yang akan menjadi fokus penyelesaian melalui RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan secara rinci visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang akan diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk



periode 2025-2029. Penyusunan tujuan dan sasaran ini akan dilengkapi dengan penetapan indikator kinerja dan target yang terukur, yang secara langsung akan digunakan untuk menjawab isu-isu strategis daerah yang telah diidentifikasi selama periode RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu, bab ini juga akan memaparkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam memfokuskan program-program prioritas daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, serta mengarahkan pengembangan wilayah Kota Dumai secara terencana dan berkelanjutan selama periode tersebut.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menyajikan secara detail kebijakan dan program prioritas dari setiap perangkat daerah yang akan menjadi fokus utama dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah. Kebijakan dan program prioritas ini akan menjadi dasar utama dalam penyusunan indikasi rencana program dan kegiatan yang akan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 2025-2029. Setiap program perangkat daerah akan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, target yang jelas, pagu indikatif anggaran, serta penanggung jawab yang spesifik berdasarkan bidang urusan Program Pembangunan Daerah. Selain itu, bab ini juga akan memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator-indikator ini akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang akan menjadi tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga akhir periode masa jabatan.

BAB V PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir atau terjadi perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian.



PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA DUMAI TAHUN 2025 - 2029

BAB II | GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Strategi daerah mengacu pada rencana dan tindakan yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Peran strategis daerah sangat penting dalam konteks otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sebagian besar urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal.

Dilihat dari peta regional Provinsi Riau, Kota Dumai terletak di pesisir timur Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Letaknya yang strategis menjadikan Dumai sebagai pintu gerbang ekspor-impor dan penghubung perdagangan internasional antara Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kota Dumai juga berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir, menjadikannya simpul penting dalam konektivitas darat dan laut di wilayah Riau.

Posisi geostrategis ini memperkuat keunggulan komparatif Pelabuhan Dumai, yang merupakan pelabuhan laut utama untuk ekspor komoditas seperti CPO dan minyak bumi. Keberadaan pelabuhan tersebut mendukung pertumbuhan sektor logistik dan industri yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Dumai dan wilayah sekitarnya.

Selain itu, keberadaan Tol Pekanbaru–Dumai yang telah beroperasi sejak tahun 2020 semakin meningkatkan potensi geostrategis Kota Dumai. Jalan tol ini secara signifikan memangkas waktu tempuh dari ibukota provinsi ke Dumai dan memperlancar arus barang dan jasa. Hal ini berdampak pada peningkatan aksesibilitas, konektivitas antarwilayah, dan mendorong pengembangan kawasan industri dan logistik di sekitar kota, menjadikan Dumai sebagai simpul penting dalam jaringan ekonomi Sumatera bagian tengah dan timur.

1. Lokasi, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

Posisi astronomis Kota Dumai terletak pada posisi antara 01°26’50” - 02°15’40” Lintang Utara dan 101°0’38” - 101°43’33” Bujur Timur dan memiliki wilayah seluas 2.066,72 km² (dua ribu enam puluh enam koma tujuh puluh dua). Secara administratif Kota Dumai seperti yang dapat dilihat pada Tabel di atas berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Selat Rupat

Sebelah Timur : Kec. Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis

Sebelah Selatan : Kec. Batin Solapan Kabupaten Bengkalis

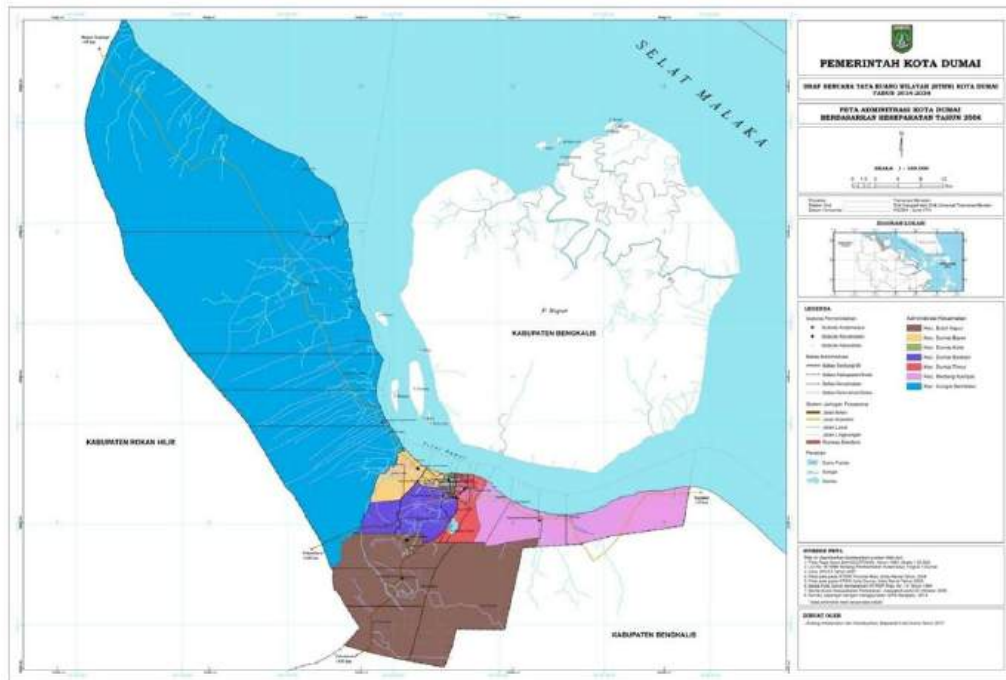
Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bangko, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Rimba Melintang dan Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir

Kota Dumai Memiliki wilayah seluas 2.066,72 km² (dua ribu enam puluh enam koma tujuh puluh dua) km² dengan luas per kecamatan seperti terlihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2024

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Kelurahan
1	Bukit Kapur	Bukit Nenas	339,26	16,42	7
2	Medang Kampai	Teluk Makmur	163,49	7,91	4
3	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung	1.420,92	68,75	6
4	Dumai Barat	Purnama	36,16	1,75	4
5	Dumai Selatan	Bukit Datuk	66,08	3,2	5
6	Dumai Timur	Teluk Binjai	35,52	1,72	5
7	Dumai Kota	Laksamana	5,29	0,26	5
Total			2.066,72	100	36

Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, 2024



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Dumai

Sumber: Peraturan Daerah Kota Dumai No.15 Tahun 2019

Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai sehingga menjadi 5 (lima) Kecamatan. Pada tahun 2009, Kota Dumai kembali mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan Bagan Besar, Kelurahan Bukit Kapur dan Kelurahan Sungai Geniot, maka saat ini terdapat 7 (tujuh) Kecamatan dan 36 (tiga puluh enam) Kelurahan dengan rincian Tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2025

No	Wilayah Administrasi			
	Kecamatan	Kelurahan		
1	Bukit Kapur	1	Bukit Nenas	
		2	Bagan Besar	
		3	Bukit Kayu Kapur	
		4	Gurun Panjang	
		5	Kampung Baru	
		6	Bagan Besar Timur	
		7	Bukit Kapur	
2	Dumai Barat	1	Bagan Keladi	
		2	Pangkalan Sesai	
		3	Purnama	
		4	Simpang Tetap Darul Ichsan	
3	Dumai Kota	1	Bintan	
		2	Dumai Kota	
		3	Laksamana	
		4	Rimba Sekampung	
		5	Sukajadi	
4	Medang Kampai	1	Guntung	
		2	Mundam	
		3	Pelintung	
		4	Teluk Makmur	
5	Dumai Timur	1	Bukit Batrem	
		2	Buluh Kasap	
		3	Jaya Mukti	
		4	Tanjung Palas	
		5	Teluk Binjai	
6	Dumai Selatan	1	Bukit Datuk	
		2	Bukit Timah	
		3	Bumi Ayu	
		4	Mekar Sari	
		5	Ratu Sima	
7	Sungai Sembilan	1	Bangsal Aceh	
		2	Tanjung Penyembal	
		3	Basilam Baru	
		4	Batu Teritip	
		5	Lubuk Gaung	
		6	Sungai Geniot	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2025

2. Topografi

Secara topografi, hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut (mdpl) seperti yang terlihat pada Tabel berikut. Memiliki

kemiringan antara 0-3 %, hanya sebagian kecil merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 8-15%.

Tabel 2. 3 Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024

No	Kecamatan	Ketinggian (MDPL)	Jarak ke Ibukota (Km)
1	Bukit Kapur	37	8
2	Medang Kampai	6	26
3	Sungai Sembilan	6	23
4	Dumai Barat	4	14
5	Dumai Selatan	3	17
6	Dumai Timur	2	16
7	Dumai Kota	1	17

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025

Kota Dumai berada di tepi pantai Selatan Selat Rupat dengan kondisi topografi yang relatif datar, khususnya di Kecamatan Dumai Barat dan Timur, sedangkan Kecamatan lainnya yaitu Bukit Kapur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan, kondisi topografinya sedikit bergelombang. Jika dilihat dari ketinggiannya, daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0-2% terdapat sekitar 41.032 Ha (64,90%); daerah yang landai sampai berombak memiliki kemiringan lereng 2-15% seluas 15.642 Ha (24,71%), daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40% seluas 364 Ha (0,58%) dan daerah berbukit memiliki kemiringan lereng >40% sekitar 6.200 Ha (9,81%) yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit Kapur.

Dari kondisi topografinya, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan. Selain untuk kawasan pembangunan kota, Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian. Hal ini juga didukung oleh kondisi keadaan tanah pada hamparan wilayah Kota Dumai yang memiliki 2 (dua) kelompok atau golongan tanah, yaitu: pertama jenis tanah *Typic Tropaquepts* atau *Fluvisol Gleik* dan jenis kedua adalah *Hydric Trophemis* atau *Humic Histosol*. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai.

Dari beberapa penelitian mengenai karakteristik tanah gambut di wilayah ini menunjukkan bahwa tanah gambut ini memiliki kedalaman hingga 3 m dan rata-rata kedalaman 0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakikatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

3. Geologi

Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan sebagian dataran tinggi sebelah selatan. Umumnya struktur tanah terdiri dari tanah Podsolik merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta tanah *Organosol* dan *Gley humus* dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Secara geologi pada medan dataran disusun oleh batuan sedimen berumur muda (Kuartar) berupa alluvium (Qp) dengan bahan penyusun lempung, pasir, kerikil, sisa tumbuhan (gambut), dan rawa gambut, sedangkan pada daerah perbukitannya disusun oleh batuan sedimen berumur tua (Tersier) dengan bahan penyusun batu lumpur kelabu berkarbon terbioturbasikan, batu pasir halus, umumnya kehalusan rendah sampai sangat rendah.

Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Terdapat dua kelompok atau golongan tanah, yaitu *Typic Tropaquepts* atau *Fluvisol Gleik* dan *Hydric Trophemis* atau *Humic Histosol*. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai ini. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah Kota Dumai ini rata-rata memiliki kedalaman 0,5m yang berarti tidak terlalu dalam, dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan

perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di Kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan, khususnya di bagian wilayah Kota Dumai Lama (Dumai Barat dan Dumai Timur) ini adalah elevasi wilayahnya yang rata-rata hanya berkisar 2 meter di atas permukaan laut.

Terkait dengan pembangunan sistem drainase kota dan karakteristik pasang surut laut yang sangat berpengaruh terhadap muka air sungai, maka diperlukan berbagai upaya, khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai. Untuk pengembangan kota, karakteristik kondisi lahan yang demikian berkemampuan rendah untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar. Hal ini berarti bahwa untuk membangun infrastruktur dimaksud, akan memerlukan teknologi yang lebih maju dan biaya yang lebih besar, namun dengan kemajuan teknologi infrastruktur yang telah berkembang pesat saat ini, maka kendala kemampuan lahan tersebut bukan lagi menjadi kendala penting.

4. Hidrologi

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik. Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai.

Di Kota Dumai terdapat 53 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai seperti yang tersaji pada Tabel di bawah ini. Sungai Buluala, Sungai Senepis, dan Sungai Mesjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

Tabel 2. 4 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Bukit Kapur	Sungai Besilang
2.	Medang Kampai	1. Sungai Puak 2. Sungai Kemeli Kecil 3. Sungai Pelintung 4. Sungai Kemeli 5. Sungai Beruang 6. Sungai Selinsing 7. Sungai Guntung 8. Sungai Mundam 9. Sungai Teluk Makmur
3.	Sungai Sembilan	1. Sungai Geniot 2. Sungai Geniot Kecil 3. Sungai Buluhala 4. Sungai Teras 5. Sungai Penyengat 6. Sungai Ilir 7. Sungai Danau 8. Sungai Hulu 9. Sungai Sembilan 10.Sungai Mampu 11.Sungai Mampu Kecil 12.Sungai Nerbit Kecil 13.Sungai Nerbit Besar 14.Sungai Paul 15.Sungai Mesjid 16.Sungai Banain 17.Sungai Saliyo 18.Sungai Bulu Ala 19.Sungai Tambuan 20.Sungai Teritib 21.Sungai Selat Mati 10.Sungai Lubuk Gaung
4.	Dumai Barat	Sungai Mesjid
5.	Dumai Selatan	Sungai Mesjid
6.	Dumai Timur	Sungai Dumai
7.	Dumai Kota	Sungai Dumai

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025

Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian kelestarian air perlu dijaga karena air adalah sumber daya yang sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah. Menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya

kekeringan ketika musim kemarau, atau tanah longsor dan banjir ketika musim hujan.

5. **Klimatologi**

Suhu menjadi salah satu variabel perubahan iklim. Suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif terhadap temperatur, panas dan dingin, diukur dengan termometer. Menurut Tri Cahyonom (2007) suhu adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu udara tertinggi di muka bumi merupakan daerah tropis dan makin ke kutub akan semakin dingin. Jika dilihat dari dataran, maka dataran terendah cenderung memiliki suhu yang tinggi dan semakin tinggi dataran suhu cenderung semakin turun. Pengukuran suhu dapat digunakan termometer, baik termometer maksimum dan termometer minimum. Biasanya pengukuran suhu dinyatakan dalam skala *Celcius* (C), *Reamur* (R), dan *Fahrenheit* (F).

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan suhu udara pada tahun 2023 berkisar antara 22°C-34°C, dengan suhu tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu 34,7°C dan suhu terendah terjadi pada bulan Januari dan Februari yaitu 22,80°C.

Sedangkan kelembaban udara rata-rata di tahun 2024 berkisar antara 54%-100% dengan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus dan September yaitu 100% dan kelembaban terendah terjadi pada bulan September yaitu 54%. Perkembangan suhu udara dan kelembaban menurut bulan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 5 Daya Dukung Air per Kecamatan di Kota Dumai

No	Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)		
		Maks	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata
1.	Januari	31,1	22,8	25,8	100	63	91
2.	Februari	31,0	22,8	25,7	98	57	87
3.	Maret	33,2	23,0	27,1	100	55	86
4.	April	33,1	23,2	25,6	100	62	72
5.	Mei	33,6	23,7	27,7	100	58	90
6.	Juni	33,5	23,6	27,3	100	65	87
7.	Juli	33,6	23,8	27,7	99	55	87
8.	Agustus	34,7	23,2	27,5	100	62	92
9.	September	34,6	22,9	27,6	100	54	85
10.	Oktober	33,2	23,3	27,2	98	56	85
11.	Nopember	32,6	24,0	27,1	99	67	92
12.	Desember	31,4	23,8	27,0	99	75	94

Sumber: KLHS RPJPD Kota Dumai

Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jumlah hari hujan dari tahun 2019-2024 mengalami peningkatan dari 119 hari pada tahun 2019 menjadi 119 hari hujan pada tahun 2024 naik sebesar 14,31%. Jumlah hari hujan terbanyak pada tahun 2024 terjadi pada bulan November sebanyak 25 hari dan paling sedikit terjadi bulan Juli sebanyak 9 hari. Perkembangan jumlah hari di Kota Dumai selama periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 6 Suhu dan Kelembaban Udara Kota Dumai Tahun 2024

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Januari	10	13	15	8	14	19	21,89
2	Februari	5	13	6	15	13	11	45,49
3	Maret	8	11	11	12	11	12	9,47
4	April	15	20	20	14	13	22	13,08
5	Mei	7	19	19	10	16	17	38,06
6	Juni	10	15	15	16	13	18	15,28
7	Juli	5	16	16	9	13	9	37,99
8	Agustus	7	15	15	20	19	18	27,47
9	September	8	25	25	21	5	17	72,06
10	Oktober	23	13	13	20	22	17	-0,47
11	November	12	25	25	15	15	25	27,00
12	Desember	9	21	21	18	18	14	19,37
Jumlah		119	206	201	178	172	199	14,31

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025

Sementara itu perkembangan jumlah curah hujan selama tahun 2019-2024 mengalami peningkatan dari 1.719,30 mm3 kemudian menjadi 2.467,00 mm3 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,67%. Jumlah curah hujan terbanyak pada tahun 2024 terjadi pada bulan Oktober yaitu 308,2 mm3 sedangkan paling sedikit terjadi pada bulan November yaitu 357 mm3. Perkembangan jumlah curah hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah. Kondisi klimatologi terutama curah hujan sangat mendukung pengembangan kegiatan sektor pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Tabel 2. 7 Perkembangan Jumlah Hari Hujan di Kota Dumai Tahun 2019-2024

No	Bulan	Curah Hujan (MM)						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Januari	150,6	78,4	81	61,4	173,6	186	24,21
2	Februari	43	74,7	67,6	267,7	107,3	43	48,08
3	Maret	132	69,1	269	196,3	75,4	185	59,68

No	Bulan	Curah Hujan (MM)						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4	April	177	240,5	230,2	200,4	164,7	246	10,04
5	Mei	86	304,1	240,6	279,5	157,8	356	66,19
6	Juni	185	178,5	125,7	159,1	195,4	233	7,11
7	Juli	93	268	324,1	122,5	173,6	88	27,86
8	Agustus	66	213,4	424,5	422,8	240,2	318	62,21
9	September	79	350,4	252,8	317,3	58,9	118	72,02
10	Oktober	347	153,5	430,6	286,9	308,2	340	21,83
11	November	178	366,8	319	176	145,8	357	35,18
12	Desember	182,7	209,9	184	251,6	147,6	177	3,57
Jumlah		1.719,30	2.507,30	2.949,10	2.741,50	1.948,50	2.647,00	12,67

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025

6. Luas Penggunaan Lahan di Kota Dumai Tahun 2023

Peruntukan penggunaan lahan di Kota Dumai terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Kawasan lindung yang terdiri dari kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya dan kawasan perlindungan setempat serta kawasan konservasi. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan industri dan kawasan pemukiman dapat dilihat pada Tabel berikut menyajikan Peruntukan penggunaan lahan di Kota Dumai seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 8 Peruntukan Penggunaan Lahan di Kota Dumai
Tahun 2019-2039**

No	Rencana Peruntukan Kawasan	Luas (ha)	Proporsi (%)
A. Kawasan Lindung			
1	Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya		
	a. Kawasan Hutan Lindung	-	-
	b. Kawasan Bergambut	-	-
2	Kawasan Perlindungan Setempat		
	a. Kawasan Taman Wisata Alam	3.567,61	1,73
	b. Sempada Pantai	279,83	0,14
	c. Sempadan Sungai	189,2	0,09
	d. Sempadan Danau	32,25	0,02
	e. Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH)	208,95	0,10
3	Kawasan Konservasi		
	a. Suaka Alam		-
	b. Resapan Air		-
Total Peruntukan Kawasan Lindung		4.277,84	2,07
B. Kawasan Peruntukan Budidaya			
1	Kawasan Hutan Produksi		-

No	Rencana Peruntukan Kawasan	Luas (ha)	Proporsi (%)
	a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas	11.851,26	5,73
	b. Kawasan hutan Produksi Tetap	121.234,68	58,66
	c. Kawasan Hutan Produksi dapat di Konversi	18.870,58	9,13
2	Kawasan Pertanian		-
	a. Kawasan Pertanian	10.368,75	5,02
	b. Kawasan Hortikultura		-
	c. Kawasan Perkebunan	3.567,47	1,73
3	Kawasan Perikanan	1.051,04	0,51
4	Kawasan Pertambangan dan Energi		-
	a. Kawasan pertambangan mineral logam		-
	a. Kawasan pertambangan Batubara		-
5	Kawasan Industri	7.602,83	3,68
6	Kawasan Perdagangan Jasa	843,45	0,41
7	kawasan Peruntukan pergudangan	253,32	0,12
8	Kawasan Rencana Bandar Udara	670,28	0,32
9	Kawasan Pelabuhan	419,32	0,20
10	Kawasan Pendidikan	17,06	0,01
11	Kawasan Kesehatan	12,81	0,01
12	Kawasan Olahraga	56,79	0,03
13	Ruang Terbuka Non Hijau	14,78	0,01
14	Kawasan Pariwisata	216,89	0,10
15	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	36,11	0,02
16	Kawasan TPA	10,64	0,01
17	Kawasan Perumahan	25.051,00	12,12
17	Kawasan Perkantoran	49,93	0,02
Total Peruntukan Kawasan Budidaya		202.198,99	97,84
C. Outline			
1	Luas Seluruh Kawasan	206.476,83	99,90
2	Lainnya	196,53	0,10
2	Lainnya Kota Dumai	206.672,36	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kota Dumai memiliki berbagai potensi daerah yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Potensi sumber daya Kota Dumai meliputi:

1. Pertanian Pangan

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai di pengaruhi oleh besarnya luas panen dan produktivitas. Luas panen yang berhasil dilakukan tergantung tersedianya lahan sawah maupun lahan bukan sawah serta indeks pertanaman, sedangkan produktivitas padi dan palawija tergantung cara tanam atau paket teknologi yang dilakukan oleh petani di Kota Dumai. Peningkatan produktivitas padi dan palawija

cenderung mengalami naik-turun pada. Data selengkapnya mengenai persentase produksi padi dan bahan pangan utama lokal.

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 produktivitas padi sebesar 3,47 ton/ha kemudian tahun 2024 naik menjadi 3,40 ton/ha atau mengalami penurunan sebesar 0,51% per tahun.

Tabel 2. 9 Produktivitas Tanaman Padi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					R/Tahun
	2020	2021	2022	2023	2024	
Luas Panen (Ha)	1.216,20	1.097,22	2.927,54	1.997,23	1.199,00	-0,36
Rasio Produktivitas Padi (Ton/Ha)	3,47	3,47	3,5	2,55	3,4	-0,51

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2025

2. Perkebunan

Berdasarkan kondisi topografi, kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang. Kondisi ini membuat lahan di Kota berpotensi untuk pengembangan tanaman perkebunan. Adapun luas areal perkebunan menurut jenis tanaman di Kota Dumai tersaji pada Tabel di bawah. Dari tabel terlihat bahwa jenis tanaman perkebunan yang dominan dikembangkan di Kota Dumai adalah kelapa sawit. Hasil produksi dari perkebunan kelapa sawit ini digunakan sebagai bahan baku pada industri pengolahan kelapa sawit yang ada di Dumai.

Berdasarkan data produktivitas sektor perkebunan di Kota Dumai periode 2020–2024, terlihat adanya dinamika yang mencerminkan tantangan sekaligus potensi perbaikan di berbagai komoditas. Kelapa sawit menunjukkan peningkatan signifikan dalam luas panen, namun produktivitasnya sempat anjlok tajam pada 2023 sebelum akhirnya pulih di 2024. Hal ini mengindikasikan adanya faktor eksternal yang memengaruhi efisiensi produksi, seperti gangguan cuaca ekstrem, perubahan tata kelola lahan, atau tantangan distribusi input produksi. Sebaliknya, karet tampil sebagai komoditas paling stabil dan menunjukkan tren pertumbuhan produktivitas yang konsisten, bahkan mencatat angka tertinggi pada 2024, menjadikannya potensi unggulan dalam pengelolaan

perkebunan berkelanjutan di wilayah ini. Komoditas kelapa mengalami penurunan tajam dalam luasan maupun produksi, tetapi mampu memulihkan tingkat produktivitasnya pada 2024 ke level yang setara dengan awal periode. Sementara itu, kakao mencerminkan kondisi yang paling fluktuatif; meskipun sempat mengalami lonjakan produktivitas pada 2021, tren berikutnya menunjukkan penurunan dan belum mencapai stabilitas yang layak. Secara umum, tahun 2023 menjadi titik balik negatif bagi hampir semua komoditas, menandai perlunya intervensi kebijakan dan strategi adaptasi yang lebih baik terhadap risiko iklim dan ekonomi. Pemulihan yang mulai terlihat di 2024 membuka ruang optimisme, namun tetap membutuhkan upaya peningkatan efisiensi, diversifikasi, dan penguatan kelembagaan petani agar produktivitas dapat tumbuh berkelanjutan.

Tabel 2. 10 Luas, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Dumai Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Luas Panen							
	Kelapa Sawit	Ha	38.665,50	38.755,00	38.805,00	90.163,50	90.283,00	23,61
	Karet	Ha	2.448,00	2.449,00	2.448,00	1.735,00	1.741,00	-8,17
	Kelapa	Ha	1.481,50	1.476,00	1.473,00	510	498,5	-23,84
	Kakao	Ha	24,5	12,94	26	25,5	26,5	1,98
2	Produksi							
	Kelapa Sawit	Ton	82.544,47	83.283,38	84.292,00	57.465,57	135.215,64	13,13
	Karet	Ton	1.850,44	1.871,91	1.920,00	718,82	1.554,68	-4,26
	Kelapa	Ton	876,98	882,12	877	141,78	298,26	-23,63
	Kakao	Ton	11,66	24,5	14	6,71	13,68	4,08
3	Produktivitas							
	Kelapa Sawit	Ton/ha	2,13	2,15	2,17	0,64	1,5	-8,39
	Karet	Ton/ha	0,76	0,76	0,78	0,41	0,89	4,03
	Kelapa	Ton/ha	0,59	0,6	0,6	0,28	0,6	0,42
	Kakao	Ton/ha	0,48	1,89	0,54	0,26	0,52	2,02

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020-2025

3. Peternak

Selama periode 2020–2024, dinamika populasi ternak di Kota Dumai menunjukkan arah pertumbuhan yang sangat beragam antar komoditas, mencerminkan perbedaan strategi budidaya, ketahanan ekonomi peternak, dan potensi pasar. Komoditas unggas, terutama ayam kampung, mencatat pertumbuhan populasi paling stabil dan eksplosif, khususnya pada 2024 dengan lonjakan sebesar 74,38%, mengindikasikan bahwa jenis ini menjadi andalan masyarakat lokal karena fleksibilitas budidayanya dan permintaan pasar yang tinggi. Di sisi lain, ayam ras pedaging sempat mengalami

stagnasi dan penurunan, namun kembali tumbuh tajam di 2024, mencerminkan potensi pemulihan dari sisi investasi atau pasokan pakan. Sebaliknya, komoditas seperti kambing/domba mengalami penurunan populasi berturut-turut, dengan penurunan tajam pada 2024, yang bisa menjadi indikasi adanya penyembelihan massal, tekanan biaya produksi, atau berkurangnya minat budidaya. Kerbau dan itik menunjukkan pola fluktuatif ekstrem, dengan pertumbuhan tinggi yang diikuti penurunan tajam, mencerminkan ketidakstabilan tata kelola populasi. Adapun sapi potong tumbuh lebih moderat namun konsisten, menandakan potensi yang masih terjaga dalam konteks peternakan besar. Secara keseluruhan, tren ini menyoroti perlunya pendekatan kebijakan yang adaptif dan berbasis komoditas dengan fokus pada penguatan komoditas unggul seperti ayam kampung, serta intervensi strategis pada sektor yang menunjukkan gejala stagnasi atau penurunan berkelanjutan. Jelasnya perkembangan jumlah dan produksi ternak ruminansia dan unggas dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 11 Populasi dan Produksi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun					R (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Populasi Ternak	-	-	-	-	-	-	-
Sapi Potong	Ekor	1.362	5.166	8.095	7.600,00	7.876,00	3,63
Kerbau	Ekor	1	24	30	19,00	26,00	36,84
Kambing/Domba	Ekor	-	4.652	4.641	4.269,00	3.084,00	-27,76
Ayam Kampung	Ekor	17.260	17.742	23.444	23.444,00	40.882,00	74,38
Ayam Ras Pedaging	Ribu Ekor	1.714	2.034	2.013	2.013	3.160	56,98
Itik	Ekor	2.818	3.000	6.004	6.004,00	3.493,00	-41,82
Produksi Daging	-	-	-	-	-	-	-
Sapi Potong	Kg	1.362	3.382	3.111	4.702,00	-	34,11
Kerbau	Kg	1	2	1	1,00	-	-8,93
Kambing/Domba	Kg	-	1.003	830	16.761,00	-	450,54
Ayam Kampung	Ton	454	16.874	14,76	14,77	-	879,79
Telur Ayam Kampung	Butir	170.103	519.141	763.396	777.627,00	-	64,00
Ayam Ras Pedaging	Ton	2.056	1.938	2.319	1.932,48	-	21,04
Itik	Ton	2.818	4.753	1	1,02	-	-19,94
Telur Itik	Kg	19.716	569.149	7.955	44.857,00	-	788,78

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2020-2025

4. Perikanan Tangkap

Kota Dumai memiliki laut yang cukup berpotensi sebagai wadah produksi perikanan laut. Perikanan laut di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki produksi perikanan laut yang memiliki banyak jenis ikan dan produksi perikanan laut yang tinggi setiap tahunnya. Kota Dumai memiliki beragam jenis perikanan laut yang memiliki produksi yang besar setiap tahunnya dibandingkan dengan perikanan budidaya.

Produksi perikanan tangkap Kota Dumai masih didominasi dengan ikan Acang-acang bombay atau yang lebih dikenal dengan ikan lomek dan ikan Gemprang atau lebih dikenal dengan nama ikan Puput. Ikan lomek merupakan ikan khas Kota Dumai yang biasa dikonsumsi dalam bentuk ikan segar maupun yang dikeringkan. Ikan lomek hidup di perairan laut, payau maupun lepas pantai yang berlumpur atau berpasir dengan kedalaman 50 meter. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap ikan lomek menjadikan ikan tersebut sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang potensial.

Dari tahun ke tahun, perkembangan produksi perikanan laut fluktuatif. Terdapat 4 (empat) jenis ikan yang menurun signifikan hasil tangkapannya, seperti Bawal Putih, Gulamah, Kerapu Batik, dan Rajungan. Pada tahun 2019 produksi perikanan laut mencapai 1.019.856 kg kemudian meningkat menjadi 1.280.265 kg tahun 2024. Produksinya mengalami kenaikan kemudian terjadi penurunan dan naik kembali. Kenaikan tahun 2019 dikarenakan masih banyaknya armada penangkapan ikan dan alat tangkap yang masih baik, namun pada tahun berikutnya muncul pelarangan alat tangkap berdasarkan undang-undang sementara alat tersebut merupakan alat tangkap yang cukup populer di kalangan masyarakat nelayan, hal ini mengakibatkan para nelayan harus mengganti alat tangkap yang digunakan.

Hal ini bisa terjadi karena akibat dari dampak perubahan iklim memicu musim ikan yang tidak menentu. Namun penurunan produksi dari beberapa jenis ikan ini, tidak mempengaruhi terhadap capaian indikator kinerja produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap diukur, divalidasi dan dilaporkan secara berkala setiap semester. Jika dibandingkan dengan data 4 (empat) tahun sebelumnya, terjadi

peningkatan data produksi perikanan tangkap. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan produksi perikanan tangkap, yaitu (1) teknologi tepat guna, (2) penyuluhan, (3) bantuan pemerintah, dan (4) lama melaut.

Kemudian adanya perbaikan pola mendata statistik yang berdasarkan kawasan tempat melelangkan atau menjual ikan, seperti tidak mendata lagi ikan yang masuk ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang pengelolaannya berada di bawah provinsi. Untuk lebih jelasnya produksi perikanan laut Kota Dumai Tahun 2020-2024. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2. 12 Produksi Perikanan Laut (Kg) Tahun 2020-2024

Komoditi	2020	2021	2022	2023	2024	R/tahun (%)
Tenggiri	36.372	68.620	82.477	89.300	96.256	27,55
Parang-parang	16.808	39.853	56.903	33.062	39.268	23,63
Senangin	11.283	59.808	87.120	78.677	133.623	85,51
Kakap hitam/putih	7.821	25.673	57.009	48.045	48.039	57,43
Gulama	2.001	14.296	11.546	3.073	3.390	14,09
Lomek	64.584	139.087	201.051	261.736	258.753	41,48
Biang	62.890	96.364	166.302	179.927	166.386	27,54
Pari	20.840	18.156	38.016	20.749	32.699	11,92
Bawal	3.028	10.635	4.307	1.309	826	-27,73
Ikan lainnya	115.326	63.889	91.663	257.187	394.751	36,02
Udang lainnya	244.838	71.723	59.309	84.368	106.274	-18,83
Jumlah	585.791	608.104	855.703	1.057.433	1.280.265	

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025

Kondisi perikanan tangkap Kota Dumai menunjukkan potensi pertumbuhan yang tinggi namun disertai ketidakstabilan yang cukup besar. Perubahan drastis pada volume hasil tangkapan dari tahun ke tahun mencerminkan sistem produksi yang sangat tergantung pada dinamika alam dan tekanan terhadap sumber daya perairan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan peningkatan produksi tidak selalu didukung oleh sistem pengelolaan yang stabil. Untuk menjaga keberlanjutan, perlu ada kebijakan penangkapan yang adaptif, pelestarian stok ikan, serta modernisasi alat tangkap. Dalam jangka panjang, pendekatan berbasis ekosistem dan penguatan kelembagaan nelayan menjadi kunci untuk menjadikan perikanan tangkap di Dumai sebagai sektor unggulan yang bukan hanya produktif, tetapi juga lestari.

2.1.3.

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1.

Daya Dukung Pangan

Analisis perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan dalam hal ini kebutuhan padi/beras dihitung mengacu pada pendapat pakar Fuad, et, al, yang termuat dalam makalah Seminar nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI: 255-266. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan dihitung berdasarkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun rencana.

➤

Sisi Permintaan (*Demand*)

Berdasarkan proyeksi kebutuhan pangan Kota Dumai tahun 2023 hingga 2029, terjadi peningkatan kebutuhan beras seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Dengan standar konsumsi sebesar 0,09 ton per kapita per tahun, kebutuhan beras meningkat dari 30.426 ton pada tahun 2023 menjadi 34.024 ton pada tahun 2029. Jika dikonversikan ke dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG), kebutuhan tersebut setara dengan 47.659,77 ton GKG pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 53.295,73 ton GKG pada tahun 2029. Kenaikan ini juga berdampak pada peningkatan kebutuhan luas panen, dari 10.831,76 hektare menjadi 12.112,66 hektare dalam kurun waktu yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan pangan, khususnya beras, di Kota Dumai terus mengalami peningkatan sehingga memerlukan upaya strategis untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan di masa mendatang. Berikut tabel kebutuhan Pangan Beras di Kota Dumai tahun 2023-2029.

Tabel 2. 13 Kebutuhan Beras Kota Dumai

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Standar Kebutuhan Beras (ton/kapita)	Total Kebutuhan Beras (ton)	Kebutuhan Beras/GKG (ton)	Kebutuhan Luas Panen (ha)
1	2023	338.070	0,09	30.426	47.659,77	10.831,76
2	2024	344.426	0,09	30.998	48.555,76	11.035,40
3	2025	350.901	0,09	31.581	49.468,98	11.242,95
4	2026	357.498	0,09	32.175	50.399,13	11.454,41
5	2027	364.219	0,09	32.780	51.347,11	11.669,79
6	2028	371.067	0,09	33.396	52.312,03	11.889,09
7	2029	378.043	0,09	34.024	53.295,73	12.112,66

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Dumai, 2024

➤ **Sisi Ketersediaan Supply**

Ketersediaan beras di Kota Dumai selama periode 2023 hingga 2029 menunjukkan kondisi yang stagnan. Dengan luas lahan padi tetap sebesar 2.928 hektare dan produktivitas padi sebesar 3,202 ton per hektare, total produksi padi setiap tahun mencapai 9.376 ton. Setelah dikonversikan menggunakan koefisien konversi padi ke beras sebesar 0,63, total ketersediaan beras tetap berada pada angka 5.907 ton per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat peningkatan kapasitas produksi beras selama tujuh tahun ke depan, baik dari sisi perluasan lahan maupun peningkatan produktivitas. Jika dibandingkan dengan tren kebutuhan beras yang terus meningkat, maka ketersediaan pangan di Kota Dumai berpotensi tidak mencukupi apabila tidak dilakukan upaya intensifikasi atau ekstensifikasi produksi padi.

Tabel 2. 14 Ketersediaan Beras Kota Dumai

No	Tahun	Luas Lahan Ditanami Padi (Ha)	Produksi Padi Rata-rata (ton)	Produktivitas Padi (ton/Ha)	Koefisien Konversi Padi	Total Ketersediaan Beras (ton)
1	2023	2.928	9.376	3,202	0,63	5.907
2	2024	2.928	9.376	3,202	0,63	5.907
3	2025	2.928	9.376	3,202	0,63	5.907
4	2026	2.928	9.376	3,202	0,63	5.907
5	2027	2.928	9.376	3,202	0,63	5.907
6	2028	2.928	9.376	3,202	0,63	5.907
7	2029	2.928	9.376	3,202	0,63	5.907

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Dumai, 2024

➤ **Daya Dukung Pangan Kota Dumai**

Berdasarkan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan beras di Kota Dumai dari tahun 2023 hingga 2029, terlihat bahwa Kota Dumai berada dalam kondisi defisit pangan setiap tahunnya. Kebutuhan beras masyarakat yang terus meningkat, dari 30.426 ton pada tahun 2023 menjadi 34.024 ton pada tahun 2029, tidak diimbangi dengan peningkatan ketersediaan beras yang tetap stagnan sebesar 5.907 ton per tahun. Selisih antara kebutuhan dan ketersediaan bahkan terus membesar, dari defisit sebesar 24.519,46 ton pada tahun 2023 menjadi 28.116,96 ton pada tahun 2029. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya dukung pangan Kota Dumai dalam hal penyediaan beras tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, sehingga Kota Dumai masih sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain. Untuk mengurangi ketergantungan ini,

diperlukan upaya strategis seperti peningkatan produktivitas, perluasan lahan tanam, diversifikasi pangan, atau perbaikan rantai distribusi pangan.

Tabel 2. 15 Daya Dukung Pangan Kota Dumai

Tahun	Kebutuhan (ton)	Ketersediaan (ton)	Selisih (Jumlah) (ton)	Status
2023	30.426	5.907	-24.519,46	Defisit
2024	30.998	5.907	-25.091,47	Defisit
2025	31.581	5.907	-25.674,24	Defisit
2026	32.175	5.907	-26.267,97	Defisit
2027	32.780	5.907	-26.872,86	Defisit
2028	33.396	5.907	-27.489,12	Defisit
2029	34.024	5.907	-28.116,96	Defisit

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Dumai, 2024

2. Daya Dukung Air

Daya Dukung Air adalah kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan air berdasarkan sumber daya air yang dimiliki. Daya Dukung Air terbagi atas ketersediaan dan kebutuhan air. Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan air dalam penyusunan KLHS RPJM Kota Dumai dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

➤ Ketersediaan air

Ketersediaan air di Kota Dumai diperoleh dari perhitungan potensi air wilayah yang didasarkan pada kemampuan penggunaan lahan, data curah hujan, serta debit air sungai. Hasil perhitungan menunjukkan secara keseluruhan bahwa Kota Dumai memiliki potensi ketersediaan air sebesar 19.699.697.505,61 m3/tahun.

Tabel 2. 16 Ketersediaan Air Kota Dumai

No.	Kecamatan	Ketersediaan Air
1	Bukit Kapur	3.278.091.856,75
2	Dumai Barat	403.357.742,70
3	Dumai Kota	35.501.837,33
4	Dumai Selatan	589.667.816,97
5	Dumai Timur	260.645.838,77
6	Medang Kampai	1.893.507.881,95
7	Sungai Sembilan	13.238.924.531,15
	Kota Dumai	19.699.697.505,61

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Dumai, 2024

➤ **Kebutuhan Air**

Kebutuhan air untuk hidup diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air yang mengacu pada standar berikut:

- Kebutuhan air penduduk sebesar 120 liter/orang/hari atau 43,8 m3/kapita/tahun. Berdasarkan NDAS dan Buku Daya Dukung Lingkungan untuk perencanaan wilayah, 2012;
- Kebutuhan air untuk kegiatan pertanian sebesar 0,231 liter/detik/ha dengan jenis penggunaan lahan sawah irigasi dan kebun campur. Berdasarkan Modul 10 Kebutuhan Air, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2000;
- Kebutuhan air untuk kegiatan industri 0,2-0,8 liter/detik/ha. Berdasarkan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2000;
- Kebutuhan air untuk ternak meliputi sapi/kerbau (40 liter/detik/ternak), domba/kambing (5 liter/detik/ternak),babi (6 liter/detik/ternak) dan unggas (0,6 liter/detik/ternak).

Kebutuhan air total dirumuskan sebagai berikut:

$$DA = N \times KHLA$$

Di mana:

DA = Total kebutuhan air (m3/tahun)

N = Jumlah penduduk

KHLA = Kebutuhan air untuk hidup layak

Perhitungan kebutuhan air di Kota Dumai diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 17 Kebutuhan Air Tahun Kota Dumai

Kecamatan	Kebutuhan Air						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Bukit Kapur	2.507.857	2.554.985	2.603.034	2.651.959	2.701.803	2.752.589	1,88
Medang Kampai	856.421	872.540	888.921	905.653	922.647	939.989	1,88
Sungai Sembilan	2.116.898	2.156.712	2.197.271	2.238.574	2.280.666	2.323.551	1,88
Dumai Barat	2.097.670	2.137.133	2.177.298	2.218.207	2.259.949	2.302.444	1,88
Dumai Selatan	2.529.625	2.577.192	2.625.635	2.674.997	2.725.280	2.776.514	1,88
Dumai Timur	3.347.590	3.410.531	3.474.610	3.539.960	3.606.492	3.674.288	1,88
Dumai Kota	1.913.140	1.949.100	1.985.761	2.023.078	2.061.140	2.099.895	1,88
Kota Dumai	15.085.596	15.369.201	15.658.150	15.952.486	16.252.428	16.557.974	1,88

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Dumai, 2024

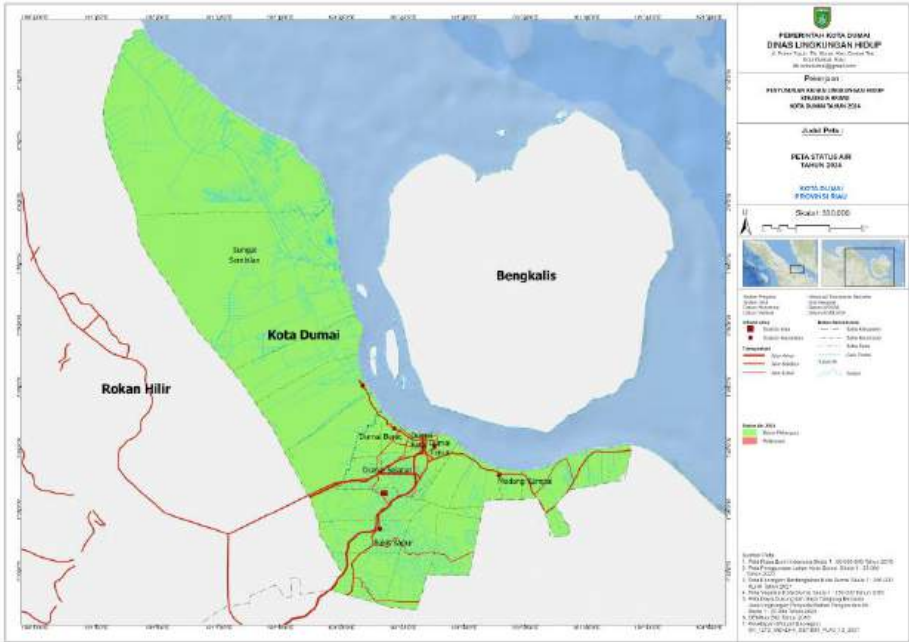
Kemudian secara berturut-turut, kebutuhan air berdasarkan hasil perhitungan proyeksi untuk tahun 2024-2029 sekaligus membandingkan dengan ketersediaan air Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 18 Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air

Tahun	DDL Air			Status
	Ketersediaan	Kebutuhan	Jumlah	
2024	19.699.697.505,61	15.085.596,00	19.684.611.909,61	Surplus
2025	19.699.697.505,61	15.369.201,00	19.684.328.304,61	Surplus
2026	19.699.697.505,61	15.658.149,60	19.684.039.356,01	Surplus
2027	19.699.697.505,61	15.952.485,60	19.683.745.020,01	Surplus
2028	19.699.697.505,61	16.252.428,00	19.683.445.077,61	Surplus
2029	19.699.697.505,61	16.557.933,00	19.683.139.572,61	Surplus

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Dumai, 2024

Berdasarkan hasil perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air di Kota Dumai dari tahun 2023 hingga 2029, diketahui bahwa Kota Dumai berada dalam kondisi daya dukung air yang surplus, di mana ketersediaan air secara konsisten lebih tinggi dibandingkan kebutuhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Dumai masih sangat mampu memenuhi kebutuhan air bagi penduduk dan berbagai aktivitas hingga tahun 2029. Namun demikian, kualitas air tetap perlu dijaga dan ditingkatkan agar pemanfaatan sumber daya air dapat berlangsung secara optimal, aman, dan berkelanjutan.



Gambar 2. 2 Peta Daya Dukung Air Kota Dumai Tahun 2024

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Dumai, 2024

3. Daya Dukung Permukiman

Perhitungan daya dukung lahan untuk permukiman dalam Penyusunan RPJMD Kota Dumai dilakukan dengan pendekatan permukiman (bangunan) berdasarkan Dr. Ing Ir, Widodo Brontowoyo, M.Sc (KLHS untuk RTRW dengan pendekatan Daya Dukung Lingkungan Tahun 2016) sebagai berikut:

$$DDL_B = \frac{\alpha \times L_w}{L_{tb}}$$

$$L_{tb} = L_B + L_{tp}$$

Keterangan:

- DDL_B : Daya dukung lahan untuk bangunan
- α : Koefisien luas lahan terbangun maksimal (untuk perkotaan, menggunakan 70% sesuai dengan UU No.26 Tahun 2007 untuk wajib RTH 30%)
- L_w : Luas wilayah (205.968,93 ha: olahan data, 2024)
- L_{Tb} : Luas lahan terbangun
- L_B : Luas lahan bangunan (ha)
- L_{Tp} : Luas lahan untuk infrastruktur seperti jalan, sungai, drainase dan lainnya (ha) atau dapat menggunakan asumsi 30% dari luas lahan bangunan.

(Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/Permen/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman) Hasil perhitungan analisis dikategorikan sebagai berikut:

- DDL_B < 1 = daya dukung lahan permukiman terlampaui atau buruk
- DDL_B 1-3 = daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang
- DDL_B > 3 = daya dukung lahan permukiman baik

Tabel 2. 19 Perhitungan DDL Permukiman

Perhitungan DDL Permukiman						Status DDL _B
Luas Wilayah	Luas Bangunan	Luas Lahan Infrastruktur (L _{tp})	Luas Lahan Terbangun (L _{tb})	Koefisien Bangunan	DDL Bangunan	
205.968,90	10.022	3.007	13.029	0,7	11,066	Baik

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Dumai, 2024

Berdasarkan perhitungan daya dukung lahan permukiman, Kota Dumai memiliki total luas wilayah sebesar 205.968,90 hektare dengan luas lahan terbangun mencapai 13.029 hektare, terdiri dari 10.022 hektare

bangunan dan 3.007 hektare infrastruktur. Dengan menggunakan koefisien bangunan sebesar 0,7, diperoleh nilai Daya Dukung Lahan Bangunan (DDLb) sebesar 11.066 hektare. Nilai ini menunjukkan bahwa luas bangunan yang ada (10.022 ha) masih berada di bawah daya dukung lahan bangunan (11.066 ha), sehingga status daya dukung lahan permukiman dikategorikan "Baik". Artinya, kapasitas lahan yang tersedia masih mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan permukiman saat ini tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap ruang. Namun, penting bagi Pemerintah Kota untuk tetap mengelola pertumbuhan fisik wilayah secara berkelanjutan agar keseimbangan antara daya dukung lingkungan dan perkembangan permukiman tetap terjaga di masa mendatang.

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Ketersediaan Air

Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian kelestarian air perlu dijaga karena air adalah sumber daya yang sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah. Menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim kemarau, atau tanah longsor dan banjir ketika musim penghujan.

Tabel 2. 20 Cadangan Ketersediaan Air Kota Dumai

Kecamatan	Cadangan
Kec. Bukit Kapur	555.272.044
Kec. Dumai Barat	48.867.930
Kec. Dumai Kota	3.641.143
Kec. Dumai Selatan	97.166.390
Kec. Dumai Timur	50.420.987
Kec. Medang Kampai	208.611.277
Kec. Sungai Sembilan	2.766.917.209

Sumber: KLHS RPJPD Kota Dumai

Pelayanan air minum penduduk perkotaan di Kota Dumai dilakukan oleh PDAM Kota Dumai. Untuk mencukupi kebutuhan air penduduk perkotaan di Kota Dumai, PDAM memanfaatkan sumber air baku dari

Sungai Mesjid. Air baku ini diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Jalan Jend. Sudirman Dumai dengan sistem pengolahan yang digunakan adalah sistem koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan oleh PDAM Kota Dumai tahun 2017, kapasitas total air baku (Sungai Mesjid) yang tersedia tahun 2017 adalah sebesar 5.321 liter/detik. Namun sampai dengan saat ini PDAM Kota Dumai belum mampu melayani kebutuhan air seluruh penduduk perkotaan di Kota Dumai. Berdasarkan informasi yang dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, pada tahun 2017 PDAM Kota Dumai hanya melayani 400 sambungan rumah, padahal tahun 2016 sudah melayani 1.300 sambungan rumah.

Untuk mencukupi kebutuhan air minum penduduk di Kecamatan Medang Kampai, Dinas PU Kota Dumai telah membangun SPAM IKK Medang Kampai dengan memanfaatkan sumber air baku berupa air permukaan dari Sungai Kemili. Sistem pengambilan menggunakan sistem sumuran/*intake* yang dibangun tahun 2011 kemudian di transmisikan ke unit produksi secara pompa. Air baku dari Sungai Kemili diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan sistem pengolahan koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Sejak dibangun tahun 2010 sampai dengan saat ini SPAM IKK Medang Kampai belum melayani kebutuhan air penduduk di Kecamatan Medang Kampai. Pelayanan air minum penduduk perkotaan di Kota Dumai dilakukan oleh PDAM Kota Dumai. Untuk mencukupi kebutuhan air penduduk perkotaan di Kota Dumai. PDAM memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Mesjid. Air baku ini diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Jalan Jenderal Sudirman Dumai dengan sistem pengolahan yang digunakan adalah sistem koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Di Kota Dumai terdapat 4 SPAM KPBU yang terdiri dari :

- SPAM KPBU Kota Dumai (Kapasitas 450 lpd (*Unsolicited*))

Sumber Air Baku SPAM KPBU Kota Dumai berasal dari Sungai Masjid. Kapasitas IPA : 450 LPD dibagi 3 tahapan yaitu Tahap 1.a IPA paket baja 50 LPD telah selesai tahun 2019 dan telah beroperasi, Tahap 1.b IPA Beton 200 lpd telah selesai dibangun tahun 2022 dan telah beroperasi dan Tahap 2 IPA Beton 200 LPD direncanakan akan mulai dibangun pertengahan tahun 2024. SPAM KPBU Kota Dumai telah memiliki Izin pengambilan air baku (SIPPA) melalui SK Menteri PUPR RI nomor 1145.6/KPTS/M/2029

tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dumai Tirta Bersemai Untuk Usaha Air Minum Di Sungai Masjid Kota Dumai Provinsi Riau.

➤ SPAM HFNF NUWSP (Kapasitas 50 lpd)

Sumber Air Baku SPAM HFNF NUWSP berasal dari Sungai Masjid. Kapasitas IPA terpasang 50 LPD dengan Teknologi membran Hollow Fiber Nano Filter (HFNF) dan merupakan bantuan Bank Dunia melalui Program NUWSP (2021). SPAM HFNF NUWSP telah memiliki Izin pengambilan air baku (SIPPA) melalui SK Menteri PUPR RI nomor 1145.6/KPTS/M/2019 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dumai Tirta Bersemai Kota Dumai Untuk Usaha Air Minum Di Sungai Masjid Kota Dumai Provinsi Riau.

➤ SPAM Regional Durolis

Sumber Air Baku SPAM REGIONAL DUROLIS berasal dari : Sungai Rokan Kabupaten Rokan Hilir. Kapasitas : IPA Tahap I 400 LPD Di mana Kota Dumai mendapat air curah sebesar 150 LPD di tahun 2022. SPAM Regional Durolis merupakan SPAM kewenangan Provinsi yang kelola oleh UPT Air Minum Provinsi Riau dengan wilayah pelayanan air minum di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis dengan total rencana pembangunan IPA sebesar 1.500 LPD yang dibagi dalam IV tahapan pembangunan. (Tahap I IPA Kap. 400 LPD, tahap IPA Kap.II 400 LPD, Tahap III IPA Kap. 400 LPD dan Tahap IV IPA Kap. 300 LPD) di mana Tahap I IPA Kapasitas 400 LPD telah selesai dibangun di Tahun 2022 dan mulai beroperasi dengan target layanan air minum untuk Kota Dumai sebesar 12.000 SR akan tetapi kondisi eksisting saat ini air curah yang mengalir ke Kota Dumai hanya mampu sebesar 80 LPD dikarenakan adanya permasalahan pada jaringan pipa distribusi dari *Offtake* SPAM Melawai ke *Offtake Reservoir Booster* (RB) KM. 9 Mekar Sari Kota Dumai

➤ SPAM B TO B Wilayah Pelayanan Medang Kampai (Kapasitas 125 lpd)

Sumber Air Baku SPAM B TO B berasal dari Sungai Kemeli. Kapasitas : IPA *membrane Hollow Fiber Nano Filter* (HFNF) Kapasitas 125 LPD progres saat ini masih dalam tahap konstruksi akhir. SPAM B TO B telah memiliki Izin pengambilan air baku (SIPPA) melalui SK Menteri PUPR RI nomor 1058/KPTS/M/2023 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dumai Tirta Bersemai Kota

Dumai Untuk Usaha Air Minum Di Sungai Kumeli Kota Dumai Provinsi Riau.

Sistem penyediaan air bersih dapat dibedakan atas sistem air bersih perkotaan dan sistem air bersih perdesaan. Sistem penyediaan air bersih perkotaan ditujukan untuk melayani kebutuhan domestik (rumah tangga) dan kebutuhan non domestik (perkantoran, perdagangan, jasa, industri dan lain-lain).

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, upaya meningkat produksi air minum untuk melayani kebutuhan pelanggan khususnya non niaga/rumah tangga, niaga dan industri harus terus dilakukan.

2. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) dibagi dengan jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama ini perlu menjadi perhatian karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Persentase ketersediaan pangan utama di Kota Dumai dari tahun 2019-2024 tersaji pada Tabel di bawah.

**Tabel 2. 21. Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai
Tahun 2020-2024**

Indikator	Satuan	Tahun					R/Tahun
		2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	6,98	21,88	11,42	33,41	45,35	59,65

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2025

Persentase ketersediaan pangan utama meningkat dari 2,26% tahun 2019 naik menjadi 45,35% di tahun 2024. Penurunan terjadi ditahun 2022, penurunan ini disebabkan oleh rendahnya produksi beras di Kota Dumai yang salah satunya disebabkan oleh banjir yang merupakan kejadian tahunan yang harus dihadapi oleh para petani. Disisi lain keterbatasan

lahan pertanian untuk proses produksi menjadi kendala yang sangat mempengaruhi rendahnya ketersediaan pangan utama (beras) di Kota Dumai. Lahan yang sempit membuat hasil produksi tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat akan konsumsi beras di Kota Dumai.

3. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan Kesehatan masyarakat. Terdapat dua jenis kondisi rawan pangan, yaitu yang bersifat kronis dan yang bersifat sementara. Salah satu penyebab permasalahan kerawanan pangan dan gizi karena lokasi geografis di wilayah tertentu yang berpotensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Permasalahan tersebut dapat dicegah dengan menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang merupakan deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah dan memberikan informasi alternatif tindakan pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. *Undernourishment* berbeda dengan *malnutrition* dan *undernutrition*, di mana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi.

Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidakcukupan konsumsi pangan). PoU mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang

mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Adapun dalam kurun waktu 2020-2024, kondisi ketahanan pangan Kota Dumai sempat berada dalam tekanan serius dalam dua tahun pertama setelah 2020, namun menunjukkan tanda-tanda pemulihan moderat dalam dua tahun terakhir. Penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengindikasikan bahwa strategi pemulihan sosial-ekonomi mulai memberikan dampak positif, meskipun angka 2024 masih lebih tinggi dari tahun awal 2020. Untuk mencapai ketahanan pangan jangka panjang, kebijakan ke depan perlu difokuskan pada penguatan akses ekonomi masyarakat terhadap pangan bergizi dan lokal, bukan hanya stabilisasi harga. Program yang menyasar kelompok rentan dan penguatan distribusi pangan juga menjadi pilar penting dalam mempertahankan tren positif ini.

Tabel 2. 22 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun 2024 (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	8,35	9,59	12,58	12,42	11,31	-8,95

Sumber: BPS Kota Dumai, 2024

4. Konsumsi Listrik per Kapita

Listrik per kapita merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata jumlah konsumsi listrik setiap penduduk dalam satu tahun. Indikator ini mencerminkan tingkat pemanfaatan energi listrik oleh masyarakat, yang biasanya berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan, modernisasi rumah tangga, serta perkembangan aktivitas ekonomi. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa konsumsi listrik mengalami peningkatan dari 744,62 juta Kwh pada 2021 menjadi 895,11 juta Kwh pada 2023, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 10 persen per tahun. Demikian pula, konsumsi listrik per kapita meningkat dari 2.302,11 Kwh menjadi 2.854,33 Kwh dalam periode yang sama, dengan pertumbuhan rata-rata 11 persen per tahun. Tren ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan energi masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas penduduk. Berikut disajikan tabel Konsumsi Listrik Kota Dumai Tahun 2021-2023.

Tabel 2. 23 Konsumsi Listrik Kota Dumai Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun			Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2021	2022	2023	
Konsumsi Listrik (Kwh)	744.623.517,00	857.927.442,00	895.110.435,11	10,00
Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh)	2.302,11	2.585,43	2.854,33	11,00

Sumber: PLN Tahun, 2024

Indikator rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Perkembangan rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai tahun 2020-2024 sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2. 24 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					R/Tahun
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah RT pelanggan pengguna listrik	84.082	88.384	91.419	97.276	136.039	12,78
Jumlah rumah tangga	73.305	75.234	77.181	79.151	81.143	2,57
Persentase Rumah tangga pengguna listrik (%)	114,70	117,48	118,45	122,90	167,65	9,95

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BPS Kota Dumai Dalam Angka, 2025

Pertumbuhan jumlah pelanggan listrik di Kota Dumai menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, khususnya pada tahun 2024, di mana lonjakan jumlah pelanggan melebihi pertumbuhan jumlah rumah tangga. Hal ini mencerminkan perluasan akses dan penetrasi elektrifikasi, baik untuk rumah tangga baru maupun rumah tangga lama yang sebelumnya belum teraliri listrik. Persentase rumah tangga pengguna listrik yang melebihi 100% sejak awal periode mengindikasikan bahwa sebagian pelanggan bukan hanya rumah tinggal, tetapi mungkin mencakup rumah ganda, usaha rumahan, atau pelanggan non-rumah tangga yang tercatat sebagai satuan rumah. Kenaikan konstan pada indikator ini menandakan adanya penetrasi layanan listrik ke wilayah pinggiran, migrasi urban, atau pembangunan perumahan baru yang cukup masif.

Akses listrik di Kota Dumai mengalami perkembangan pesat dan menyeluruh, menandakan kemajuan infrastruktur dasar yang menopang pembangunan ekonomi dan sosial. Peningkatan yang lebih cepat dari pertumbuhan jumlah rumah tangga menunjukkan bahwa kota ini telah

berhasil melampaui cakupan kebutuhan dasar energi, dengan potensi menjadi wilayah dengan elektrifikasi penuh (*universal access*). Namun, keberhasilan ini juga harus diimbangi dengan jaminan kualitas pasokan, keberlanjutan sumber energi, serta kecukupan daya untuk mendorong produktivitas masyarakat.

5. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Penggunaan air bersih oleh rumah tangga di Dumai mengalami pertumbuhan eksponensial dalam lima tahun terakhir. Pemanfaatan air bersih PDAM oleh rumah tangga di Kota Dumai menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan setelah 2021, dengan lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2022 yang menandai ekspansi jaringan distribusi secara signifikan. Kenaikan drastis ini bukan hanya mencerminkan peningkatan infrastruktur, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses layanan air bersih, serta kemungkinan intervensi kebijakan atau investasi publik di sektor air minum. Pertumbuhan mulai melambat pada 2024 (+39,6%), namun angka cakupan tetap meningkat, mencapai lebih dari 18% rumah tangga terlayani.

Kesimpulannya dalam lima tahun terakhir, sektor air bersih Kota Dumai telah memasuki fase pertumbuhan yang progresif, dengan peningkatan jumlah pelanggan yang mencerminkan ekspansi infrastruktur dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan PDAM. Meski demikian, angka cakupan yang masih di bawah 20% menunjukkan bahwa akses air layak masih menjadi tantangan utama, dan peningkatan kuantitas harus segera diikuti dengan jaminan kualitas, keberlanjutan, serta pemerataan akses di seluruh kecamatan. Tantangan selanjutnya adalah mengubah lonjakan awal ini menjadi transformasi sistemik menuju layanan air bersih yang inklusif dan merata. Berikut Tabel yang menguraikan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Dumai.

Tabel 2. 25 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					R/Tahun
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah rumah tangga pelanggan air bersih PDAM	672	1052	4348	8780	12256	106,65
Jumlah rumah tangga	73.305	75.234	77.181	79.151	81.143	2,57

Indikator	Tahun					R/Tahun
	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Rumah tangga pengguna air (%)	0,92	1,40	5,63	11,09	15,10	101,47

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2020-2024

2.1.5. **Lingkungan Hidup Berkualitas**

1. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Peningkatan jumlah penduduk berdampak kepada peningkatan laju pembangunan di berbagai sektor. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang terjadi di beberapa wilayah. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya lingkungan baik secara kuantitas maupun kualitas. Salah satu parameter untuk melihat kondisi kualitas lingkungan hidup di suatu daerah adalah IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). IKLH merupakan indeks yang diperoleh dari berbagai parameter kualitas lingkungan, yaitu kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Sumber data IKLH Kota Dumai diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kota Dumai masih belum memiliki data IKLH yang lengkap karena keterbatasan pengolahan data, sehingga hanya di tahun 2022 dan 2024 saja yang representatif. Kualitas lingkungan di Kota Dumai menunjukkan kemajuan substansial dalam lima tahun terakhir, terutama pada indeks komposit kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang melonjak dari 11,88 pada 2020 menjadi 67,56 pada 2024. Indeks kualitas udara mulai menurun perlahan sejak 2022, nilainya masih relatif tinggi (>87), yang berarti kualitas udara Dumai tergolong baik. Sebaliknya, indeks kualitas air sempat menurun di 2023, yang bisa disebabkan oleh tekanan pencemaran air limbah domestik atau aktivitas industri, namun kembali pulih pada 2024. Kualitas lahan menunjukkan tren yang stabil dan membaik dengan capaian 58,52 di tahun 2024.

Secara keseluruhan, kualitas lingkungan hidup di Kota Dumai mengalami perbaikan yang konsisten dan positif, mencerminkan efektivitas kebijakan dan program lingkungan yang telah dijalankan. Capaian indeks yang semakin mendekati nilai ideal menunjukkan bahwa Dumai bergerak menuju kota dengan ekosistem yang lebih sehat dan layak huni, meskipun

masih terdapat tantangan, terutama dalam pengelolaan air dan pengendalian kualitas udara jangka panjang. Untuk menjaga tren ini, upaya preventif berbasis data dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan perlu terus ditingkatkan agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem kota. Data IKLH di Kota Dumai disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 26 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020-2024

No	Indeks	Tahun					R/Tahun
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Indeks Kualitas Air	-	-	50	45,6	50,83	0,83
2.	Indeks Kualitas Udara	-	91,37	92,7	89,7	87,97	-1,26
3.	Indeks Kualitas Lahan	54,25	54,94	53,3	57	58,52	1,91
4.	Indeks Kualitas lingkungan Hidup	11,88	49,04	68,05	66,66	67,56	54,43

Sumber: KLHS RPJMD Kota Dumai 2025-2029

2. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Intensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual pada tahun tertentu dengan *output* aktivitas ekonomi suatu negara pada tahun yang sama. Emisi aktual yang dimaksud adalah banyaknya emisi yang dihasilkan setelah adanya intervensi aksi dan kebijakan PRK, yang didapat dari pengurangan antara *baseline* emisi dengan potensi penurunan emisi pada tahun tersebut. Sedangkan *output* aktivitas ekonomi negara menggunakan data Pendapatan Domestik Bruto (PDB) konstan tahun 2010.

Capaian Intensitas emisi GRK Provinsi didapat dari angka/nilai penurunan emisi GRK tahun tertentu dibagi Produk Domestik Regional Bruto tahun yang sama. Persentase penurunan intensitas emisi GRK didapat dari data capaian intensitas emisi GRK provinsi pada tahun tertentu dibandingkan dengan data Intensitas Emisi GRK *baseline* (tahun *initial* 2010). Capaian penurunan intensitas emisi GRK Provinsi Riau Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 27 Capaian Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Riau terhadap *Baseline* Tahun 2010-2024

Tahun	Penurunan Emisi Tahunan	Penurunan Emisi Kumulatif	% Penurunan Intensitas Emisi Terhadap Baseline
2010	0,00%	0,00%	0,00%
2011	5,90%	2,94%	9,20%
2012	9,67%	5,15%	18,07%
2013	13,40%	7,15%	25,18%
2014	17,10%	9,09%	30,06%
2015	20,69%	11,00%	32,76%
2016	24,20%	12,84%	38,26%
2017	27,63%	14,61%	43,57%
2018	31,12%	16,39%	47,30%
2019	34,59%	18,17%	51,14%
2020	37,98%	19,90%	54,02%
2021	36,53%	21,21%	55,39%
2022	38,28%	22,46%	58,44%
2023	44,01%	23,94%	63,37%
2024	46,95%	25,39%	66,90%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, 2025

Berdasarkan tabel, capaian penurunan emisi GRK tahunan Provinsi Riau dalam dua puluh tahun terakhir sebesar 46.95%, sedangkan secara kumulatif capaian penurunan emisi GRK sebesar 25.39%. Penurunan emisi GRK Provinsi Riau terbesar disumbang dari sektor *forest and other land use* (FOLU) sebesar 25.78%, lahan gambut sebesar 29.02%, pertanian sebesar 19.79%, peternakan sebesar 21.58%. selanjutnya persentase penurunan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* tahun 2024 sebesar 66.90%.

3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Formula yang dipergunakan untuk menghitung persentase penanganan sampah adalah merupakan hasil bagi antara volume tempat sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Tidak dijelaskan secara terperinci yang tertulis dalam mengenai definisi volume sampah yang ditangani, apakah memiliki pengertian volume sampah yang dibuang ke TPA atau volume sampah yang diolah. Data yang tertulis dalam tabel di bawah ini merupakan data jadi mengenai persentase penanganan sampah yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

Tabel 2. 28 Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	R/Tahun (%)
Persentase penanganan sampah (%)	57	66	50	67	68	4,61
Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)	56.358,19	57.812,72	59.029,99	63.763,68	62.706,45	2,70
Sampah Terkelola	39.235,13	37.720,20	38.229,01	38.925,06	40.108,21	0,55
Persentase Sampah Terkelola	69,62	65,25	64,76	61,05	63,96	-2,10

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tren timbulan sampah di Kota Dumai menunjukkan peningkatan moderat namun konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan pertumbuhan populasi, konsumsi rumah tangga, serta aktivitas ekonomi yang terus meningkat. Meskipun secara kuantitas sampah terus bertambah, kapasitas pengelolaan sampah cenderung stagnan dan belum mampu mengimbangi timbulan yang terjadi. Hal ini tampak dari persentase sampah terkelola yang menurun dari hampir 70% pada 2020 menjadi 63,96% pada 2024, meski secara volume aktual terjadi sedikit peningkatan dalam jumlah ton sampah yang berhasil dikelola.

Sementara itu, indikator penanganan sampah yang berbeda dari sekadar pengelolaan (misalnya: melibatkan pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan akhir) menunjukkan tren lebih fluktuatif, dengan penurunan signifikan pada 2022 yang tampaknya disebabkan oleh disrupsi layanan atau efisiensi sistem. Namun, angka ini kembali membaik dalam dua tahun terakhir dan mencapai angka tertinggi di 2024 sebesar 68%, yang bisa menjadi indikator bahwa reformasi sistem persampahan atau perluasan armada/pelayanan telah mulai membuahkan hasil.

Secara keseluruhan, Pengelolaan sampah di Kota Dumai menunjukkan upaya yang konsisten dalam menangani volume sampah yang terus meningkat, tetapi efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Meskipun volume sampah yang dikelola meningkat secara absolut, persentase pengelolaannya relatif stagnan bahkan menurun, yang berarti sistem masih tertinggal dibanding laju pertumbuhan sampah. Perbaikan dalam indikator penanganan sampah menunjukkan arah positif, namun peningkatan

kualitas sistem pengumpulan, pemrosesan, dan edukasi pemilahan di sumber masih menjadi tantangan utama. Kota Dumai perlu mempercepat integrasi sistem pengelolaan yang berbasis ekonomi sirkular dan pemberdayaan masyarakat agar pencapaian pengurangan sampah dan peningkatan efisiensi pengelolaan dapat berjalan beriringan.

4. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Secara umum, kondisi sanitasi di Kota Dumai menunjukkan arah perbaikan yang positif dan signifikan selama lima tahun terakhir. Penurunan tajam angka buang air besar sembarangan (BABS) dari 7,30% pada 2022 menjadi hanya 1,73% pada 2024 menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat mulai efektif, mungkin berkat kampanye sanitasi, pendampingan komunitas, dan peningkatan akses sarana. Masalah paling nyata akibat perilaku BABS sembarangan adalah infeksi saluran pencernaan serta menghambat pertumbuhan fisik bagi anak-anak. Mayoritas rumah tangga telah memiliki tangki septik individual (di atas 95%), yang merupakan sinyal positif bahwa masyarakat telah beralih ke sistem sanitasi yang lebih aman dan tertutup.

Namun, peningkatan kepemilikan jamban cubluk juga patut dicermati. Meskipun jamban ini lebih baik daripada praktik BABS, tipe ini masih masuk dalam kategori sanitasi tidak layak karena berisiko mencemari lingkungan jika tidak dilengkapi sistem pengolahan. Di sisi lain, kehadiran sistem pengolahan limbah komunal dan IPLT mulai tersedia sejak 2021, menandai adanya langkah awal dalam membangun infrastruktur pengolahan lumpur tinja skala kota, meski cakupannya masih sangat terbatas (<2%).

Kesimpulannya perbaikan sanitasi Kota Dumai dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan dan edukasi publik telah membuahkan hasil nyata, terutama dalam penurunan drastis praktik BABS dan tingginya adopsi tangki septik individual. Meskipun demikian, tantangan keberlanjutan masih ada, seperti keberadaan jamban cubluk yang tetap meningkat dan rendahnya cakupan sistem pengolahan komunal. Ke depan, kota ini perlu memperluas layanan pengolahan air limbah terpusat, meningkatkan kualitas sistem eksisting, dan mempercepat transisi dari sanitasi dasar menuju sanitasi aman dan berkelanjutan untuk seluruh rumah tangga.

Tabel 2. 29 Perkembangan Penyediaan Sanitasi Rumah Tangga Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase perilaku masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	5,36	7,17	7,3	1,83	1,73	-24,63
Persentase kepemilikan jamban cubluk	2,38	1,72	2,39	2,69	2,69	3,11
Persentase kepemilikan Tangki Septik individual	94,64	92,83	95,49	95,56	95,60	0,25
Persentase pengolahan air limbah <i>domestic system</i> komunal	0	0	0	1,31	1,31	-
Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	1	1	1	1	-

Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

5. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk telah dibahas pada salah satu indikator dalam pokok bahasan pekerjaan umum. Terdapat kesamaan di antara keduanya, yakni didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berikut Tabel mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai yang menunjukkan pada tahun 2020 rasio sebesar 20 TPS per satuan penduduk kemudian mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 32 TPS per satuan penduduk dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,41% per tahun.

Tabel 2. 30 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	20	20	22	31	32	12,47

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024.

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar

Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup; Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA); Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Indeks Risiko Bencana

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, di antaranya - Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan *magnitude* dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. - Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Selama tiga tahun pertama (2020–2022), Indeks Risiko Bencana di Kota Dumai stagnan pada angka 108,4, menunjukkan belum ada langkah mitigasi signifikan yang mampu menurunkan eksposur atau kerentanan wilayah terhadap ancaman bencana. Namun, mulai tahun 2023, terdapat penurunan yang menandakan awal dari efektivitas intervensi kebencanaan, dan pada 2024 terjadi penurunan tajam hingga 84,3, yaitu penurunan lebih dari 20%. Penurunan tajam Indeks Risiko Bencana di Kota Dumai pada tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa wilayah ini telah memasuki fase transisi menuju sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh dan adaptif. Efektivitas program mitigasi, pemetaan risiko, dan sistem peringatan dini kemungkinan besar meningkat dalam dua tahun terakhir, serta mendapat dukungan dari pembenahan kebijakan tata ruang dan infrastruktur. Untuk menjaga tren positif ini, dibutuhkan konsistensi kebijakan lintas sektor dan penguatan kapasitas masyarakat agar ketahanan terhadap bencana dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

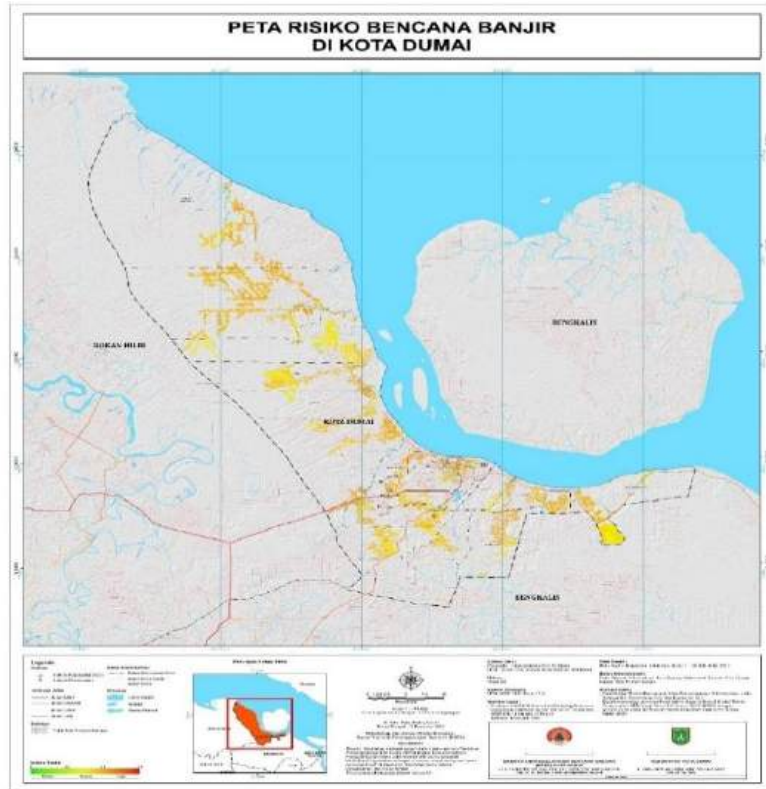
Tabel 2. 31 Indeks Risiko Bencana Kota Dumai Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Risiko Bencana	108,4	108,4	108,4	106,6	98,91	-2,26 %

Sumber: BNPB, 2025

a) Kebencanaan

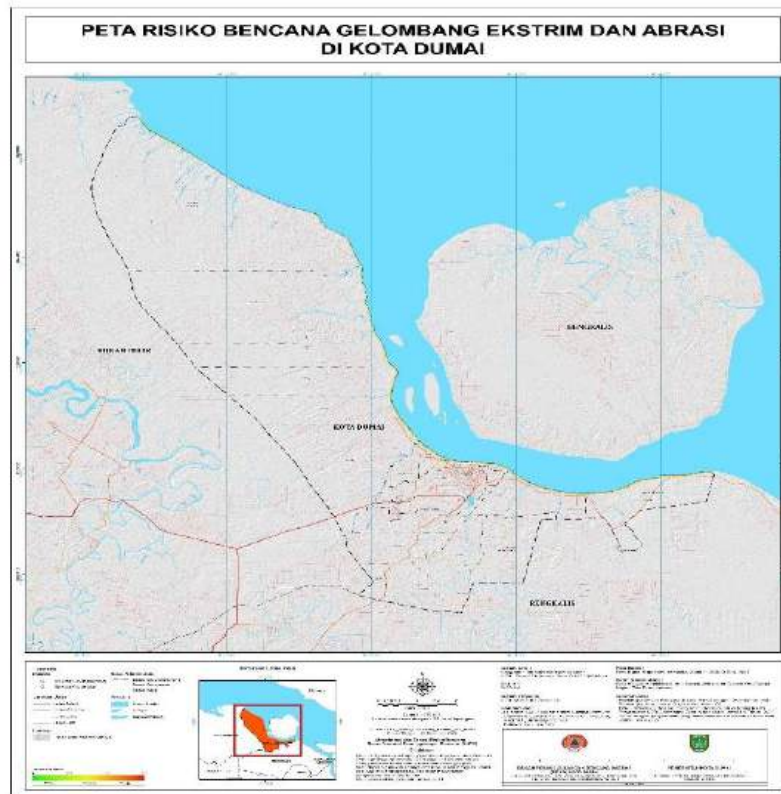
Banjir masih menjadi persoalan utama sampai saat ini di Kota Dumai. Ketika hujan dan pasang laut naik, kondisi pinggiran kota dan sebagian jalan di tengah kota memprihatinkan. Jika dilihat dari peta rawan bencana banjir seperti yang tersaji pada Gambar berikut, maka Kecamatan yang memiliki rawan bencana banjir adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Barat. Hal itu disebabkan hampir sebagian besar daratan di Dumai merupakan lahan gambut, sehingga setiap hujan dan pasang, air selalu tertahan cukup lama.



Gambar 2. 3 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai

Sumber: BPBD Kota Dumai

Selain banjir, dampak gelombang ekstrem menjadi ancaman tersendiri di Kota Dumai. Gelombang ekstrem adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Potensi bahaya gelombang ekstrem dan abrasi dibuat sesuai metode yang ada di dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya gelombang ekstrem dan abrasi terdiri dari parameter tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Peta rawan gelombang ekstrem dan abrasi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2. 4 Peta Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Sumber: BPBD Kota Dumai, 2025

Selain ancaman bencana yang disebabkan oleh alam, kegagalan teknologi merupakan salah satu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Kegagalan teknologi dapat diakibatkan karena adanya kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Berdasarkan lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012, parameter penyusun indeks ancaman/potensi bahaya kegagalan teknologi terdiri dari parameter jenis industri dan kapasitas industrinya. Adanya kejadian-kejadian bencana kegagalan teknologi yang pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai melakukan kajian potensi bahaya kegagalan teknologi pada beberapa Kawasan industri yang ada di Kota Dumai, yakni kawasan kilang minyak PT Kilang Pertamina Internasional RU-II. Kegagalan teknologi di Kota Dumai dapat terjadi pada lintasan pipa sepanjang 60 km membelah wilayah kota pada Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Dumai Timur dan kemungkinan terjadi ledakan pada unit *refinery* BBM dengan radius 25 km². Peta rawan Bahaya Kegagalan Teknologi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2. 5 Peta Rawan Bahaya Kegagalan Teknologi

Sumber: BPBD Kota Dumai, 2025

b) Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kota Dumai mempunyai potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya adalah kebakaran hutan dan terutama lahan diwilayah Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai sembilan. Kebakaran hutan dan lahan tersebut selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian dan perkebunan. Namun kebakaran hutan dan lahan dapat diantisipasi dengan menumbuhkan kewaspadaan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasannya serta masyarakat yang sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

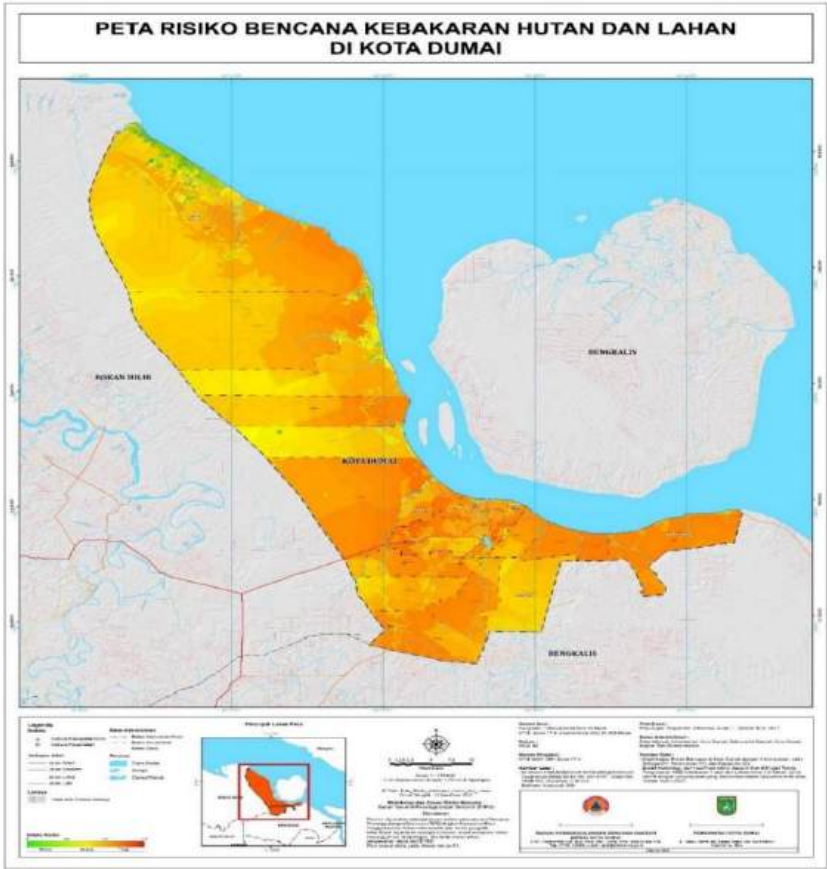
Kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan selama periode 2019-2024 terjadi penurunan, di mana bencana kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan dari 109 kejadian tahun 2019 menjadi 50 kejadian pada tahun 2024. Jika kejadian dilihat mengikut bulan pada tahun 2024, maka kejadian kebakaran hutan lahan terbanyak terjadi pada bulan

Februari dengan masing-masing 16 kejadian seperti yang tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2. 32 Perkembangan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020-2024

No	Bulan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Januari	15	2	6	0	0	-100,00
2	Februari	23	14	2	1	16	-8,67
3	Maret	25	7	5	16	11	-18,56
4	April	7	0	5	4	4	-13,06
5	Mei	0	1	0	4	1	0,00
6	Juni	2	5	4	4	2	0,00
7	Juli	3	7	6	5	12	41,42
8	Agustus	3	3	1	3	0	-100,00
9	September	1	5	0	1	1	0,00
10	Oktober	0	6	2	2	3	-20,63
11	November	0	0	0	0	0	0,00
12	Desember	0	0	0	0	0	0,00
Jumlah Kejadian		79	50	31	40	50	-10,81

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025



Gambar 2. 6 Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Sumber: BPBD Kota Dumai, 2025

Berikut disajikan tabel Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019–2024.

Tabel 2. 33 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019-2024

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL LUAS KEBAKARAN
1	Bukit Kapur	32	1	11,5	2,7	13	99	159,2
	Bukit Nenas	1	-	-	0,4	1	1	3,4
	Bagan Besar	2	-	-	-	1	-	3
	Bukit Kayu Kapur	2,5	1	1,5	-	3	1	9
	Gurun Panjang	26,5	-	10	2	8	97	143,5
	Kampung Baru	-	-	-	-	-	-	0
	Bagan Besar Timur	-	-	-	0,3	-	-	0,3
	Bukit Kapur	-	-	-	-	-	-	0
2	Medang Kampai	112	21,4	12,51	10	82,85	14,4	253,16
	Pelintung	-	5	-	9,5	66,25	3,5	84,25
	Guntung	33,5	3	1	-	0,5	2,5	40,5
	Teluk makmur	73,5	11,4	2,5	0,5	15,3	5,1	108,3
	Mundam	5	2	9,01	-	0,8	3,3	20,11
3	Sungai Sembilan	103	90,8	133,4	7,8	10	16,8	361,8
	Bangsai Aceh	51	35,5	4	0,5	-	15	106
	Lubuk Gaung	21,5	43	121,4	5,5	3,5	-	194,9
	Basilam Baru	25	-	-	-	-	-	25
	Batu Teritip	1	9,5	8,08	1,5	4,8	1,8	26,68
	Tanjung Penyembal	4,5	2,8	-	0,3	1	-	8,6
	Sungai Geniot	-	-	-	-	0,7	-	0,7
4	Dumai Barat	14	14,5	3	2	2,2	0,8	36,5
	Pangkalan Sesai	1	-	-	-	-	-	1
	Purnama	3	7,25	-	-	-	-	10,25
	Simpang Tetap Darul Ihsan	3,5	-	-	-	-	0,8	4,3
	Bagan Keladi	6,5	7,25	3	2	2,2	-	20,95
5	Dumai Selatan	51,8	5	1	1,3	1,05	6,05	66,2
	Mekar Sari	2,75	2	-	1	0,25	3,55	9,55
	Bukit Timah	15	1	0,25	0,1	-	0,8	17,15
	Bumi Ayu	2	0,5	-	-	-	-	2,5
	Bukit Datuk	7,5	1,5	0,5	0,3	0,8	84,43	12,1
	Ratu Sima	24,5	-	0,25	-	-	0,2	24,95
6	Dumai Timur	42,3	6,3	8,5	28	10,75	97,1	192,95
	Teluk Binjai	18,8	4,75	8,5	-	-	-	32,05
	Buluh Kasap	-	1	-	-	-	-	1
	Jaya Mukti	-	0,25	-	-	-	-	0,25
	Tanjung Palas	-	-	-	28	7,95	86,6	122,55
	Bukit Batrem	23,5	0,3	-	-	2,8	10,5	37,1
7	Dumai Kota	-	-	-	-	0	0	0
	Rimba Sekampung	-	-	-	-	-	-	0
	Sukajadi	-	-	-	-	-	-	0
	Bintan	-	-	-	-	-	-	0
	Dumai Kota	-	-	-	-	-	-	0
	Laksamana	-	-	-	-	-	-	0
KOTA DUMAI		355	138,95	169,94	51,7	119,85	234,15	1.069,59

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

c) Tingkat Risiko Multibahaya di Kota Dumai (per kecamatan)

Seluruh kecamatan di Kota Dumai berada dalam kondisi risiko multibahaya yang tinggi. Situasi ini menunjukkan bahwa seluruh wilayah administrasi kota tersebut menghadapi potensi bahaya yang besar, sekaligus memiliki tingkat kerentanan masyarakat dan infrastruktur yang

tinggi. Ketimpangan semakin parah karena kapasitas wilayah dalam menghadapi bencana masih sangat terbatas. Tidak ada satu pun kecamatan yang memiliki kapasitas yang memadai, sehingga tingkat kesiapsiagaan, respons darurat, dan perlindungan masyarakat berada pada level yang lemah. Ketidaksiapan ini menjadi faktor krusial yang memperbesar potensi dampak dari setiap kejadian bencana. Dengan kata lain, wilayah Kota Dumai sangat rentan terhadap berbagai bencana dan memerlukan intervensi menyeluruh baik dari sisi penguatan sistem kelembagaan, penyediaan infrastruktur mitigasi, maupun peningkatan literasi bencana di kalangan masyarakat. Fakta bahwa seluruh kecamatan tergolong dalam risiko tinggi menandakan perlunya pendekatan lintas sektor dalam perencanaan pembangunan kota yang lebih berketahanan terhadap bencana.

Tabel 2. 34 Tingkat Risiko Multibahaya di Kota Dumai

No	Kecamatan	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Bukit Kapur	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Dumai Barat	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Dumai Kota	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Dumai Selatan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
5	Dumai Timur	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Medang Kampai	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Sungai Sembilan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
8	Kota Dumai (umum)	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber: SK KRB Nomor 14 Tahun 2024

d) Tingkat Risiko Berdasarkan Jenis Bencana di Kota Dumai

Jenis bencana yang memiliki tingkat risiko tertinggi di Kota Dumai adalah banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta kegagalan teknologi. Ketiganya merupakan bencana yang memiliki karakteristik bahaya tinggi, memengaruhi wilayah luas, dan berdampak besar terhadap masyarakat. Selain itu, tingkat kerentanannya juga tinggi, menunjukkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan sangat rentan terhadap bencana-bencana tersebut. Kapasitas yang tersedia dalam menghadapi bencana tersebut masih belum cukup, sehingga meningkatkan nilai risiko secara keseluruhan. Di sisi lain, terdapat beberapa jenis bencana lain seperti cuaca ekstrem, abrasi pantai, dan kekeringan yang tergolong dalam kategori risiko sedang. Meski tidak sebesar tiga bencana utama, potensi kerugian dari ketiga jenis bencana ini tetap signifikan, terutama karena

faktor kerentanan dan kapasitas yang belum ideal. Sementara itu, gempa bumi merupakan satu-satunya bencana dengan risiko rendah, yang mencerminkan kondisi geologis Kota Dumai yang relatif stabil. Pola risiko ini mengindikasikan bahwa wilayah Dumai lebih rawan terhadap bencana yang bersifat hidrometeorologis dan akibat aktivitas manusia, sehingga kebijakan mitigasi yang terfokus pada tata kelola lahan, infrastruktur drainase, pengawasan industri, dan perlindungan lingkungan menjadi sangat penting untuk menurunkan tingkat risiko yang ada.

Tabel 2. 35 Tingkat Risiko berdasarkan Jenis Bencana

No	Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Gempa Bumi	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
2	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
4	Kekeringan	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
5	Kegagalan Teknologi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
6	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: SK KRB Nomor 14 Tahun 2024

2.1.7. Demografi

Secara umum data demografi sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam pemenuhan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penduduk seperti pembangunan rumah, ketersediaan air dan listrik serta kebutuhan lainnya terutama pelayanan umum. Hal ini penting untuk menentukan arah kebijakan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat. Sedangkan bagi keperluan dunia usaha untuk mengidentifikasi target pasar barang dan jasa.

1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kota Dumai mengalami pertambahan dari 316.782 jiwa tahun 2020 menjadi 349.389 jiwa pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk selama periode 2020-2024 sebesar 2,48% per tahun. Penyumbang utama tingginya pertumbuhan penduduk adalah peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki yang tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 2,49% per tahun sementara peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk perempuan

sebesar 2,47% per tahun selama periode tahun 2020-2024, jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 36 Indikator Kependudukan Tahun 2020-2024

Indikator Kependudukan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Penduduk (Jiwa)	316.782	323.452	331.832	338.064	349.389	2,48
Laki-Laki (Jiwa)	162.769	166.049	170.201	173.758	179.604	2,49
Perempuan (Jiwa)	154.013	157.403	161.631	164.306	169.785	2,47
Sex Rasio	105,69	105,49	105,3	105,75	105,78	0,02
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)	183,39	187,25	160,56	163,35	169,05	-2,01
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	2,58	2,11	2,59	1,88	3,35	6,75
Luas Wilayah (Km2)	2.066,72	2.066,72	2.066,72	2.066,72	2.066,72	0,00

Sumber: BPS, kota Dumai Dalam Angka 2025

Dalam kurun waktu tersebut laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 3,35% dan pertumbuhan penduduk paling rendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 1,88%

Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Kota di Provinsi Riau, maka Kota Dumai menempati pertumbuhan penduduk tertinggi ketiga setelah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Siak selama periode tahun 2020-2024. Selain angka kelahiran penduduk, pertumbuhan penduduk Kota Dumai tersebut disebabkan oleh adanya migrasi dari daerah lain baik antara kabupaten kota juga antar provinsi. Kondisi ini terjadi mengingat Kota Dumai merupakan salah wilayah yang sektor industri pengolahan yang mengalami perkembangan dengan pesat terutama industri pengolahan CPO dan industri lainnya.

Pertumbuhan penduduk Kota Dumai mencerminkan kota yang sedang mengalami ekspansi penduduk secara alami dan migrasi, namun masih dalam kendali. Dengan struktur gender yang stabil dan kepadatan yang tidak berlebihan, Dumai memiliki ruang pertumbuhan spasial dan demografis yang cukup besar. Namun, tantangan jangka menengah adalah menjaga keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, perumahan, serta

perlindungan lingkungan agar laju pertumbuhan tidak menimbulkan tekanan sosial dan ekologis.

2. Perkembangan Kepadatan Penduduk

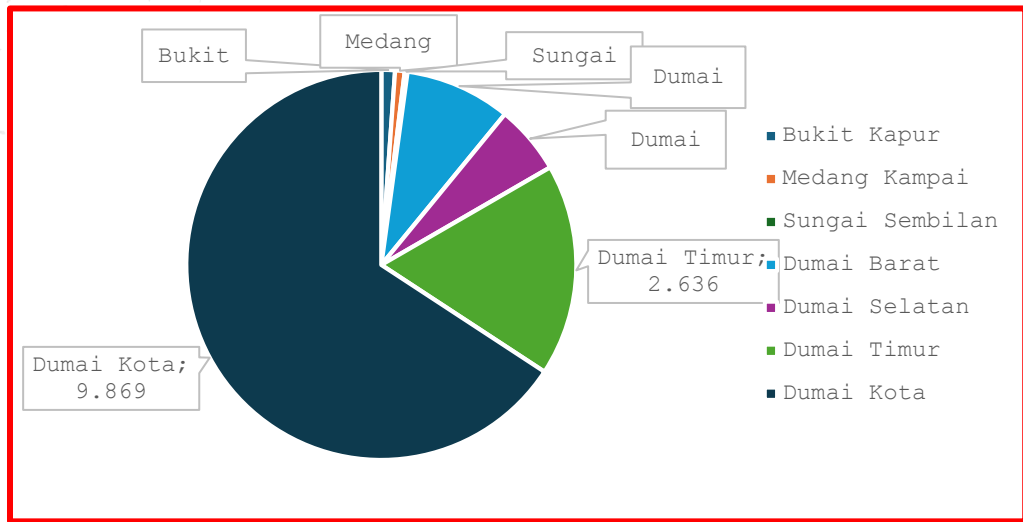
Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk (*population density*) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas (km²). Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di suatu wilayah relatif sama dengan faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk di suatu wilayah. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: Faktor fisik; Faktor iklim; Faktor tanah; Faktor vegetasi; Faktor suplai air; Faktor kebencanaan & penyakit; Faktor komunikasi; Faktor ekonomi; Faktor politis dan Faktor sumber daya alam. Berikut Tabel berikut yang menunjukkan tingkat kepadatan penduduk di Kota Dumai menurut Kecamatan selama periode 2020-2024.

Tabel 2. 37 Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Dumai dan Kecamatan Tahun 2020-2024

Kecamatan	Luas wilayah (Km)	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Bukit Kapur	339,26	152	156	161	163	169	2,69
Medang Kampai	163,49	103	108	113	115	119	3,68
Sungai Sembilan	1.420,92	29	31	32	33	35	4,81
Dumai Barat	36,16	1225	1248	1278	1276	1317	1,83
Dumai Selatan	66,08	799	808	821	842	860	1,86
Dumai Timur	35,52	1941	1980	2030	2073	2636	7,95
Dumai Kota	5,29	7689	7674	7695	7955	9869	6,44
Kota Dumai	2.066,72	153	157	161	164	169	2,52

Sumber: BPS, kota Dumai Dalam Angka 2025

Pada tahun 2024, kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Dumai Kota sebanyak 9.869 jiwa/km² hal ini dapat dimaklumi jumlah penduduk dan luas wilayahnya didominasi pusat pemukiman, kegiatan perdagangan, jasa dan pelabuhan laut Dumai (pelabuhan ekspor dan penumpang yang cukup ramai). Hal tersebut memberikan andil yang cukup besar terhadap konsentrasi penduduk Kota Dumai. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 35 jiwa/km². Untuk jelasnya dapat dilihat grafik berikut.



Gambar 2. 7 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2024

Sumber: BPS, kota Dumai Dalam Angka 2025

Kepadatan penduduk yang terlalu tinggi cenderung menurunkan kualitas hidup orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena kesempatan kerja dan tempat tinggal yang ada, tidak mampu mengakomodasi jumlah penduduk yang semakin banyak. Sehingga, nantinya ada orang-orang yang tidak bisa mengakses tempat tinggal ataupun lapangan pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa dampak dari kepadatan penduduk yang terlalu tinggi terhadap suatu wilayah.

- 1) Munculnya kawasan-kawasan kumuh (*slum*) dengan tempat tinggal informal serta lingkungan hidup yang tidak layak huni
- 2) Tidak cukupnya lapangan pekerjaan sehingga muncul sektor-sektor informal seperti PKL dan buruh ilegal yang tidak terdokumentasikan dengan baik
- 3) Turunnya kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat
- 4) Turunnya *image* estetik dari sebuah perkotaan jika ada permukiman kumuh
- 5) Terganggunya keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat di wilayah tersebut
- 6) Risiko munculnya penyakit dari lingkungan hidup kawasan kumuh yang tidak bersih
- 7) Munculnya kesenjangan sosial yang tinggi antara orang-orang yang sukses dan orang-orang yang tidak mampu mengakses sarana dan prasarana dasar

- 8) Kurangnya sarana dan prasarana dasar untuk menunjang orang-orang yang sangat banyak (kurang lebarnya jalan, kurang banyaknya kereta, kurang baiknya jaringan fiber optik internet, dsb)

Secara umum, kita dapat menyimpulkan bahwa dampak dari suatu daerah yang penduduknya terlalu padat cenderung negatif. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerataan pembangunan antar wilayah guna untuk mengurangi kepadatan penduduk pada suatu wilayah dan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan *carrying capacity*.

3. Perkembangan Sebaran Penduduk

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan *input* dan sekaligus pemanfaat hasil pembangunan. Oleh karena itu data sebaran kependudukan yang sangat penting dalam perencanaan untuk mengetahui permintaan barang dan jasa pelayanan seperti kebutuhan lahan untuk perumahan, pertanian, industri dan utilitas lainnya di masa yang akan datang.

Jika dilihat sebaran penduduk menurut Kecamatan, selama periode 2020-2024 pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Medang Kampai sebesar 4,72% per tahun dan terendah terdapat di Kecamatan Dumai Kota -3,71% per tahun. Perkembangan sebaran jumlah, pertumbuhan dan distribusi penduduk selama periode 2020-2024 menurut Kecamatan di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 38 Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Kecamatan	Perkembangan Jumlah Penduduk					Rata-rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Bukit Kapur	51.564	53.004	54.734	55.163	56.954	2,52
Medang Kampai	16.794	17.592	18.512	18.838	20.196	4,72
Sungai Sembilan	41.738	43.382	45.298	46.564	49.448	4,33
Dumai Barat	44.292	45.132	46.198	46.141	47.419	1,72
Dumai Selatan	52.791	53.406	54.276	55.642	57.591	2,20

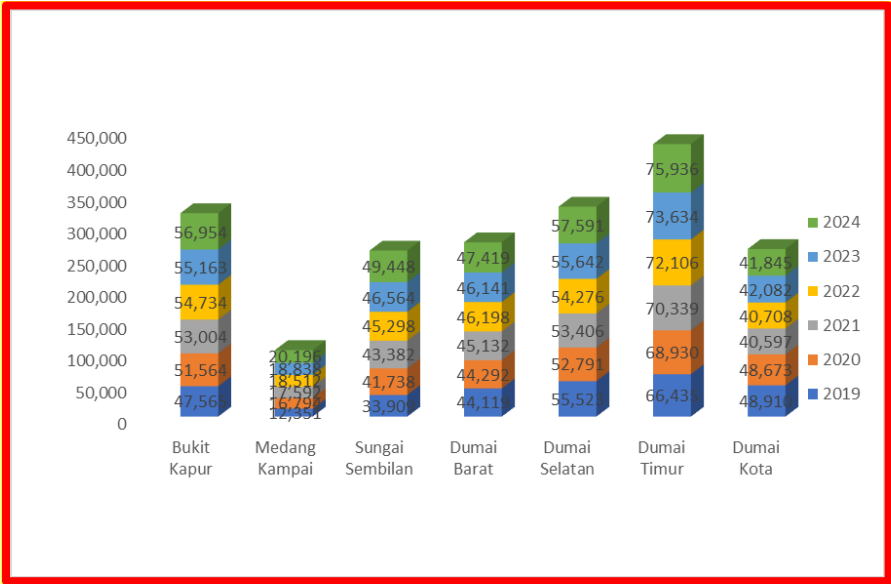
Kecamatan	Perkembangan Jumlah Penduduk					Rata-rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Dumai Timur	68.930	70.339	72.106	73.634	75.936	2,45
Dumai Kota	40.673	40.597	40.708	42.082	41.845	0,71
Kota Dumai	316.782	323.452	331.832	338.064	349.389	2,48

Sumber: BPS, kota Dumai Dalam Angka 2025

Berdasarkan data Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk di atas rata-rata Kota Dumai selama tahun 2020-2024 tersebar di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai, dan Sungai Sembilan.

Ada tiga faktor yang menyebabkan persebaran penduduk penduduk di setiap daerah, yaitu faktor fisiografis, faktor biologis, serta faktor kebudayaan dan teknologi. Secara empiris, penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik serta adanya dukungan kebijakan pemerintah yang lebih terutama dalam penanganan persoalan sosial dan ekonomi.

Selain itu kesempatan kerja, penduduk lebih suka tinggal di daerah di mana mereka dapat bekerja, tersedia infrastruktur transportasi, kejahatan tingkat kejahatan yang tinggi membuat masyarakat enggan tinggal di suatu daerah karena mereka tidak merasa aman. Perkembangan sebaran jumlah dan distribusi penduduk selama periode tahun 2023 menurut Kecamatan di Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2. 8 Jumlah dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024

Sumber: BPS, kota Dumai Dalam Angka 2025

4. Perkembangan Sex Ratio Penduduk

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan.

Sex ratio dapat digunakan untuk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan. Penurunan *sex ratio* dapat disebabkan oleh tingkat kelahiran, meninggal, imigrasi dan emigrasi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pola seleksi alam pada rasio jenis kelamin dapat dipengaruhi oleh kualitas dan stabilitas habitat langsung, serta oleh sifat-sifat sejarah kehidupan, kompetisi dan penyebaran, yang mempengaruhi persaingan lokal pada pasangan atau sumber daya.

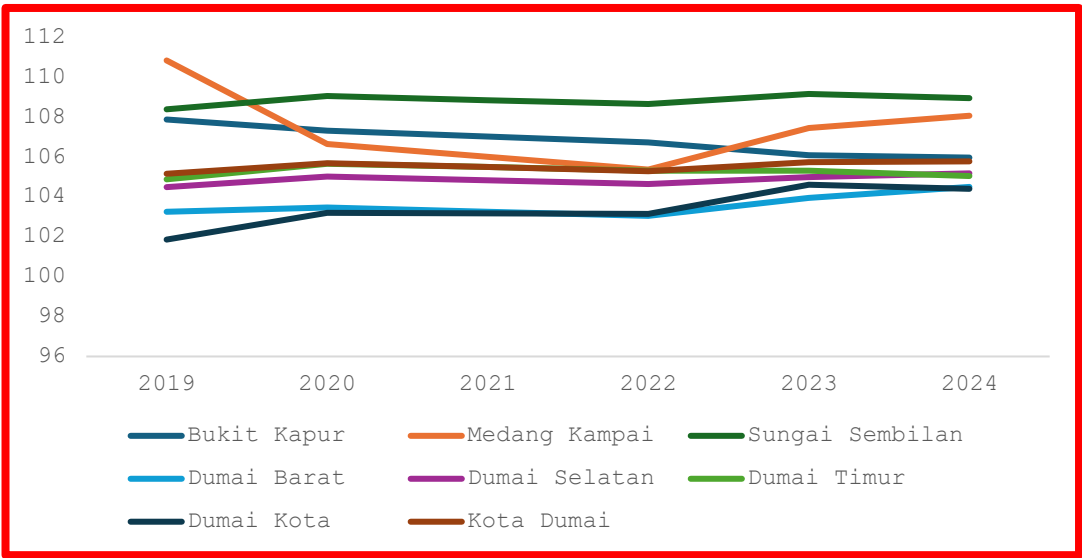
Tabel 2. 39 Perkembangan Sex Ratio Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Kecamatan	Sex Ratio				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bukit Kapur	107,33	107,02	106,72	106,1	105.97
Medang Kampai	106,64	106	105,37	107,44	108.08
Sungai Sembilan	109,05	108,85	108,66	109,16	108.94
Dumai Barat	103,48	103,26	103,05	103,95	104.5
Dumai Selatan	105,03	104,84	104,65	104,99	105.18

Kecamatan	Sex Ratio				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dumai Timur	105,66	105,49	105,32	105,32	105.05
Dumai Kota	103,19	103,17	103,15	104,61	104.4
Kota Dumai	105,69	105,49	105,3	105,75	105.78

Sumber: BPS, kota Dumai Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel di atas, *sex ratio* bergerak stabil di kisaran 105, dengan sedikit peningkatan dari 105,69 di tahun 2020 menjadi 105,78 di tahun 2024, menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan di tingkat kota. Sex rasio penduduk menurut Kecamatan di Kota Dumai tahun 2024 disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 2. 9 Sex Ratio Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024

Perkembangan data mengenai rasio jenis kelamin atau sex rasio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen dan keterlibatan perempuan dalam bidang kewirausahaan.

5. Proyeksi Kependudukan

Proyeksi jumlah penduduk merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah karena menjadi dasar penentuan kebutuhan dan prioritas pelayanan publik. Dalam konteks RPJMD Kota Dumai, analisis proyeksi penduduk membantu mengidentifikasi arah kebijakan pembangunan yang responsif terhadap dinamika pertumbuhan demografis di tiap kecamatan. Proyeksi Penduduk Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 40 Proyeksi Penduduk Kota Dumai Tahun 2025-2030

Kecamatan	Proyeksi Penduduk Kota Dumai						Rata-rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Bukit Kapur	58.387	59.857	61.363	62.907	64.491	66.114	2,52
Medang Kampai	21.149	22.147	23.193	24.287	25.433	26.634	4,72
Sungai Sembilan	51.589	53.822	56.152	58.582	61.118	63.764	4,33
Dumai Barat	48.235	49.064	49.908	50.767	51.640	52.528	1,72
Dumai Selatan	58.858	60.152	61.475	62.827	64.209	65.622	2,20
Dumai Timur	77.796	79.702	81.654	83.654	85.703	87.802	2,45
Dumai Kota	42.143	42.444	42.746	43.051	43.358	43.667	0,71
Kota Dumai	358.052	366.930	376.029	385.352	394.907	404.699	2,48

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2030, 2025

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2025 hingga 2030, terjadi peningkatan populasi secara konsisten dari 358.052 jiwa pada tahun 2025 menjadi 404.699 jiwa pada tahun 2030. Kenaikan jumlah penduduk ini mencerminkan pertumbuhan rata-rata sekitar 2,48% per tahun. Pertumbuhan penduduk ini memberikan implikasi penting terhadap perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Dumai perlu mengantisipasi tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan dan layanan publik, serta mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dengan mempertimbangkan sebaran demografis antar kecamatan. Proyeksi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan program prioritas RPJMD agar mampu menjawab dinamika kebutuhan penduduk secara tepat sasaran.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menghitung perubahan /pertambahan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tahun 2010 untuk menghilangkan pengaruh kenaikan harga, Suatu wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi jika PDRB atas dasar harga konstan yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. 41 Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2020-2024

No	Kategori	Pertumbuhan Ekonomi(%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	4,18	3,97	0,14	1,88	1,99
B	Pertambangan & penggalian	-1,30	0,65	2,06	5,05	4,36
C	industri pengolahan	3,01	6,56	7,72	5,87	3,95
D	Pengadaan listrik dan gas,	222,56	26,75	42,88	0,48	5
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,05	7,79	8,13	14,77	12,94
F	Bangunan	-3,02	0,05	4,91	10,15	8,02
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	-10,32	9,02	3,33	6,44	7,52
H	Transportasi dan pergudangan	-34,64	0,42	9,14	5,97	3,2
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	-20,01	19,1	4,57	5,43	14,46
J	Informasi dan komunikasi	9,24	4,13	2,83	4,65	8,53
K	Jasa keuangan dan asuransi	3,44	4,47	5,03	3,24	2,19
L	<i>Real estate</i>	1,66	2,6	5,35	4,08	5,07
M, N	Jasa perusahaan	-21,64	0,95	1,35	6,78	7,42
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-2,16	2,15	9,04	4,45	9,79
P	Jasa pendidikan	1,41	2,56	2,18	4,92	4,92
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	14,62	10,33	4,39	7,15	7,07
R, S, T, U	Jasa lainnya	-20,03	5,84	13,12	4,96	7,04
Pertumbuhan ekonomi		-1,05	5,98	6,36	6,05	5,02

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025

2. Perkembangan Nilai PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat percepatan perkembangan pembangunan

perekonomian suatu daerah, karena PDRB adalah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan dukungan faktor-faktor produksi dalam wilayah tersebut mengikut perkembangan harga berlaku dan harga konstan. Nilai PDRB yang dihasilkan dalam suatu wilayah terdiri dari PDRB ADHB dan ADHK terhadap 17 lapangan usaha.

Perkembangan nilai PDRB ADHB Kota Dumai dapat digunakan untuk menganalisis pergerakan kegiatan ekonomi masyarakat baik yang disebabkan oleh pertambahan jumlah produksi dan kenaikan harga barang dan jasa, struktur perekonomian sektoral dan struktur perekonomian regional yaitu mengetahui kontribusi Kota Dumai terhadap perekonomian wilayah.

Tabel berikut menunjukkan bahwa nilai PDRB ADHB Kota Dumai dengan migas pada tahun 2020 adalah Rp. 36.313.730 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 52.668.100 juta tahun 2024. Peningkatan nilai PDRB ADHB ini menunjukkan adanya perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat berupa terjadinya peningkatan jumlah produksi dan harga barang/jasa di Kota Dumai.

Sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHB tertinggi adalah industri pengolahan, di mana pada tahun 2020 senilai Rp. 21.772,9 miliar kemudian meningkat menjadi Rp. 31.824,1 miliar pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 10% per tahun. Sedangkan sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHB terendah adalah jasa perusahaan, pada tahun 2019 hanya sebesar Rp. 1,63 miliar kemudian menurun menjadi Rp. 2,06 miliar tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 6,08% per tahun. Selanjutnya jika diamati perkembangan pertumbuhan secara relatif, maka sektor dengan pertumbuhan tertinggi selama tahun 2020-2024 adalah pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 22,24% per tahun dengan nilai PDRB ADHB meningkat dari Rp. 73,72 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 157,42 miliar pada tahun 2024.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara agregat PDRB ADHB Kota Dumai mengalami pertumbuhan positif rata-rata 7,92% per tahun selama 2020-2024, namun pertumbuhan ini tidak merata antar sektor. Industri pengolahan menjadi sektor andalan dengan kontribusi dan pertumbuhan tertinggi secara nilai, mencerminkan peran dominan sektor ini dalam struktur ekonomi Dumai. Di sisi lain, sektor jasa perusahaan dan transportasi-pergudangan justru mengalami kontraksi, yang dapat

mengindikasikan adanya pergeseran permintaan, kurangnya inovasi, atau dampak eksternal seperti perubahan pola logistik dan teknologi. Sementara itu, pertumbuhan luar biasa pada sektor pengadaan listrik dan gas meskipun dari basis yang kecil, menunjukkan adanya investasi besar atau transformasi struktural di sektor energi yang dapat menjadi peluang pertumbuhan baru jika didukung dengan kebijakan berkelanjutan dan penguatan sektor pendukung.

Tabel 2. 42 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Dumai Tahun 2020-2024

No	Sektor/Sub sector	Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,079,109.40	2,303,167.25	2,452,756.78	2,616,278.48	2,851,570.00
2	Pertambangan dan Penggalian	129,553.49	132,990.46	139,352.95	151,508.49	159,030.00
3	Industri Pengolahan	21,772,852.25	24,294,167.07	27,839,955.31	30,032,692.95	31,824,120.00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	73,723.73	92,975.88	140,550.18	149,175.32	157,420.00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,604.43	6,038.04	6,599.65	7,857.29	9,150.00
6	Konstruksi	3,941,634.14	3,995,660.54	4,510,776.13	5,335,392.25	5,792,110.00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	525,818,852	5,873,683.29	6,349,996.34	6,847,745.54	7,601,090.00
8	Transportasi dan Pergudangan	72,659,229	757,618.13	889,949.98	1,002,207.32	1,128,030.00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26,031,055	314,99.80	335,595.81	360,638.47	426,900.00
10	Informasi dan Komunikasi	45,723,742	478,073.42	500,687.76	529,335.31	576,450.00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	40,920,299	449,223.55	517,340.12	544,489.23	562,290.00
12	Real Estate	164,082.24	168,398.89	182,025.42	194,515.59	208,380.00
13	Jasa Perusahaan	1,631.94	1,650.72	1,738.00	1,926.43	2,060.00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	590,244.82	605,346.83	667,050.56	702,392.18	767,360.00
15	Jasa Pendidikan	185,339.10	192,270.01	199,182.23	212,306.66	225,800.00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77,378.69	86,277.57	93,680.55	103,791.89	112,600.00
17	Jasa lainnya	181,04.05	193,571.52	225,572.10	242,032.48	263,750.00
PDRB		36,313,730.07	39,946,107.96	45,052,809.86	49,034,285.87	52,668,100.00

Sumber: PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020—2024

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020–2024, Sektor Industri Pengolahan, yang secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, dengan rata-rata kontribusi mencapai 60,85% antara tahun 2020 hingga 2024. Kontribusinya bahkan mencapai puncaknya di tahun 2022 sebesar 61,79%. Dua sektor lain yang juga memiliki kontribusi signifikan adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan rata-rata 14,33%, dan Konstruksi dengan rata-rata 10,55%. Sektor seperti Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta Jasa Perusahaan menunjukkan kontribusi yang sangat kecil, bahkan mendekati 0% di beberapa tahun, namun cenderung stabil. Beberapa sektor menunjukkan sedikit fluktuasi selama periode tersebut di antaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan sedikit penurunan dari 5,73% di tahun 2020 menjadi 5,41% di tahun 2024, Pertambangan dan Penggalan juga menunjukkan tren penurunan kecil secara bertahap, Transportasi dan Pergudangan menunjukkan sedikit peningkatan dari 2,00% di tahun 2020 menjadi 2,14% di tahun 2024. Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kota Dumai sangat bergantung pada sektor industri, didukung oleh sektor perdagangan dan konstruksi, dengan sebagian besar sektor lainnya memberikan kontribusi yang lebih kecil. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel berikut.

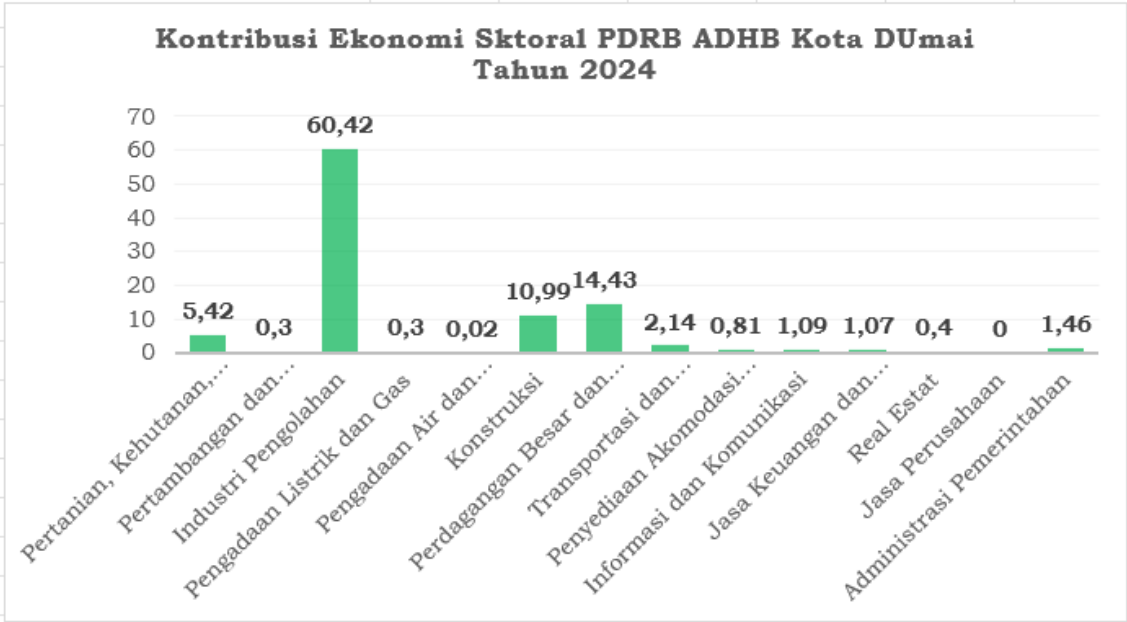
Tabel 2. 43 Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Dumai Tahun 2020-2024

No	Sektor	Kontribusi Sektoral (%)					Rata-rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,73	5,77	5,44	5,34	5,41	5,54
2	Pertambangan dan Penggalan	0,36	0,33	0,31	0,31	0,30	0,32
3	Industri Pengolahan	59,96	60,82	61,79	61,25	60,42	60,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,23	0,31	0,30	0,30	0,27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
6	Konstruksi	10,85	10,00	10,01	10,88	11,00	10,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,48	14,70	14,09	13,97	14,43	14,33
8	Transportasi dan Pergudangan	2,00	1,90	1,98	2,04	2,14	2,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,72	0,79	0,74	0,74	0,81	0,76
10	Informasi dan Komunikasi	1,26	1,20	1,11	1,08	1,09	1,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,13	1,12	1,15	1,11	1,07	1,12
12	Real Estate	0,45	0,42	0,40	0,40	0,40	0,41
13	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Sektor	Kontribusi Sektoral (%)					Rata-rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,63	1,52	1,48	1,43	1,46	1,50
15	Jasa Pendidikan	0,51	0,48	0,44	0,43	0,43	0,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21
17	Jasa lainnya	0,50	0,48	0,50	0,49	0,50	0,49
PDRB		100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Jika diamati pada gambar di bawah ini aspek perkembangan kontribusi sektoral selama tahun 2020-2024 salah satu sektor yang memberikan kontribusi tertinggi adalah industri pengolahan di mana pada tahun 2020 berkontribusi sebesar 59,96% dan meningkat menjadi 60,42% pada tahun 2024. Kondisi ini wajar karena Kota Dumai merupakan salah wilayah yang terdapat di Provinsi Riau dengan jumlah kawasan industri terbanyak terutama yang berskala besar dengan perusahaan multinasional baik yang bergerak dibidang pengolahan migas dan non migas seperti industri pengolahan turunan CPO dan sekaligus menjadikan Kota Dumai sebagai salah satu *hub port* terhadap ekspor CPO dan turunannya di Provinsi Riau dan bahkan terbesar di Sumatera. Jelasnya lihat Gambar berikut.



Gambar 2. 10 Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Kota Dumai Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

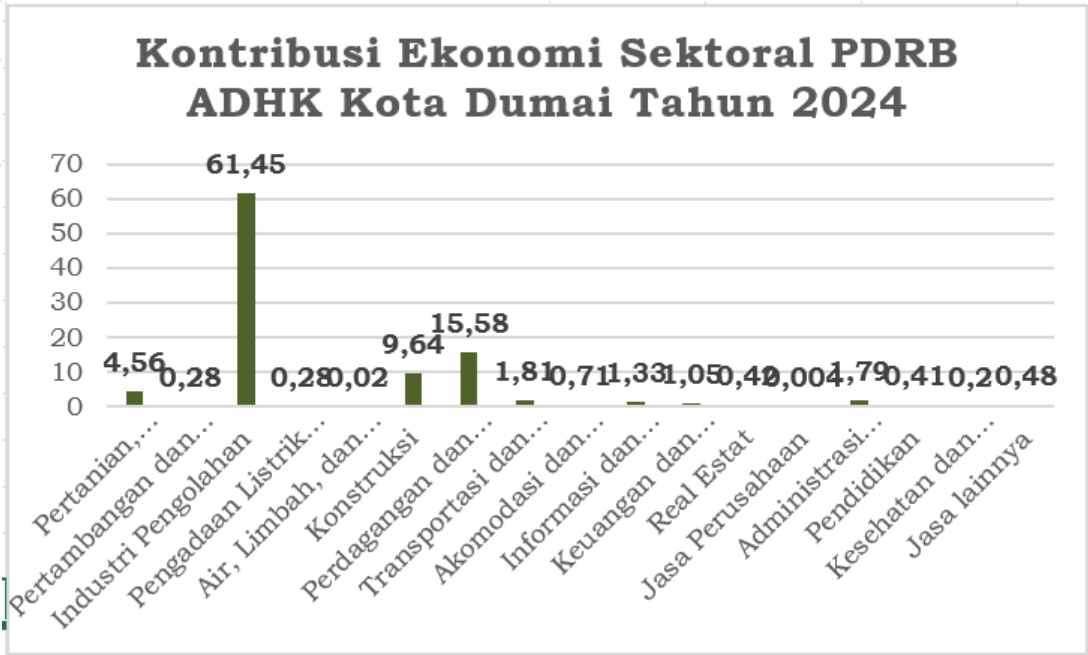
Menurut publikasi BPS, PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2014, tahun dasar

yang digunakan adalah tahun dasar 2010. Adapun PDRB kota Dumai tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 44 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Juta) Kota Dumai Tahun 2020-2024

No	Sektor/Sub sektor	Nilai PDRB ADHK (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,299,761.49	1,351,367.35	1,353,308.06	1,378,765.08	1,406,220.00
2	Pertambangan dan Penggalian	77,470.45	77,974.01	79,578.24	83,595.62	87,240.00
3	Industri Pengolahan	15,020,311.75	16,006,044.09	17,241,068.60	18,253,329.59	18,974,950.00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	45,610.20	57,810.02	82,598.92	82,991.31	87,140.00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,107.82	4,427.41	4,787.35	5,494.51	6,210.00
6	Konstruksi	2,383,801.65	2,384,993.55	2,502,103.89	2,756,162.91	2,977,320.00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,730,303.07	4,066,732.21	4,202,233.90	4,472,739.04	4,809,190.00
8	Transportasi dan Pergudangan	465,475.75	467,439.73	510,168.26	540,637.24	557,930.00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	145,576.33	173,379.44	181,306.44	191,156.71	218,800.00
10	Informasi dan Komunikasi	336,681.51	350,586.46	360,504.90	377,263.01	409,430.00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	280,070.73	292,581.59	307,308.22	317,259.29	324,200.00
12	Real Estate	110,427.27	113,298.38	119,365.05	124,232.65	130,530.00
13	Jasa Perusahaan	1,047.17	1,064.45	1,078.86	1,152.04	1,240.00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	432,877.88	442,184.75	482,175.06	503,634.02	552,960.00
15	Jasa Pendidikan	108,792.95	111,567.17	114,003.35	119,608.27	125,500.00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,099.16	50,856.60	53,089.96	56,886.89	60,910.00
17	Jasa lainnya	109,573.25	115,972.33	131,188.36	137,697.01	147,400.00
PDRB		24,597,988.44	26,068,279.54	27,725,867.44	29,402,605.17	30,877,160.00

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2025



Gambar 2. 11 Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Kota Dumai Tahun 2024

Sumber: BPS, 2025

Tabel 2. 45 Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Kategori	Uraian	Kontribusi 2020 (%)	Kontribusi 2024 (%)	Pertumbuhan Kontribusi (%/tahun)
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5,28	4,56	-3,60
B	Pertambangan dan Penggalian	0,31	0,28	-2,51
C	Industri Pengolahan	61,07	61,45	0,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,28	10,18
E	Air, Limbah, dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,00
F	Konstruksi	9,69	9,64	-0,13
G	Perdagangan dan Reparasi Mobil	15,16	15,58	0,69
H	Transportasi dan Pergudangan	1,89	1,81	-1,08
I	Akomodasi dan Makan Minum	0,59	0,71	4,74
J	Informasi dan Komunikasi	1,37	1,33	-0,74
K	Keuangan dan Asuransi	1,14	1,05	-2,03
L	Real Estat	0,45	0,42	-1,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,004	0,004	0,00
O	Administrasi Pemerintahan	1,76	1,79	0,42
P	Pendidikan	0,44	0,41	-1,75
Q	Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,19	0,2	1,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,45	0,48	1,63

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2025

Sementara itu jika dilihat perkembangan kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai terhadap perekonomian Provinsi Riau selama tahun

2020-2024 menunjukkan rata-rata kontribusi yang mengalami penurunan sebesar 1,22% per tahun menurut PDRB ADHB. Selanjutnya menurut PDRB ADHK terjadi peningkatan dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 1,98% per tahun. Perkembangan kontribusi dan pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut.

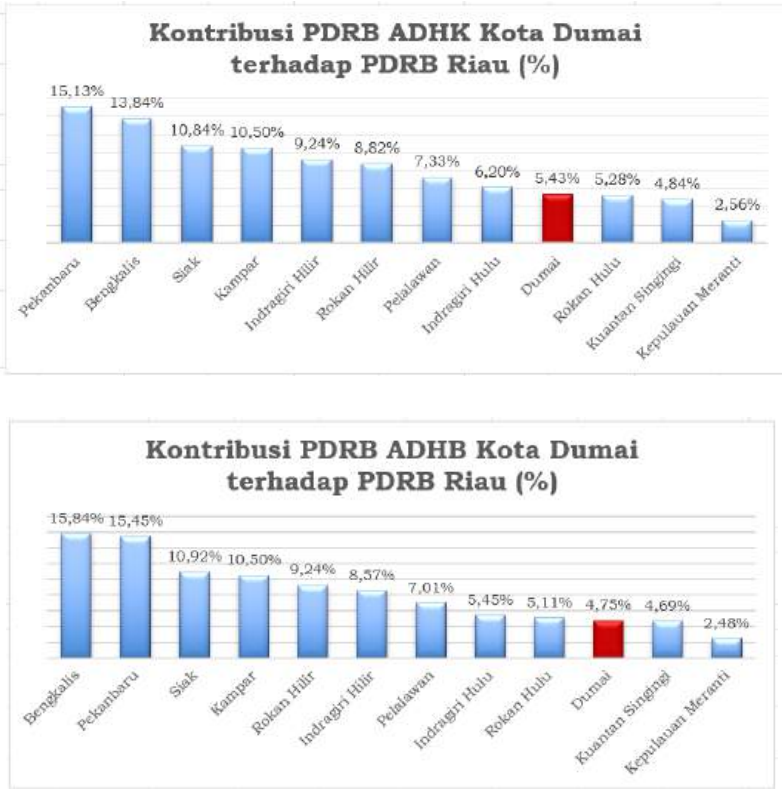
Tabel 2. 46 Perkembangan Kontribusi PDRB Kota Dumai Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Perkembangan Kontribusi	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kontribusi PDRB HB Kota Dumai terhadap PDRB HB Provinsi Riau	4,99	4,76	4,54	4,78	4,75	-1,22
Kontribusi PDRB HK Kota Dumai terhadap PDRB HK Provinsi Riau	5,02	5,15	5,24	5,34	5,43	1,98
Pertumbuhan Kontribusi PDRB HB Kota Dumai terhadap PDRB HB Provinsi Riau	4,97	-4,6	-4,56	5,14	1,82	-22,21
Pertumbuhan Kontribusi PDRB HK Kota Dumai terhadap PDRB HK Provinsi Riau	0,09	2,53	1,73	1,82	1,78	110,88

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Selanjutnya dapat dijelaskan tentang perkembangan posisi kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai dibandingkan dengan kabupaten kota terhadap Provinsi Riau tahun 2024. Kontribusi PDRB ADHB Kota Dumai berada di posisi ke tiga terendah dengan kontribusi sebesar 4,75% dan berada di bawah rata-rata Provinsi Riau sebesar 8,36%. Sedangkan pada PDRB ADHK di urutan ke empat hanya berkontribusi sebesar 5,43% dan berada di bawah rata-rata Provinsi Riau sebesar 8,33%. Rendahnya kontribusi PDRB Kota Dumai baik dalam ADHB (4,75%) maupun ADHK (5,43%) dibandingkan rata-rata Provinsi Riau mengindikasikan bahwa peran Dumai dalam perekonomian provinsi masih relatif kecil meskipun wilayah ini memiliki potensi strategis, terutama dari sektor industri pengolahan dan migas. Posisi Dumai yang berada di peringkat ketiga terendah dalam ADHB dan keempat dalam ADHK menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya belum cukup kuat untuk mendorong peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap total PDRB

provinsi. Hal ini bisa disebabkan oleh masih tingginya ketergantungan pada sektor-sektor tertentu tanpa diiringi dengan diversifikasi ekonomi yang memadai, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal dan infrastruktur penunjang. Untuk itu, perlu strategi penguatan sektor unggulan sekaligus pengembangan sektor baru berbasis potensi lokal agar kontribusi Dumai terhadap perekonomian Riau dapat meningkat secara berkelanjutan. Lihat Gambar berikut.



Gambar 2. 12 Posisi Kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai dan Kabupaten Kota terhadap Provinsi Riau Tahun 2024

Sumber: BPS, 2025

Rendahnya posisi kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai dibandingkan dengan 11 kabupaten kota lainnya pada tahun 2024, tidak terlepas dari jumlah penduduk yang sedikit atau hanya 5,02% dari jumlah penduduk Provinsi Riau. Melihat kondisi ini maka untuk meningkatkan kontribusi Kota Dumai pada perekonomian Provinsi Riau adalah dengan peningkatan investasi pada sektor ekonomi terutama sektor industri pengolahan dan sektor jasa perdagangan yang memiliki nilai tambah tinggi atau dengan kata lain industri berbasis teknologi inovasi dan kreasi sehingga menghasilkan produk dan jasa yang bernilai tinggi.

3. PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan. Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan regional, bahkan tinggi rendahnya pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai determinasi kemajuan wilayah. Satu hal yang perlu diperhatikan bersama bahwa kemajuan wilayah tidak hanya ditentukan oleh besaran pendapatan regional, tapi juga tergantung dari banyaknya jumlah penduduk.

Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan per kapita dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah, serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. PDRB per kapita secara agregatif menunjukkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi. Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Ini dapat digunakan bersamaan dengan data soal harga sandang, pangan dan papan. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga sandang, pangan dan papan oleh rata-rata keluarga. Sandang (pakaian) bermakna keharusan menjaga perilaku yang beradab, Pangan (makanan) bermakna keharusan berusaha mewujudkan mimpi agar menjadi nyata, sedangkan Papan (tempat tinggal) bermakna keharusan mampu beradaptasi memberi makna dalam peranan kehidupan harian. Oleh karena itu menjaga rasio harga sandang, pangan dan papan rumah terhadap pendapatan per kapita sangat berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Perkembangan PDRB per kapita harga berlaku dan harga konstan Kota Dumai Tahun 2020-2024 ditunjukkan pada Tabel di bawah, selama periode tersebut PDRB per kapita Harga Berlaku dengan migas

menunjukkan tren peningkatan dari Rp. 114,63 Juta per kapita pada tahun 2020 menjadi Rp. 150,74 juta per kapita pada tahun 2024. Sedangkan PDRB per kapita Harga Konstan mengalami peningkatan dari Rp. 77,65 juta per kapita pada tahun 2020 menjadi Rp. 88,37 juta per kapita pada tahun 2024.

Berdasarkan Tabel di bawah dapat dilihat bahwa percepatan peningkatan pendapatan per kapita PDRB Harga Berlaku masyarakat Kota Dumai lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Hal tersebut tergambarkan dari rata-rata per kapita provinsi pada tahun 2020 sebesar Rp. 113,79 juta pada PDRB Harga Berlaku atau lebih rendah dari per kapita PDRB Harga Berlaku Kota Dumai sebesar Rp. 114,63 juta atau PDRB harga berlaku Provinsi Riau lebih rendah sebesar 8,73%. Pada tahun 2023 pendapatan per kapita Kota Dumai menurut PDRB harga berlaku sebesar Rp. 145,04 juta lebih rendah sebesar 5,07% dari rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Riau sebesar Rp. 152,40 juta. Kondisi menunjukkan bahwa adanya kebijakan pemerintah yang mendorong keberhasilan pengembangan ekonomi masyarakat, walaupun jumlah penduduk Kota Dumai bertambah dari 308.812 jiwa pada tahun 2020 menjadi 338.064 jiwa pada tahun 2023.

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020–2024 laju pertumbuhannya justru melambat dan tertinggal dibandingkan daerah lain di provinsi tersebut. Penurunan posisi relatif ini, dari surplus 8,73% di atas rata-rata provinsi menjadi defisit 5,07%, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Dumai tidak cukup cepat untuk mengimbangi peningkatan pendapatan di daerah lain, bahkan ketika jumlah penduduk meningkat sebesar 9,45% selama periode tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Dumai cenderung tidak inklusif atau belum cukup merata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Meskipun terdapat indikasi keberhasilan kebijakan pembangunan, khususnya dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah pertumbuhan jumlah penduduk, namun efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan relatif perlu ditingkatkan. Maka ke depan diperlukan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih berorientasi pada produktivitas, penciptaan nilai tambah lokal, dan peningkatan kapasitas SDM agar pendapatan per kapita tidak hanya tumbuh secara absolut tetapi juga mampu bersaing secara relatif di tingkat provinsi.

Tabel 2. 47 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Dumai dan PDRB Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	PDRB Per Kapita	Tahun					Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PDRB HB Per Kapita Kota Dumai	114,63	123,5	135,78	145,04	150,74	7,09
2	PDRB HB Per Kapita Provinsi Riau	113,79	129,21	149,91	152,4		10,23
3	PDRB HK Per Kapita Kota Dumai	77,65	80,59	83,55	86,97	88,37	3,29
4	PDRB HK Per Kapita Provinsi Riau	76,63	78	80,06	81,81		2,20

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Pengembangan ekonomi regional tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kemajuan ekonomi tetapi juga untuk peningkatan kemakmuran penduduknya. Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan (BPS, 2020). Akan tetapi data pendapatan yang akurat sulit diperoleh. Pendapatan per kapita masyarakat Kota Dumai diperkirakan akan mengalami perubahan seiring terjadinya perubahan nilai PDRB pada sektor-sektor dominan yang ada di Kota Dumai.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Dumai mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 8,19% pada tahun 2020 menurun menjadi 4,66% pada tahun 2024 dengan penurunan pertumbuhan sebesar 13,15% per tahun.

Upaya yang harus dilakukan dalam rangka terus mengurangi tingkat pengangguran antara lain membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha, sehingga jumlah tenaga

kerja bertambah, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa *entrepreneur* atau membuka usaha sendiri. Berikut disajikan Tabel yang menggambarkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Angkatan Kerja Kota Dumai dari Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 48 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Dumai Tahun 2020-2024

Kota Dumai	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Penduduk (Jiwa)	316.782	323.452	331.832	338.064	349.389	2,48
Jumlah Penduduk 15-64 Tahun (Jiwa)	213.253	217.981	223.772	230.251	239.219	2,91
Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	146.586	144.465	148.506	156.790	158.478	1,97
Jumlah Bekerja	134.581	135.381	140.509	148.710	151.095	2,94
Jumlah Menganggur (Orang)	12.005	9.084	7.997	8.080	7.383	-11,44
TPT (%)	8,19	6,29	5,38	5,15	4,66	-13,15
Kesempatan Kerja (%)	91,81	93,71	94,62	94,85	95,34	0,95

Sumber: BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5. Indeks Pembangunan Manusia

Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Dumai selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan tantangan dan pemulihan dalam pembangunan sumber daya manusia. Pada tahun 2019, IPM tercatat sebesar 74,64, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 74,40, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Mulai tahun 2021, tren IPM kembali menunjukkan peningkatan berkelanjutan: 74,75 (2021), 75,26 (2022), 75,66 (2023), dan akhirnya mencapai 76,19 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan kebijakan pembangunan manusia, terutama dalam aspek pelayanan kesehatan, perluasan akses pendidikan, dan perbaikan taraf hidup masyarakat secara umum.



Gambar 2. 13 Tren Pertumbuhan IPM Kota Dumai Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kota Dumai, 2024

Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan tahunan IPM memperkuat pemahaman terhadap tren tersebut. Setelah penurunan -0,24 poin pada 2020, pertumbuhan IPM kembali positif dan terus meningkat, dengan pertumbuhan tertinggi pada 2024 sebesar +0,53 poin. Grafik garis IPM dan batang pertumbuhan menunjukkan sinyal positif bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia secara agregat mengalami peningkatan yang konsisten. Nilai IPM yang mencapai 76,19 pada 2024 mencerminkan bahwa Kota Dumai telah berada pada kategori tinggi dalam klasifikasi IPM menurut standar UNDP, meskipun belum mencapai kategori sangat tinggi. Ini menandakan bahwa SDM Kota Dumai terus mengalami peningkatan dari segi umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita. Namun, percepatan reformasi struktural masih dibutuhkan untuk mencapai kualitas SDM yang benar-benar kompetitif di tingkat global.

Tabel 2. 49 Indeks Pembangunan Manusia di Kota Dumai
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,4	74,75	75,26	75,66	77,03	0,87
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,12	13,31	13,32	13,33	13,35	0,44
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,07	10,14	10,15	10,16	10,29	0,54
Usia Harapan Hidup	Tahun	72,88	72,9	73,18	73,31	73,5	0,21
Pengeluaran Rill Per Kapita	(Rp Juta/kapita)	11.751	11.818	12.249	12.457	12.847	2,25

Sumber: BPS Kota Dumai, 2020-2024

6. Indeks Gini

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin.

Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna) (muta'ali, 2015). Artinya, semakin mendekati angka satu (1) nilai indeks gini maka tingkat ketimpangan penduduk semakin lebar (*Perfect inequality*). Menurut Oshima dalam Muta'ali (2015), nilai indeks gini dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

$G > 0,5$ ketimpangan tinggi

$0,35 < G < 0,5$ ketimpangan sedang

$G < 0,35$ ketimpangan ringan

Adapun rumus untuk menghitung indeks gini adalah sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum (X_{i+1} - X_i) (Y_i + Y_{i+1})$$

Di mana,

G = Angka Gini *Coefficient*

X_i = Proporsi Jumlah tangga kumulatif dalam kelas i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Menurut muta'ali (2015), untuk menghitung indeks gini, maka dilakukan pengelompokan penduduk sebagai berikut:

1. 20% penduduk yang menerima pendapatan tinggi dari jumlah penduduk
2. 40% penduduk yang menerima pendapatan menengah dari jumlah penduduk
3. 40% penduduk yang menerima pendapatan terendah

4. Atau penduduk dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu 20% termiskin, 20% kedua, 20% ketiga, 20% keempat dan 20% terkaya

Adapun hasil perhitungan dari persamaan indeks gini di atas adalah sebagai berikut

Tabel 2. 50 Indeks Gini Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan / Tahun (%)
Indeks Gini	0,361	0,36	0,345	0,324	0,31	0,328	-2,30

Sumber: BPS Kota Dumai Tahun, 2025

7. Tingkat Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumber daya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada di bawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Dumai, tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2020-2024 cenderung menurun di mana kenaikan hanya terjadi pada tahun 2021 sebagai akibat Pandemi Covid 19.

Tabel 2. 51 Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	R (%)
Batas Kemiskinan	Rp/ Kapita/ Bln	484.609	509.002	543.182	601.348	631.652	6,85
Jumlah penduduk miskin Kota Dumai	000 Jiwa	9,88	10,57	10	10,15	10,02	0,35
Persentase penduduk miskin Kota Dumai	(%)	3,16	3,42	3,2	3,21	3,14	-0,16

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025

Kemudian tabel yang sama juga menyajikan indeks keparahan kemiskinan/*poverty severity index* atau yang sering dinotasikan dengan P2. Indeks keparahan kemiskinan menjelaskan tentang kondisi penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2. 52 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024	R (%)
Indeks Kedalaman Kemiskinan P1	0,31	0,4	0,36	0,36	0,2	-10,38
Indeks Keparahannya Kemiskinan P2	0,05	0,07	0,27	0,06	0,03	-11,99

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) atau Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini tetap bertahan sepanjang hidupnya. Umur Harapan Hidup merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat, termasuk akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Umur Harapan Hidup juga merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia di suatu wilayah. Umur Harapan Hidup merupakan salah satu indikator kunci yang digunakan untuk menilai kualitas kesehatan masyarakat.

Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Dumai dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari 72,88 tahun pada tahun 2020 menjadi 73,5 tahun pada tahun 2024. Namun bila dibandingkan dengan pencapaian Umur Harapan Hidup Indonesia dan pencapaian Umur Harapan Hidup Provinsi Riau dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terlihat

capaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai masih di bawah angka Provinsi Riau dan angka Nasional, seperti tabel berikut ini:

Tabel 2. 53 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	71,47	71,57	71,85	73,93	74,15
Provinsi Riau	73,66	73,72	73,95	74,18	74,41
Kota Dumai	72,88	72,9	73,18	73,31	73,5

Sumber: BPS, 2025

Meningkatnya Umur Harapan Hidup secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Keadaan ini terkait dengan pola hidup sehat masyarakat serta tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah untuk dicapai, serta kesadaran yang tinggi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

2. Stunting

Stunting merupakan salah satu isu kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian utama, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif dan produktivitas mereka di kemudian hari. Oleh karena itu, pemerintah bersama berbagai pihak terkait terus berupaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting melalui berbagai program intervensi gizi, perbaikan sanitasi, serta peningkatan edukasi masyarakat. Untuk memahami efektivitas upaya yang telah dilakukan, berikut disajikan tren prevalensi stunting Kota Dumai

Tabel 2. 54 Prevalensi Stunting Kota Dumai Tahun 2019-2024

Uraian	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting	%	11,8	n/a	23	12,8	14,9	16,9

Sumber: Survey Kesehatan Indonesia, 2025

Prevalensi stunting di Kota Dumai pada tahun 2019 sebesar 11,8%. Pada tahun 2020 tidak dilakukan survei status gizi sehingga pada tahun 2020 Kota Dumai untuk data prevalensi stuntingnya tidak tersedia. Pada tahun 2021 prevalensi stunting di Kota Dumai sebesar 23%, bila

dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat positif menjadi 12,8%. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya atau intervensi yang berhasil dalam menanggulangi stunting. Prevalensi stunting kembali meningkat menjadi 14,9% pada tahun 2023 dan 16,9% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penanganan stunting masih ada dan ada faktor-faktor baru yang mempengaruhi, atau efektivitas intervensi sebelumnya menurun.

3. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena di samping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu.

Dari hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) pada balita di Kota Dumai pada tahun 2024 diperoleh status gizi balita sebagai berikut: persentase balita dengan gizi buruk sebesar 0,10% (21 penderita), prevalensi balita dengan gizi kurang sebesar 1,62% (144 penderita). Bila dibandingkan dengan target sasaran tahun 2024 di mana persentase balita dengan gizi buruk sebesar < 2% dan persentase balita dengan gizi kurang sebesar <5%, maka pencapaian status gizi balita sudah lebih dari target.

Tabel 2. 55 Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Bayi Baru lahir ditimbang	Bayi	8.119	8.102	8.064	8.351	8.868	2,53
Jumlah Bayi BBLR	Bayi	121	71	102	89	144	4,75
Persentase Bayi BBLR	%	1,49	0,88	1,26	1,07	1,62	2,41
Jumlah Balita ditimbang	Balita	26.005	22.187	19.381	19.267	20.355	-5,64
Jumlah Balita Gizi Buruk	Balita	3	6	23	13	21	62,96
Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,01	0,03	0,12	0,07	0,1	78,13

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025

Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi buruk pada balita dapat diantisipasi. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain, kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan risiko tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah. Permasalahan kesehatan gizi masyarakat yang juga menjadi perhatian Pemerintah adalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak.

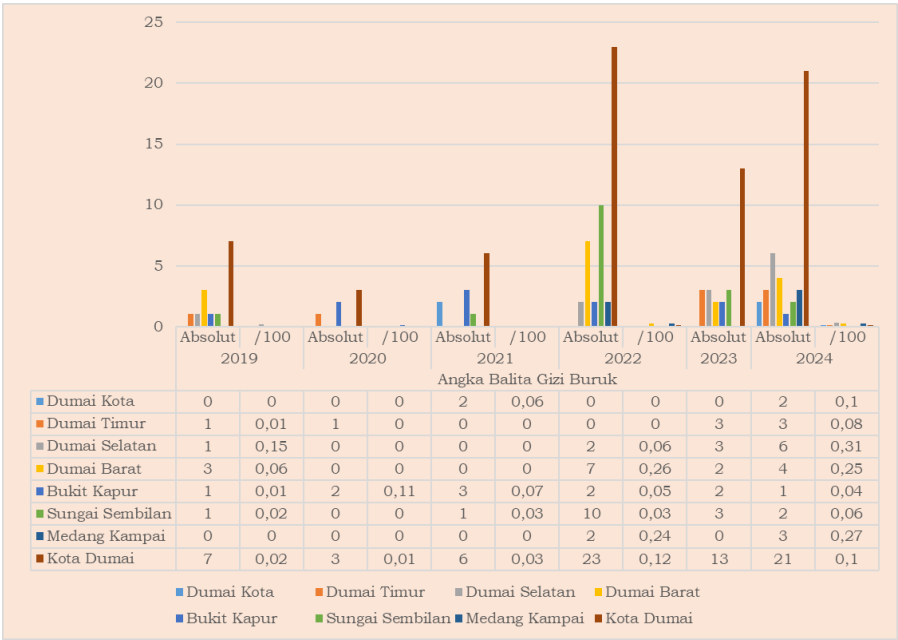
Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. UNICEF mendefinisikan stunting sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi badan di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis). Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Selain mengalami pertumbuhan terhambat, stunting juga seringkali dikaitkan dengan penyebab perkembangan otak yang tidak maksimal.

Kementrian kesehatan telah menyusun strategi nasional dalam menurunkan stunting. Strateginya antara lain dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak yakni untuk anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan di antaranya pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0-23 bulan. Juga intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, antara lain, penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan dan gizi.

Dalam RPJMN 2020-2024 penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 19% pada 2024 dari yang saat ini 30,8% (Riskesdas 2018). Upaya ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Pengukuran stunting dengan menggunakan pengukuran TB/U, anak stunting akan masuk kategori kurang dari -2 standar deviasi (SD), artinya, di dalam grafik pertumbuhan balita akan berada di bawah garis merah. Prevalensi balita pendek (stunting) Kota Dumai sebesar 0,2% (79 penderita), balita kurus sebanyak 93 penderita (0,2%).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah. Selama tahun 2019-2024, di mana pada tahun 2020 angka balita gizi buruk dari tujuh

Kecamatan hanya terdapat di lima Kecamatan yaitu Dumai Timur, Dumai Selatan, Bukit Kapur, dan Sungai Sembilan masing-masing sebanyak 1 orang dan Bukit Kapur Sebanyak 2 orang. Namun pada tahun 2024 data jumlah balita gizi buruk terbanyak berada di Dumai Selatan yaitu sebanyak 6 orang. Jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 14 Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2024

4. Prevalensi Balita Gizi Kurang

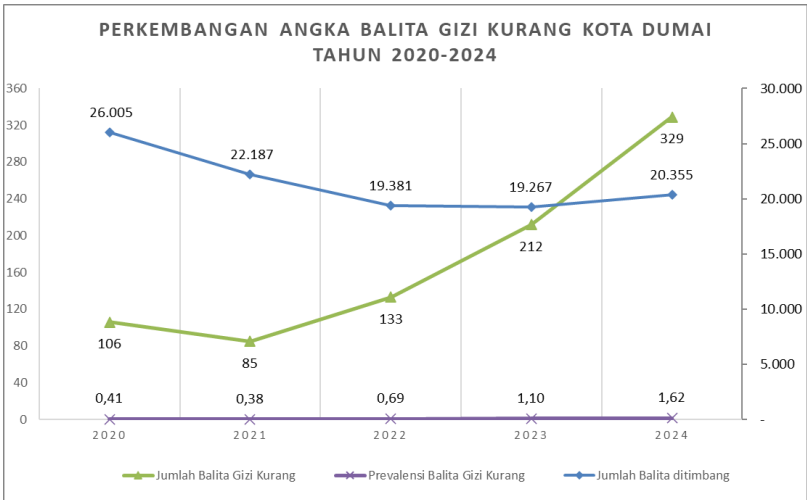
Anak bergizi kurang biasanya disebabkan karena kekurangan gizi mikro seperti zat besi, vitamin, atau yodium. Penambahan gizi dalam asupan makanan sangat diperlukan untuk memperbaiki status gizi anak. Penyebab gizi kurang pada anak balita adalah karena tidak mendapatkan asupan gizi yang sesuai usianya. Prevalensi status gizi kurang selama periode 2020-2024 mengalami kecenderungan peningkatan yaitu sebesar 42,30% per tahun. Balita gizi kurang bertambah dari 182 tahun 2020 menjadi 212 tahun 2024. Prevalensi balita gizi kurang dengan nilai tertinggi selama periode 2020-2024 terjadi pada tahun 2020. Berikut disajikan perkembangan balita gizi kurang di Kota Dumai dari tahun 2020-2024 pada Tabel berikut.

Tabel 2. 56 Perkembangan Angka Balita Gizi Kurang Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					Pertumbuhan Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Balita ditimbang	Orang	26.005	22.187	19.381	19.267	20.355	-5,94
Jumlah Balita Gizi Kurang	Orang	106	85	133	212	329	32,73
Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	0,41	0,38	0,69	1,10	1,62	41,11

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2025

Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan status gizi balita kurang adalah konsumsi makanan yang tidak mencukupi kebutuhan sehingga tubuh kekurangan zat gizi, keadaan kesehatan, pengetahuan orang tua tentang kesehatan, tingkat pendidikan, pemberian ASI, kondisi sosial ekonomi, pada konsumsi keluarga, faktor sosial keadaan penduduk, paritas, umur, jenis kelamin, dan pelayanan kesehatan.



Gambar 2. 15 Perkembangan Angka Balita Gizi Kurang di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

5. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran (*Infant Mortality Rate*)

Kematian prenatal merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa tujuh hari setelah persalinan. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Angka Kematian Bayi sebanyak 7,35 bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020 kemudian meningkat menjadi 9,33 bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2024 dengan pertumbuhan 5,26% per tahun. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap

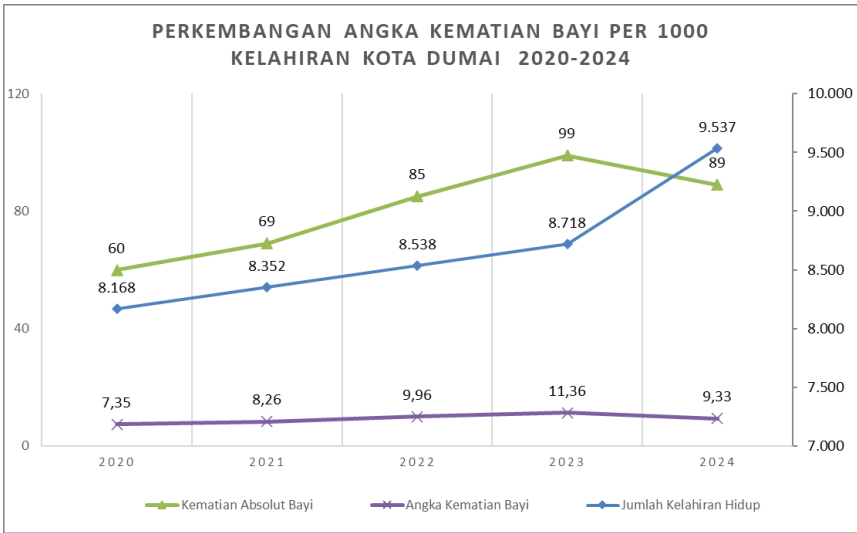
perinatal. Perkembangan angka kematian bayi 1.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2020-2024 pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 57 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Kota Dumai Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	8.168	8.352	8.538	8.718	9.537	3,95
2	Kematian Absolut Bayi	Bayi	60	69	85	99	89	10,36
3	Angka Kematian Bayi	/1000KH	7,35	8,26	9,96	11,36	9,33	6,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025

Perkembangan tren angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kota Dumai menunjukkan penurunan pada tahun 2024 yang semula 11,36 menjadi 9,33 atau hanya mengalami peningkatan sebesar 5,26% per tahun. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh jumlah kelahiran bayi dengan pertumbuhan sebesar 3,95% per tahun atau bertambah dari 8.168 bayi tahun 2020 menjadi 9.537 bayi tahun 2024. Perkembangan tren angka kematian bayi 1.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2020-2024 pada gambar berikut.



Gambar 2. 16 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

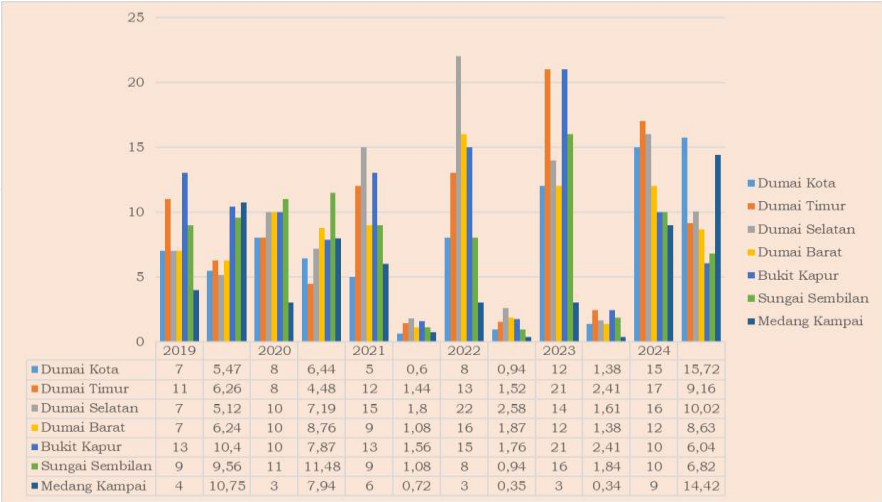
Angka Kematian bayi/1.000 kelahiran per Kecamatan dari tahun 2020-2024 fluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi ada Kecamatan Dumai Kota sebesar 6,17%. Pada tahun 2024 AKB/1.000 tertinggi ada di

Kecamatan Dumai Timur sebesar 2,41/KH atau sebanyak 21 kematian absolut bayi.

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Penyebab kematian pada bayi umumnya didominasi oleh kasus Asfiksia, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Kelainan bawaan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua masih relatif kurang.

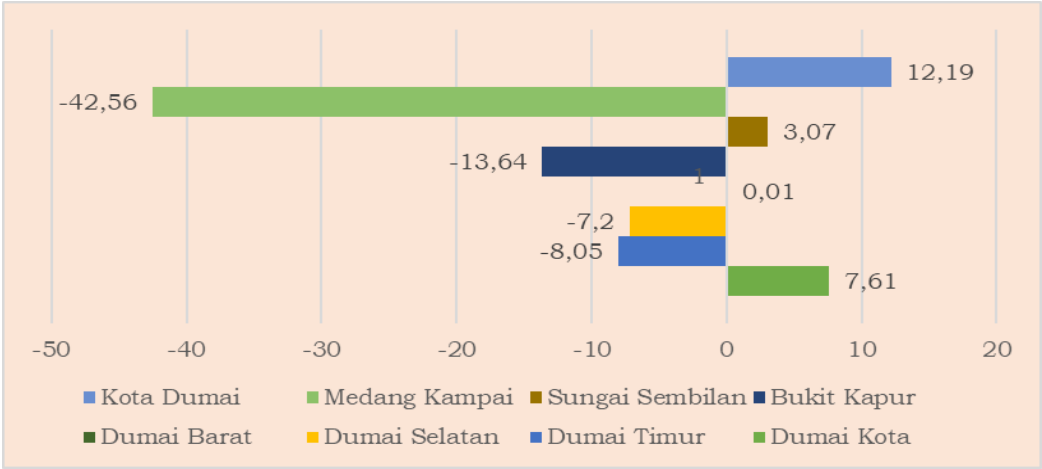
Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab risiko kematian bayi waktu lahir.

Usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian bayi antara lain adalah meningkatkan kebersihan (*hygiene*) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemia, serta promosi pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan bayi. Penyebab kematian bayi juga dapat dikarenakan adanya kelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan risiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua. Angka kematian bayi tahun 2019-2024 per Kecamatan Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 2. 17 Perkembangan Angka Kematian Bayi Absolut dan Per 1000 Kelahiran Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025



Gambar 2. 18 Pertumbuhan per Tahun Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025

6. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur kurang dari 5 tahun per 1.000 penduduk. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2. 58 Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	8.168	8.352	8.538	8.718	9.537	3,95
Kematian Absolut Balita	Balita	72	82	95	117	89	5,44
Angka Kematian Balita	/1000 KH	8,81	9,82	11,13	13,42	11,53	6,96

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025

Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai dari tahun 2020-2024 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, dari 8,81/1000 kelahiran hidup tahun 2020 menjadi 13,42/1000 kelahiran hidup bayi di tahun 2023. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 11,53/1000 kelahiran hidup. Perkembangan tren Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup Kota Dumai menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,96% per tahun, seiring dengan bertambahnya kematian absolut balita dari 72 balita pada tahun 2020 bertambah menjadi 117 balita ditahun 2023 dan kemudian mengalami penurunan menjadi 89 di tahun 2024. Perkembangan tren Angka Kematian Balita 1.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2019-2023 pada Gambar berikut.

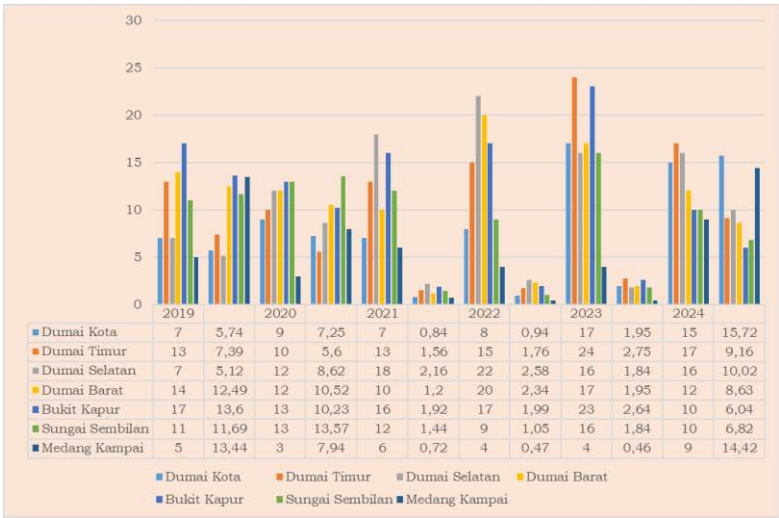


Gambar 2. 19 Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

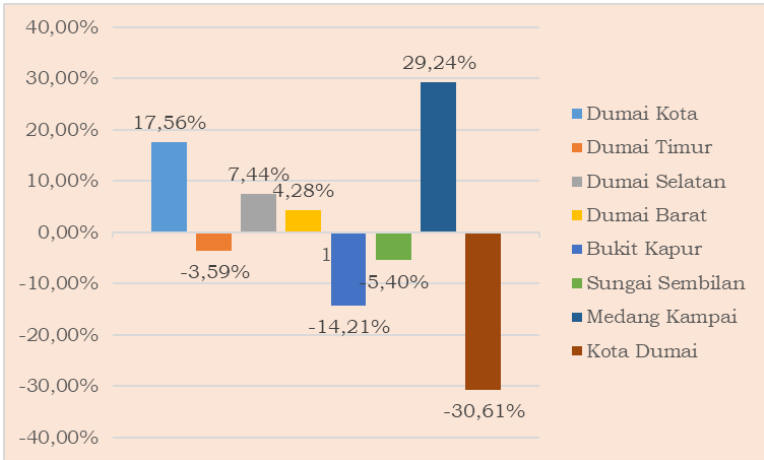
Sementara itu Angka Kematian balita per Kecamatan di Kota Dumai dari selama tahun 2019-2023 fluktuatif. Perkembangan Angka kematian Balita tertinggi di Kecamatan Dumai Kota dengan pertumbuhan sebesar 24,84% per tahun. Usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian balita antara lain adalah meningkatkan kebersihan (*hygiene*) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap

kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemia, serta promosi pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan balita. Perkembangan Angka kematian balita tahun 2019-2024 per Kecamatan Kota Dumai dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 20 Perkembangan Angka Kematian Balita Absolut dan per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024



Gambar 2. 21 Pertumbuhan per Tahun Angka Kematian Balita Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024

7. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau

penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Jumlah kematian ibu diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memantau kematian terkait dengan kehamilan.

Kasus jumlah kematian ibu dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan ibu dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman ibu hamil tentang risiko yang terkait dengan kehamilan seperti 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan jarak Terlalu Dekat) dan juga 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk, dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas rujukan). Penyebab langsung kematian ibu antara lain: eklampsi, pendarahan, *partus macet*, infeksi, *abortus* dan lain-lain. Penyebab tidak langsung antara lain: penyakit infeksi seperti malaria, *typhoid* serta penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit gula dan penyakit lainnya.

Kasus jumlah kematian ibu melahirkan berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Meningkatnya kasus jumlah kematian ibu ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai. Warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatannya. Penyebab kematian ibu pada umumnya karena perdarahan dan eklampsi atau pre eklampsi. Perkembangan kasus jumlah Kematian Ibu dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2. 59 Perkembangan Jumlah Kematian Ibu Kota Dumai
Tahun 2020-2024**

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kematian Absolut Ibu	Jiwa	3	22	5	9	7	23,59

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025

Kasus jumlah kematian ibu menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan ibu dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan ibu balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Jumlah kematian ibu yang dilaporkan pada tahun 2024 sebanyak 7 kasus, jumlah kematian tahun 2024 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Kasus jumlah kematian ibu per Kecamatan di Kota Dumai dari tahun 2024 berasal dari Kecamatan Dumai Kota sebanyak 1 ibu, Dumai Selatan 1 ibu, Dumai Barat 1 ibu, Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 3 ibu, dan Kecamatan Medan Kampai sebanyak 1 ibu.

Hal ini terjadi karena kurangnya kompetensi tenaga bidan dan perilaku ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan. Kriteria pencatatan data kematian ibu dan bayi di beberapa unit pelayanan kesehatan kadang berbeda-beda, seperti KTP ibu yang merupakan penduduk luar Kota Dumai atau KTP orang tua bayi yang masih Kota Dumai walaupun sudah lama pindah ke luar Kota Dumai ikut tercatat dalam registrasi salah satu penyumbang angka kematian di Kota Dumai.

8. Angka Kematian Neo-Natal per 100.000 Kelahiran

Kematian neo-natal merupakan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup dalam 7 hari setelah kelahiran, di kenal juga dengan istilah kematian neo-natal dini/perinatal, dan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup lebih dari 7 hari sampai kurang 29 hari dikenal dengan kematian neo-natal lanjut. Kematian neo-natal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi, sedangkan kematian neo-natal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neo-natal. Keberhasilan Kota Dumai mengurangi angka kematian neo-natal karena adanya program alarm persalinan. Berikut data angka kematian neo-natal di Kota Dumai dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 60 Perkembangan Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	8.168	8.352	8.538	8.718	9537	3,95
Kematian Absolut Neonatal	Neo-natal	39	44	52	67	74	17,37
Angka Kematian Neonatal	/ 1000 KH	4,77	5,27	6,09	7,69	7,76	12,94

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025

Angka Kematian Neonatal Kota Dumai pada tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang cenderung meningkat sejak tahun 2020 sebanyak 4,77 per 1.000 kelahiran kemudian bertambah menjadi 7,76 per 1.000 kelahiran pada tahun 2024. Upaya yang harus dilakukan dalam rangka menurunkan kematian neonatal adalah setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dan setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

9. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana dengan tujuan untuk menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, membudayakan NKBS, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka kematian ibu (Ibu Hamil, melahirkan dan nifas);
2. Membudayakan NKKBS;
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
4. Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar

masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk Masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan yang bersumber daya Masyarakat. Penimbangan secara rutin di Posyandu dapat untuk pemantauan pertumbuhan dan mendeteksi sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan bayi dan balita. Peningkatan gizi bayi dan balita di posyandu yang dilakukan oleh kader dapat berupa Penyuluhan tentang ASI, Status Gizi, MPASI, Imunisasi, pemberian Vit. A, serta stimulasi tumbuh kembang anak, diare pada balita. Selain itu diharapkan ada strategi operasional yang dapat dilakukan di setiap Posyandu dengan melakukan analisa rasio jumlah posyandu terhadap jumlah bayi dan balita dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan tumbuh kembang sejak dalam kandungan umur 2 tahun (*Golden Period*).

Jumlah posyandu dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan sebesar 0,50% per tahun, dari 197 posyandu pada tahun 2020 meningkat menjadi 201 pada tahun 2024. Selanjutnya jumlah balita juga mengalami peningkatan dari 42.098 balita tahun 2020 menjadi 44.931 balita tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 1,66% per tahun. Kondisi ini telah menyebabkan penurunan rasio posyandu per satuan balita sebesar 1,18% per tahun dari 4,68 per 1.000 balita pada tahun 2020 menjadi 4,47 per 1000 balita ditahun 2024, artinya terdapat 4 posyandu untuk setiap 1000 balita. Akan tetapi, meskipun mengalami penurunan rasio posyandu di Kota Dumai masih jauh di atas standar (1:1000). Berikut disajikan data rasio posyandu per satuan balita pada Tabel berikut.

Tabel 2. 61 Perkembangan Rasio Posyandu per 1.000 Balita Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Posyandu	Unit	197	197	198	198	201	0,5
Jumlah Balita	Balita	42.098	43.046	44.003	44.931	44.931	1,66
Rasio Posyandu / 1000 Balita	Indeks	4,68	4,58	4,5	4,41	4,47	-1,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024

Hal ini terjadi karena kemampuan penyediaan fasilitas posyandu yang sudah membaik walaupun jumlah balita bertambah setiap tahunnya. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya

Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh dan untuk bersama memberdayakan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

10.Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Pada tahun 2020-2024 jumlah rumah sakit yang ada di Kota Dumai sebanyak 5 rumah sakit yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Dumai tipe B yakni RSUD Kota Dumai, 1 rumah sakit milik BUMN tipe D yakni RS Pertamina dan 1 rumah sakit milik TNI/POLRI yakni RS Bhayangkara yang mulai operasional sejak tahun 2007 (Rumah Sakit Pelabuhan sejak tahun 2007 sudah tidak operasional lagi dan berubah status menjadi Balai Pengobatan). Rasio cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2020-2024 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 62 Perkembangan Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Rumah Sakit	Unit	3	3	4	5	6	18,92
Jumlah Penduduk	Jiwa	316.782	323.452	331.832	338.064	349.389	2,48
Rasio Rumah Sakit /1000 Penduduk	Indeks	0,0095	0,0093	0,0121	0,0148	0,0172	16,04

Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020-2025.

Dapat dilihat bahwa rasio cakupan pelayanan rumah sakit tahun 2020 adalah sebesar 0,009 naik menjadi 0,0175 pada tahun 2024. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan rasio cakupan pelayanan rumah sakit dari tahun 2020-2024. Namun demikian perkembangan ini belum bisa mencapai standar rasio cakupan pelayan rumah sakit (1:1000). Untuk itu hal ini penting menjadi perhatian karena semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani tapi tidak diiringi oleh penambahan pembangunan rumah sakit.

Peningkatan rasio cakupan pelayanan rumah sakit dari 0,009 pada tahun 2020 menjadi 0,0175 pada tahun 2024 menunjukkan adanya lonjakan signifikan dalam kapasitas layanan kesehatan di Kota Dumai. Namun, meskipun secara angka terlihat meningkat drastis, pencapaian ini belum memenuhi standar ideal rasio rumah sakit yaitu 1 rumah sakit per 1.000 penduduk (1:1000). Ketimpangan ini mencerminkan bahwa meskipun terjadi penambahan fasilitas atau peningkatan kapasitas layanan, pertumbuhan jumlah penduduk kemungkinan jauh lebih cepat dibandingkan dengan penambahan jumlah rumah sakit atau fasilitas rawat inap yang tersedia. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan, seperti keterbatasan daya tampung pasien, antrean yang panjang, beban kerja tenaga medis yang tinggi, serta potensi menurunnya kepuasan dan efektivitas pengobatan.

Selain itu, apabila tidak diiringi dengan pemerataan distribusi fasilitas kesehatan, maka lonjakan cakupan ini bisa jadi hanya terkonsentrasi di pusat kota atau wilayah tertentu, sementara masyarakat di pinggiran masih kesulitan mendapatkan akses layanan rumah sakit. Kondisi ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada peningkatan angka rasio semata, tetapi juga pada pembangunan rumah sakit baru, penguatan rumah sakit eksisting, dan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kota Dumai. Di sisi lain, alternatif strategi seperti penguatan layanan kesehatan primer, pengembangan rumah sakit tipe D di wilayah padat penduduk, dan pemanfaatan teknologi telemedis juga dapat menjadi solusi jangka menengah untuk memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan demikian, tantangan ini harus dijawab melalui perencanaan terpadu antara pertumbuhan penduduk, pengembangan infrastruktur kesehatan, serta penguatan SDM medis agar visi kesehatan masyarakat yang merata dan berkeadilan bisa terwujud.

11. Rasio Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan di kelompokkan ke dalam tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) tenaga psikologi klinis, tenaga

keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis bio medik, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain.

Tabel 2. 63 Rasio Tenaga Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020-2024

No	Uraian Tenaga Kesehatan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dokter spesialis	14,01	13,38	14,01	12,82	13,68	-0,59
2	Dokter umum	26,42	35,49	40,2	36,39	34,63	7,00
3	Dokter gigi	5,41	5,91	5,79	6,56	5,24	-0,80
4	Tenaga Perawat	122,86	153,16	135,82	151,5	171,71	8,73
5	Tenaga Bidan	121,59	128,56	130,64	129,14	139,99	3,59
6	Tenaga Kefarmasian	18,78	18,05	14,62	14,61	15,43	-4,79
7	Tenaga Gizi	11,14	10,58	10,96	11,33	12,22	2,34
8	Tenaga Kesehatan Lingkungan	3,82	4,67	4,87	5,37	5,82	11,10
9	Tenaga Kesmas	10,5	10,5	11,88	13,12	19,21	16,30
10	Ahli Laboratorium	13,69	13,07	12,79	14,91	17,17	5,83
11	Teknis Medis	14,41	11,83	17,05	17,3	18,3	6,16
12	Teknik Biomedik	7	0,62	4,26	4,18	4,95	-8,30
13	Keterampilan Fisik	3,5	4,05	3,96	3,88	4,37	5,71

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025

Penentuan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dilakukan melalui penetapan rasio antara jumlah tenaga kesehatan dibanding dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2024 tenaga kesehatan yang ada di sarana kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (Puskesmas dan RSUD Kota Dumai) belum mencapai target baik jumlah dan rasio adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, tenaga gizi, ahli laboratorium, teknisi biomedik dan keterampilan fisik.

12. Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis dan para medis di Kota Dumai meliputi para dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat dan bidan. Peran tenaga medis dan para medis di mata masyarakat dan dunia sangatlah penting. Tenaga medis dan para medis memiliki peran sebagai garda terdepan dalam

penanganan Kesehatan masyarakat. Perkembangan rasio tenaga medis dan para medis selama periode 2020-2024 di Kota Dumai mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,57% per tahun. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel berikut.

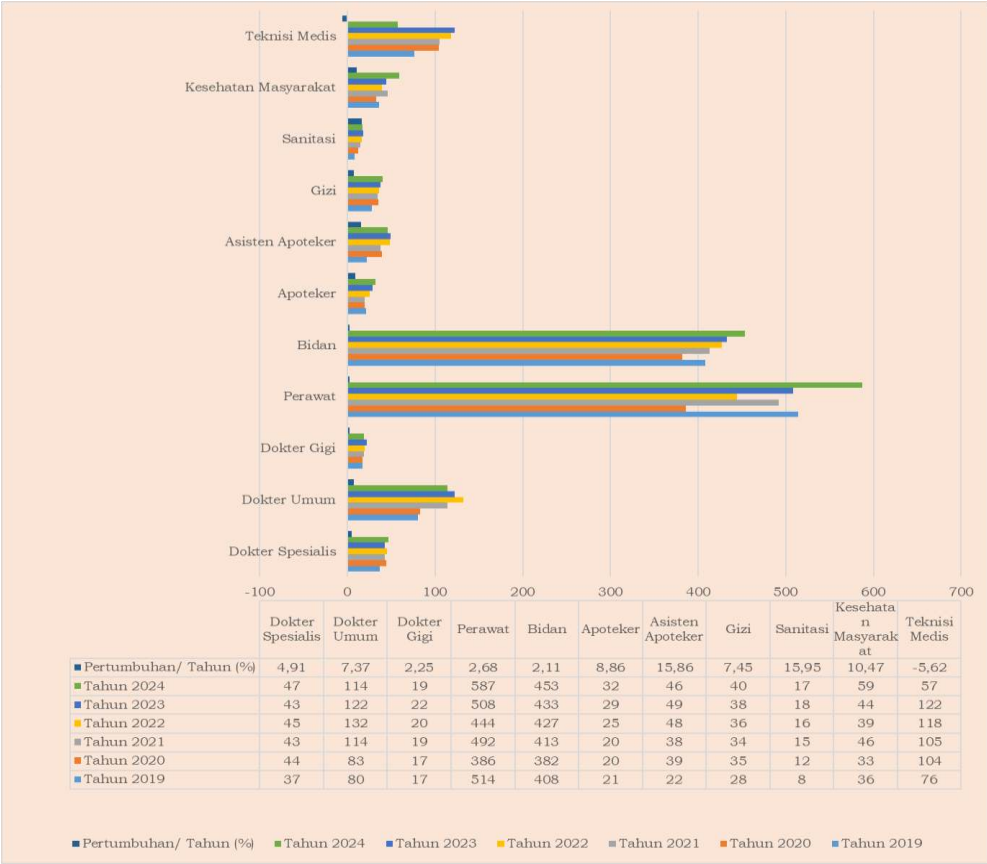
Tabel 2. 64 Rasio Tenaga Kesehatan, Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Tenaga Kesehatan	Unit	1.179	1.146	1.360	1.333	1.471	5,69
Jumlah Tenaga Medis	Orang	138	176	197	189	180	6,87
Jumlah Tenaga Para Medis	Orang	1.041	970	871	924	1.109	1,59
Jumlah penduduk	Jiwa	316.782	321.238	328.378	338.064	343.597	2,05
Rasio tenaga medis per 1000 penduduk	Indeks	3,72	3,57	4,14	3,94	4,28	3,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025

Salah satu penyebab meningkatnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu adalah terbatasnya tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai khususnya tenaga medis yakni tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis baik di puskesmas maupun di RSUD Kota Dumai. Pada umumnya kasus kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu merupakan kasus kematian dengan rujukan ke rumah sakit.

Dengan ditetapkannya RSUD Kota Dumai menjadi rumah sakit rujukan regional oleh Pemerintah Pusat, maka pasien yang berobat ke RSUD Kota Dumai tidak hanya pasien dari Kota Dumai namun juga pasien dari Kabupaten lain seperti dari Bengkalis dan Rokan Hilir. Pada tahun 2024 total tenaga medis yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se-Kota Dumai) sebanyak 1.471 orang yang terdiri dari dokter spesialis sebanyak 47 orang, dokter umum sebanyak 114 orang dan dokter gigi sebanyak 19 orang. Dengan demikian pada tahun 2024 rasio dokter spesialis sebesar 13,67 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum 33,17 per 1.000 penduduk, dan rasio dokter gigi 5,52 per 1.000 penduduk.



Gambar 2. 22 Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019-2024

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020-2025

Jika dilihat rasio tenaga medis (dokter) dan paramedis menurut kecamatan menunjukkan bahwa terdapat semua kecamatan di Kota Dumai sudah memenuhi standar WHO yaitu 1.000 penduduk per seorang dokter, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 2. 65 Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Ahli Lab Medik	Tenaga Penyuluh	Jumlah	Rasio Tenaga Kesehatan/ Jumlah Penduduk
Bukit Kapur	55,910	18	3	47	70	7	5	5	4	159	2.84
Medang Kampai	19,658	7	1	33	19	2	3	2	1	68	3.46
Sungai Sembilan	48,258	12	1	26	50	4	2	3	3	101	2.09
Dumai Barat	46,515	20	4	32	68	6	6	5	9	150	3.22
Dumai Selatan	56,494	8	2	18	29	3	2	3	6	71	1.26
Dumai Timur	74,894	37	6	398	161	51	20	36	27	736	9.83
Dumai Kota	41,768	12	2	33	56	3	2	3	9	120	2.87
Kota Dumai	343,497	114	19	587	453	76	40	57	59	1,405	4.09

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2025

13. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK).

Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas perawatan dan rumah sakit pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK (pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif).

Kasus komplikasi kebidanan yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2020-2024 berdasarkan data profil kesehatan Provinsi Riau menunjukkan bahwa di Kota Dumai dalam penanganan komplikasi kebidanan sudah 100,00% sebagaimana Gambar berikut.



Gambar 2. 23 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di RS Kota Dumai Tahun 2020-2024

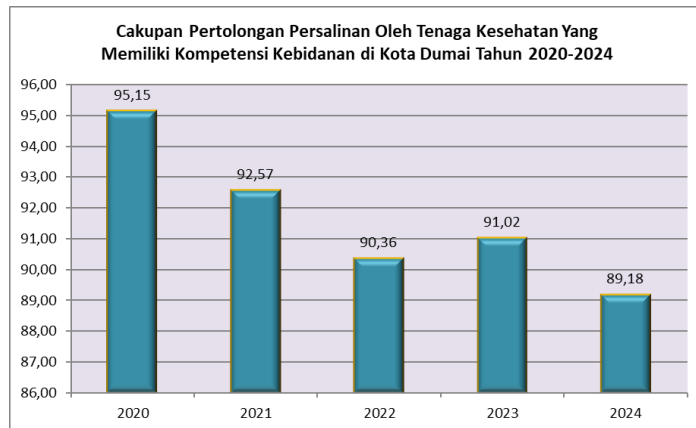
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Riau, Tahun 2020-2024

14. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu namun dipengaruhi pula oleh faktor yang lain, di antaranya adalah proses

kelahiran/persalinan. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran.

Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, selama tahun 2020-2024 memiliki rata-rata pertumbuhan yang cenderung menurun sebesar -1,79% per tahun. Berikut ini perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai.



Gambar 2. 24 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Riau, Tahun 2019-2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai berfluktuasi dari tahun 2020-2024. Dapat dilihat dari tahun 2020 pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 95,15%

meningkat pada tahun 2024 angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sebesar 89,18%.

Jika dibandingkan dengan target indikator Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai yang menargetkan cakupan sebesar 90%, maka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai pada tahun 2020-2024 telah melebihi target nasional hanya sebesar 0,45%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya penduduk yang belum memilih tenaga kesehatan sebagai penolong kelahiran utama karena rendahnya kemampuan penduduk untuk mengakses fasilitas kesehatan.

15. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

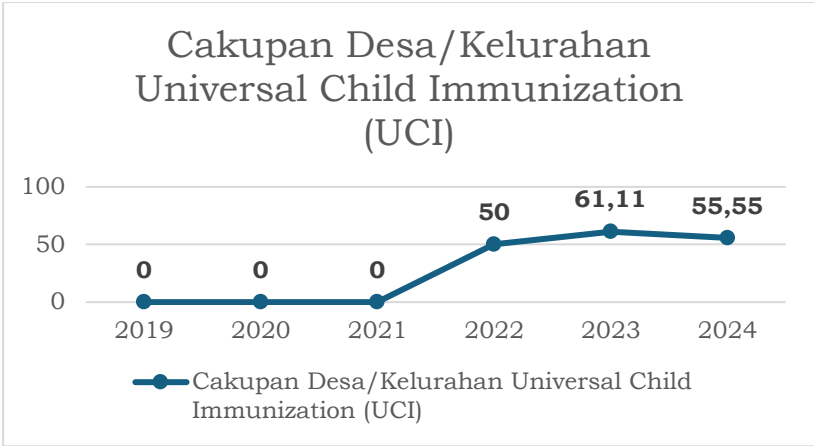
Untuk cakupan kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* di Kota Dumai menunjukkan bahwa masyarakat Kota Dumai telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui Posyandu, Puskesmas maupun Rumah Sakit. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang.

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT_{HB}Hib, 4 dosis , 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak rubella. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi kelas 1 SD sederajat diberikan vaksinasi 1 DT dan campak rubella (MR), kelas 2 dan 5 SD sederajat diberikan vaksinasi Td.

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis Td. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis Td.

Kementerian Kesehatan menargetkan pada tahun 2019 seluruh desa/ kelurahan mencapai 100% UCI (*Universal Child Immunization*) atau

90% dari seluruh bayi di desa/kelurahan tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG, Hepatitis B, DPT-Hib, Polio dan campak. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang. Berikut ini perkembangan cakupan kelurahan UCI di Kota Dumai. Berikut ini gambar cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Dumai tahun 2019-2024.



Gambar 2. 25 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Riau, Tahun 2019-2024

Selama tahun 2019-2024, cakupan kelurahan UCI mengalami penurunan yang sangat signifikan terutama pada tahun 2020-2021.Target UCI yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI, namun tidak sesuai dengan target disebabkan karena Pandemi Covid 19 tahun 2020. Di mana Posyandu balita tidak berjalan, sehingga cakupan kelurahan UCI tidak tercapai. Namun pada tahun berikutnya kelurahan UCI mengalami peningkatan dari 0,00% naik menjadi 50,00% ditahun 2022 dan terus mengalami peningkatan hingga 61,11%. Kemudian, pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 55,55%. Angka ini masih jauh dari target UCI yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI sehingga perlu mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah Kota Dumai.

Jika dilihat cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Dumai menurut Kecamatan menunjukkan bahwa terdapat satu Kecamatan yang mengalami pertumbuhan yang positif selama periode

tahun 2019-2024 yaitu di Kecamatan Dumai Barat rata-rata sebesar 25,99% per tahun. Sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Dumai untuk meningkatkan realisasi capaian cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI).



Gambar 2. 26 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025

Imunisasi BCG (*Bacillus Celmette-Guerin*) sebanyak 1 (satu) kali dilakukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Imunisasi BCG diberikan segera setelah bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan atau mulai 1 (satu) bulan di Posyandu. Imunisasi hepatitis-B sebanyak 1 (satu) kali untuk mencegah penyakit Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan dan dapat menyebabkan pengerutan hati (*sirosis*) dan kanker hati. Imunisasi terhadap Balita merupakan bagian dari pelayanan kepada Balita, di mana persentase balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi di Kota Dumai.

Imunisasi Hepatitis B ini diberikan segera setelah lahir di sarana pelayanan kesehatan. Imunisasi DPT-HB sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberi kekebalan pada penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus dan Hepatitis B. Imunisasi ini pertama kali diberikan pada usia bayi 2 (dua) bulan. Kemudian imunisasi berikutnya selisihnya 4 minggu. Pada saat ini

pemberian imunisasi DPT dan Hepatitis B dalam program imunisasi dilakukan bersamaan dengan menggunakan vaksin DPT-HB. Imunisasi polio untuk memberikan kekebalan dari penyakit polio dan diberikan sebanyak 4 (empat) kali dengan jelang waktu (jarak) 4 minggu. Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak, diberikan pada bayi umur 9 bulan sebagaimana tersaji pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 66 Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	BCG	59,81	68,51	90,04	83,9	79,18	7,27
2	Campak	34,54	44,73	87,51	87,88	83,6	24,73
3	DPT 1, DPT 2 dan DPT 3	50,02	49,62	90,98	86,17	80,9	12,77
4	Polio 1, 2, 3 dan Polio 4	49,93	52,6	90,9	86,56	80,3	12,61
5	Hepatitis B1, B2 dan B3	50,02	49,62	90,98	88,7	96,75	17,93

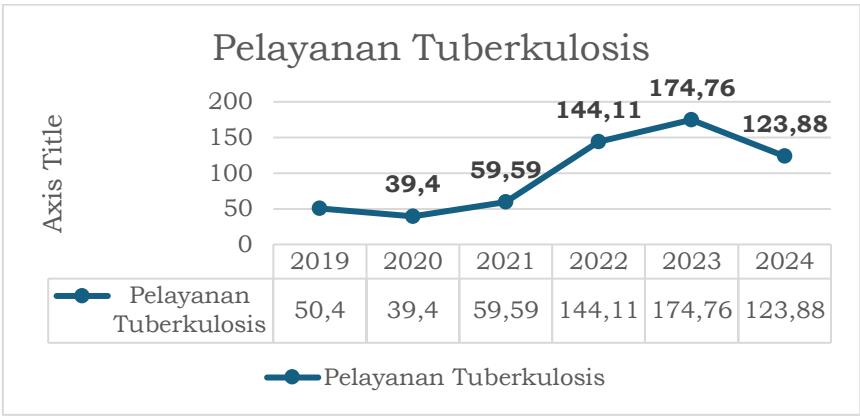
Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020-2025

Data pertumbuhan cakupan layanan kesehatan di Kota Dumai dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang sangat positif, dengan seluruh kelompok mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada kelompok kedua dengan laju sebesar 24,73% per tahun, diikuti oleh kelompok kelima yang tumbuh sebesar 17,93% per tahun. Kelompok ketiga dan keempat juga mengalami pertumbuhan yang kuat, masing-masing sebesar 12,77% dan 12,61% per tahun. Sementara itu, kelompok pertama mencatat pertumbuhan paling rendah, yaitu sebesar 7,27% per tahun, yang meskipun positif, menunjukkan adanya fluktuasi di tahun-tahun terakhir. Peningkatan ini mengindikasikan adanya keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan cakupan layanan dasar kesehatan, baik melalui ekspansi fasilitas, peningkatan kualitas layanan, maupun sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Namun demikian, inkonsistensi pada kelompok pertama perlu menjadi perhatian, karena penurunan cakupan di tahun-tahun terakhir berpotensi melemahkan capaian jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus menjaga dan memperkuat pelaksanaan program di lapangan serta memastikan distribusi layanan yang merata dan berkelanjutan, terutama bagi kelompok yang menunjukkan fluktuasi pertumbuhan.

16.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderitaan Penyakit TBC
 BTA

Dalam penanggulangan tuberkulosis pemerintah memberikan otoritas terhadap kabupaten/kota. Dalam penanggulangan tuberkulosis, WHO telah menetapkan strategi, yang merupakan strategi cost-efektif yaitu strategi DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse*) yang artinya pengobatan jangka pendek dengan pengawasan minum obat langsung yang memberikan angka kesembuhan yang tinggi. Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis dilakukan minimal 1 kali dalam setahun berupa pemeriksaan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan dahak secara bakteriologis dan/ atau radiologis, edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, melakukan rujukan jika diperlukan.

Cakupan pelayanan orang terduga tuberkulosis di Kota Dumai tahun 2019-2024 sudah mulai membaik, peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022 karena sudah melebihi 100% dan pada tahun 2023 cakupan pelayanan tuberkulosis di Kota Dumai sebesar 174,76%. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 123,88%. Perkembangan di Kota Dumai dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2. 27 Cakupan Pelayanan Tuberkulosis (%) di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025

Cakupan pelayanan orang terduga Tuberkulosis di Kota Dumai per Kecamatan tahun 2019-2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi ada di kecamatan Dumai Barat sebesar 91,94% per tahun atau mengalami peningkatan persentase dari 59,00% menjadi

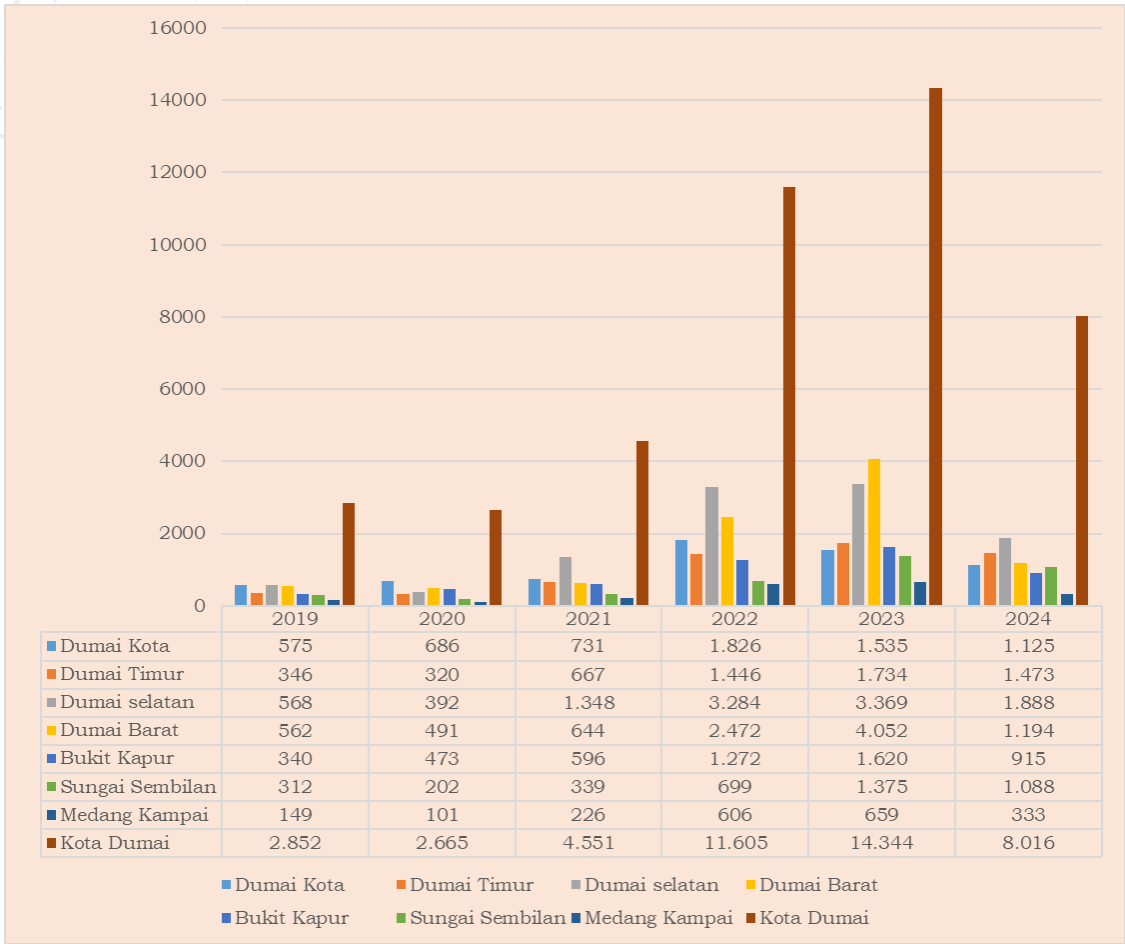
124,63%. Meskipun sudah mengalami peningkatan pemerintah harus tetap meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ke depan cakupan yang masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan.

Cakupan pelayanan orang terduga Tuberkulosis (TBC) di Kota Dumai menunjukkan tren pertumbuhan positif selama tahun 2019–2024, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kecamatan Dumai Barat sebesar 91,94% per tahun, meningkat dari 59,00% menjadi 124,63%. Capaian ini mencerminkan meningkatnya upaya deteksi dini kasus TBC di masyarakat, yang sangat penting dalam memutus rantai penularan. Namun, meskipun terjadi peningkatan signifikan, cakupan yang belum merata antar kecamatan tetap menjadi tantangan, terutama di wilayah dengan akses pelayanan kesehatan yang rendah atau kesadaran masyarakat yang masih minim. Oleh karena itu, perlu upaya berkelanjutan dalam edukasi kesehatan, penguatan peran puskesmas dan kader kesehatan, serta perluasan skrining aktif guna memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, mendapatkan layanan deteksi TBC secara tepat waktu dan berkualitas. Pemerintah daerah juga perlu menempatkan kecamatan dengan cakupan rendah sebagai prioritas dalam strategi eliminasi TBC di Kota Dumai. Cakupan layanan per Kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 67 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020–2024

Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%)					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
	%	%	%	%	%	
Dumai Kota	58,4	59,14	142,21	121,25	114,91	18,44
Dumai Timur	17	31,46	69,69	86,1	100,13	55,79
Dumai selatan	36,9	113,18	226,64	207,06	142,7	40,23
Dumai Barat	43,1	48,68	199,84	342,23	124,63	30,40
Bukit Kapur	62,3	59,42	124,1	151,4	107,9	14,72
Sungai Sembilan	41,7	85,1	104,64	201,61	186,62	45,45
Medang Kampai	36,7	61,08	192,38	180,55	107,77	30,91
Kota Dumai	39,4	59,59	144,11	174,76	123,88	33,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025



Gambar 2. 28 Nilai Absolut Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019–2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025

17.Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan standar kepada ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin meliputi persalinan normal, persalinan komplikasi. Standar persalinan normal yang dilakukan dengan Acuan Persalinan Normal (APN) yang dilakukan, sedangkan persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2019-2024 fluktuatif, belum mencapai target 100%. Adapun cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin pada tahun 2024 mencapai angka 89,55%.

Meskipun angka tersebut mencerminkan adanya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu, namun masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan standar pelayanan, baik untuk persalinan normal yang

mengacu pada Acuan Persalinan Normal (APN) maupun untuk persalinan komplikasi yang memerlukan penanganan rujukan sesuai buku saku pelayanan kesehatan ibu. Ketidaktercapaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan tenaga kesehatan terlatih, kendala geografis, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melahirkan di fasilitas kesehatan, serta belum optimalnya sistem rujukan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kapasitas dan distribusi tenaga kesehatan, serta memastikan kesiapan sarana prasarana layanan bersalin di seluruh wilayah kerja agar semua ibu bersalin memperoleh pelayanan yang sesuai standar dan berkualitas. Lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel berikut,

Tabel 2. 68 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kota Dumai Tahun 2024

Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	9.936	8.898	1.038	89,55

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025

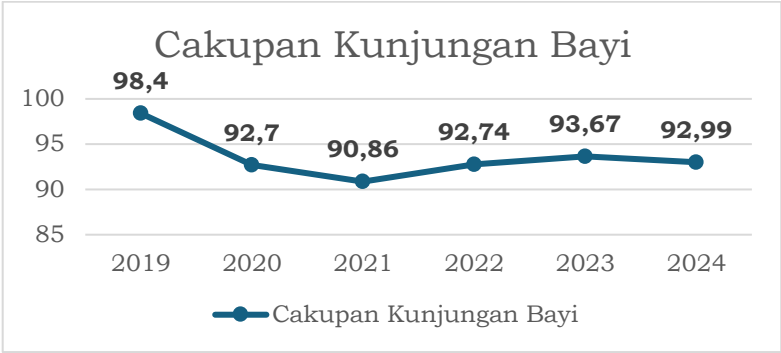
18. Cakupan Kunjungan Bayi

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari–3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai diukur dari jumlah kedatangan ke pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dengan syarat:

- Sampai dengan umur 1 tahun (12 bulan kurang 1 hari) sudah mendapat vitamin A sebanyak 1 kali.
- Penimbangan berat badan dilakukan minimal sebanyak 8 kali dalam 1 tahun.

- c. Melakukan pemeriksaan SDIDTK, yaitu pemantauan pertumbuhan perkembangan bayi (tercatat di dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA).

Pada tahun 2019 cakupan kunjungan bayi sebesar 98,40% dan pada tahun 2024 turun menjadi sebesar 92,99%. Bila dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yakni sebesar 90%, maka angka tersebut meskipun mengalami penurunan tapi telah melebihi target. Dengan demikian hal ini tetap harus menjadi perhatian agar tidak terjadi penurunan yang lebih signifikan. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar.



Gambar 2. 29 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Riau, Tahun 2019-2024

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir jika dilihat berdasarkan Kecamatan maka capaian pelayanan tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Kota dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,50% atau meningkat dari 100,00% tahun 2019 menjadi 104,51% tahun 2024. Sedangkan cakupan pelayanan terendah ada di Kecamatan Dumai Timur yang mengalami penurunan dari 99,90% di tahun 2019 menjadi 98,87% di tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -3,91% per tahun.

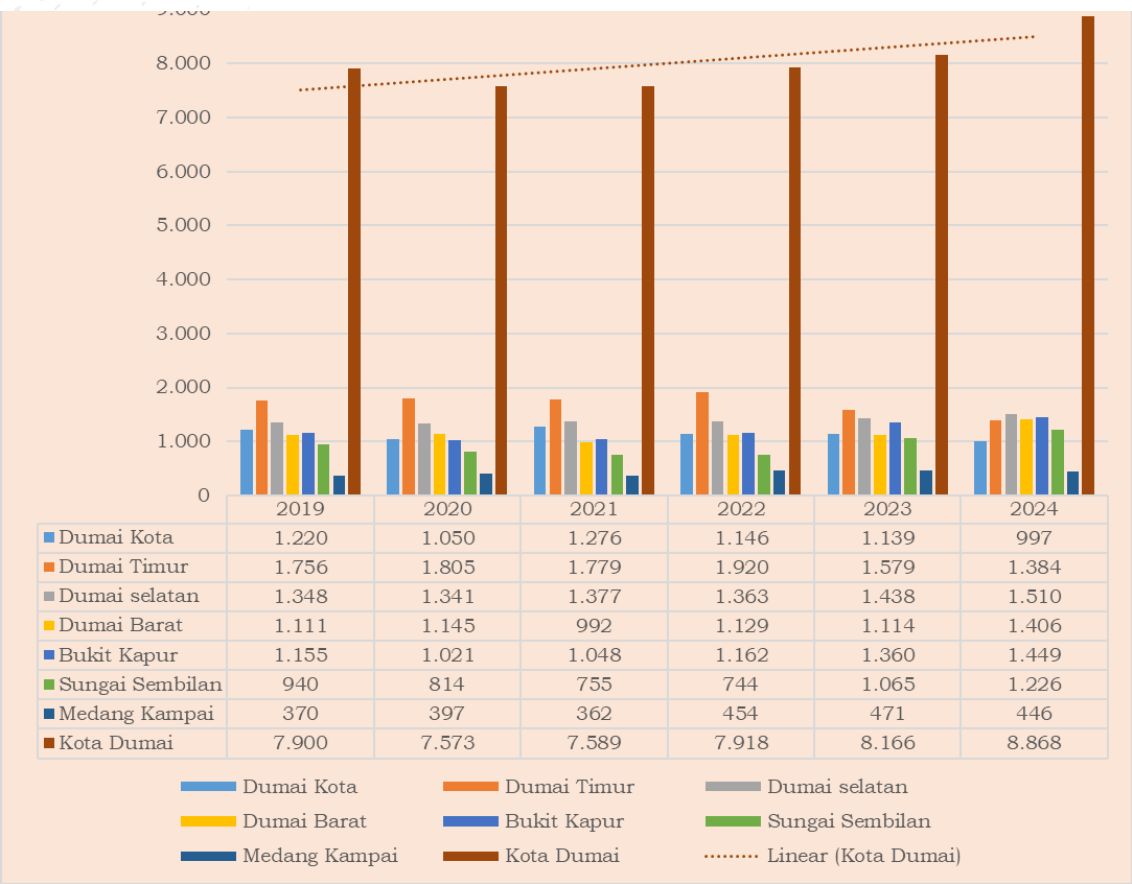
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kota Dumai menunjukkan capaian yang bervariasi antar kecamatan selama periode 2019–2024. Kecamatan Dumai Kota mencatat capaian tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,50% per tahun, meningkat dari 100,00% menjadi 104,51%, yang mencerminkan komitmen dan efektivitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, terutama dalam menjangkau seluruh bayi baru lahir untuk mendapatkan intervensi awal yang penting. Sebaliknya, Kecamatan Dumai Timur mengalami penurunan cakupan dari 99,90%

menjadi 98,87% dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -3,91% per tahun, mengindikasikan adanya kemunduran akses atau kualitas layanan kesehatan neonatal di wilayah tersebut. Perbedaan capaian ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum Kota Dumai telah mencapai cakupan tinggi, masih terdapat tantangan dalam pemerataan pelayanan, khususnya di wilayah dengan akses sulit atau rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah melakukan evaluasi spesifik per wilayah dan memperkuat pendekatan berbasis komunitas serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk memastikan seluruh bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Tabel 2. 69 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019–2024

Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	%	%	%	%	%	%	
Dumai Kota	100	84,5	100,47	101,96	103,08	104,51	0,89
Dumai Timur	99,9	101	97,37	104,07	83,24	98,87	-0,21
Dumai selatan	98,6	96,4	96,84	96,74	100,63	94,61	-0,82
Dumai Barat	99,1	100,4	85,15	96,74	93,3	101,22	0,42
Bukit Kapur	92,4	80,3	80,55	82,41	95,57	87,6	-1,06
Sungai Sembilan	99,9	85	77,04	65,96	89,57	83,69	-3,48
Medang Kampai	99,5	105	93,54	99,78	97,92	71,47	-6,40
Kota Dumai	98,4	92,7	90,86	92,74	93,67	92,99	-1,12

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024



Gambar 2. 30 Nilai Absolut Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019–2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024

19.Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Balita

Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Setiap balita (0-59 bulan) memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang meliputi pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul Vitamin A, pemberian imunisasi dasar lengkap, penimbangan minimal 8 kali dalam setahun yang dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak.

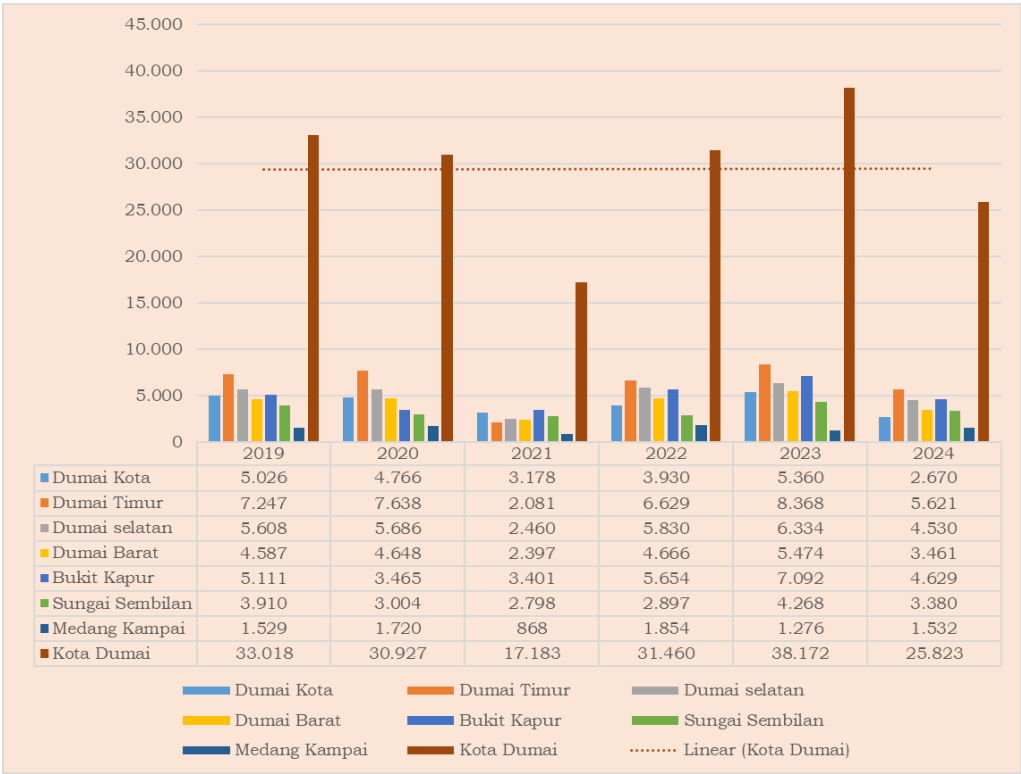
Mengingat periode balita merupakan fase krusial dalam menentukan kualitas kesehatan dan perkembangan anak jangka panjang, maka kecamatan dengan cakupan rendah harus menjadi prioritas utama dalam intervensi pelayanan kesehatan balita ke depan, melalui penguatan peran

posyandu, penyuluhan gizi dan kesehatan, serta dukungan logistik dan insentif bagi kader kesehatan di wilayah dengan capaian rendah. Cakupan layanan per Kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 70 Persentase Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	%	%	%	%	%	%	
Dumai Kota	99,2	74,5	48,57	84,19	94,12	97,98	-0,25
Dumai Timur	99,3	82,9	22,1	86,51	85,6	103,4	0,81
Dumai selatan	98,7	74,6	33,56	99,59	85,95	111,08	2,39
Dumai Barat	98,5	79,1	39,9	96,25	89,01	98,88	0,08
Bukit Kapur	98,5	52,9	50,74	96,53	96,66	104,98	1,28
Sungai Sembilan	99,9	60,8	55,42	61,85	69,66	82,68	-3,71
Medang Kampai	99,2	88,3	43,55	98,04	51,51	86,95	-2,60
Kota Dumai	99	73,5	39,92	88,71	84,96	99,33	0,07

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024



Gambar 2. 31 Nilai Absolut Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2019-2024

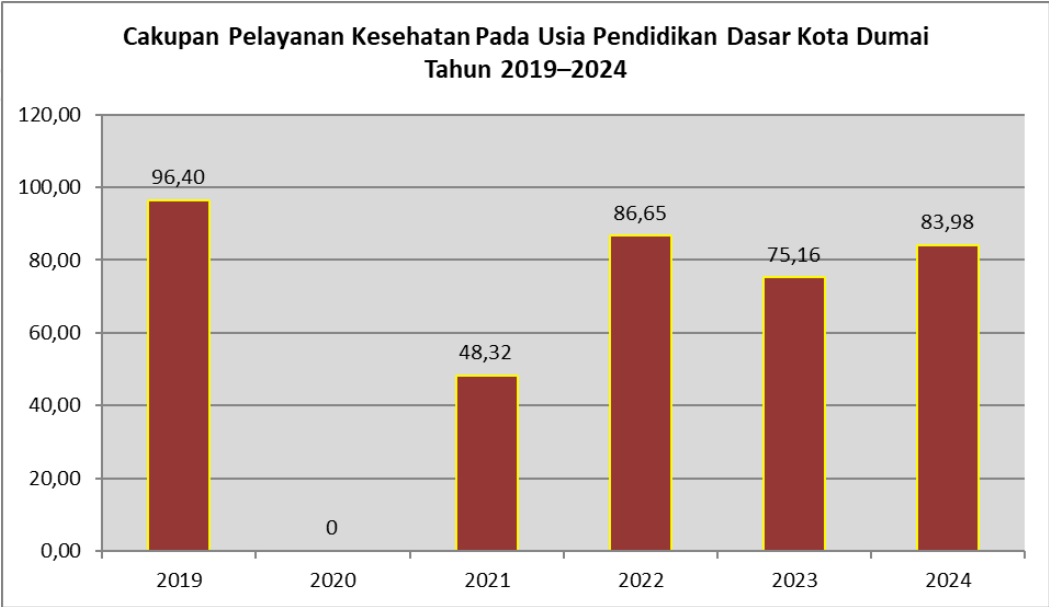
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024

20. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Anak-anak merupakan kelompok besar masyarakat yang mempunyai tingkatan kesehatan lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya berdasarkan tingkat kesakitan. Meskipun demikian merupakan kelompok yang rawan terhadap penyakit dan merupakan dasar bagi pendidikan kesehatan selanjutnya. Usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan anak melalui pengelolaan di sekolah dengan program Trias UKS, yaitu menanamkan pengetahuan kesehatan pandangan dan kebiasaan hidup sehat untuk diri sendiri dan lingkungannya. Pelayanan kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan. Menciptakan lingkungan sekolah sehat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Setiap anak pada usia pendidikan dasar usia 7 tahun – 15 tahun. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan luar satuan pendidikan dasar (pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LKPA) dan lainnya meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indra. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan bila diperlukan, memberikan penyuluhan kesehatan.

Cakupan pelayanan usia pendidikan dasar di Kota Dumai tahun 2019-2024 cenderung mengalami penurunan, khususnya tahun 2020 disebabkan karena Pandemi Covid 19, di mana kegiatan sekolah dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau pembelajaran jarak jauh sehingga berakibat pada tidak dilaksanakannya pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar, namun kembali meningkat dan menjadi 83,98% pada tahun 2024. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar di Kota Dumai 2019-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 2. 32 Cakupan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025

Jika dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar per Kecamatan di Kota Dumai dengan persentase tertinggi di tahun 2024 adalah Kecamatan Dumai Selatan sebesar 99,9% dan cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar terendah di Kecamatan Bukit Kapur sebesar 57,7%. Oleh karena itu ke depan cakupan yang masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 71 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019–2024

Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Dumai Kota	947	89,3	0	0	2,868	65,78	6,493	82,55	3,98	56,1	4.709	67,7	-5,39%
Dumai Timur	2,08	97,7	0	0	5,047	55,88	10,721	83,02	10,867	93,57	12.996	96	-0,35%
Dumai selatan	2,461	98,1	0	0	4,32	64,12	8,885	90,07	2,479	28,36	9.667	99,9	0,36%
Dumai Barat	1,388	97,1	0	0	2,639	39,65	7,561	92,53	3,122	38,26	7.921	96,3	-0,17%
Bukit Kapur	2,1	96,9	0	0	4,136	54,9	9,121	92,41	10,92	114,9	6.323	57,7	-9,85%
Sungai Sembilan	1,277	97,6	0	0	3,044	28,24	6,085	77,08	7,895	120,35	8.182	86,3	-2,43%
Medang Kampai	602	91,9	0	0	1,218	39,8	2,919	91,62	2,134	62,56	2.873	73,8	-4,29%
	10,855	96,4	0	0	23,272	48,32	51,785	86,65	41,397	75,16	52.671	84	-2,72%

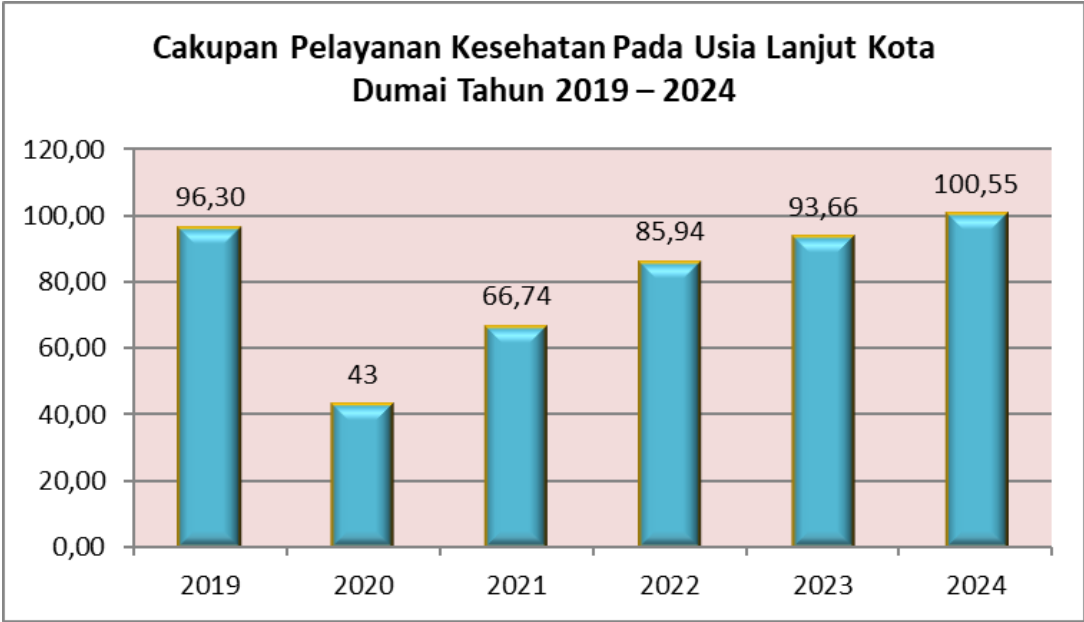
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025

21. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut dibagi ke dalam 3 kategori yaitu Pelayanan kesehatan geriatri di masyarakat, Pelayanan kesehatan geriatri di masyarakat berbasis rumah sakit, dan Pelayanan kesehatan geriatri berbasis rumah sakit. Masalah kesehatan pada lanjut usia disebabkan oleh kemunduran sel-sel tubuh, sehingga fungsi dan daya tahan tubuh menurun serta faktor risiko terhadap penyakit pun meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh malnutrisi, gangguan keseimbangan, kebingungan mendadak. Selain itu, beberapa penyakit yang sering terjadi pada lanjut usia antara lain hipertensi, gangguan pendengaran dan penglihatan, demensia, osteoporosis, dan sebagainya.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis. Selain itu, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif. Pelayanan kesehatan lanjut usia bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia yang berkualitas melalui penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat. Upaya yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain meningkatkan upaya kesehatan bagi lanjut usia di pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan Pelayanan Santun lanjut usia, meningkatkan upaya rujukan kesehatan bagi lanjut usia melalui pengembangan Poliklinik Geriatri Terpadu di Rumah Sakit, dan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi lanjut usia. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelayanan kesehatan standar pada usia lanjut dilakukan pada penduduk usia 60 tahun ke atas. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dalam bentuk edukasi, dan skrining kesehatan pelayanan kesehatan usia lanjut. Pelaksanaan skrining kesehatan pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal sekali dalam setahun meliputi pengukuran tinggi, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, anamnesa perilaku berisiko. Tindak lanjut skrining yaitu membuat

rujukan dan melakukan penyuluhan kesehatan. Berikut disajikan cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kota Dumai dari tahun 2019-2025. Cakupan layanan kesehatan pada usia lanjut di Kota mengalami penurunan akibat pandemik Covid-19 terutama pada tahun 2020 hanya mencapai 43,00% dan kembali meningkat menjadi 100,55% pada tahun 2024. Perkembangan cakupan layanan Kesehatan usia lanjut dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2. 33 Cakupan Pelayanan Usia Lanjut di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025

Jika dilihat cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut menurut Kecamatan di Kota Dumai yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama periode tahun 2020-2024 adalah Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 15,33% per tahun dan yang mengalami pertumbuhan terendah adalah kecamatan Dumai Timur hanya sebesar 3,89%. Sedangkan pada tahun 2024 persentase cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut tertinggi adalah Kecamatan Medang Kampai sebesar 111,34% dan yang terendah ada di Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 96,88%. Dalam hal ini dibutuhkan bantuan pelaku rawat/pendamping/pramusila atau lazim disebut *care giver*. Oleh karenanya, peran *care giver* menjadi sangat penting dan perlu dikembangkan aturan, standar dan norma oleh pemerintah yang mengatur pemenuhan kebutuhan *care giver* termasuk pembinaan dan pemenuhan hak para *care giver* itu sendiri. Cakupan pelayanan kesehatan

pada usia lanjut menurut Kecamatan di Kota Dumai tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 72 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019 – 2024

Kecamat an	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (%)												Pertumb uhan/ Tahun (%)
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Dumai Kota	2,114	98,4	973	44,5	1,608	71,91	1,874	94,69	1,871	96,1	3.884	100	0,32%
Dumai Timur	3,067	99,1	1,586	50,4	1,734	53,87	2,784	85,66	2,828	84,65	5.237	100	0,18%
Dumai selatan	2,332	96,8	864	35,3	1,512	60,36	2,062	83,04	2,237	88,84	4.635	99	0,45%
Dumai Barat	1,869	94,7	878	43,7	1,265	61,59	1,827	88,86	2,251	107,09	3.626	103,69	1,83%
Bukit Kapur	2,067	93,9	974	43,5	1,865	81,37	2,081	83,81	2,467	98,37	3.116	101,17	1,50%
Sungai Sembilan	1,571	94,7	614	36,4	1,255	72,71	1,65	83,08	1,894	90,45	2.792	96,88	0,46%
Medang Kampai	595	90,8	302	45,3	580	85,17	646	80,55	834	98,58	1.021	111,34	4,16%
Kota Dumai	13,615	96,3	6,191	43	9,819	66,74	12,924	85,94	14,382	93,66	24.311	100,55	0,87%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025

22. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas mempunyai fungsi antara lain:

- Pusat pembangunan berwawasan kesehatan
- Pusat pemberdayaan masyarakat
- Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer
- Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer

Sarana bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada yang merupakan bangunan hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena adanya pemekaran Kota Dumai, pada umumnya sudah berumur tua dan kondisinya sudah mulai rusak. Seluruh kelurahan di Kota Dumai telah memiliki poskeskel, namun masih ada sebanyak 9 poskeskel lagi yang belum memiliki bangunan sendiri (masih menumpang/menyewa). Karena minimnya anggaran di Dinas Kesehatan untuk melakukan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya termasuk poskeskel mengakibatkan tidak semua puskesmas dan jaringannya bisa dilakukan rehabilitasi secara maksimal. Dari 10 puskesmas, 12 puskesmas pembantu dan 24 poskeskel

yang ada pada umumnya kondisinya rusak ringan (di wilayah kerja puskesmas perkotaan seperti wilayah kerja puskesmas Dumai Kota, Dumai Barat, Jaya Mukti, Bumi Ayu, Purnama dan Bukit Kapur), sedang maupun berat (di wilayah kerja puskesmas pedesaan seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit Kayu Kapur dan Bukit Timah). Jika dilihat dari sebarannya dari 10 puskesmas yang ada 3 puskesmas yang rawat inap yaitu puskesmas Bukit Kapur dengan 10 tempat tidur, Sungai Sembilan 11 tempat tidur, dan Medang Kampai 10 tempat tidur.

Tabel 2. 73 Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2024

Kecamatan	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur
Dumai Timur	1	0	0
Dumai Barat	1	0	0
	1	0	0
Bukit Kapur	0	1	10
	1	0	0
Sungai Sembilan	0	1	11
Medang Kampai	0	1	10
Dumai Kota	1	0	0
Dumai Selatan	1	0	0
	1	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan, Kota Dumai Dalam Angka, Tahun 2025

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, cakupan pelayanan puskesmas sampai tahun 2024 belum menjangkau seluruh Kecamatan di Kota Dumai. Adapun perkembangan jumlah puskesmas dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai sudah mencapai standar per 100.000 orang penduduk. Tahun 2020 rasio puskesmas 3,16:100.000 artinya ada 3 puskesmas untuk 100.000 orang penduduk. Namun pada tahun 2024 turun menjadi rasio 2,91. Adapun informasi tersebut dapat dilihat dari Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 74 Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Dumai	Jumlah Puskesmas	Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk
2020	316.782	10	3,16
2021	323.452	10	3,09
2022	331.832	10	3,01
2023	338.064	10	2,96
2024	343.597	10	2,91

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Cakupan efektif adalah sebagian dari manfaat kesehatan potensial, yang lebih kepada sistem kesehatan yang sesungguhnya diterima dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas puskesmas yang tersedia. Pelayanan yang berkualitas harus mempertimbangkan beberapa aspek dimensi jumlah kualitas sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya *safety*/keamanan, *patient focus* (Pelayanan yang berfokus pada pasien), *Technical competence* (Kompetensi teknis yang di miliki oleh pemberi layanan kesehatan). Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari tahun 2020 sebanyak 13 pustu menjadi 12 pustu pada tahun 2024. Cakupan Puskesmas Pembantu seperti yang terlihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2. 75 Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai
Tahun 2020-2024**

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Puskesmas	10	10	10	10	10	0,00
Jumlah Puskesmas Pembantu	13	12	12	12	12	-1,92
Jumlah Seluruh Kecamatan	7	7	7	7	7	0,00
Rasio Puskesmas Pembantu	1,86	1,71	1,71	1,71	1,17	-1,92

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025

23. Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,

- Semua puskesmas harus memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam, kondisi saat ini baru 4 puskesmas di 4 Kecamatan yang memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam yaitu: puskesmas Medang Kampai, Sungai Sembilan, Bukit Kapur Dan Dumai Barat.
- Puskesmas wajib memiliki kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana, kondisi saat ini di Kota Dumai rata-rata puskesmas baru memiliki $\pm$ 45% dari 100% kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana.

Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis dan terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai. Kondisi di atas menyebabkan petugas kesehatan sulit dalam menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan masyarakat pun sulit mengakses sarana pelayanan kesehatan.

Dengan kondisi wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan yang luas dan juga memiliki daerah sulit dijangkau, serta kondisi jalan dan infrastruktur lainnya yang belum memadai mempengaruhi akses masyarakat yang perlu mendapatkan pelayanan rujukan ke RSUD Kota Dumai khususnya pasien gawat darurat atau rujukan kasus maternal neonatal resti dan komplikasi. Meskipun ada tersedia puskesmas keliling air (*speedboat*), namun karena jumlahnya hanya 1 unit dan muatannya juga terbatas, maka belum bisa melayani seluruh pasien rujukan khususnya yang berada di daerah sulit. Tidak jarang kasus kematian pasien rujukan terjadi di perjalanan sebelum tiba di rumah sakit karena medan yang sulit sehingga jarak tempuh menjadi lama.

Di samping itu, masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Misalnya, masih ada puskesmas yang belum memiliki IPAL, generator set (Genset), sarana air bersih (SAB) seperti sumur bor dalam. Masih ada puskesmas yang tidak memiliki ambulans padahal seluruh puskesmas telah mempunyai pelayanan kegawatdaruratan (UGD), sedangkan puskesmas yang memiliki ambulans kondisinya sudah mulai rusak.

Tabel 2. 76 Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2024

No	Lokasi	Jenis	Tahun Pengadaan
A	Pengadaan IPL		
1	Laboratorium Dinas Kesehatan	IPAL	2015
2	Puskesmas Bukit Kapur	IPAL MRC 10	2016

No	Lokasi	Jenis	Tahun Pengadaan
3	Puskesmas Medang Kampai	IPAL MRC 10	2016
4	Puskesmas Sungai Sembilan	IPAL MRC 10	2016
5	Puskesmas Dumai Kota	IPAL BARTEC	2017
6	Puskesmas Jayamukti	IPAL BARTEC	2017
7	Puskesmas Dumai Barat	IPAL BARTEC	2017
8	Puskesmas Bukit Timah	IPAL Bio Wash 5m3	2020
9	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	IPAL FLASH TIPE ECO 1 5M3	2021
10	Puskesmas Purnama	IPAL FLASH TIPE ECO 3 5M3	2021
B	Pengadaan IPL SW 100		
1	Puskesmas Medang Kampai	Steril Wave 100	2019
2	Puskesmas Purnama	Steril Wave 100	2019
C	Pengadaan IPL		
1	Laboratorium	IPAL FLASH TIPE ECO 3 3-10M3	2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025

Ketersediaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan sampah medis (SW 100) Kota Dumai statis pada tahun 2023. Seluruh puskesmas sudah memiliki IPAL termasuk laboratorium Kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas A.

Meskipun 2 dari 10 puskesmas se-Kota Dumai telah memiliki alat pengolah sampah medis yakni SW 100, permasalahan pengelolaan sampah medis baik di puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan mandiri di Kota Dumai masih menjadi kendala utama karena belum tersedia di Kota Dumai. Padahal permasalahan pengelolaan sampah medis merupakan salah satu prioritas Nasional.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan hampir miskin tahun 2023 sebesar 151.547 orang khusus jaminan untuk masyarakat miskin berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jamkesmas dan Jamkesda ini merupakan jaminan kesehatan yang sama-sama diperuntukkan bagi warga miskin. Namun, ruang lingkup berbeda. JAMKESMAS adalah program yang ruang lingkupnya lebih luas yang diperuntukkan untuk warga miskin di seluruh Indonesia. Sesuai namanya, Jamkesda ini diberikan kepada warga miskin oleh pemerintah daerah suatu Kabupaten atau Provinsi.

Dari 10 puskesmas hanya puskesmas Dumai Barat yang belum memiliki genset. Ada 4 puskesmas yang sudah memiliki genset tapi belum memiliki rumah genset yakni puskesmas Bumi Ayu, puskesmas Bukit Timah, puskesmas Purnama dan puskesmas Bukit Kayu Kapur. Selain itu ada 2 (dua) puskesmas yang belum memiliki sumur bor dalam yakni puskesmas Bumi Ayu dan puskesmas Bukit Kayu Kapur.

Tabel 2. 77 Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam Tahun 2024

No	Nama Puskesmas	Jenis Sarana		Keterangan
		Genset + Rumah	Sumur Bor Dalam	
1.	Dumai Kota	2017/2018	2017	
2.	Dumai Barat	-	2017	Sumur bor tidak berfungsi
3.	Sungai Sembilan	2017/2019	2017	Sumur bor tidak berfungsi
	Sungai Sembilan		2021	
4.	Bukit Kapur	2017/2019	2017	Sumur bor tidak
	Bukit Kapur		2022	
5.	Medang Kampai	2017/2019	2017	Sumur bor tidak berfungsi
	Medang Kampai		2021	
6.	Jaya Mukti	2017/2019	2017	
7.	Bumi Ayu	2021	-	Tanpa rumah genset
8.	Bukit Timah	2021	2019	Sumur bor sudah dipernaiki tahun 2022. Tanpa rumah genset
9.	Purnama	2021	2019	Tanpa rumah genset
10.	Bukit Kayu Kapur	2021	-	Tanpa rumah genset

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025

*Data Tahun 2022

24. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke Kabupaten/Kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi akan meningkatkan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk berisiko. Adanya peningkatan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk berisiko dari Tahun 2021 (0,011%). Tahun 2022 (0,093%) dan pada tahun 2023 jumlah kasus HIV di Kota Dumai secara kumulatif ada 74 kasus dengan prevalensi *rate* 0,022% terhadap penduduk berisiko HIV di Kota Dumai. Jumlah remaja usia 15-24 tahun yg telah

mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS di Kota Dumai sejak tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023 secara berurutan berjumlah 587 jiwa, 1.162 jiwa dan 1.118 jiwa . pada tahun 2023 prevalensi HIV di Kota Dumai 0,02% dengan jumlah kasus HIV 74 penderita dari estimasi 7.400 penduduk yang berisiko.

Kota Dumai merupakan daerah berisiko malaria, merupakan ciri khas daerah tropis dengan hutan bakau, dan letak geografis Kota Dumai yang berbatasan dengan daerah endemis malaria yaitu Kabupaten Rohil dan Kabupaten Bengkalis. Walaupun Kota Dumai sudah eliminasi malaria namun tetap dilakukan penguatan surveilans agar tidak terjadi KLB. Angka kesakitan malaria Kota Dumai Tahun 2023 0,015 per 1000 penduduk dari target 1/1000 penduduk, dengan jumlah kasus 5 penderita malaria.

Permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai yang menjadi perhatian setiap tahunnya adalah penyakit DBD, yang merupakan penyakit potensial terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa). Penyakit DBD sering menyerang anak – anak dan sering menyebabkan kematian. Angka kesakitan demam berdarah dengue pada tahun 2023 mengalami peningkatan kasus yang sangat signifikan ada 664 kasus dengan *incident rate* (angka kesakitan sebesar 196,41/100.000) dari 186 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan PE DBD & lavasidasi selektif untuk 664 kasus dengan melakukan Penyemprotan/ *fogging* sarang nyamuk.

Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai, namun kasus DBD belum bisa ditekan secara maksimal. Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti perubahan cuaca yang ekstrem yang berakibat adanya banjir, tingkat mobilitas penduduk masih tinggi, belum tersedianya sarana pembuangan air limbah (SPAL) dan sarana pembuangan sampah yang memenuhi standar dan $\pm 80\%$ penduduk Kota Dumai masih menggunakan bak/drum sebagai tempat penampungan air, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Di samping itu, dampak dari *global warming* juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari

hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD. Kondisi ini menjadikan Kota Dumai sebagai daerah endemis penyakit Demam Berdarah dan bila tidak dilakukan upaya-upaya secara intensif dapat terjadi peningkatan kasus dan potensial menimbulkan KLB.

Upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus. Selain itu perlu juga didukung oleh ketersediaan peralatan *fogging* yang cukup dan layak. Saat ini peralatan *fogging* yang tersedia jumlahnya terbatas dan kondisinya sudah banyak yang rusak karena terlalu sering digunakan.

Penyakit TB paru merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Menurut data WHO pada 2015, Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia terkait masalah tuberkulosis Dengan kasus terbanyak di negara India, kemudian diikuti oleh Indonesia, Tiongkok, Filipina, Pakistan, Nigeria dan Afrika Selatan.

Permasalahan penyakit TB di Kota Dumai makin kompleks, karena masih banyak penyakit TB yang belum terdeteksi di masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami gejala TB dan juga relevansi terhadap risiko terkena TB dan semakin meningkatnya kasus TB yang resistan (MDR *Multy Drug Resistance*). Pada tahun 2023 Kasus penemuan TB di Kota Dumai yaitu ada 904 kasus yang ditemukan di Kota Dumai, untuk diobati sehingga dapat memutuskan rantai penularan di Kota Dumai. Pada tahun 2023 angka kesembuhan TB Paru sebesar 90,83% dari 904 kasus TB BTA (+) yg mengalami kesembuhan ada 812 kasus.

Penyebab diare merupakan penyakit berbasis lingkungan, yang merupakan permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai. Diare dapat terjadi karena keracunan makanan, infeksi kuman, dan stres. Angka kesakitan diare semua umur di Kota Dumai selama tahun 2023 sebanyak 3.180 penderita atau IR 9,41/1000.

Gaya hidup sehat bisa mencegah hadirnya berbagai penyakit tidak menular. Hipertensi dan Diabetes Melitus. Pada tahun 2023 Hipertensi tercatat 2.280 Penderita (0,67%) dan Diabetes Melitus tercatat 758 Penderita (0,22%) perlu menjadi perhatian karena jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi komplikasi lebih berat yang menyebabkan kematian dan beban biaya pengobatan yang sangat besar. Berdasarkan penyebab kematian di Kota Dumai tahun 2023, pada umumnya penyebab kematian didominasi oleh Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Diabetes Melitus, Asma, Kecelakaan, Stroke, Hipertensi dan kanker. Penyakit Tidak Menular (PTM) umumnya dipengaruhi oleh keadaan demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya seperti meningkatnya umur harapan hidup, adanya kondisi lingkungan yang merugikan kesehatan seperti pencemaran udara dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta makin tingginya paparan faktor risiko seperti merokok, pola aktivitas fisik (kurang olah raga), pola makan yang tinggi lemak dan rendah serat. Sebagian besar penderita tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk saat ini perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, perlu mendapatkan layanan cepat. Pada tahun 2023 Kota Dumai melakukan pelayanan kesehatan jiwa 481 (97,60%). *Screening*, pemeriksaan leher rahim pada tahun 2023 dilaksanakan pada 402 (0,85%) dari sasaran 47.244 wanita kelompok usia reproduktif 30 – 50 tahun dengan IVA positif sebanyak 21 kasus (5,2%) dan terdapat tumor 1 kasus (0,3%).

Selama satu dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Kota Dumai sedang mengalami *triple burden* penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit-penyakit Tidak Menular (PTM) mulai mendominasi pola penyakit rawat jalan terbesar baik di rumah sakit maupun puskesmas seperti penyakit Hipertensi, Diabetes Melitus, Gastritis, dan penyakit jantung. Sedangkan penyakit menular baik itu penyakit menular berbasis lingkungan seperti DBD, Malaria, TB Paru dan penyakit menular seksual seperti HIV AIDS masih tetap merupakan permasalahan kesehatan utama di Kota Dumai. Di samping itu penyakit *neglected diseases* seperti kusta dan filariasis masih terus dilakukan pengendalian dan pencegahan. Angka kesakitan dan kematian yang

disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal sudah tidak ditemukan lagi kecuali campak.

25. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Persentase rumah tangga yang mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meningkat, namun pencapaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan. Salah satu indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang pencapaiannya rendah adalah perilaku merokok. Konsumsi rokok meningkat secara pesat dari tahun ke tahun dan saat ini Indonesia merupakan negara nomor 3 (tiga) dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan III (bulan September) tahun 2015 Provinsi Riau, pada kelompok makanan, pengeluaran untuk tembakau dan sirih menempati urutan ke tiga tertinggi setelah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi termasuk minuman beralkohol, dan pengeluaran untuk padi-padian. Ini menunjukkan bahwa konsumsi rokok telah sampai pada situasi yang mengkhawatirkan dan merupakan epidemi yang mengancam terutama di bidang kesehatan karena menyebabkan penyakit jantung dan kanker yang dapat berujung pada kematian. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan kesehatan perokok dan orang lain yang terpapar asap rokok, tetapi mengancam ekonomi keluarga masyarakat miskin. Ironisnya, pelaku konsumsi rokok tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada remaja dan anak sekolah. Hal ini sebagai dampak dari maraknya iklan di media penyiaran dan media luar ruang serta pemberian sponsor oleh industri tembakau. Berbagai upaya untuk pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan di Kota Dumai telah dilakukan salah satunya melalui penetapan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 11 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Dumai, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Meskipun Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 tentang Nomor 7 Tahun 2011.

Pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok telah ditetapkan, namun masih banyak dijumpai orang yang merokok di angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang lainnya yang notabene telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Ini menunjukkan kebijakan pengendalian dampak konsumsi rokok belum didukung oleh semua pihak. Oleh sebab itu, upaya pengendalian dampak konsumsi rokok harus dilaksanakan secara komprehensif sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) lainnya yang pencapaiannya juga rendah adalah perilaku memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Salah satu penyebab masih tingginya angka kesakitan malaria dan DBD adalah karena masih rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Padahal upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD dan Malaria adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai fokus pada penurunan tingkat kematian ibu dan bayi serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai, data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 78 Perkembangan Penerima Batuan Iuran (PBI) dari APBD Kota Dumai dan APBN Tahun 2020-2024

Sumber Dana	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
APBD Kota Dumai	84.057	89.238	108.456	110.015	117.317	8,69
APBN	74.766	75.857	85.175	103.498	100.881	7,78
Jumlah	158.823	165.095	196.631	213.513	218.198	8,26

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025

Data perkembangan penerimaan bantuan iuran dari APBD Kota Dumai dan APBN selama periode 2020–2024 menunjukkan tren

peningkatan yang konsisten, baik dari sisi nominal maupun laju pertumbuhan. Bantuan dari APBD Kota Dumai meningkat dari Rp84,06 miliar pada 2020 menjadi Rp117,32 miliar pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,69% per tahun. Kenaikan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam mendukung pembiayaan layanan dasar bagi masyarakat, khususnya dalam bidang jaminan sosial dan kesehatan. Meskipun kenaikannya moderat, kontribusi APBD tetap penting karena mencerminkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program perlindungan sosial secara langsung.

Sementara itu, bantuan iuran dari APBN menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu 7,78% per tahun, dengan peningkatan dari Rp74,77 miliar pada 2020 menjadi Rp100,88 miliar pada 2024. Peningkatan yang lebih besar ini mencerminkan adanya dukungan pemerintah pusat yang lebih intensif, kemungkinan sebagai bagian dari upaya perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau peningkatan alokasi bantuan sosial nasional di daerah-daerah.

Secara total, jumlah penerimaan bantuan iuran meningkat dari Rp158,82 miliar pada 2020 menjadi Rp218,20 miliar pada 2024, dengan laju pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 8,26%. Tren ini menunjukkan adanya penguatan kolaborasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam membiayai program-program kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan ini juga harus diimbangi dengan evaluasi efektivitas pemanfaatan dana bantuan iuran, agar benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan, serta berdampak langsung terhadap peningkatan akses layanan dasar seperti kesehatan dan jaminan sosial. Pemerintah Kota Dumai juga perlu menjaga kesinambungan fiskal agar kontribusi APBD tetap proporsional dan berkelanjutan.

26. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan

Walaupun ketersediaan obat dan vaksin cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya masih belum sesuai standar. Penggunaan obat generik sudah cukup tinggi, tetapi penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh masih rendahnya penerapan formularium dan pedoman penggunaan obat secara rasional. Di lain pihak,

penduduk yang mengetahui tentang seluk-beluk dan manfaat obat generik, masih sangat sedikit. Pengetahuan masyarakat tentang obat secara umum juga masih belum baik.

Berdasarkan Laporan Indikator Peresepan di Puskesmas Tahun 2022 ditemukan beberapa puskesmas belum menggunakan obat secara rasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan obat-obatan antibiotik yang tinggi pada kasus ISPA Non Pneumonia masih di bawah angka batas rasional (20%). Demikian juga penggunaan obat-obatan antibiotik yang tinggi pada kasus Diare Non Spesifik di puskesmas Jaya Mukti (15,39%) sudah melebihi angka batas rasional (8%). Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada kegiatan pengawasan obat dan makanan:

a. Apotek

Ditemukannya tidak tertibnya pengadministrasian kartu stok obat, ditemukannya penyimpanan obat yang bercampur dengan produk bukan obat di dalam lemari pendingin, ditemukannya penyimpanan obat tidak dengan wadah asli, dan ditemukannya penjualan produk jamu tanpa izin edar POM. Masih ada ditemukan yang tidak memiliki apoteker penanggung jawab yakni 1 apotek dari 41 apotek yang ada.

b. Toko Obat

Penemuan paling banyak adalah toko obat tidak memiliki izin atau izin toko obat yang sudah mati dan belum diperpanjang, tidak tertibnya pengadministrasian surat pesanan dan faktur pembelian obat, ditemukannya produk obat yang sudah kadaluarsa, ditemukannya penjualan obat keras (obat daftar G), dan ditemukannya penjualan produk jamu dan kosmetik tanpa izin edar POM. Masih banyak ditemukan toko obat yang tidak memiliki Asisten Apoteker penanggung jawab yakni sebanyak 22 toko obat dari 30 toko obat yang ada.

c. Toko Makanan dan Minuman

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan paling banyak adalah kurangnya kebersihan toko dan kerapian penataan/penyusunan barang sehingga terlihat berantakan yang bisa mempengaruhi mutu produk, ditemukannya produk pangan luar negeri tanpa izin edar POM, ditemukannya produk pangan rumah tangga tanpa izin edar IRTP, ditemukannya produk berbahan kimia berdekatan dengan produk

makanan, ditemukannya penjualan obat berlogo biru, ditemukannya produk pangan yang rusak dan kadaluarsa, ditemukannya produk pangan *frozen* menggunakan izin IRTP dan ditemukannya penjualan kosmetik tanpa izin edar POM. Pada tahun 2019, jumlah toko makanan minuman yang ada di Kota Dumai sebanyak 198 sarana.

d. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan paling banyak adalah IRTP tidak memiliki kelengkapan dokumen produksi seperti tidak mencatat jumlah bahan yang digunakan, jumlah yang produksi, jumlah yang diedarkan sehingga tidak bisa menelusuri bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; ruang produksi yang sempit dan kebanyakan bergabung dengan dapur untuk memasak kebutuhan dibersihkan; tidak tersedianya sarana pembersihan/pencucian sesuai standar.

Selain itu, mutu sarana produksi makanan umumnya masih belum baik, akibat kurang efektifnya pengawasan dan pembinaan. Masih ada ditemukan IRTP dan jajanan anak sekolah yang masih menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam proses pengolahan makanan dan minumannya seperti formalin, boraks dan bahan pewarna berbahaya. Pada tahun 2019, jumlah IRTP yang ada di Kota Dumai sebanyak 401 sarana.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Rata-rata Lama Sekolah

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2020-2024 Kota Dumai memiliki tren meningkat. Adapun peningkatan angka rata-rata lama sekolah Kota Dumai selama kurun waktu tersebut yaitu 0,87% per tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di Provinsi Riau maka rata-rata lama sekolah Kota Dumai lebih tinggi, tetapi jika dibandingkan dengan nasional rata-rata lama sekolah di Kota Dumai lebih rendah. Hal ini mengindikasikan peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai salah satu upaya prioritas pembangunan sumber daya manusia di Kota Dumai ke depannya akan terus ditingkatkan.

Meskipun angka RLS Kota Dumai lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Riau, namun masih berada di bawah angka nasional, yang mengindikasikan bahwa kualitas dan akses pendidikan lanjutan di Kota

Dumai masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dumai memiliki fondasi pendidikan dasar yang relatif baik, tetapi belum optimal dalam mendorong partisipasi pendidikan di jenjang menengah dan tinggi. Rendahnya laju pertumbuhan ini juga menjadi refleksi bahwa upaya pembangunan sumber daya manusia di Kota Dumai perlu lebih terarah dan intensif, melalui penguatan akses pendidikan, peningkatan fasilitas dan mutu sekolah, serta perluasan program pendidikan vokasi dan beasiswa, agar dapat mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing masyarakatnya secara berkelanjutan.

Tabel 2. 79 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kota Dumai	10,07	10,14	10,15	10,16	10,29	0,54
Provinsi Riau	9,14	9,19	9,22	9,32	9,43	0,78
Indonesia	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85	1,07

Sumber: BPS, 2025

2. Harapan Lama Sekolah

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2020-2024 Kota Dumai memiliki tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,38% per tahun. Jika dibandingkan terhadap angka harapan lama sekolah Provinsi Riau selama kurun waktu 2020-2024 HLS Kota Dumai berada di bawah HLS Provinsi Riau dan HLS nasional. Kemudian mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 HLS Kota Dumai lebih tinggi dari Provinsi Riau dan Nasional. Hal ini mengindikasikan Pembangunan system Pendidikan di Kota Dumai semakin membaik. Namun, di tahun 2024 HLS Kota Dumai mengalami peningkatan yang sedikit dan kembali berada di bawah HLS Provinsi Riau.

Kondisi ini mencerminkan bahwa akses dan partisipasi pendidikan di Kota Dumai tergolong baik dan berada di atas rata-rata nasional, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menempuh pendidikan hingga tingkat menengah atas. Namun demikian, laju pertumbuhannya yang lebih rendah dibandingkan provinsi maupun nasional menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan mulai melambat, dan bisa jadi sudah mendekati titik jenuh, terutama pada kelompok usia sekolah dasar dan menengah.

Hal ini mengindikasikan bahwa ke depan, Kota Dumai perlu berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan perluasan akses ke jenjang pendidikan tinggi, agar tidak hanya berhenti pada pencapaian kuantitatif, tetapi juga memastikan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang lebih kompetitif. Penguatan pendidikan vokasi, pengurangan angka putus sekolah pada remaja, serta dorongan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan RLS ke arah yang lebih signifikan.

Tabel 2. 80 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kota Dumai	13,12	13,31	13,32	13,33	13,35	0,44
Provinsi Riau	13,3	13,28	13,29	13,3	13,42	0,22
Indonesia	12,98	13,08	13,1	13,15	13,21	0,44

Sumber: BPS, 2025

3. Angka Literasi

Literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis (Abidin, 2015). Kern (2000) mendefinisikan istilah literasi sebagai penggunaan praktik sosial, dan historis, budaya yang berpusat pada penciptaan dan interpretasi makna melalui teks. Literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan. Tingkatan literasi yang berkembang pada masa sekarang ini yaitu tingkatan literasi yang pertama adalah kemampuan aksesibilitas terhadap sumber-sumber bahan bacaan terpercaya, terlengkap, terkini. Kemudian tingkatan literasi yang kedua adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Dalam konteks ini pemahaman apa yang tersirat didapat melalui proses membaca. Tingkat literasi yang ketiga, literasi adalah kemampuan mengemukakan ide atau gagasan baru, inovasi baru, kreativitas baru hingga memiliki kemampuan menganalisis informasi. Sedangkan untuk tingkat literasi yang tertinggi adalah kemampuan menghasilkan barang dan jasa bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global.

Tabel 2. 81 Rata-rata Kemampuan Literasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2021-2024

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2021	2022	2023	2024	
1	SD	Indeks	50,02	55,97	61,78	63,27	8,15
2	SMP	Indeks	63,38	66,65	72,12	74,65	5,61

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Tahun 2025

Rata-rata indeks kemampuan literasi jenjang pendidikan SD di Kota Dumai mengalami peningkatan sebesar 8,15% per tahun dari 50,02 pada tahun 2021 meningkat menjadi 63,27 tahun 2024. Pada jenjang SMP indeks kemampuan literasi di Kota Dumai juga mengalami peningkatan dari 63,38 tahun 2021 naik menjadi 74,65 di tahun 2024. Jika dilihat dari pertumbuhannya indeks literasi jenjang SMP lebih rendah yaitu 5,61% per tahun, namun indeks literasi jenjang SMP lebih tinggi dibandingkan jenjang SD. Sedangkan sebaran capaian kemampuan literasi rata-rata jenjang pendidikan SD dan SMP/PKBM tahun 2023 dengan capaian baik sebesar 47,84%, capaian sedang sebesar 48,43%, dan capaian kurang sebesar 3,73%. Sedangkan untuk tahun 2024 capaian baik sebesar 60,46%, capaian sedang sebesar 33,51%, dan capaian kurang sebesar 6,02%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2. 82 Persentase Kemampuan Literasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kota Dumai Tahun 2023-2024

Indikator	Satuan	2023			2024*		
		Baik	Sedang	Kurang	Baik	Sedang	Kurang
SD	%	44,07%	51,69%	4,24%	67,80%	27,97%	4,24%
SMP/ PKBM	%	51,61%	45,16%	3,23%	53,13%	39,06%	7,81%
Rata-rata	%	47,84%	48,43%	3,73%	60,46%	33,51%	6,02%

Sumber: Rapor Pendidikan Kota Dumai, Kemendikbud 2024 (data diolah)

Keterangan * : Data Pemutakhiran Juli 2024

4. Angka Numerasi

Berhitung adalah pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam berbagai situasi. Ini melibatkan pengakuan dan pemahaman peran matematika di dunia dan memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika secara sengaja. Angka, pengukuran dan geometri, statistik dan probabilitas adalah aspek umum

dari pengalaman matematika kebanyakan orang dalam situasi pribadi, belajar, dan kerja sehari-hari. Yang tak kalah penting adalah peran penting yang dimainkan oleh aljabar, fungsi dan hubungan, logika, struktur matematika, dan bekerja secara matematis dalam pemahaman orang tentang dunia alam dan manusia, dan interaksi di antara mereka. Siswa dihadapkan pada pemahaman matematika yang semakin canggih dan halus, kelancaran, penalaran, pemodelan dan pemecahan masalah. Kemampuan ini memungkinkan siswa untuk menanggapi situasi akrab dan asing dengan menggunakan matematika untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah secara efisien. Sekarang juga ada bukti bagus bahwa bidang pengembangan lainnya seperti ketahanan dan ketekunan mendukung pencapaian dalam berhitung juga (VCAA, 2017).

Numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi dalam kehidupan sehari-hari, dan kemampuan untuk menginterpretasikan informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Kemampuan ini ditunjukkan dengan kenyamanan terhadap bilangan dan cakap menggunakan keterampilan matematika secara praktis memenuhi tuntutan kehidupan. Kemampuan ini juga merujuk pada apresiasi dan pemahaman informasi yang dinyatakan secara matematis, misalnya grafik, table dan bagan.

Tabel 2. 83 Rata-rata Kemampuan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kota Dumai Tahun 2021-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2021	2022	2023	2024	
SD	Indeks	33,9	40,95	46,25	53,24	16,24
SMP	Indeks	63,38	66,65	62,96	64,39	0,53

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Tahun 2025

Rata-rata indeks kemampuan numerasi jenjang pendidikan SD di Kota Dumai mengalami peningkatan sebesar 16,24% per tahun dari 33,90 pada tahun 2021 meningkat menjadi 53,24 tahun 2024. Pada jenjang SMP indeks kemampuan literasi di Kota Dumai sebaliknya mengalami penurunan dari 63,38 tahun 2021 turun menjadi 64,39 di tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 0,53% per tahun. Sedangkan sebaran capaian kemampuan numerasi rata-rata jenjang pendidikan SD dan SMP/PKBM tahun 2023 dengan capaian baik sebesar 16,20%, capaian sedang sebesar 39,82%, dan capaian kurang sebesar 43,99%. Sedangkan

untuk tahun 2024 capaian baik sebesar 37,75%, capaian sedang sebesar 49,15%, dan capaian kurang sebesar 13,10%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 84 Persentase Kemampuan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kota Dumai Tahun 2023-2024

Indikator	Satuan	2023			2024*		
		Baik	Sedang	Kurang	Baik	Sedang	Kurang
SD	%	19,49%	45,76%	34,75%	36,44%	48,31%	15,25%
SMP	%	12,90%	33,87%	53,23%	39,06%	50,00%	10,94%
Rata-rata	%	16,20%	39,82%	43,99%	37,75%	49,15%	13,10%

Sumber: Rapor Pendidikan Kota Dumai, Kemendikbud 2024 (data diolah)
 Keterangan * : Data Pemutakhiran Juli 2024

5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi atau kemampuan membaca dan menulis masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 menegaskan bahwa IPLM menjadi salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan.

Tabel 2. 85 Indeks Pembangunan Literasi Kota Dumai Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator	Tahun	
	2023	2024
Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,51	0,50
Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	0,23	0,31
Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	1,00	1,00
Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari	0,05	0,09
Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	1,00	1,00
Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	1,00	1,00
Jumlah anggota Perpustakaan	1,00	1,00
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	68,42	70,00

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Dumai menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Nilai IPLM tercatat sebesar 68,42 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 70,00 pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh beberapa indikator pendukung. Dari sisi pemerataan layanan perpustakaan, terjadi sedikit penurunan dari 0,51 pada tahun 2023 menjadi 0,50 di tahun 2024. Namun demikian, terdapat perbaikan pada indikator ketercukupan koleksi perpustakaan, yang meningkat signifikan dari 0,23 menjadi 0,31, sehingga mampu memperkuat ketersediaan bahan bacaan bagi masyarakat. Indikator rasio ketercukupan tenaga perpustakaan tetap berada pada angka 1,00, menunjukkan bahwa tenaga pengelola perpustakaan sudah sesuai standar. Begitu juga dengan indikator perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dan jumlah anggota perpustakaan, yang konsisten berada pada nilai 1,00 baik pada tahun 2023 maupun 2024.

Sementara itu, tingkat kunjungan masyarakat per hari mengalami peningkatan positif dari 0,05 pada 2023 menjadi 0,09 pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat sedikit penurunan pada pemerataan layanan, peningkatan pada indikator koleksi, kunjungan masyarakat, serta konsistensi indikator lainnya berkontribusi pada kenaikan nilai IPLM. Hal ini menandakan adanya perkembangan positif dalam pembangunan literasi masyarakat di Kota Dumai.

6. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar di Kota Dumai dari tahun 2019-2024 pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif dengan masing-masing pertumbuhan sebesar -1,33% per tahun dan 0,96% per tahun. Pada tahun 2024 APK Kota Dumai untuk jenjang SD/MI mengalami penurunan dari tahun 2022, tetapi APK jenjang SMP/MT mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi sebesar 92,08. Kondisi ini menggambarkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan Pendidikan masih perlu ditingkatkan.

Tren fluktuatif angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kota Dumai selama tahun 202–2024, dengan pertumbuhan

negatif -0,96% per tahun untuk SD/MI dan positif 0,64% per tahun untuk SMP/MTs, mencerminkan adanya ketimpangan dan tantangan dalam akses serta kesinambungan pendidikan dasar. Penurunan APK pada jenjang SD/MI, khususnya sejak tahun 2022, mengindikasikan adanya penurunan jumlah anak usia sekolah dasar yang terdaftar di sekolah, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perpindahan penduduk, pernikahan dini orang tua, kondisi ekonomi keluarga, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan sejak dini.

Sementara itu, peningkatan APK jenjang SMP/MTs hingga mencapai 92,08 pada 2024 menunjukkan adanya perbaikan akses pada jenjang menengah pertama, namun angka tersebut masih belum mencapai tingkat ideal 100%, yang berarti sebagian anak usia SMP masih belum mengakses pendidikan formal. Ketimpangan pertumbuhan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan di Kota Dumai belum merata dan keberlanjutan transisi antar tingkat pendidikan masih menghadapi kendala.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat intervensi pada dua sisi sekaligus: mendorong peningkatan akses masuk jenjang SD/MI, misalnya melalui penyisiran anak usia sekolah, program pendidikan inklusif, dan sosialisasi wajib belajar; serta meningkatkan retensi dan transisi siswa dari SD ke SMP melalui peningkatan mutu layanan, beasiswa pendidikan, dan penguatan peran orang tua dan komunitas dalam mendukung pendidikan anak. Dengan memperbaiki kesinambungan pendidikan dasar secara menyeluruh, Kota Dumai dapat meningkatkan kualitas dan partisipasi pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 86 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
APK SD/MI	%	108,86	107,65	107,04	106,41	103,19	-1,33
APK SMP/MTs	%	88,66	92,32	86,69	89,93	92,08	0,95

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025

7. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah.

Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah.

Tabel 2. 87 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
APM SD/MI/ Paket A	%	99	98,95	98,86	98,84	98,85	-0,04
APM SMP/MTs/Paket B	%	83,24	83,96	84,45	83,31	81,92	-0,40

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas, tren Perkembangan APM dari tahun 2020-2024 fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan yaitu -0,04% per tahun untuk APM SD/MI atau turun dari 99,00% tahun 2020 menjadi 98,85% tahun 2024. APM SMP/MTs juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan pertumbuhan sebesar -0,40% per tahun. Nilai APM SMP/MTs tahun 2020 sebesar 83,24% kemudian turun menjadi 83,92% pada tahun 2024. Berfluktuatifnya APM dipengaruhi oleh menurunnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP. Menurunnya angka melanjutkan sekolah dan kondisi ini harus dicermati oleh Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendidikan. Meskipun penurunan pada jenjang SD tampak kecil, namun penurunan yang lebih tajam di jenjang SMP mencerminkan tantangan serius dalam keberlanjutan pendidikan, terutama transisi dari pendidikan dasar ke menengah.

Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya angka putus sekolah setelah lulus SD, kondisi sosial ekonomi yang mendorong anak-anak untuk bekerja di usia dini, kurangnya ketersediaan sarana pendidikan menengah di wilayah tertentu, hingga minimnya dorongan keluarga atau lingkungan terhadap pentingnya pendidikan lanjutan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Dumai, khususnya Dinas Pendidikan, karena rendahnya APM tidak hanya mengindikasikan rendahnya keterlibatan anak dalam sistem pendidikan formal, tetapi juga berpotensi berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah

8. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin banyak jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Selain itu APS tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Dengan demikian naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Berdasarkan Kelompok usia 5-6 tahun terdapat adanya fluktuasi, meskipun sempat menurun akan tetapi kembali meningkat di tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 0,29%. Sementara itu, APS usia 7-12 tahun konsisten di angka yang sangat tinggi, mendekati 100%, menandakan hampir semua anak di kelompok usia ini bersekolah. Pertumbuhannya juga positif meski sangat kecil, hanya 0,03%. Kelompok usia 13-15 tahun mengalami penurunan partisipasi pada tahun 2022, namun menunjukkan pemulihan di tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, secara keseluruhan terjadi sedikit penurunan pertumbuhan sebesar 0,27%. Peningkatan paling mencolok terlihat pada APS usia 7-18 tahun (Kesetaraan). Angka partisipasi untuk program kesetaraan melonjak drastis dari 10,28% di tahun 2021 menjadi 37,26% di tahun 2024, dengan pertumbuhan yang sangat tinggi mencapai 53,61%. Ini menunjukkan peningkatan minat dan aksesibilitas yang signifikan terhadap pendidikan kesetaraan. Berikut disajikan tabel Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Tahun 2021-2024

Tabel 2. 88 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Tahun 2021-2024

Angka Patisipasi Sekolah (APS) Usia	Tahun				Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2021	2022	2023	2024	
5-6 Tahun	55,38	54,48	50,9	55,87	0,29
7-12 Tahun	99,53	98,86	99,85	99,63	0,03
13-15 Tahun	97,25	93,97	94,74	96,45	-0,27
7-18 Tahun (Kesetaraan)	10,28	13,43	27,96	37,26	53,61

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Olahan Rapor Pendidikan

9. Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah. Dengan data ini dapat dilihat jumlah siswa yang putus sekolah, selain itu yang paling utama adalah mencari penyebab mengapa angka putus sekolah naik dan turun Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), angka putus sekolah pada tahun 2020 sebesar 0,096%, dan menurun pada tahun menjadi 0,011%. Pada jenjang SMP juga demikian, pada tahun 2020 angka putus sekolah adalah sebesar 0,086%, dan menurun pada tahun 0,009%.

Kecenderungan naiknya dan turunnya angka putus sekolah dalam beberapa tahun untuk semua jenjang pendidikan di Kota Dumai menunjukkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius mengenai minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, atau kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan menurun. Mulai tahun 2017, data yang disajikan Badan Pusat Statistik adalah angka putus sekolah, yaitu proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jejang pendidikan sebagai berikut.

Tabel 2. 89 Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,096	0,422	2,18	2,33	0,011	-41,82
Angka Putus Sekolah SMP/MTS	%	0,086	0,393	4,17	4,44	0,009	-43,12

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2024

Beberapa kajian menunjukkan bahwa angka putus sekolah dapat setidaknya ada enam faktor penyebab terjadinya putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan dasar yaitu faktor ekonomi, minat untuk

bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang, fasilitas belajar yang kurang mendukung, faktor budaya dan lokasi atau letak sekolah (Burhannudin dalam Prihatin, 2011). Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

- a. Faktor ekonomi merupakan faktor pertama penyebab anak putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga si anak untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu, walaupun pemerintah telah mencanangkan Program Pendidikan Gratis dua belas tahun, namun belum berimplikasi secara maksimal terhadap penurunan jumlah anak putus sekolah.
- b. Kurang perhatian orang tua merupakan faktor kedua. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua si anak sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Persentase anak yang tidak dan putus sekolah karena rendahnya kurangnya perhatian orang tua.
- c. Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai merupakan faktor ketiga. Fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, misalnya perangkat (alat, bahan, dan media) pembelajaran yang kurang memadai, buku pelajaran kurang memadai, dan sebagainya. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat dipenuhi siswa dapat menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan putus sekolah.
- d. Minat anak untuk sekolah merupakan faktor keempat. Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh, fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Minat yang kurang dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan misalnya tingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah peranan lingkungan.

- e. Budaya merupakan faktor kelima yang terkait dengan kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Rendahnya kesadaran orang tua atau masyarakat akan pentingnya pendidikan. Perilaku masyarakat pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa bersekolah pun anak-anak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah, oleh karena di desa jumlah anak yang bersekolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan masa depan anaknya. Masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih usia sekolah untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah.

Lokasi atau letak sekolah merupakan faktor keenam yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh

10. Jumlah Ketersediaan Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sekolah sebagai lembaga pendidikan sosial, bisa disebut juga sebagai satu organisasi yaitu terikat kepada tata aturan formal, berprogram dan bertarget atau bersasaran yang jelas, serta memiliki struktur kepemimpinan dalam penyelenggaraan yang resmi. Pada akhirnya, fungsi sekolah terikat kepada sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Di kota Dumai jumlah sekolah pada tahun 2024 hampir semua tidak mengalami peningkatan. Pada jenjang pendidikan PAUD/TK dan jenjang SD/MI tidak mengalami peningkatan jumlah sekolah, tetapi pada jenjang SMP/MTs dan jenjang SMA/MA/SMK jumlah mengalami peningkatan 1 unit sekolah.

Berdasarkan data jumlah satuan pendidikan di Kota Dumai tahun 2023–2024, secara umum pertumbuhan jumlah sekolah terbilang sangat terbatas. Pada jenjang PAUD/TK dan SD/MI, tidak terjadi penambahan unit sama sekali, masing-masing tetap berjumlah 99 dan 111 unit. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan pada jenjang dasar dan anak usia dini belum mengalami ekspansi, meskipun beberapa kecamatan seperti Medang Kampai hanya memiliki 5 unit PAUD dan 8 unit SD, yang

berpotensi menimbulkan ketimpangan akses pendidikan. Pada jenjang SMP/MTs terjadi peningkatan dari 40 menjadi 42 unit, dengan penambahan di Kecamatan Bukit Kapur, Dumai Selatan, dan Dumai Timur, namun terjadi penurunan di Dumai Kota dari 4 menjadi 3 unit, yang perlu dicermati karena dapat mempengaruhi kapasitas layanan pendidikan di pusat kota. Sementara itu, jenjang SMA/MA/SMK hanya bertambah satu unit, yaitu di Kecamatan Bukit Kapur, menjadi total 16 unit di seluruh Kota Dumai. Jumlah ini masih tergolong sangat terbatas, mengingat sebagian besar kecamatan seperti Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Barat, dan Dumai Kota hanya memiliki satu unit sekolah menengah atas. Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan satuan pendidikan di Kota Dumai belum merata dan masih terpusat pada kecamatan-kecamatan tertentu, sehingga ke depan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai untuk memastikan pemerataan akses dan distribusi layanan pendidikan di seluruh wilayah.

Tabel 2. 90 Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Satuan	Jenjang Pendidikan							
			PAUD/TK		SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA/SMK	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Bukit Kapur	Unit	14	14	16	16	5	6	2	3
2	Medang Kampai	Unit	5	5	8	8	3	3	1	1
3	Sungai Sembilan	Unit	14	14	24	24	6	6	1	1
4	Dumai Barat	Unit	11	11	11	11	5	5	1	1
5	Dumai Selatan	Unit	16	16	16	16	10	11	5	5
6	Dumai Timur	Unit	27	27	28	28	7	8	4	4
7	Dumai Kota	Unit	12	12	8	8	4	3	1	1
	Kota Dumai	Unit	99	99	111	111	40	42	15	16

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, Tahun 2025

11. **Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4**

Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan mutu layanan pendidikan anak usia dini. Kualifikasi akademik yang memadai sangat berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam memberikan stimulasi, pembelajaran, dan pengasuhan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Oleh karena itu, peningkatan jumlah guru PAUD yang berpendidikan tinggi menjadi fokus utama dalam mendukung kualitas pendidikan dasar.

Tabel 2. 91 Proporsi Guru Paud dengan Kualifikasi S1/D4 Kota Dumai Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun				Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2021	2022	2023	2024	
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	47,96	50,00	49,18	48,44	0,33

Sumber: Surat Mendikdasmen, 2025 data diolah

12. Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah

Perkembangan Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar di Kota Dumai tahun 2020-2024 memiliki tren fluktuatif. Pada jenjang SD, rata-rata pertumbuhan per tahunnya adalah 28,8%. Pada Jenjang SMP, rata-rata pertumbuhan per tahunnya adalah 26,49%.

Perkembangan rasio siswa terhadap ruang kelas jenjang Pendidikan Dasar di Kota Dumai tahun 2020-2024 memiliki tren fluktuatif. Rata-rata pertumbuhan rasio siswa terhadap ruang kelas SD per tahunnya adalah -7,33%. Pada tahun 2024, rasio siswa terhadap ruang kelas jenjang SD adalah 1:23.Rata-rata pertumbuhan rasio siswa terhadap ruang kelas SMP per tahunnya adalah -7,13%. Pada tahun 2024 rasio siswa terhadap ruang kelas jenjang SMP adalah 1:22. Hal ini menandakan bahwa ruang kelas pada satuan pendidikan di Kota Dumai sudah mencukupi. Akan tetapi berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai pada Tahun 2025 masih terdapat 41 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama yang melaksanakan *double shift*. Berikut disajikan Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Siswa terhadap Ruang kelas di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Tabel 2. 92 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Siswa terhadap Ruang kelas di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Kegiatan	Satuan	Tahun					Pertumb uhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Gedung SD	Unit	107	108	108	113	110	0,69
Jumlah Penduduk Usia SD	Jiwa	114.105	122.815	118.895	127.213	42.609	-21,83
Rasio Ketersediaan SD	Indeks	9,38	8,79	9,08	8,88	25,82	28,80
Gedung SMP	Unit	37	38	38	41	42	3,22

Kegiatan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Penduduk Usia SMP	Jiwa	47.201	50.426	45.494	54.969	20.924	-18,40
Rasio Ketersediaan SMP	Rasio	7,84	7,54	8,35	7,46	20,07	26,49
Jumlah Siswa SD	Orang	38.416	38.456	38.054	38.442	38.564	0,10
Jumlah RK SD	Orang	1.234	1.062	1.481	1.639	1.680	8,02
Rasio Siswa/RK SD	Indeks	31,13	36	25,3	23,45	22,95	-7,33
Jumlah Siswa SMP	Orang	13.480	13.316	13.394	13.418	13.781	0,55
Jumlah RK SMP	Orang	454	354	517	542	624	8,28
Rasio Siswa/RK SMP	Indeks	29,69	38	25,9	24,76	22,08	-7,13

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025

13. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun merupakan perbandingan antara jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah penduduk per 10.000. Adapun perkembangan rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Dumai dari rentang waktu 2020-2024 terus mengalami peningkatan seperti yang tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2. 93 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	9.100	11.630	33.301	33.418	33.672	38,69
Jumlah Anggota Perpustakaan	90	97	253	6.716	7.400	201,13

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dan Kota Dumai Dalam Angka 2025

Data menunjukkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Dumai mengalami tren peningkatan signifikan setelah penurunan tajam pada 2020, yakni dari 9.100 pengunjung (2020) naik menjadi 33.672 pengunjung pada 2024. Hal ini mencerminkan adanya pemulihan dan peningkatan minat masyarakat terhadap layanan perpustakaan pasca pandemi.

Sementara itu, jumlah anggota perpustakaan mengalami lonjakan luar biasa, dari hanya 90 orang pada 2020 menjadi 7.400 orang pada 2024, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 201,13% per tahun. Peningkatan

ini menunjukkan keberhasilan dalam menarik minat masyarakat untuk terdaftar secara formal sebagai anggota, kemungkinan besar melalui inovasi digital, promosi aktif, atau integrasi layanan perpustakaan dengan platform pendidikan. Namun, meskipun jumlah anggota meningkat tajam, gap antara pertumbuhan anggota dan pengunjung menunjukkan bahwa banyak anggota yang belum aktif berkunjung atau memanfaatkan fasilitas perpustakaan secara langsung. Hal ini menjadi catatan penting bagi pengelola perpustakaan untuk tidak hanya fokus pada kuantitas keanggotaan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dan pemanfaatan fasilitas agar literasi masyarakat dapat tumbuh secara nyata dan merata.

14. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kota Dumai dari rentang waktu tahun 2020-2024 sebanyak 54.976, baik melalui pembelian buku oleh perpustakaan daerah sendiri maupun hibah buku ke perpustakaan daerah oleh pihak lain. Tetapi ada hibah buku langsung oleh pihak lain ke perpustakaan kelurahan maupun ke perpustakaan rutan. Pada tahun 2020 jumlah buku 53.557 dan pada tahun 2020 Dinas Perpustakaan mendapat penambahan buku berupa *e-book* yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus sebanyak 2.460 eksemplar sehingga jumlah buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai sebanyak 53.557 eksemplar. Kemudian pada tahun 2024 jumlah buku bertambah menjadi 54.976 eksemplar.

Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun ada perhatian terhadap penambahan bahan bacaan, upaya peningkatan kualitas dan kuantitas koleksi buku belum menjadi prioritas utama, padahal koleksi yang memadai dan relevan merupakan fondasi penting untuk membangun budaya literasi yang kuat. Oleh karena itu, ke depan, Pemerintah Kota Dumai perlu memperkuat kebijakan pengembangan koleksi berbasis kebutuhan pembaca, memperluas kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga penyumbang buku, serta memastikan bahwa seluruh koleksi — baik fisik maupun digital — dapat diakses secara merata dan terintegrasi dalam sistem layanan perpustakaan yang modern dan inklusif.

Tabel 2. 94 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	53.557	54.202	54.202	54.723	54.976	0,66
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	0	0	64,6	0	64,46	-0,11
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	0	61,87	68,42	70	6,37
Nilai Pengawasan Kearsipan	63,01	30,92	36,55	45,65	35,01	-13,66

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dan Kota Dumai Dalam Angka 2025

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

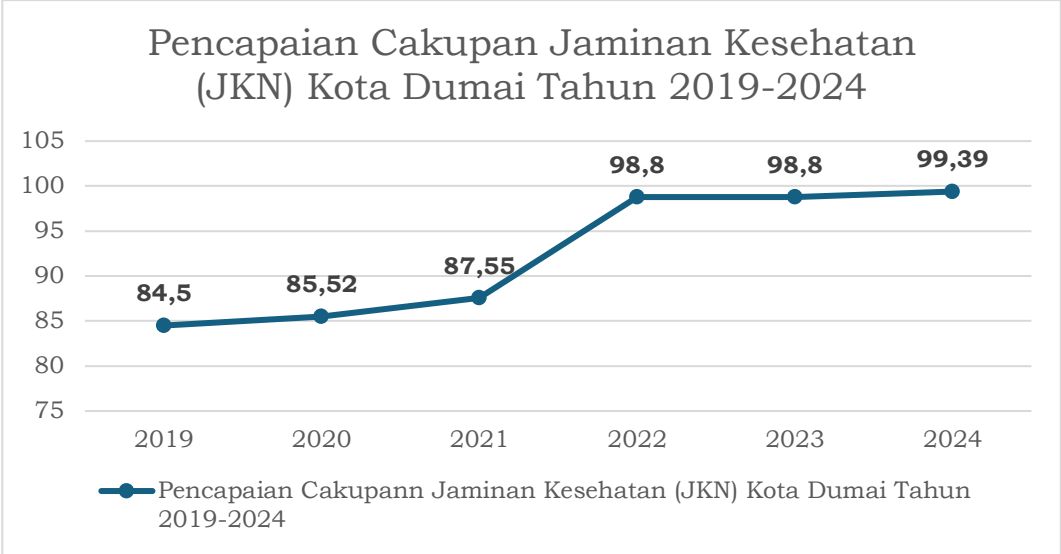
1. Jaminan Kesehatan

Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 218.198 orang yang terdiri dari Peserta PBI APBN sebanyak 100.881 orang dan peserta PBI APBD sebanyak 117.317 orang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai pada tahun 2024 yakni sebanyak 188.000 orang, maka telah terealisasi sebesar 116% yang artinya telah melebihi target dan tingkat pencapaiannya baik.

Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannya adalah bukan saja memenuhi kewajiban pemerintah tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu. Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Dumai telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rujukan di puskesmas-puskesmas se-Kota Dumai yakni sebanyak 117.860 pasien rawat jalan, sebanyak 611 pasien rawat inap dan sebanyak 5.728 pasien rujukan.

Pertumbuhan penduduk Kota Dumai ditandai dengan adanya *window opportunity* di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah

penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif. Jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2023 adalah 338.064 orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 2,11% per tahun berdasarkan hasil dari Badan Pusat Statistik Kota Dumai 2024, maka jumlah penduduk Kota Dumai diperkirakan akan meningkat pada tahun selanjutnya. Demikian juga masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin dan mendekati miskin bertambah, dan ini menyebabkan permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka. Tahun 2023 pemerintah baik Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat harus memberikan uang premium jaminan kesehatan sebanyak 151.547 orang miskin dan mendekati miskin.



Gambar 2. 34 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Tahun 2019-2024.

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024

2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kemiskinan dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami gangguan menderita gizi buruk, pengetahuan kesehatan kurang, perilaku kesehatan kurang, lingkungan pemukiman buruk, biaya kesehatan tidak tersedia. Sebaliknya kesehatan mempengaruhi kemiskinan. Derajat kesehatan dapat menekan kemiskinan karena dengan masyarakat yang sehat produktivitas kerja meningkat, pengeluaran berobat

rendah, investasi dan tabungan memadai, tingkat pendidikan maju, tingkat fertilitas dan kematian rendah, stabilitas ekonomi mantap.

Salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan milik pemerintah adalah BPJS kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS kesehatan terdiri dari dua kelompok peserta yaitu Penerima Bantuan Iuran dan bukan penerima bantuan iuran. Menurut undang-undang Penerima bantuan iuran (PBI) ditujukan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu. Pemerintah akan menanggung iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat dalam kelompok PBI tersebut. Dengan adanya program BPJS kesehatan, masyarakat miskin peserta BPJS kesehatan penerima bantuan iuran diharapkan akan lebih mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan derajat kesehatan masyarakat akan meningkat.

Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerja sama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai, Pada tahun 2024 terdapat 117.317 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Dumai dari target 188.000 peserta. Dengan kata lain, pada tahun 2024 sekitar 62,40% penduduk kurang mampu atau miskin di Kota Dumai telah menikmati layanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Dumai. Data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2. 95 Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Sumber Dana	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
APBD Kota Dumai	84.057	89.238	108.456	110.015	117.317	8,69
APBN	74.766	75.857	85.175	103.498	100.881	7,78
Jumlah	158.823	165.095	193.631	213.513	218.198	8,26

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025

Program Jaminan Kesehatan (Jamkesko) Kota Dumai dimulai sejak tahun 2009 dan terus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesko di Kota Dumai dikuatkan melalui Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III bagi penduduk Kota Dumai dan selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III selanjutnya diperbaharui Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Dumai bagi masyarakat Kota Dumai tahun 2019. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan jaminan kesehatan (JKN) di puskesmas, pembinaan pelayanan jaminan kesehatan ke puskesmas dan pembayaran belanja premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan iuran (PBI) dari APBN maupun APBD tidak diperuntukkan seluruh masyarakat. Kartu Indonesia Sehat dari APBN dan APBD diperuntukkan untuk warga miskin kurang mampu yang memiliki NIK bagi yang mampu dianjurkan untuk mengurus sesuai ketentuan, yakni bayar premi. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan verifikasi dan validasi data PBI JKN yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan data agar terwujudnya ketepatan sasaran pemakai PBI-JKN di Kota Dumai. Perubahan data dimaksud seperti meninggal, pindah keluar kota atau telah menjadi mampu sehingga kuota yang kosong dapat dialihkan ke masyarakat lain yang tidak mampu.

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, keberadaan kebudayaan daerah kembali mendapat perhatian dari pemerintah. Berdasarkan regulasi tersebut, secara eksplisit terlihat bahwa kebudayaan daerah yang ada di kota dan kabupaten menjadi dasar bagi perumusan kebudayaan daerah di tingkat provinsi dan selanjutnya menjadi dasar penting bagi perumusan strategi kebudayaan di tingkat nasional.

Berkenaan hal tersebut, kebudayaan daerah di Kota Dumai perlu diformulasikan sedemikian rupa ke dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). PPKD Kota Dumai merupakan dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan kebudayaan daerah yang dihadapi Kota Dumai dalam Upaya Pemajuan Kebudayaan beserta rekomendasinya. Adapun Data Objek Pemajuan Kebudayaan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2. 96 Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Dumai

No	Objek	Jenis	Keterangan
1,	Manuskrip	1. Surat Penebangan Hutan atau membuka lahan sekitar tahun 1900 2. Surat dari Sultan Kerajaan Siak 3. Penetapan Bulan Puasa	Ditemukan pada abad ke – 19
2,	Tradisi Lisan	1. Putri Tujuh 2. Misteri Goa Pelintung 3. Panglima Hitam 4. Bujang Manjo 5. Buah Bakau Belukap Jin 6. Asal Mula Lubuk Gaung	1. Berkembang 2. Berkembang 3. Berkembang 4. Berkembang 5. Berkembang 6. Berkembang
3,	Adat Istiadat	1. Meminang 2. Mengantar Tanda 3. Mengantar Belanja 4. Menegakkan Bangsal 5. Menggantung 6. Berandam 7. Berinai Curi 8. Akad Nikah 9. Tepuk Tepung Tawar Berarak Pengantin 10. Silat Pengantin 11. Pantun Pembuka 12. Duduk Bersanding 13. Makan Adab 14. Mandi Taman 15. Perkawinan Melayu 16. Perkawinan 17. Petang Megang 18. Semah Kampung	1. Berkembang 2. Berkembang 3. Berkembang 4. Berkembang 5. Berkembang 6. Berkembang 7. Berkembang 8. Berkembang 9. Berkembang 10. Berkembang 11. Berkembang 12. Berkembang 13. Berkembang 14. Berkembang 15. Berkembang 16. Berkembang 17. Berkembang 18. Kurang Berkembang
4,	Ritus	1. Cukur Rambut Anak 2. Mengantar Talam 3. Menujuh Hari (Tahlilan) 4. Penanggalan Pusat 5. Perayaan 6. Semah Laut	1. Berkembang 2. Berkembang 3. Berkembang 4. Berkembang 5. Berkembang 6. Berkembang
5,	Pengetahuan Tradisional	1. Pengobatan Tradisional Ada 46 jenis pengobatan di antaranya Tidak Nafsu makan, Mimisan, Masuk Angin, Panas Dalam, Sakit Kepala dan lain sebagainya 2. Busana Tradisional Teluk Balango, Cekak Musang, Kebaya Labuh, Gunting Cino, Baju Kurung 3. Jemput Semangat Membangkitkan Semangat	1. Kurang Berkembang 2. Berkembang 3. Berkembang

No	Objek	Jenis	Keterangan
		Makanan dan Minuman 4. Kurma, Kepurun, Hasidah, Kue Bingka, Laksamana Mengamuk, Air Mata Pengantin, Kue Bangkit	4. Berkembang
		1. Cangkul 2. Arit 3. Parang 4. Kapak 5. Tangguk 6. Lukah Tugal	Peralatan yang digunakan pada bidang Pertanian dan Perikanan
6,	Teknologi Tradisional	1. Sanggar Cik Sima, Sanggar Laksmana Melayu, Sri Kencana, Tuah Betong, Bunga Raya, Cik Minah Sayang, Tuah Pesisir, Engku Hamidah, Young Mude, Merak Seroja, Nyiur Gading, Bunga Keris, Siti Laut, Sri Pelintung, Sri Bintang, Teater Titik, Putri Pepuyu, Sri Mayang, Teater Biduk Bertuah, Teater Padepokan Bambu, Teater Bendera, 2. Mufti Edan, Alm Nurham Yahya, Abdul Hamid 3. Seni Musik Tradisional Akordion, Rebana, Beban, Kompong, Gambus, Marwas, Gendang Panjang 4. Karya Musik Tradisional Budak Tanjung Palas, Musik Lagu Putri Tujuh, Musik Lagu Laila Canggung 5. Seni Tari Putri Tujuh, Zapin Senarak, Joget, Mak Inang, Tari Langgam, Tari Olang-olang, Tari Kreasi Daerah Parit Hukum, Zapin Api Zapin Semarak 6. Seni Teater 7. Syair, Puisi, Monolog, Teater Bangsawan, Pertunjukan Teater	1. Sanggar Tari 2. Seniman Pencipta Lagu 3. Berkembang 4. Berkembang 5. Berkembang 6. Kurang Berkembang 7. Berkembang
7,	Seni	1. Melayu, Indonesia, Inggris, Minang, Bugis Batak	1. Berkembang Kurang
8,	Bahasa	1. Lulu Cina Buta, Bakiak, Congklak, Gasing, Estatak, Layang-layang, Tarik tambang, Tongkat Dingin, Guli, Patok Lele, Gala Panjang, Ban Senebu, Senangkup,	2. Berkembang
9,	Permainan Rakyat	1. Pencak Silat	
10,	Olahraga Tradisional		

Sumber: Dokumen PPKD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

2. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2020-2024 menunjukkan angka yang konstan. Pada tahun 2020 jumlah festival seni dan budaya berjumlah 5 kegiatan, begitu juga pada tahun 2024 jumlah festival seni dan budaya

berjumlah 5 kegiatan. Adapun bentuk dari penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahun 2020-2024 adalah panggung seni rakyat, festival lampu colok, festival layang dan gasing, festival masakan tradisional, dan malam resepsi kenegaraan. Ini membuktikan bahwa upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya yang diwujudkan melalui festival dan lomba mulai menumbuhkan minat dan antusiasme masyarakat dalam melestarikan kebudayaan melayu.

Tabel 2. 97 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	5	5	5	6	5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

3. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Selama 5 tahun, sudah 153 karya seni di Kota Dumai yang berbasis Melayu diinventarisasi dan direvitalisasi. Sesungguhnya potensi karya seni dan budaya Melayu yang sejatinya direvitalisasi masih sangat banyak. Basis budaya Melayu yang berada pada aliran sungai sebagai tempat peradaban budaya Melayu masa lalu harus menjadi sumber revitalisasi dan inventarisasi. Sungai besar harus menjadi fokus dalam pelestarian budaya melayu, terutama budaya lisan dan karya seni budaya Melayu lainnya. Hal ini mengingat generasi tua yang tahu persis tentang budaya lisan dan karya seni budaya Melayu sudah mulai berangsur-angsur termakan usia tua (Sumber: RPJMD Provinsi Riau 2019-2024).

Cagar Budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan prikehidupannya dilindungi oleh Undang-undang dari bahaya kepunahan. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya. Bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan kebudayaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan pendidikan agama atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pemerintah Kota Dumai sangat mendukung dengan objek cagar budaya. Dengan cara telah dikumpulkan data oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Dumai seperti : Makam Putri Tujuh, Makam Simpan, Makam Datuk Tabrani, Makam Pawang Lion, Keris Tikam Bayang, Tapak Harimau Sakti, Pedang Panjang, Batu Beranak.

4. Jumlah Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan

Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa belum semua fungsi tersebut dilaksanakan oleh perpustakaan. Fungsi rekreasi sering kali diabaikan oleh pengelola perpustakaan maupun badan yang menaunginya. Fungsi rekreasi di perpustakaan dapat mengacu pada semua hal dalam perpustakaan. Beberapa aspek yang diperlukan dalam mengoptimalkan fungsi rekreasi di perpustakaan antara lain: birokrasi, anggaran, SDM, serta manajemen yang bagus, persentase perimbangan jumlah koleksi, serta keterbatasan anggaran sehingga untuk membeli bahan bacaan ringan dan santai tidak tercukupi menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan fungsi rekreasi di perpustakaan. Perlu strategi khusus untuk menggaet masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pameran buku, *workshop*, pasar murah atau yang lainnya dengan berlandaskan fungsi rekreasi. Beberapa pengembangan berdasarkan pada konsep fungsi rekreasi di antaranya meliputi program *edu-tourism*, keberagaman layanan perpustakaan baik di dalam kegiatan utama perpustakaan, maupun di luar kegiatan dasar perpustakaan, persentase perimbangan koleksi, tata ruang, *lighting* dan pewarnaan ruangan yang memberikan kesan nyaman dan tidak membosankan serta Perabotan dan perlengkapan yang tidak terlalu kaku dan formal.

Tabel 2. 98 Jumlah Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Perpustakaan	90	266	243	246	264	30,87
Tenaga Pengelola Pustaka	-	104	253	394	532	72,30
Jumlah Pustakawan	-	10	7	6	8	-7,17
Pustaka Terakreditasi	-	10	10	16	30	44,22
Belum Terakreditasi	-	256	223	229	234	-2,95

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah perpustakaan yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2020 hingga tahun 2024 relatif mengalami pertambahan. Pada tahun 2020 jumlah perpustakaan adalah 90 perpustakaan dan pada tahun 2024 jumlah perpustakaan naik menjadi 264 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 30,83% per tahun. Adapun jumlah tenaga pengelola perpustakaan tahun 2021 sebanyak 104 orang dan meningkat menjadi 532 orang ditahun 2024 atau mengalami pertumbuhan sebesar 72,30% per tahun. Jumlah pustakawan mengalami penurunan sebesar 7,17% di mana pada tahun 2021 terdapat 10 orang pustakawan menjadi 8 orang pustakawan ditahun 2024.

5. Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk di Kota Dumai dari tahun 2020-2024 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2020 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 2,84 dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 7,56 terjadi peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Data perkembangan jumlah perpustakaan di Kota Dumai selama periode 2020–2024 menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan, dari hanya 90 unit pada tahun 2020 menjadi 264 unit pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 30,87% per tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan upaya besar Pemerintah Kota Dumai dalam memperluas akses literasi melalui pengadaan fasilitas perpustakaan, baik di tingkat kelurahan, sekolah, maupun komunitas.

Namun demikian, peningkatan jumlah perpustakaan tidak otomatis mencerminkan peningkatan kualitas dan efektivitas layanan literasi, apalagi jika tidak diiringi dengan peningkatan koleksi, sumber daya manusia pengelola, serta minat baca masyarakat. Oleh karena itu, tantangan berikutnya bagi Pemerintah Kota Dumai adalah memastikan bahwa seluruh perpustakaan yang dibangun benar-benar fungsional, aktif, dan mampu menjadi pusat pembelajaran masyarakat, bukan hanya sekadar memenuhi indikator kuantitatif. Upaya pembinaan, digitalisasi layanan, serta program literasi berbasis komunitas perlu diperkuat agar pertumbuhan ini berdampak langsung terhadap peningkatan budaya baca dan kualitas sumber daya manusia di Kota Dumai. Tabel berikut menggambarkan Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk.

Tabel 2. 99 Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Perpustakaan	90	266	243	246	264	30,87
Jumlah Penduduk per 10.000	31,68	32,35	33,18	33,81	34,94	2,48
Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk	2,84	8,22	7,32	7,28	7,56	27,71

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dan BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024

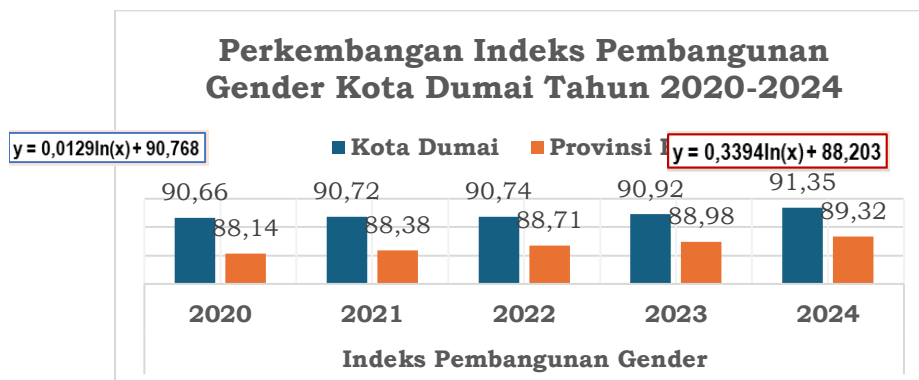
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mampu mengukur tingkat capaian kemampuan dasar pembangunan manusia, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender. Pengukuran tersebut diukur dengan semakin kecil jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100 artinya pembangunan antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih setara atau seimbang. Begitu pula sebaliknya, di mana semakin jauh dari angka 100 maka semakin besar pula perbedaan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 menjelaskan standar angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dikarenakan angka 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG memiliki komponen pembentuk yang menentukan nilai dari IPG. Komponen pembentuk tersebut sama dengan yang digunakan dalam pengukuran IPM, yakni angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pengetahuan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran laki-laki dan perempuan. Keberhasilan pembangunan perempuan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender atau yang difokuskan kepada perempuan. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM. namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar berikut.



**Gambar 2. 35 Indeks Pembangunan Gender Kota Dumai
Tahun 2020-2024**

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025

Mencermati data di atas, IPG Kota Dumai dalam kurun tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dari 90,66 pada tahun 2020 menjadi 91,35 pada tahun 2024 atau meningkat rata-rata 0,76% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Dumai selama kurun tahun tersebut menunjukkan arah yang semakin membaik. Jika dibandingkan dengan IPG provinsi Riau capaian IPG Kota Dumai pada tahun 2024 lebih tinggi dari capaian Provinsi Riau yaitu 89,32 dengan rata-rata pertumbuhan 1,32% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Dumai berada di atas Provinsi Riau.

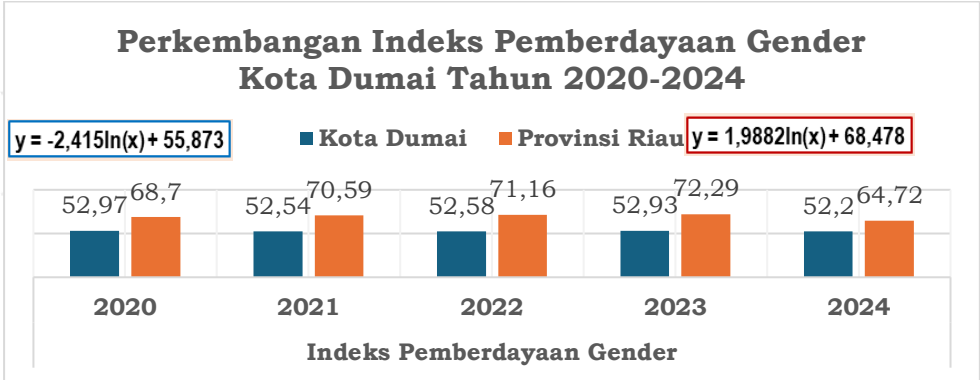
Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya pengarusutamaan gender di Kota Dumai telah menunjukkan hasil yang relatif kuat, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi perempuan. Meski demikian, laju pertumbuhannya yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi menjadi catatan penting bahwa percepatan pemberdayaan perempuan di Kota Dumai perlu ditingkatkan, tidak hanya pada aspek

akses, tetapi juga dalam pencapaian kualitas hidup dan pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, program-program strategis seperti pelatihan vokasional perempuan, dukungan perempuan dalam kepemimpinan lokal, serta perlindungan perempuan dari diskriminasi ekonomi dan sosial perlu terus diperkuat agar capaian IPG tidak stagnan dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

2. Indeks Pemberdayaan Gender

Peningkatan jumlah perempuan yang bekerja akan terus terjadi seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan dan kapasitas perempuan. Potensi perempuan sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan cukup besar mengingat populasinya hampir sama dengan laki-laki. Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan yang hanya mencapai hampir 50% memberikan indikasi bahwa masih terdapat potensi sumber daya manusia yang cukup besar yang belum ter-manfaatkan. Oleh sebab itu, partisipasi perempuan dalam proses pembangunan harus ditingkatkan karena selain akan meningkatkan produktivitas, juga akan memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Pujiwati, 1983).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Menurut ukuran ini semakin tinggi tingkat keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan politik semakin berdaya perempuan dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan pembangunan perempuan dapat dilihat dari Indeks pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender atau yang difokuskan kepada perempuan serta lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2. 36 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Dumai Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025

Capaian IDG Kota Dumai selama kurun tahun 2020-2024 menunjukkan kecenderungan yang semakin turun dari 52,97 pada tahun 2020 menjadi 52,20 pada tahun 2024 dengan pertumbuhan -1,47% per tahun. Sedangkan Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 1,12% per tahun. Artinya pemberdayaan gender di Kota Dumai lebih lambat perkembangannya dari pada Provinsi Riau dan masih belum optimal. Untuk tahun 2024 terlihat bahwa IDG Kota Dumai masih di bawah IDG Provinsi Riau.

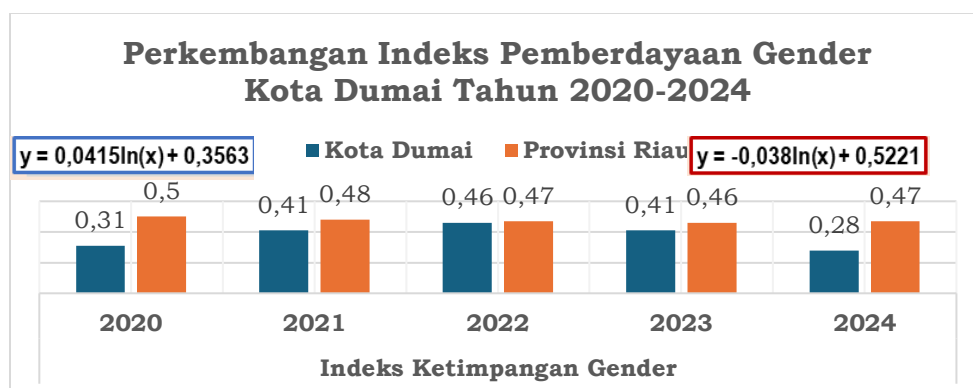
Perbedaan arah pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan gender di Kota Dumai berkembang jauh lebih lambat dibandingkan Provinsi, bahkan mengalami kemunduran. Pada tahun 2023, nilai IDG Kota Dumai tercatat lebih rendah daripada Provinsi Riau, yang menegaskan bahwa partisipasi dan keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan di Kota Dumai belum optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan dalam posisi strategis, partisipasi tenaga kerja perempuan yang terbatas, atau akses yang belum merata terhadap pelatihan dan sumber daya ekonomi.

3. Indeks Ketimpangan Gender

Gagasan mengenai konsep gender yang merupakan hasil dari suatu budaya, bukan biologis, pertama kali dikemukakan oleh Mead (1935). Mead menyimpulkan bahwa ekspektasi peran antara laki-laki dengan perempuan tidak berlaku universal, melainkan sangat bervariasi di lingkungan yang berbeda. Istilah gender, sebagai suatu kata yang berbeda dengan “sex”, pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller. Menurut Stoller (1968), “sex” terkategori secara biologis sedangkan “gender” terbentuk berdasarkan

faktor sosial budaya, bukan fisik biologis. Oakley (1985) juga menyebut “sex” sebagai suatu yang merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang didapati secara natural, sedangkan “gender” merujuk pada klasifikasi sosial antara maskulin dan feminin yang bervariasi antar komunitas. Delphy (1993) mendefinisikan “gender” sebagai produk yang dibentuk oleh faktor budaya, historis, dan sosial dari hierarki patriarki. Gender dipahami sebagai hierarki yang muncul di masyarakat, satu kelompok (laki-laki) lebih memiliki kuasa dan hak istimewa dibanding kelompok yang lain (perempuan). Sementara itu, Lopez-Carlos & Zahidi (2005) menyebut gender merujuk pada laki-laki dan perempuan, status keduanya dan posisi relatif antar keduanya.

Kesetaraan gender dipandang bukan hanya sekedar pemenuhan hak dasar bagi setiap manusia. Namun lebih daripada itu, kesetaraan gender merupakan suatu pilar penting untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Kesetaraan gender menggambarkan suatu kondisi perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan partisipasi yang sama dalam hal ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini menjamin bahwa tidak ada potensi sumber daya yang ada yang tidak ter-manfaatkan seoptimal mungkin. Dengan kata lain, kesetaraan gender mendorong suatu negara mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada ke titik optimalnya, tidak ada satu pun potensi yang ada dilemahkan.



Gambar 2. 37 Indeks Ketimpangan Gender Kota Dumai Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Data ketimpangan gender memberikan informasi kepada

pembuat kebijakan terkait domain atau dimensi mana saja yang masih mengalami ketimpangan dan membutuhkan intervensi kebijakan.

Capaian IKG Kota Dumai selama kurun tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat dari 0,31 pada tahun 2020 menjadi 0,28 pada tahun 2024. Sedangkan Provinsi Riau menurun dari 0,5 pada tahun 2020 menjadi 0,47 pada tahun 2024. Artinya ketimpangan gender di Kota Dumai lebih cepat perkembangannya dari pada Provinsi Riau walaupun masih belum optimal. Untuk tahun 2024 terlihat bahwa IKG Kota Dumai masih di bawah IKG Provinsi Riau.

Kondisi ini menjadi kontras dengan Provinsi Riau, yang justru mengalami penurunan IKG sebesar -3,01% per tahun, mencerminkan adanya pelebaran kesenjangan gender di tingkat provinsi. Meskipun demikian, IKG Kota Dumai pada tahun 2024 masih berada di bawah capaian provinsi, yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender di Kota Dumai masih relatif lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau secara keseluruhan. Dengan kata lain, meskipun perbaikannya lebih cepat, titik awal ketimpangan di Kota Dumai kemungkinan lebih besar, sehingga masih membutuhkan upaya berkelanjutan dan konsisten untuk mencapai kesetaraan yang lebih optimal.

4. Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Berikut disajikan tabel *Total Fertility Rate* (TFR) Kota Dumai Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 100 Total Fertility Rate Kota Dumai Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
TFR	4,9	3,33	2,22	2,22	2,3	-17,23

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Total Fertility Rate (TFR) di Kota Dumai menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, TFR masih berada pada angka 4,9, kemudian turun menjadi 3,33 pada tahun 2021. Penurunan terus berlanjut pada tahun 2022 hingga mencapai 2,22, dan stabil pada angka yang sama pada tahun 2023. Pada tahun 2024, TFR sedikit meningkat menjadi 2,3.

Secara rata-rata, pertumbuhan TFR mengalami penurunan sebesar - 17,23 persen per tahun. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola fertilitas masyarakat, yang mengarah pada penurunan tingkat kelahiran. Penurunan TFR ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian kelahiran, peran aktif program keluarga berencana (KB), serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja. Meskipun sempat terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2024, secara keseluruhan tren TFR memperlihatkan penurunan yang positif karena mengarah pada kondisi ideal, yaitu mendekati tingkat penggantian (*replacement level fertility*) sekitar 2,1. Dengan demikian, capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Dumai.

Selanjutnya *Age Specific Fertility Rate (ASFR)* adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Seperti yang dijelaskan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 101 *Age Specific Fertility Rate (ASFR)* Kota Dumai Tahun 2021 – 2024

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur (Jiwa)	Jumlah Kelahiran Tahun 2021	Jumlah Kelahiran Tahun 2022	Jumlah Kelahiran Tahun 2023	Jumlah Kelahiran Tahun 2024	ASFR
15-19	16,429	158	144	169	114	6,94
20-24	11,957	1,506	1,414	1,304	1057	88,40
25-29	11,412	2,799	2,056	2,088	1704	149,32
30-34	11,265	2,074	1,750	1,500	1371	121,70
35-39	12,142	967	1,010	877	742	61,11
40-44	10,973	227	187	185	214	19,50
45-49	12,061	19	19	25	13	1,08
Jumlah	86,239	7,750	6,580	6,148	5,215	666,85

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Berdasarkan data jumlah penduduk wanita usia subur (WUS) di Kota Dumai tahun 2021–2024, tercatat sebanyak 86.239 jiwa tersebar pada kelompok umur 15–49 tahun. Jumlah kelahiran menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari 7.750 kelahiran pada 2021 menjadi 6.580 kelahiran pada 2022, lalu menurun lagi menjadi 6.148 kelahiran pada 2023, dan kembali turun menjadi 5.215 kelahiran pada 2024.

Jika dilihat menurut kelompok umur, kelahiran paling tinggi terjadi pada kelompok umur 25–29 tahun, dengan 2.799 kelahiran pada 2021 dan masih mendominasi hingga 2024 dengan 1.704 kelahiran. Hal ini tercermin dari ASFR tertinggi sebesar 149,32 pada kelompok umur tersebut, diikuti oleh kelompok umur 30–34 tahun dengan ASFR 121,70. Sementara itu, kelompok umur 20–24 tahun juga memberikan kontribusi cukup besar dengan ASFR 88,40, meskipun jumlah kelahirannya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Untuk kelompok umur yang lebih tua, yaitu 35–39 tahun, angka kelahiran juga masih cukup signifikan dengan ASFR 61,11. Sebaliknya, kelompok umur 15–19 tahun dan 45–49 tahun memiliki kontribusi kelahiran yang relatif kecil, dengan ASFR masing-masing 6,94 dan 1,08, yang menunjukkan bahwa angka kelahiran di usia sangat muda maupun usia mendekati akhir masa subur semakin rendah.

Secara total, nilai ASFR pada seluruh kelompok umur mencapai 666,85, dengan konsentrasi kelahiran terbesar pada usia produktif 20–34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pola kelahiran masyarakat cenderung terkonsentrasi pada usia ideal untuk reproduksi, meskipun tren jumlah kelahiran secara keseluruhan mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

5. Cakupan Peserta KB Aktif

Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif adalah proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap

jumlah pasangan usia subur. Tabel di bawah ini menunjukkan pencapaian peserta KB Aktif (MCPR) yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini disebabkan pengguna, peminat, dan pengetahuan masyarakat terhadap pemakaian kontrasepsi semakin meningkat, masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi untuk ber-KB, serta menjarangkan kelahiran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar lebih sejahtera dan bahagia.

Tabel 2. 102 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Cakupan peserta KB aktif	35,923	34,475	23,49	30,301	34,015	-1,36

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

6. Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Per Kecamatan, PUS bukan peserta KB, unmetneed dan PUS yang bukan target Program KB

Cakupan pemakaian kontrasepsi di Kota Dumai pada tahun 2020 adalah 75,5% (35.923 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di Kecamatan Dumai Selatan yaitu 4.831 PUS (80,2%). Pada tahun 2021 adalah 74,9% (36.132 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di Kecamatan Dumai Selatan yaitu 5.032 PUS (82,4%), pada tahun 2022 adalah 53,8% (23.490 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di Kecamatan Sungai Sembilan yaitu 3.990 PUS (61,7%), Selanjutnya capaian pada tahun 2023 adalah 66% (30.301 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di Kecamatan Dumai Kota yaitu 4.023 PUS (77,1%), pada tahun 2024 adalah 70,3% (34.015 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di Kecamatan Dumai Barat yaitu 5.034 PUS (77,1%).

Sedangkan cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB pada tahun 2020 adalah 11.652 PUS (24,5%) dengan angka *unmeetneed* tertinggi yang harus diintervensi yaitu di Kecamatan Dumai Kota 18,1% dengan jumlah 1.212 PUS. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB pada tahun 2021 adalah 12.122 PUS (25,1%) dengan angka *unmeetneed* tertinggi yang harus di intervensi yaitu di Kecamatan Dumai Kota 16% dengan jumlah 1.069 PUS. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB pada tahun 2022 adalah 20.150 PUS (46,2%) dengan angka *unmeetneed* tertinggi yang harus di intervensi yaitu ada 2 kecamatan,



Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Barat, Di mana kecamatan Dumai Timur 33,5% dengan jumlah 3.141 PUS dan kecamatan Dumai Barat 33,5% dengan jumlah 2.098 PUS.

Tahun 2023 cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB adalah 15.598 PUS (34%) dengan angka *unmeetneed* tertinggi yang harus diintervensi yaitu Kecamatan Bukit Kapur 16,7% dengan jumlah 1.451 PUS. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB pada tahun 2024 adalah 14.342 PUS (29,7%) dengan angka *unmeetneed* tertinggi yang harus diintervensi yaitu di Kecamatan Dumai Timur 9,2% dengan jumlah 948 PUS.

Tabel 2. 103 Cakupan *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)*, PUS bukan peserta KB, *Unmetneed* dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan Tahun 2020-2024

KECAMATAN	PUS					CPR										PUS BUKAN PESERTA KB									
						PESERTA AKTIF					% PA / PUS / x 100					JUMLAH					% PUS BUKAN PESERTA KB / PUS x100				
	2020	2021	2022	2023	2024						2020	2021	2022	2023	2024						2020	2021	2022	2023	2024
	Dumai Kota	6680	6680	4290	5218	4807	5117	5267	2601	4023	3424	76,60	78,85	60,63	77,10	71,23	1563	1413	1689	1195	1383	23,4	21,2	39,4	22,9
Dumai Timur	9984	10008	9364	9881	10294	7852	7810	4088	6083	6729	78,65	78,04	43,66	61,56	65,37	2132	2198	5276	3798	3565	21,4	22,0	56,3	38,4	34,6
Dumai Barat	8441	8761	6255	6217	6648	5897	5973	3152	4288	5034	69,86	68,18	50,39	68,97	75,72	2544	2788	3103	1929	1614	30,1	31,8	49,6	31,0	24,3
Dumai Selatan	6027	6104	6277	6448	7598	4831	5032	3602	4049	5315	80,16	82,44	57,38	62,79	69,95	1196	1072	2675	2399	2283	19,8	17,6	42,6	37,2	30,0
Bukit Kapur	3493	3797	8245	8669	8772	2705	3024	4414	5356	6388	77,44	79,64	53,54	61,78	72,82	788	773	3831	3313	2384	22,6	20,4	46,5	38,2	27,2
Medang kumpai	6272	6079	2741	2691	3439	4886	4242	1643	1802	2119	77,90	69,78	59,94	66,96	61,62	1386	1837	1098	889	1320	22,1	30,2	40,1	33,0	38,4
Sungai Sembilan	6678	6825	6468	6775	6799	4635	4784	3990	4700	5006	69,41	70,10	61,69	69,37	73,63	2043	2041	2478	2075	1793	30,6	29,9	38,3	30,6	26,4
Kota Dumai	47575	48254	43640	45899	48357	35923	36132	23490	30301	34015	75.51	74.88	53.83	66.02	70.34	11652	12122	20150	15598	14342	24.5	25.1	46.2	34.0	29.7

KECAMATAN	UNMET NEED										PUS YANG BUKAN TARGET PROGRAM KB									
	JUMLAH					% UNMET NEED / PUS x 100					HAMIL dan IAS					% HAMIL dan IAS / PUS x 100				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Dumai Kota	1212	1069	1053	368	321	18,1	16,0	24,5	7,1	6,7	851	844	919	658	633	12,7	12,6	21,4	12,6	13,2
Dumai Timur	1015	1208	3141	1268	948	10,2	12,1	33,5	12,8	9,2	1117	990	2138	1749	1736	11,2	9,9	22,8	17,7	16,9
Dumai Barat	1383	1336	2098	942	437	16,4	15,2	33,5	15,2	6,6	1161	1452	1085	571	648	13,8	16,6	17,3	9,2	9,7
Dumai Selatan	625	507	1381	899	541	10,4	8,3	22,0	13,9	7,1	571	565	1314	936	972	9,5	9,3	20,9	14,5	12,8
Bukit Kapur	547	581	2384	1451	587	15,7	15,3	28,9	16,7	6,7	241	242	1598	1093	1048	6,9	6,4	19,4	12,6	11,9
Medang kumpai	623	912	456	249	270	9,9	15,0	16,6	9,3	7,9	763	925	720	412	509	12,2	15,2	26,3	15,3	14,8
Sungai Sembilan	893	789	1360	800	302	13,4	11,6	21,0	11,8	4,4	1150	1252	1424	792	728	17,2	18,3	22,0	11,7	10,7
Kota Dumai	6298	6402	11873	5977	3406	13,2	13,3	27,2	13,0	7,0	5854	6270	9198	6211	6274	12,3	13,0	21,1	13,5	13,0

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

7.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan kualitas keluarga di suatu wilayah. Indeks ini dikembangkan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) sebagai salah satu alat ukur keberhasilan program pembangunan keluarga yang berfokus pada pencapaian ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Berikut disajikan tabel Indeks Pembangunan Keluarga Kota Dumai

Tabel 2. 104

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Dumai Tahun 2021-2024

Uraian	Angka iBangga				Capaian iBangga Tahun 2024 terhadap 2023	Tren iBangga tahun 2021 - 2024	Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2021	2022	2023	2024			
Kota Dumai	53,09	58,07	66,08	66,69	Naik	Naik	7,90
Provinsi Riau	53,01	56,74	63,70	63,46	Turun	Fluktuatif	6,18

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Dumai menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, nilai iBangga Kota Dumai berada pada angka 53,09 dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 66,69 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas pembangunan keluarga di Kota Dumai dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 7,90%.

8.

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah dengan memperhatikan aspek kependudukan. IPBK mencerminkan sejauh mana pembangunan suatu wilayah telah terintegrasi dengan berbagai aspek kependudukan, seperti partisipasi, keberlanjutan, pemihakan, integrasi, dan kesetaraan. Berikut tabel yang menyajikan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kota Dumai Tahun 2021-2024

Tabel 2. 105

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kota Dumai Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	Tahun				Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2021	2022	2023	2024	
IPBK	Indeks	63,1	63,8	65,7	68,0	2,54

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Indeks Pembangunan Berbasis Keluarga (IPBK) di Kota Dumai menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021 nilai IPBK tercatat sebesar 63,1, meningkat menjadi 63,8 pada tahun 2022, lalu mencapai 65,7 pada tahun 2023, dan terus naik hingga 68,0 pada tahun 2024. Secara rata-rata, pertumbuhan IPBK selama periode tersebut adalah 2,54 persen per tahun, yang menandakan adanya kemajuan dalam pembangunan berbasis keluarga. Secara keseluruhan, peningkatan IPBK mencerminkan arah pembangunan keluarga di Kota Dumai yang terus membaik, meskipun masih diperlukan upaya strategis untuk mengatasi hambatan yang ada agar pertumbuhan dapat lebih merata dan berkelanjutan.

9. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Dumai dimaknai sebagai pola pikir kebudayaan daerah dari sebuah kota yang religius, multikultural, kreatif, dan inovatif atau pola pikir kebudayaan manusia Dumai, yang memiliki ciri-ciri religius, multikultural, kreatif, dan inovatif dan menjaga nilai-nilai budaya. Dari hasil pendataan lapangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) terdiri dari tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, masih bisa ditemukan di Kota Dumai. Berikut tabel yang menyajikan Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2024

Tabel 2. 106 Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2024

No.	Jenis	Kondisi Faktual		
		Sering dituturkan	Jarang dituturkan	Tidak dituturkan
	Tradisi Lisan			
1.	Dongeng			
	1) Putri Tujuh	√		
	2) Misteri Goa Pelintung	√		
	3) Panglima Hitam	√		
	4) Bujang Manjo	√		
	5) Buah Bakau Belukap Jin Qunai	√		
	6) Asal Mula Nama Lubuk Gaung	√		
	7) Parit Hukum	√		
2.	Pantun			
	1) Pantun Nasehat	√		
	2) Jenaka	√		
	3) Muda Mudi	√		
	4) Hantaran Belanja	√		
3.	Cerita Rakyat			

No.	Jenis	Kondisi Faktual		
		Sering dituturkan	Jarang dituturkan	Tidak dituturkan
	1) Lubuk Sebetir	√		
4.	Senandung			
	1) Syair Lagu Melayu	√		
	Manuskrip			
1.	Hikayat			
	1) Silsilah keturunan Sultan Abdul Djalil Rahmad Syah (1931)	√		
2.	Serat			
	1) Pembagian Hasil Pertanian dari Kerajaan Siak	√		
	2) Penetapan Bulan Puasa	√		
3.	Naskah			
	1) Besluit no 16	√		
	2) Besluit no 60	√		
	3) Besluit no 183	√		
	4) SK Bupati Bengkalis No. 28/Desa/1962 tgl 19 Sept 1962	√		
	5) SK Camat no. 1/Pd.P/Ds- 65.	√		
	6) Lampiran SK Bupati Bengkalis No.90/B/PD/1954 tgl. 9 Okt 1954	√		
	Adat Istiadat			
1.	Aturan adat yang berkaitan dengan lingkungan			
	1) Pantang Larang	√		
2.	Aturan adat yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan			
	1) Meminang	√		
	2) Mengantar tanda	√		
	3) Mengantar belanja	√		
	4) Menegak bangsal	√		
	5) Menggantung	√		
	6) Berandam	√		
	7) Berinai curi	√		
	8) Akad nikah	√		
	9) Tepuk tepung tawar	√		
	10) Berarak pengantin	√		
	11) Silat pengantin	√		
	12) Pantun Pembuka	√		
	13) Duduk bersanding	√		
	14) Makan adab	√		
	15) Mandi taman	√		
	16) Perkawinan melayu	√		
	17) Perkawinan	√		
	18) Petang megang	√		
	19) Semah Kampung (beratip kampung)	√		
	Ritus			
1.	Perayaan			
	1) Khitanan	√		
	2) Khatam Quran	√		
	3) Petang megang	√		
2.	Peringatan kelahiran			

No.	Jenis	Kondisi Faktual		
		Sering dituturkan	Jarang dituturkan	Tidak dituturkan
	1) Mengayun anak 2) Akikah 3) Menujuh bulan 4) Tanggal pusat 5) Mencukur rambut	√ √ √ √ √		
3.	Upacara Perkawinan			
	1) Menantar tande 2) Meminang 3) Mengantar belanja 4) Berandam 5) Menggantung 6) Makan beradap 7) Berinai curi 8) Akad nikah 9) Tepuk tepung tawar 10) Berarak 11) Mandi taman	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √		
4.	Upacara Kematian			
	1) Ziarah kubur 2) Menujuh hari	√		
5.	Ritual penyehatan			
	1) Semah laut 2) Nabur bunga di laut 3) Semah kampung (beratip kampung)	√ √ √		
	Pengetahuan Tradisional			
1.	Kerajinan			
	1) Tenun 2) Anyam	√ √		
2.	Busana			
	1) Teluk belanga 2) Cekak musang 3) Kebaya Labuh 4) Gunting cino 5) Baju kurung 6) Tanjak	√ √ √ √ √ √		
3.	Metode penyehatan			
	1) Buang Tetemas 2) Jemput Semangat 3) Bekam 4) Urut 5) Shinsei 6) Tidak nafsu makan 7) Mimisan 8) Masuk angin 9) Sakit kepala 10) Panas dalam 11) Sariawan 12) Migren 13) Radang tenggorokan 14) Tekanan darah rendah 15) Tekanan darah tinggi	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √		



No.	Jenis	Kondisi Faktual		
		Sering dituturkan	Jarang dituturkan	Tidak dituturkan
	16) Kencing kurang lancar	√		
	17) Asma (sesak napas)	√		
	18) Ambeyen	√		
	19) Sakit pinggang	√		
	20) Asam urat	√		
	21) Susah buang air besar	√		
	22) Keputihan	√		
	23) Masuk angin pada anak	√		
	24) Muntah, mual, perut	√		
	25) Perut kembung	√		
	26) Diare	√		
	27) Mata merah	√		
	28) Cacingan	√		
	29) Cacar air	√		
	30) Keseleo	√		
	31) Typus	√		
	32) Rematik	√		
	33) Rambut rontok	√		
	34) Kolesterol	√		
	35) Bintik hitam pada wajah	√		
	36) Kokoloteun	√		
	37) Jerawat	√		
	38) Batuk	√		
	39) Batuk 100 hari	√		
	40) Batuk berlendir	√		
	41) Pilek pada anak	√		
	42) Luka tergores	√		
	43) Luka berdarah	√		
	44) Penurun panas	√		
	45) Obat bengkak	√		
	46) Menghentikan Pendarahan	√		
	47) Tergores pisau	√		
	48) Obat bau badan	√		
	49) Agar tubuh rambut	√		
	50) Agar warna rambut hitam dan lebat	√		
	51) Sakit perut	√		
4.	Jamu/ramuan tradisional			
	1) Rempah ratus	√		
5.	Makanan dan minuman tradisional			
	1) Asam pedas	√		
	2) Kurmak	√		
	3) Kepurun	√		
	4) Hasidah	√		
	5) Bolu kemojo	√		
	6) Kue bingko	√		
	7) Laksamana mengamuk	√		
	8) Air mata pengantin	√		
	9) Kue bangkit	√		
	10) Otak naga	√		



No.	Jenis	Kondisi Faktual		
		Sering dituturkan	Jarang dituturkan	Tidak dituturkan
	Teknologi Tradisional			
1.	Alat Tangkap			
	1) Jala	√		
	2) Lukah	√		
2.	Arsitektur/ Ornamen			
	1) Selembayung	√		
3.	Perkakas Pertanian			
	1) Arit	√		
	2) Parang	√		
	3) Tangguk	√		
	4) Lukah	√		
	5) Tugal	√		
	Seni			
1.	Seni Musik			
	1) Gambus	√		
	2) Marwas	√		
	3) Accordion	√		
	4) Biola	√		
	5) Gendang Bebano	√		
	6) Kompang	√		
	7) Rebana	√		
	8) Gendang Panjang	√		
	9) Budak tanjung palas	√		
	10) Lagu Laila canggung	√		
2.	Seni Tari			
	1) Tari Persembahan	√		
	2) Tari olang-olang	√		
	3) Tari purti tujuh	√		
	4) Joget mak inang	√		
	5) Tari Langgam	√		
	6) Zapin senarak	√		
	7) Tari kreasi daerah parit hukum	√		
	8) Zapin api	√		
	9) Zapin semarak	√		
3.	Seni Rupa			
	1) Pucuk rebung	√		
	2) Lebah begayut	√		
	3) Awan berarak	√		
	4) Pucuk paku	√		
4.	Seni Sastra			
	1) Syair	√		
	2) Puisi	√		
	3) Monolog	√		
5.	Seni Teater			
	1) Teater Bangsawan	√		
	Bahasa			
1.	Bahasa Indonesia			
	1) Bahasa Indonesia	√		
2.	Bahasa Daerah			
	1) Bahasa Melayu Riau	√		
	2) Bahasa Batak	√		

No.	Jenis	Kondisi Faktual		
		Sering dituturkan	Jarang dituturkan	Tidak dituturkan
	3) Bahasa Bugis	√		
	4) Bahasa Indonesia	√		
	5) Bahasa Jawa	√		
	6) Bahasa Minang	√		
	7) Bahasa Aceh	√		
	8) Bahasa Palembang	√		
	9) Bahasa Sunda	√		
	10) Bahasa China	√		
	Permainan Rakyat			
1.	Permainan Tradisional			
	1) Lulu cina buta	√		
	2) Bakiak/ Terompa Panjang	√		
	3) Pok pok pisang	√		
	4) Congkak	√		
	5) Gasing	√		
	6) Guli	√		
	7) Patok lele	√		
	8) Porok	√		
	9) Bakiak	√		
	10) Laying-layang	√		
	11) Setatak	√		
	12) Tarik Tambang	√		
	13) Tonggak dingin	√		
	14) Galah Panjang	√		
	15) Ban senebu	√		
	16) Senangkup	√		
	Olahraga Tradisional			
1.	Seni Musik			
	1) Silat	√		
	2) Sepak Takraw	√		

Sumber: Naskah PPKD Kota Dumai 2025-2029, 2025

10. Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan prikehidupannya dilindungi oleh Undang-undang dari bahaya kepunahan. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, Bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan kebudayaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan pendidikan agama atau kebudayaan melalui proses penetapan.

**Tabel 2. 107 Objek Diduga Cagar Budaya Kota Dumai
Tahun 2024**

NO	CAGAR BUDAYA	KLASIFIKASI OBYEK	KECAMATAN	KONDISI OBJEK Terawat/ kurang terawat/ tidak terawat
1	Makam Datuk Pawang Lion	Struktur	Medang Kampai	Terawat
2	Tapak Harimau Sakti	Struktur	Medang Kampai	Terawat
3	Batu Seludung	Struktur	Medang Kampai	tidak terawat
4	Makam putri tujuh	Struktur	Dumai Timur	Terawat
5	Bekas benteng	Struktur	Dumai Barat	Tidak ada lagi
6	Makam Simpan (kompleks chevron I)	Struktur	Dumai Selatan	Terawat
7	Makam Datuk Tabrani	Struktur	Dumai Selatan	tidak terawat
8	Makam H Jalal	Struktur	Dumai Kota	Tidak ada lagi
9	Kompleks makam Kerabat Tujuh	Situs	Dumai Kota	Terawat
10	Makam Syaikh Sayyid Aziz Ibrahim	Struktur	Sungai Sembilan	Terawat
11	Makam Panglima Delau	Struktur	Medang Kampai	tidak terawat
12	Makam Panglima Pandak	Struktur	Medang Kampai	tidak terawat
13	Makam Tuk Kedondong	Struktur	Dumai Barat	Terawat
14	Makam Syekh Umar	Struktur	Dumai Barat	Terawat
15	Batu Beranak	Benda	Dumai Barat	Terawat
16	Pesanggrahan Putri Tujuh	Bangunan	Dumai Timur	Terawat
17	Makam Siti Laut	Struktur	Dumai Barat	Terawat
18	Keris 1	Benda	Dumai Barat	Terawat
19	Keris 2	Benda	Dumai Barat	Terawat
20	Keris 3	Benda	Dumai Barat	Terawat
21	Keris 4	Benda	Dumai Barat	Terawat
22	Keris kecil	Benda	Dumai Barat	Terawat
23	Mangkok 1	Benda	Dumai Barat	Terawat
24	Mangkok 2	Benda	Dumai Barat	Terawat
25	Kendi 1	Benda	Dumai Barat	Terawat
26	Kendi 2	Benda	Dumai Barat	Terawat
27	Meriam	Benda	Dumai Selatan	Terawat
28	Tepak Sirih	Benda	Dumai Barat	Terawat
29	Cepu	Benda	Dumai Barat	Terawat
30	Payung kecil	Benda	Dumai Barat	Terawat
31	Pedang panjang	Benda	Dumai Barat	Terawat

NO	CAGAR BUDAYA	KLASIFIKASI OBYEK	KECAMATAN	KONDISI OBJEK Terawat/ kurang terawat/ tidak terawat
32	Keris tikam bayang	Benda	Dumai Kota	Terawat
33	Keris tahta naga siak	Benda	Dumai Kota	Terawat

Sumber: Naskah PPKD Kota Dumai 2025-2029, 2025

Tabel 2. 108 Cagar Budaya Kota Dumai Tahun 2024

NO	CAGAR BUDAYA	KLASIFIKASI OBYEK	NO. SURAT KEPUTUSAN	KONDISI OBYEK
				Terawat/Kurang Terawat/Tidak Terawat
1	Batu Nisan Perempuan Komplek Makam Putri Tujuh	Situs		Terawat
2	batu Nisan Laki-laki Komplek Makam Tujuh	Situs	Kpts. Wali Kota Dumai No.430/1219/2024	Terawat
3	Makam Syekh Umar	Situs	SK Wako : 925/2021	Terawat
4	Batu Beranak	Situs	SK Wako : 925/2021	Terawat
5	Keuntungan	Situs	SK Wako : 925/2021	Terawat
6	Makam Pawang Lion	Situs	SK Wako : 925/2021	Terawat
7	Tapak Harimau Sakti	Situs	SK Wako : 925/2021	Terawat

Sumber: Naskah PPKD Kota Dumai 2025-2029, 2025

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Angka Ketergantungan

Dependency Ratio dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau yang sedang berkembang dengan cara membandingkan antara kelompok umur produktif (15-64 tahun) dengan kelompok umur belum produktif (0-14 tahun) dan kelompok umur tidak produktif (64 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

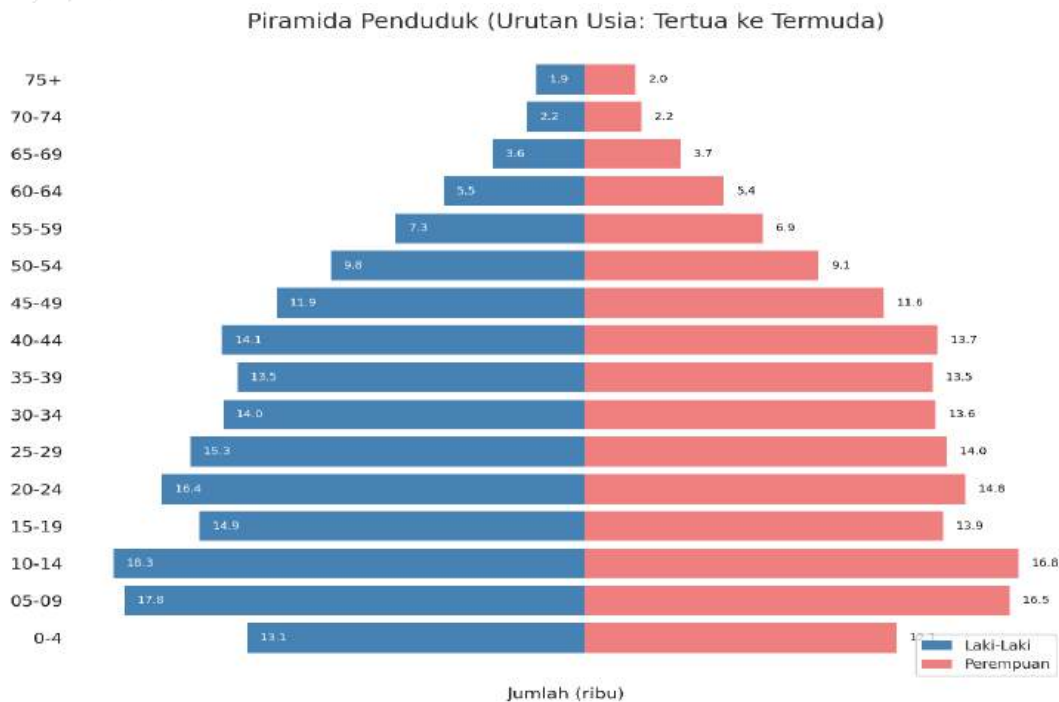
Selama periode 2020-2024, perkembangan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami pertumbuhan sebesar 2,91% per tahun, kelompok umur belum produktif (0-14 tahun) mengalami pertumbuhan sebesar 0,68% dan usia tidak produktif (65 tahun ke atas) tumbuh sebesar

7,96% per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio ketergantungan sebesar -1,31% per tahun. Penurunan rasio ketergantungan tersebut yang disebabkan oleh laju pertumbuhan usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan usia tidak produktif. Hal tersebut dapat terjadi karena angka kelahiran atau fertilitas yang terus mengalami penurunan dan angka kematian atau mortalitas menjelang usia tidak produktif yaitu usia 64 tahun ke atas. Nilai *dependency ratio* Kota Dumai masuk kategori sangat tinggi selama periode 2020-2024 sebagaimana terlihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2. 109 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2020-2024

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk					Pertumbuhan /Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	0-4	33.966	34.249	34.761	24.815	25.184	-7,21
2	05-09	30.224	30.502	30.872	34.178	34.316	3,23
3	10-14	27.870	28.178	28.682	34.589	35.092	5,93
4	15-19	27.314	27.436	27.716	26.574	28.841	1,37
5	20-24	27.734	28.022	28.376	29.936	31.156	2,95
6	25-29	27.552	27.987	28.588	28.566	29.323	1,57
7	30-34	26.371	26.768	27.265	26.749	27.633	1,18
8	35-39	25.283	25.744	26.377	27.037	26.969	1,63
9	40-44	22.967	23.438	23.975	27.092	27.740	4,83
10	45-49	19.389	20.052	20.799	22.411	23.536	4,96
11	50-54	15.108	15.754	16.507	18.156	18.920	5,79
12	55-59	12.515	13.161	13.851	13.525	14.247	3,29
13	60-64	9.020	9.619	10.318	10.205	10.854	4,74
14	65-69	6.162	6.658	7.145	6.790	7.295	4,31
15	70-74	2.827	3.287	3.841	4.020	4.436	11,92
16	75+	2.480	2.597	2.759	3.421	3.847	11,60
Umur Produktif		213.253	217.981	223.772	230.251	239.219	2,91
Umur Belum Produktif		92.060	92.929	94.315	93.582	94.592	0,68
Umur Tidak Produktif		11.469	12.542	13.745	14.231	15.578	7,96
Persentase Umur Produktif		67,32	67,39	67,44	68,11	68,47	0,42
Rasio Ketergantungan		48,55	48,39	48,29	46,82	46,05	-1,31
Jumlah Penduduk		316.782	323.452	331.832	338.064	349.389	2,48

Sumber: Dumai Dalam Angka, 2025



Gambar 2. 38 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2024

Sumber: *Sumber: Dumai Dalam Angka, 2025*

Dampak dari tingginya rasio ketergantungan antara penduduk antara lain:

- 1) Penerimaan pajak yang lebih rendah. Pensiunan membayar pajak penghasilan lebih rendah. Oleh karena itu, penduduk usia kerja memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membayar pajak; belanja pemerintah lebih tinggi. Pemerintah berkomitmen untuk membayar pensiun negara dan manfaat terkait seperti jaminan pendapatan minimum. Ada juga tuntutan yang lebih besar untuk pengeluaran tidak langsung untuk pensiunan. Orang di atas 65 tahun lebih mungkin memerlukan perawatan kesehatan. Oleh karena itu, ada tuntutan yang lebih besar ditempatkan pada pengeluaran pemerintah oleh kenaikan rasio ketergantungan;
- 2) Potensi kenaikan pajak yang lebih tinggi. Tekanan pada keuangan pemerintah dapat menyebabkan tarif pajak yang lebih tinggi pada penduduk pekerja atau produktif, yang dapat menciptakan disinsentif untuk bekerja dan mengurangi pendapatan. Pemerintah mungkin terpaksa menggunakan lebih banyak pendapatan dari pajak tidak langsung atau pajak kekayaan.
- 3) Dana pensiun yang lebih rendah. Pertambahan pensiunan juga meningkatnya kebutuhan dana pensiun. Juga dapat menyebabkan krisis kredit dan suku bunga rendah. Tekanan untuk menaikkan usia

pensiun. Karena kenaikan biaya pensiun, ada tekanan untuk menaikkan usia pensiun baik di sektor swasta maupun sektor publik.

- 4) Daya saing, jika suatu perekonomian mengalami peningkatan rasio ketergantungan yang lebih cepat dari rata-rata global, hal tersebut dapat memengaruhi daya saing internasional dan menyebabkan produktivitas yang lebih rendah dan ini akan menyebabkan penurunan daya saing daerah.

2.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

1. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Selama periode 2020 hingga 2024, nilai PDRB ADHB Kota Dumai menunjukkan tren meningkat secara konsisten, dari Rp36,31 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp49,03 triliun pada 2023, dan diperkirakan naik menjadi Rp52,67 triliun pada tahun 2024. Seiring dengan itu, nilai PDRB sektor industri pengolahan juga meningkat dari Rp21,77 triliun (2020) menjadi Rp30,03 triliun (2023), dengan estimasi Rp31,82 triliun pada 2024. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB juga mengalami fluktuasi ringan namun tetap dominan, yaitu dari 59,96% (2020) naik ke 61,25% (2023), sebelum diproyeksikan sedikit turun ke 60,42% pada 2024. Puncak kontribusi terjadi pada 2022 sebesar 61,8%, yang menunjukkan bahwa sektor ini merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi Kota Dumai.

Sektor industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung ekonomi Kota Dumai dengan kontribusi stabil di atas 59% sepanjang 2020–2024. Kenaikan nilai PDRB sektor ini menunjukkan pertumbuhan kapasitas produksi dan aktivitas industri, yang secara tidak langsung dapat mendorong penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah. Namun, tren penurunan kontribusi pada 2024 meski secara nilai tetap naik, mengindikasikan mulai menguatnya peran sektor-sektor lain. Ini bisa menjadi sinyal positif bagi diversifikasi ekonomi, namun tetap perlu diwaspadai agar tidak terjadi pelemahan pada sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi penopang utama PDRB Dumai.

Tabel 2. 110 Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun					R(%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
PDRB ADHB Kota Dumai	Rp. Milyar	36.313.730	39.946.108	45.052.810	49.034.286	52.668.100	9,74
PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	21.772.852	24.294.167	27.839.955	30.032.693	31.824.120	9,95
Kontribusi PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	%	59,96	60,82	61,8	61,25	60,42	0,19

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto, Tahun 2020-2024

2. Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB

Dengan tingginya kontribusi sektor industri pengolahan sebagai pembentuk PDRB di Kota Dumai, maka salah satu sektor yang mendapat eksternalitas positif dari aktivitas sektor industri pengolahan tersebut adalah meningkatnya aktivitas pada lapangan usaha Transportasi dan pergudangan di kota Dumai. Lapangan usaha ini dimaksud untuk menjamin logistik seperti bahan mentah ataupun peralatan dari aktivitas industri pengolahan tetap tersedia sehingga sektor dimaksud dapat terus beraktivitas. Adapun dalam kurun waktu 2020-2024 rata-rata pertumbuhan kontribusi sektor transportasi dan pergudangan berdasarkan harga berlaku cenderung menurun sebesar 1,70%. Hal ini diakibatkan masih terbatasnya akses ke pusat-pusat industri pengolahan di Kota Dumai di mana akses jalan tersebut masih menyatu dengan akses jalan yang di peruntukkan untuk aktivitas masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sektor transportasi dan pergudangan mendapatkan eksternalitas positif dari aktivitas industri pengolahan yang mendominasi struktur ekonomi Kota Dumai, namun potensi kontribusinya terhadap PDRB belum berkembang secara optimal. Pertumbuhan kontribusi yang hanya sebesar 1,70% selama 2020–2024 mencerminkan bahwa peningkatan nilai sektor ini belum diikuti oleh peningkatan peran struktural dalam ekonomi daerah. Salah satu faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya akses jalan menuju pusat-pusat industri yang masih bercampur dengan jalur lalu lintas masyarakat umum. Kondisi ini menyebabkan efisiensi logistik terganggu dan menurunkan daya saing sektor transportasi dan pergudangan. Untuk itu, perlu dilakukan intervensi kebijakan berupa

pembangunan dan pemisahan jalur logistik industri, optimalisasi pelabuhan dan terminal barang, serta penguatan konektivitas antar kawasan industri. Dengan penataan infrastruktur yang tepat, sektor transportasi dan pergudangan di Kota Dumai berpotensi tumbuh lebih cepat dan menjadi pendorong diversifikasi ekonomi yang memperkuat ketahanan wilayah terhadap guncangan sektoral.

Tabel 2. 111 Perkembangan Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
PDRB ADHB Kota Dumai	Rp. Milyar	36.313,70	39.946,11	45.052,81	49.034,29	52.668,10	9,74
PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp. Milyar	726,94	757,62	889,95	1.002,21	1.128,03	11,61
Kontribusi PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	%	2,00	1,90	1,98	2,04	2,14	1,70

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto, Tahun 2020-2024

3. Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PDRB

Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Dumai masih belum terdata secara spesifik dalam laporan PDRB yang dipublikasikan secara umum. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, sektor-sektor utama yang menyumbang pada PDRB Dumai antara lain adalah industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar serta eceran. Namun, potensi ekonomi kreatif di Dumai tetap signifikan mengingat perkembangan sektor-sektor seperti informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif, menunjukkan kecenderungan rata-rata pertumbuhan yang meningkat sebesar 2,65%. Jumlah kunjungan wisatawan domestik dari tahun 2020-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 23,65% per tahun. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dampak pandemi Covid-19 di mana pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 12.908 jiwa sedangkan pada tahun 2024 mencapai 13.500 jiwa. Berikut disajikan tabel kunjungan wisatawan Kota Dumai.

Tabel 2. 112 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					R (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Wisatawan Domestik	81.202	39.325	46.258	78.481	95.300	4,08
Wisatawan Mancanegara	12.908	3.834	5.040	6.031	13.500	1,13
Jumlah	94.110	43.159	51.298	84.512	108.800	3,69

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun, 2025

Berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Dumai tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren pertumbuhan ekonomi yang cukup positif, terutama pasca-pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, total PDRB Kota Dumai tercatat sebesar Rp36.313,70 miliar dan terus meningkat setiap tahun hingga mencapai Rp52.668,10 miliar pada tahun 2024. Kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2021 ke 2022 dengan lonjakan sebesar 26,37%. Hal ini mengindikasikan pemulihan ekonomi yang cukup kuat setelah melewati masa tekanan akibat pandemi. Namun, setelah 2022, laju pertumbuhan mulai melambat, yakni 8,85% pada 2023 dan sekitar 7,4% pada 2024, menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi mulai memasuki fase stabil.

Sektor akomodasi makan dan minum, yang sangat terdampak pandemi, mengalami penurunan dari Rp319,62 miliar pada 2019 menjadi Rp258,81 miliar pada 2020. Namun, sejak tahun 2021, sektor ini mulai menunjukkan tren pemulihan yang berkelanjutan. Nilainya meningkat dari Rp315 miliar pada 2021 menjadi Rp426,90 miliar pada 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kembali aktivitas masyarakat, khususnya di sektor pariwisata, kuliner, dan jasa penyediaan makanan dan minuman. Pemulihan ini juga bisa dikaitkan dengan pelonggaran pembatasan mobilitas serta meningkatnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, sektor informasi dan komunikasi menunjukkan kinerja yang jauh lebih stabil dan konsisten tumbuh selama periode 2020–2024. Nilai sektor ini meningkat dari Rp457,24 miliar pada 2020 menjadi Rp576,45 miliar pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dan penggunaan teknologi informasi terus meningkat, baik dalam sektor pendidikan, perdagangan, maupun komunikasi masyarakat. Sektor ini cenderung tidak terlalu terpengaruh pandemi, bahkan tumbuh di tengah krisis, sehingga berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi digital ke depan.

Sementara itu, kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap total PDRB masih tergolong rendah dan relatif stagnan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 1,97% dan sempat mengalami penurunan menjadi 1,82% pada 2023, kemudian sedikit meningkat menjadi 1,91% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun potensi ekonomi kreatif cukup besar, namun kontribusinya terhadap perekonomian Dumai belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dan dukungan kebijakan yang lebih terarah untuk mengembangkan sektor ini, baik melalui penguatan ekosistem pelaku usaha kreatif, fasilitasi digitalisasi, maupun peningkatan akses pasar.

Secara keseluruhan, perekonomian Kota Dumai pada periode 2020–2024 menunjukkan arah pemulihan dan pertumbuhan yang positif. Namun, perlu strategi lanjutan untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, sekaligus mendorong pengembangan sektor-sektor potensial seperti ekonomi kreatif dan informasi-komunikasi agar kontribusinya terhadap PDRB semakin besar dan berkelanjutan.

Tabel 2. 113 Perkembangan Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun					R (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
PDRB ADHB Kota Dumai	Rp. Miliar	36.313,70	39.946,11	45.052,81	49.034,29	52.668,10	9,74
PDRB ADHB Sektor Akomodasi Makan dan Minum	Rp. Miliar	258,81	315	335,6	360,64	426,9	13,33
PDRB ADHB Sektor Informasi dan Komunikasi	Rp. Miliar	457,24	478,07	500,69	529,34	576,45	5,96
Kontribusi PDRB ADHB Sektor Ekonomi Kreatif	%	1,97	1,99	1,86	1,82	1,91	-0,77

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto, Tahun 2020-2024

4. Rasio Kredit UMKM terhadap PDRB

Rasio pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana sektor UMKM berkontribusi terhadap perekonomian suatu wilayah. Rasio ini menunjukkan persentase pinjaman yang diberikan kepada UMKM dibandingkan dengan total nilai tambah yang dihasilkan oleh wilayah tersebut di Kota Dumai selama tahun 2020-2024.

Tabel 2. 114 Perkembangan Rasio Pinjaman UMKM Terhadap PDRB ADHB Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
PDRB ADHB Kota Dumai	(Rp. Milyar)	36.314	39.946	45.053	49.034	52.668	9,74
Pinjaman UMKM	(Rp. Milyar)	1.228	1.392	1.847	2.274	2.909	24,06
DPK/PDRB	(%)	3,38	3,49	4,1	4,64	5,22	11,48

Sumber: BPS, Bank Indonesia, 2024 data diolah

Rasio pinjaman UMKM terhadap PDRB ADHB Kota Dumai selama tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang baik dengan pertumbuhan sebesar 11,48% per tahun atau naik dari 3,38 tahun 2020 menjadi 5,22% tahun 2024. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan lembaga keuangan terhadap sektor UMKM dan membaiknya iklim usaha di daerah. Tren positif ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat fundamental ekonomi kerakyatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang impresif, rasio kredit UMKM Kota Dumai masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut. Akselerasi pemberian kredit UMKM perlu diimbangi dengan program pendampingan usaha, pelatihan manajemen keuangan, dan pengembangan kapasitas SDM UMKM. Kualitas kredit dan *sustainability* usaha UMKM harus menjadi fokus utama untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pengembangan platform digital untuk UMKM, integrasi dengan rantai pasok industri besar, dan penciptaan klaster usaha berbasis komoditas unggulan daerah dapat memperkuat ekosistem UMKM yang lebih kompetitif dan *resilient*.

5. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan mencerminkan persentase individu dalam angkatan kerja yang mampu menciptakan usaha. Tabel di bawah ini menyajikan data terkait ketenagakerjaan dan kewirausahaan dari tahun 2020 hingga 2024. Kolom Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dari 6.525 orang pada tahun 2020 menjadi 4.071 orang pada tahun 2022. Namun, angka ini kemudian melonjak tajam menjadi 8.882 orang pada tahun 2024, menghasilkan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,03% per tahun. Selanjutnya, Angkatan kerja menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit

fluktuasi, dimulai dari 146.586 pada tahun 2020 dan berakhir pada 158.478 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 1,06% per tahun. Kemudian Rasio Kewirausahaan yang awalnya menurun dari 4,45% pada tahun 2020 menjadi 2,74% pada tahun 2022. Akan tetapi, rasio ini mengalami peningkatan drastis menjadi 5,60% pada tahun 2024, menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang kuat sebesar 2,94% per tahun. Berikut disajikan tabel mengenai Rasio Kewirausahaan Kota Dumai Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 115 Rasio Kewirausahaan Kota Dumai Tahun 2020 - 2024

Uraian	Tahun					Pertumbuh an/tahun
	2020	2021	2022	2023	2024	
Berusaha dibantu buruh tetap/ Buruh dibayar	6.525	4.939	4.071	7.141	8.882	4,03
Angkatan kerja	146.586	144.465	148.506	156.790	158.478	1,06
Rasio Kewirausahaa n (%)	4,45	3,42	2,74	4,55	5,60	2,94

Sumber: Dumai Dalam Angka Kota Dumai, 2025

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan resiliensi dan adaptasi pasar tenaga kerja dan ekosistem kewirausahaan. Setelah menghadapi tantangan berat akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pada pekerjaan formal dan rasio kewirausahaan di awal periode 2020-2022, terjadi pemulihan yang kuat. Pemulihan ini ditandai dengan peningkatan signifikan pada jumlah usaha yang mempekerjakan buruh tetap/dibayar dan terutama, lonjakan drastis pada rasio kewirausahaan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin proaktif dalam menciptakan peluang ekonomi, dengan kewirausahaan menjadi salah satu pilar utama dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi ke depan.

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK ini merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/provinsi/kabupaten/kota. Interpretasinya, semakin tinggi TPAK kota, menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour*

supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa suatu perekonomian di kota tersebut.

Adapun perkembangan Tingkat partisipasi Angkatan kerja mengalami perkembangan yang fluktuatif. Secara rinci perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Dumai Tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 116 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Dumai Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kota Dumai	67,15	64,91	65,45	65,45	65,21	-0,73

Sumber: BPS, 2025

Fluktuasi TPAK Kota Dumai dengan kecenderungan menurun 0,73% per tahun) menjadi indikator penting yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan ketenagakerjaan daerah. Penurunan dari 67,15% pada 2020 menjadi 65,21% pada 2024 dapat mengindikasikan berbagai faktor, mulai dari meningkatnya jumlah penduduk yang melanjutkan pendidikan, perubahan struktur demografi, hingga ketidaksesuaian antara ketersediaan lapangan kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Fenomena ini perlu dianalisis lebih mendalam untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja lokal.

Optimalisasi TPAK memerlukan strategi yang holistik dalam pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Kota Dumai perlu mengembangkan program pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal, khususnya sektor industri pengolahan yang mendominasi ekonomi daerah. Penciptaan *link and match* antara institusi pendidikan dengan dunia industri, pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi, dan program pemagangan yang terstruktur dapat meningkatkan kualitas dan daya serap tenaga kerja. Investasi dalam sektor jasa dan ekonomi kreatif juga dapat membuka peluang kerja baru yang lebih beragam dan sesuai dengan karakteristik demografis daerah.

7. Indeks Inovasi Daerah

Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang binwas pemerintahan daerah, Penelitian dan pengembangan dilakukan dalam

rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan Penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan sejak tahun 2022—2024. Penunjang Urusan Bidang penelitian dan pengembangan memberikan kontribusi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta pembangunan kerja sama antar daerah yang di implementasikan melalui beberapa kegiatan antara lain. Perkembangan kinerja indikator penelitian dan pengembangan selama tahun 2022—2024, kinerja masing-masing indikator jelasnya lihat tabel berikut.

**Tabel 2. 117 Perkembangan Indeks Inovasi Daerah
Tahun 2022 - 2024**

Uraian	2022			2023			2024		
	Peringkat	Nilai	Kategori	Peringkat	Nilai	Kategori	Peringkat	Nilai	Kategori
Dumai	76	41,03	Inovatif	72	42,38	Inovatif	47	54,7	Inovatif
Riau	16	50,94	Inovatif	15	53,52	Inovatif	18	53,63	Inovatif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No.400.10.11-6287 Tahun 2025

Pencapaian Indeks Inovasi Daerah Kota Dumai yang mencapai 54,7 pada 2024 dengan peringkat 47 nasional menunjukkan progres signifikan dalam pengembangan ekosistem inovasi daerah. Peningkatan dari posisi 76 pada 2022 mengindikasikan komitmen dan efektivitas program-program inovasi yang telah diimplementasikan. Meskipun masih dalam kategori "Inovatif", capaian ini menempatkan Kota Dumai pada posisi yang *competitive* di antara daerah-daerah lain di Indonesia.

Untuk mencapai kategori "Sangat Inovatif" dan meningkatkan daya saing regional, Kota Dumai perlu memperkuat ekosistem inovasi melalui kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha (*triple helix innovation*). Pengembangan *science and technology park*, penguatan riset dan pengembangan berbasis keunggulan lokal, serta investasi dalam infrastruktur digital dan teknologi informasi menjadi kunci akselerasi inovasi. Program inkubasi teknologi, kompetisi inovasi, dan kemitraan dengan universitas dan lembaga penelitian dapat mempercepat transfer teknologi dan komersialisasi hasil riset. Fokus pada inovasi berkelanjutan yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau juga akan memperkuat posisi kompetitif Kota Dumai di masa depan.

2.3.3. Transformasi Digital

1. Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah baik dalam manajemen internal organisasi maupun dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Data aplikasi fungsional yang telah diterapkan pada Perangkat Daerah di Kota Dumai pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 118 Aplikasi Fungsional yang Digunakan Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2024

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
I	Layanan Publik		
1	Sistem Informasi Pendidikan	Dapodik	Disdikbud Kota Dumai
		PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)	Disdikbud Kota Dumai
		Dapodik	Disdikbud Kota Dumai
		PIP (Program Indonesia Pintar)	Disdikbud Kota Dumai
2	Sistem Informasi Kesehatan	ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dinkes Kota Dumai
		Sistem Informasi Hepatitis dan PISP Indonesia (SIHEPI)	Dinkes Kota Dumai
		e-KOHORT	Dinkes Kota Dumai
		Eppgbm	Dinkes Kota Dumai
		Pilar Data Esensia	RSUD Kota Dumai
		Pcare BPJS	Dinkes Kota Dumai
		SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis)	Dinkes Kota Dumai
		SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)	Dinkes Kota Dumai
		SITKO (Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga)	Dinkes Kota Dumai
		SIMKESWA (Sistem Kesehatan jiwa)	Dinkes Kota Dumai
		ASPAK (Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan)	Dinkes Kota Dumai
		SIPNAP (SISTEM PELAPORAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA)	Dinkes Kota Dumai
		e-monev HSP	Dinkes Kota Dumai
		e-monev TFU	Dinkes Kota Dumai
		SPPIRT	Dinkes Kota Dumai
		SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan)	Dinkes Kota Dumai



No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
		Registrasi Fasyankes	Dinkes Kota Dumai
		SATU SEHAT	Dinkes Kota Dumai
		SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS)	Dinkes Kota Dumai
		SISMAL (Sstem Informasi Malaria)	Dinkes Kota Dumai
		Kescatin	Dinkes Kota Dumai
		e-monev PKAM	Dinkes Kota Dumai
3	Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optimal-Sistem Informasi Daerah Binaan	SIKDA-OPTIMA. (Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optima)	Dinkes Kota Dumai
		SIDARBIN (Sistem InformasiDaerah Binaan)	Dinkes Kota Dumai
		SIPGAR (Sistem Informasi Kebugaran)	Dinkes Kota Dumai
		ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan)	Dinkes Kota Dumai
4	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	SITANJAKMAS Sistem Informasi dan Pendataan Kesejahteraan Masyarakat	Dinsospm Kota Dumai
		BANSOS SIAGA	Dinsospm Kota Dumai
		SIKS-NG	Dinsospm Kota Dumai
6	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	BAPPEDA Kota Dumai
		KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran)	BAPPEDA Kota Dumai
		E-Monev (Elektronik Monitoring dan Evaluasi)	BAPPEDA Kota Dumai
7	Sistem Informasi Penanaman Modal/Perizinan	OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP Kota Dumai
		SIPERI (Sistem Informasi Perizinan)	DPMPTSP Kota Dumai
		Antrean Online MPP Kota Dumai	DPMPTSP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	MATAHAR1	Bapenda Kota Dumai
		SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)	Bapenda Kota Dumai
		E-BILLING (Sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat nomor Kode Billing pajak)	Bapenda Kota Dumai



No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
		E-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)	Bapenda Kota Dumai
		SISMIOP (Sistem Manajemen Infomasi Objek Pajak)	Bapenda Kota Dumai
		E-BPHTB (Sistem pembayaran, pelaporan, pelayanan, dan pengawasan BPHTB elektronik)	Bapenda Kota Dumai
		Dashboard QRIS BRK Syariah	Bapenda Kota Dumai
9	CCTV Online	cctv.dumaikota.go.id	Dishub Kota Dumai
II	Administrasi dan Manajemen Umum		
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	e-BMD (Barang Milik Daerah)	BPKAD Kota Dumai
2	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	MATAHAR1	Bapenda Kota Dumai
		SIMGAJI	BPKAD Kota Dumai
		Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia	Bapenda Kota Dumai
		SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)	Bapenda Kota Dumai
3	Sistem Informasi Pengadaan	Aplikasi SPSE v4 (lpse.dumaikota.go.id)	Bagian Adm. Pembangunan Setdako Dumai
4	Sistem Informasi Pembangunan	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	BAPPEDA Kota Dumai
		Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) E-Database	BAPPEDA Kota Dumai
5	Sistem Informasi Legislasi	1. ILDIS v3 (jdih-dprd.dumaikota.go.id)	Setwan KotaDumai
		2. jdih.dumaikota.go.id	Bagian Hukum dan HAM Setdako Dumai
6	Sistem Informasi Kearsipan	JKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	DISPERSIP Kota Dumai
		SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	Dispersip Kota Dumai, Diskominfotiksan Kota Dumai
7	Sistem Informasi Perpustakaan	iDumai : portal & aplikasi perpustakaan digital yang berisikan beragam buku digital/ebook	DISPERSIP Kota Dumai
		INLISLite Versi 3	DISPERSIP Kota Dumai
8	Sistem Informasi	Aplikasi WBS (wbs.dumaikota.go.id)	Inspektorat



No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	E-LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	
		E-SAKIP (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	
		Halo Inspektur (halo-inspektur.dumaikota.go.id)	
9	Sistem Aplikasi Perkantoran	SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	Dispersip Kota Dumai, Diskominfo Kota Dumai
		Aplikasi e-Presensi	BKPSDM Kota Dumai, Diskominfo Kota Dumai
10	Sistem Administrasi Kependudukan	SiLAWO (Sistem Layanan Adminduk Warga secara Online)	Disdukcapil Kota Dumai
		SIK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Disdukcapil Kota Dumai
		IKD (Identitas Kependudukan Digital)	Disdukcapil Kota Dumai
III	Administrasi Legislasi		
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	jdi.h.dumaikota.go.id	Bagian Hukum Setdako Dumai
IV	Manajemen Keuangan		
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	BAPPEDA Kota Dumai
		e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
		SIPD Penatausahaan	BPKAD Kota Dumai
2	BPKAD.	SIMGAJI	BPKAD Kota Dumai
	Bappeda. Biro AP. Biro Organisasi dan Dispenda	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kota Dumai
VI	Manajemen Kepegawaian		
1	Sistem Informasi Kepegawaian	SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)	BKPSDM Kota Dumai
		e-Kinerja	BKPSDM Kota Dumai
		SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)	BKPSDM Kota Dumai
		SIAP (Sistem Informasi Arsip Pegawai)	BKPSDM Kota Dumai
		SI-ASN	BKPSDM Kota Dumai

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Setdako Dumai Tahun 2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa belum semua perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik. Meskipun telah mencapai progres yang baik, masih terdapat peluang untuk optimalisasi dan integrasi sistem yang lebih *seamless*. Belum semua perangkat daerah mengimplementasikan teknologi informasi secara optimal, yang mengindikasikan perlunya *roadmap* transformasi digital yang lebih terstruktur. Pengembangan sistem terintegrasi, standardisasi platform, dan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi menjadi prioritas ke depan. Investasi dalam *cybersecurity*, *data governance*, dan interoperabilitas sistem akan memperkuat fondasi transformasi digital yang berkelanjutan. Program literasi digital bagi aparatur sipil negara dan masyarakat juga perlu diperkuat untuk mendukung adopsi teknologi yang lebih luas.

2. Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Kota Dumai ada sejak tahun 2002, dan berisikan informasi tentang fasilitas kota, pemerintahan, pelayanan, dan informasi-informasi aktual yang selalu di-*update* hampir setiap hari. Dapat dikatakan situs resmi milik Pemerintah Kota Dumai ini selalu menayangkan informasi terbaru dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dan berita yang terjadi di Kota Dumai ini hanya dengan memantau *website* ini.

Tabel 2. 119 Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Website</i> milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2025

Untuk mengoptimalkan fungsi *website* sebagai sarana komunikasi dan pelayanan publik, Kota Dumai perlu mengembangkan *website* yang lebih interaktif dan *user-friendly*. Integrasi dengan sistem pelayanan *online*, pengembangan fitur *feedback* masyarakat, dan optimalisasi untuk *mobile device* akan meningkatkan aksesibilitas dan *user experience*. Pengembangan konten multimedia, infografis, dan data *visualization* dapat meningkatkan *engagement* masyarakat. Implementasi *analytics* dan monitoring system akan memberikan *insight* tentang kebutuhan informasi masyarakat dan

efektivitas komunikasi publik. *Website* juga dapat dikembangkan sebagai platform promosi potensi investasi dan pariwisata daerah.

3. Indeks SPBE Kota Dumai

Capaian indeks SPBE pada tahun 2024 sebesar 3,90 dengan predikat baik. Nilai indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dilakukan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik tahun 2024 untuk memperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah.

Target SPBE dapat tercapai karena dukungan Kegiatan Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan beberapa sub kegiatan antara lain : Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik dan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah.

Tabel 2. 120 Capaian Indeks SPBE di Kota Dumai Tahun 2020 - 2024

Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Capaian Indeks SPBE	Indeks	2,25	2,56	2,63	3,34	3,9	14,74

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai Tahun, 2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dan Perwako Dumai Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 di mana Kementerian PAN-RB mengamanatkan

Pemerintah Daerah agar dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE menjadi lebih terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, Aparatur Sipil Negara, dan instansi pemerintah. Proses Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan melalui Aplikasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<https://tauval.spbe.go.id>).

2.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer/barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Selama kurun Waktu 2020-2024, Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kota Dumai cenderung turun sebesar 2,99%. Adapun pada tahun 2020 kontribusi PMTB adalah sebesar 44,64% turun menjadi sebesar 39,54% pada tahun 2024.

Tabel 2. 121 Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)					Pertumbuhan /Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pembentukan Modal Tetap Bruto	16.210.568,19	17.019.727,70	18.785.813,34	19.967.222,54	20.825.015,80	6,46
Produk Domestik Regional Bruto	36.313.730,07	39.946.107,96	45.052.809,86	49.034.285,88	52.668.101,40	9,74
Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	44,64	42,61	41,70	40,72	39,54	-2,99

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Pengeluaran 2020-2024, data diolah.

Tren penurunan kontribusi PMTB terhadap PDRB dari 44,64% pada 2020 menjadi 39,54% pada 2024 mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan momentum investasi infrastruktur dan aset produktif di

Kota Dumai. Meskipun nilai absolut PMTB terus mengalami pertumbuhan 6,46% per tahun, rasionya terhadap PDRB menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh konsumsi dan ekspor dibandingkan investasi modal tetap. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus untuk memastikan *sustainability* pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Revitalisasi investasi modal tetap memerlukan strategi yang komprehensif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kota Dumai perlu memperkuat infrastruktur pendukung investasi, menyederhanakan prosedur perizinan, dan mengembangkan zona ekonomi khusus yang menarik bagi investor. Fokus investasi pada sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan berkelanjutan, teknologi ramah lingkungan, dan infrastruktur digital akan memberikan *multiplier effect* yang optimal. Program *Public-Private Partnership (PPP)* dapat menjadi alternatif dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sinergi antara sektor publik dan swasta. Pengembangan *smart city initiatives* dan *green infrastructure* juga akan meningkatkan daya tarik investasi jangka panjang.

2. Ekspor Perdagangan Luar Negeri

Ekspor-impor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor impor menggunakan prinsip pencatatan dengan basis aktual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Berikut disajikan tabel Ekspor Perdagangan Luar Negeri Kota Dumai Tahun 2020-2024

Tabel 2. 122 Ekspor Perdagangan Luar Negeri Kota Dumai Tahun 2020-2024

URAIAN	TOTAL					R (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Migas (Nilai USD)	243.418.556,71	370.157.792,99	366.795.309,29	244.142.934,84	349.814.990,37	9,79
Non Migas (Nilai USD)	7.955.884.217,10	9.199.978.648,59	9.068.888.765,84	6.169.229.114,35	5.448.551.300,85	-9,03
Total Nilai Ekspor (Nilai USD)	8.199.302.773,81	9.570.136.441,58	9.435.684.075,13	6.413.372.049,19	5.798.366.291,22	-8,30
Rasio Ekspor Non Migas Terhadap Total Ekspor Perdagangan Luar Negeri (Nilai USD)	97,03	96,13	96,11	96,19	93,97	-0,80

Sumber: IPSKA, Dinas Perdagangan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat ketergantungan yang tinggi pada ekspor non-migas dalam struktur perdagangan luar negeri, seperti yang ditunjukkan oleh rasio yang konsisten di atas 93%. Meskipun demikian, terjadi tren penurunan yang mengkhawatirkan pada ekspor non-migas di tahun-tahun terakhir 2023-2024, yang menyebabkan penurunan pada total nilai ekspor. Di sisi lain, ekspor migas menunjukkan rata-rata pertumbuhan positif, meskipun dengan nilai absolut yang jauh lebih kecil dibandingkan non-migas. Tantangan utama yang terlihat dari tabel ini adalah perlunya diversifikasi dan penguatan kembali sektor ekspor non-migas untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dalam perdagangan luar negeri.

2.3.5. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Bersih

Indikator rumah tangga pengguna air bersih didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Air minum/air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sumber-sumber air yang digunakan oleh rumah tangga sebagai sumber air minum/air bersih antara lain: air kemasan/isi ulang, sumur bor/pompa/leding, sumur terlindung, air hujan, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sumber utama air minum semakin mudah. Disisi lain juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait penggunaan air bersih untuk kesehatan juga semakin meningkat.

Berikut Tabel yang menguraikan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Dumai.

Tabel 2. 123 Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah rumah tangga pelanggan air bersih PDAM	672	1.052	4.348	878	12.256	106,65
Jumlah rumah tangga	94.441	82.478	83.898	82.958	84.516	-2,74
Persentase Rumah tangga pengguna air (%)	0,71	1,28	5,18	1,06	14,50	112,47

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, 2025

2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik didapatkan dari formula panjang jalan kondisi baik (km) dibagi dengan panjang jalan seluruhnya (km). Perhitungan proporsi panjang jaringan jalan mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Panjang jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2020 sepanjang 573,95 km kemudian bertambah menjadi 628,98 km tahun 2024, jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 124 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Panjang jalan kondisi baik	Km	401,15	401,15	530,84	549,48	524,16	6,92
Panjang Jalan kondisi sedang	Km	172,8	172,8	145,04	86,65	67,84	-20,84
Kondisi Jalan Mantap	Km	573,95	573,95	675,88	636,13	592,01	0,78
Panjang jalan kondisi rusak ringan	Km	42,78	42,78	172,27	158,79	147,16	36,19
Panjang jalan kondisi rusak berat	Km	581,51	581,51	350,09	403,31	329,42	-13,24
Kondisi Jalan Tidak Mantap	Km	624,29	624,29	522,36	562,1	476,58	-6,53

Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Panjang jalan seluruhnya	Km	1198,24	1198,24	1198,24	1198,24	1.068,58	-2,82
Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	47,90	47,90	56,41	53,09	55,40	3,70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2025

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap diukur untuk menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani pergerakan lalu lintas.

Optimalisasi kualitas jaringan jalan memerlukan pendekatan yang holistik dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur transportasi. Implementasi *road asset management system* dapat mengoptimalkan alokasi anggaran pemeliharaan jalan berdasarkan prioritas dan tingkat kerusakan. Penggunaan teknologi konstruksi yang lebih durable dan ramah lingkungan akan meningkatkan lifecycle infrastruktur jalan. Program *preventive maintenance* yang terstruktur akan lebih *cost-effective* dibandingkan *reactive maintenance*. Integrasi dengan sistem transportasi cerdas dan pengembangan jalan berbasis *green infrastructure* akan mendukung visi *smart city* dan *sustainable development*.

3. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
- 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota

Pencapaian SPM Perumahan Rakyat diamanatkan tercapai 100% dalam kondisi ada atau tidak adanya bencana alam. Di Kota Dumai pada tahun 2024 tidak terjadi bencana alam sehingga dilakukan Pembangunan Rumah Korban Bencana Tahun sebelumnya yang telah ter data, pembuatan Dokumen Identifikasi Perumahan, Dokumen Identifikasi Lahan Potensial,

dan DED Perumahan bagi korban bencana untuk mencapai target SPM dengan realisasi 100%

Tabel 2. 125 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penanganan Rumah Khusus Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

Sejak tahun 2020, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi kriteria: kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita, memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak dan ketahanan bangunan. Berikut disajikan tabel Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2020-2024

Tabel 2. 126 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	82,31	84,76	75,63	81,3	86,16	1,15

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau pada tahun 2024 yaitu sebesar 91,55%. Perkembangan tingkat kepemilikan rumah layak huni penduduk dan bagi rumah tangga miskin di kota Dumai mengalami peningkatan sebesar 2,70%. Kepemilikan rumah layak huni masih belum mampu didapatkan oleh sebagian masyarakat, terlihat jelas dengan adanya permukiman-permukiman kumuh bahkan di wilayah kota besar.

Pada tahun 2024 jumlah rumah tangga Kota Dumai yaitu 107.537, jika diasumsikan satu rumah tangga sama dengan satu rumah. Namun data di mana jumlah rumah layak huni dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024 yaitu 20.242 unit, sehingga angka rasio rumah layak huni Kota Dumai tahun 2024 yaitu 18,82%. Berikut tabel perkembangan tingkat kepemilikan rumah layak huni penduduk dan bagi rumah tangga miskin Kota Dumai.

**Tabel 2. 127 Perkembangan Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni
Penduduk dan Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai
Tahun 2020-2024**

Indikator	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Rumah Tangga	73.305	75.234	77.181	79.151	107.537	10,05
Jumlah Penduduk	316.782	323.452	331.832	338.064	349.389	2,48
Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga termasuk Miskin	19.349	19.469	19.855	20.133	20.242	1,13
Rasio Rumah Layak Huni	26,4	25,88	25,73	25,44	18,82	-8,11

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

Untuk mencapai target 100% akses hunian layak, Kota Dumai perlu mengembangkan strategi perumahan yang inklusif dan berkelanjutan. Program rumah bersubsidi, renovasi rumah tidak layak huni, dan bantuan stimulan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu diperkuat. Pengembangan konsep *affordable housing* dengan standar *green building* dan teknologi ramah lingkungan akan mendukung *sustainability* program perumahan. Kemitraan dengan developer swasta melalui skema *cross-subsidy* dapat mempercepat penyediaan perumahan bagi segmen masyarakat menengah ke bawah. Integrasi dengan program *smart city* dalam pengembangan digital infrastruktur di kawasan perumahan juga akan meningkatkan kualitas hidup penghuni.

**Tabel 2. 128 Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan
Bangunan Tempat Tinggal Kota Dumai Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Milik Sendiri	58,56	65,31	67,52	71,12	72,73	5,57
Kontrak/ Sewa	28,52	22,75	18,75	14,84	13,23	-17,47
Lainnya	12,92	11,94	13,73	14,04	14,04	2,10

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan data kepemilikan tempat tinggal penduduk Kota Dumai, terlihat adanya tren peningkatan proporsi rumah milik sendiri dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase rumah milik sendiri tercatat sebesar 58,56 persen dan terus meningkat hingga mencapai 72,73 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 5,57 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan

masyarakat, khususnya dalam hal kepemilikan aset hunian. Sementara itu, rumah dengan status kontrak atau sewa mengalami penurunan cukup signifikan. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 28,52 persen, kemudian terus menurun hingga hanya 13,23 persen pada tahun 2024. Laju penurunan rata-rata per tahun mencapai -17,47 persen, yang menandakan semakin banyak penduduk beralih dari rumah sewa atau kontrak menjadi rumah milik sendiri. Kategori lainnya, yang mencakup status hunian selain milik sendiri maupun sewa, cenderung relatif stabil dengan sedikit peningkatan. Persentase pada tahun 2020 sebesar 12,92 persen, kemudian naik menjadi 14,04 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 2,10 persen.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi pergeseran pola kepemilikan rumah di Kota Dumai, di mana masyarakat semakin mampu memiliki rumah pribadi, seiring dengan menurunnya ketergantungan terhadap hunian sewa atau kontrak.

4. Luas Kawasan Kumuh

Aspek lain yang tak kalah penting dalam pembangunan perkotaan adalah Kawasan kumuh. Kekumuhan suatu kawasan ditandai pada 7 aspek di antaranya yaitu : Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan dan Proteksi Kebakaran.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, pada tahun 2024 terdapat 149,71 hektar kawasan kumuh perkotaan yang tertuang di dalam SK Walikota Dumai Nomor 50.13/576/2024 dengan Persentase Kota Dumai tanpa kumuh tahun 2024 yaitu 30,92 %. Adapun lokasi-lokasi lingkungan dan permukiman kumuh perkotaan yang dimaksud tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2. 129 Kawasan Kumuh Kota Dumai Tahun 2024

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan
Bintan	Dumai Kota	Bintan	7,38
Kota Jadi	Dumai Kota	Dumai Kota Sukajadi	18,58
Rimbis	Dumai Kota	Rimba Sekampung	10,76
Palas	Dumai Timur	Tanjung Palas	6,21

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan
STDI Sesai	Dumai Barat	Pangkalan Sesai. Simpang Tetap Darul Ihsan	12,04
Bagan Nama	Dumai Barat	Bagan Keladi Purnama	19,36
Ratu Sima	Dumai Selatan	Ratu Sima	0
Bukit Sari	Dumai Selatan	Mekar Sari. Bukit Timah	19,29
Lubuk Penyembal	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung. Tanjung Penyembal	17,15
Guntung Mundam Makmur	Medang Kampai	Guntung. Teluk Makmur. Mundam	38,94

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Secara umum, rasio elektrifikasi adalah indikator yang menggambarkan persentase rumah tangga yang telah menikmati akses listrik dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga yang ada di suatu wilayah. Indikator ini tidak hanya mencerminkan tingkat ketersediaan infrastruktur energi, tetapi juga menjadi salah satu ukuran penting dalam pembangunan, karena akses listrik berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup. Berikut disajikan tabel yang menyajikan rasio elektrifikasi Kota Dumai Tahun 2020-2024

Tabel 2. 130 Rasio Elektrifikasi Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Rasio Elektrifikasi	100	99,6	99,99	99,99	99,99	0,00

Sumber: PLN dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, 2025

Berdasarkan data rasio elektrifikasi selama periode 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa akses listrik masyarakat sudah berada pada tingkat yang sangat tinggi. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi tercatat sebesar 100 persen, kemudian sedikit mengalami penurunan menjadi 99,6 persen pada tahun 2021. Namun demikian, sejak tahun 2022 hingga 2024 rasio elektrifikasi kembali meningkat dan stabil pada angka 99,99 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga telah terlayani listrik dengan sangat baik. Pertumbuhan rata-rata tahunan yang tercatat sebesar 0,00 persen mengindikasikan bahwa capaian rasio

elektrifikasi telah mencapai tingkat optimal atau mendekati titik jenuh. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi ke depan bukan lagi terkait dengan perluasan akses, melainkan lebih kepada menjaga kualitas pasokan listrik, meningkatkan keandalan jaringan, serta memastikan kontinuitas pelayanan agar masyarakat dapat memperoleh manfaat energi listrik secara berkelanjutan.

2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Perbandingan pajak terhadap pendapatan suatu perekonomian (*economy*), selanjutnya dalam analisis ini disebut rasio pajak (*tax ratio*), merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan negara, rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak suatu negara dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), sedangkan di tingkat daerah rasio pajak merupakan rasio antara pajak daerah wilayah perekonomian daerah tersebut dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka rasio pajak suatu daerah dipengaruhi oleh PDRB. PDRB dapat dilihat dari tiga sisi: produksi, pengeluaran, serta pendapatan.

Di sisi produksi, PDRB mengindikasikan kegiatan ekonomi suatu daerah yang secara umum dapat digambarkan melalui kemampuan daerah tersebut menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan hidup masyarakat pada periode tertentu. Dari sisi pengeluaran, PDRB menggambarkan keseluruhan pengeluaran yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu wilayah pada periode tertentu yaitu sektor rumah tangga (berupa konsumsi rumah tangga), sektor swasta (pembentukan barang modal/investasi), sektor pemerintah (konsumsi pemerintah di luar pembayaran non jasa / *transfer non payment*), serta sektor luar negeri (ekspor dan impor). Sementara itu, di sisi pendapatan, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan yang diterima penduduk wilayah tersebut pada suatu periode berupa gaji dan sejenisnya, sewa modal, bunga dan sejenisnya, serta laba yang dihasilkan oleh pengusaha.

Dari sisi mana pun PDRB diukur akan dihasilkan angka yang sama (setelah dilakukan penyesuaian dan koreksi). Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai

pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengetahui angka-angka rasio pajak di berbagai wilayah di Indonesia akan membantu kita dalam menganalisis secara sederhana hubungan antara pajak daerah wilayah tersebut dengan PDRB-nya, mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang potensial serta sektor ekonomi yang terkait, dan menilai kondisi suatu daerah dengan membandingkannya dengan daerah lain. Selama kurun waktu 2020-2024, Kontribusi pajak daerah terhadap PDRB Kota Dumai cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan 10%. Adapun pada tahun 2014 kontribusi pajak daerah adalah sebesar 0,46% naik menjadi sebesar 0,82% pada tahun 2024.

Tabel 2. 131 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pajak Daerah (Rp Milyar)	165,26	185,98	226,33	358,51	400	24,73
PDRB HB (Rp Milyar)	36.313,70	39.946,11	45.052,81	49.034,29	52.668,10	9,74
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,46	0,47	0,50	0,73	0,76	15,55

Sumber: Bapenda Kota Dumai, 2025 data diolah

Peningkatan signifikan rasio pajak daerah dari 0,46% pada 2020 menjadi 0,76% pada 2024 dengan pertumbuhan 15,55% per tahun menunjukkan akselerasi yang luar biasa dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan ini mengindikasikan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta membaiknya kepatuhan wajib pajak. Tren positif ini berkontribusi signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah dan kapasitas pemerintah dalam membiayai program pembangunan.

Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang impresif, rasio pajak daerah Kota Dumai masih memiliki potensi untuk ditingkatkan lebih lanjut. Optimalisasi basis pajak melalui digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan *database* wajib pajak, dan implementasi *risk-based compliance* akan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Program edukasi pajak, kemudahan pembayaran melalui digital *payment*, dan peningkatan kualitas

pelayanan pajak dapat meningkatkan *voluntary compliance*. Pengembangan *tax incentive* untuk sektor-sektor strategis dan investasi *green economy* juga dapat menjadi instrumen untuk mendorong investasi sambil tetap mengoptimalkan penerimaan pajak. Kerja sama dengan otoritas pajak pusat dalam data *sharing* dan *joint audit* akan memperkuat *law enforcement* dalam perpajakan daerah.

2. Tingkat Inflasi

inflasi merupakan indikator ekonomi makro yang mengindikasikan baik buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meskipun perekonomian secara menyeluruh semakin baik tidak berarti bahwa inflasi tidak terjadi. Terjadinya deflasi juga tidak selalu menunjukkan hal yang positif bagi perekonomian suatu daerah. Dengan kata lain, bahwa yang menjadi indikator perekonomian semakin baik jika angka inflasi suatu daerah stabil dan relatif rendah.

Perkembangan inflasi mikro menurut bulanan Kota Dumai tahun 2019-2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif di mana pada tahun 2019 inflasi tertinggi pada bulan Mei sebesar 1,05 % dan deflasi tertinggi pada bulan September sebesar 0,79 % kemudian pada tahun 2024 inflasi tertinggi pada bulan Maret sebesar 0,90% dan deflasi tertinggi pada bulan Juli sebesar 0,65%. Tabel berikut menunjukkan perbandingan Perkembangan inflasi bulanan dan inflasi tahunan (Y on Y) Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2020-2024.

Tabel 2. 132 Perkembangan Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Bulan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	0,54	0,4	0,68	0,84	0,26
Februari	0,21	-0,38	-0,38	-0,06	0,46
Maret	-0,05	-0,04	0,66	-0,02	0,9
April	-0,19	0,24	0,74	-0,16	-0,13
Mei	0,95	0,65	1,51	0,27	0,7
Juni	0,11	0,02	1,56	0,29	-0,04
Juli	-0,26	0,22	0,57	0,72	-0,65
Agustus	-0,05	-0,26	-1,05	-0,11	-0,08
September	-0,02	0,1	1,57	0,52	-0,23
Oktober	0,44	0,46	-0,59	-0,3	0,05
November	0,37	0,36	0,17	0,8	0,45
Desember	0,8	-0,13	0,88	-0,03	0,66

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025

Inflasi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara mikro. Sementara itu perkembangan inflasi sektoral tahun 20-2024 menunjukkan bahwa rata-rata inflasi tertinggi terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan mencapai 5,83% per tahun. Selanjutnya, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menempati urutan kedua yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,80% per tahun. Sedangkan rata-rata inflasi terendah selama tahun 2019-2024 adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib hanya sebesar 0,90% per tahun.

**Tabel 2. 133 Perkembangan Inflasi Sektoral Kota Dumai
Tahun 2020-2024**

No	Sektor	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	3,77	6,55	6,34	4,7	6,87	16,19
B	Pertambangan dan Penggalian	2,43	1,99	2,67	3,5	0,58	-30,10
C	Industri Pengolahan	1,29	4,71	6,39	1,89	1,94	10,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,6	-0,5	5,8	5,63	0,5	-70,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,25	-0,04	1,08	3,73	3,04	24,88
F	Konstruksi	0,38	1,32	7,61	7,38	0,5	7,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,2	2,46	4,62	1,32	3,24	10,16
H	Transportasi dan Pergudangan	5,3	3,83	7,63	6,27	9,07	14,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,24	1,6	1,88	1,92	3,42	28,87
J	Informasi dan Komunikasi	0,04	0,41	1,85	1,03	0,34	70,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,39	5,09	9,64	1,95	1,06	-40,73
L	Real Estate	-0,19	0,03	2,6	2,67	1,96	302,76
M,N	Jasa Perusahaan	1,78	-0,49	3,88	3,8	-0,65	9,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,64	0,4	1,05	0,81	-0,5	-32,55
P	Jasa Pendidikan	3,18	1,16	1,38	1,59	1,36	-19,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,53	1,07	4,01	3,4	1,32	-15,01
R,S, T,U	Jasa lainnya	2,89	1,02	3,02	2,23	1,8	-11,16
PDRB Dengan Migas		3,49	1,52	3,8	6,05	2,28	-10,10

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025, data diolah

Inflasi tahun 2024 masih termasuk dalam kategori inflasi rendah karena masih kurang dari 10%. Namun demikian ada beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian terutama terkait dengan sektor yang inflasinya mendekati 10% seperti sektor Transportasi dan Pergudangan. Untuk menjaga gejolak inflasi (*volatile food*) melalui penguatan empat pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K); Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat, dan; Memperkuat koordinasi Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui pemantauan harga sehingga empat strategi tersebut dapat dijalankan terutama sinergi meningkatkan ketersediaan pangan melalui korporatisasi dan digitalisasi sumber-sumber pengembangan dan peningkatan produksi barang dan jasa.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Dumai. Adapun hasil evaluasi kinerja Kota Dumai tahun 2021—2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2. 134 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021—2024

No	Jenis Evaluasi	Satuan	Hasil Evaluasi				Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2021	2022	2023	2024	
1	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Skor	3,081	3	3,24	3,306	2,38
2	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	2,706	2,706	2,874	3,126	4,93
3	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		50,66	52,74	66,59	66,59	9,54
4	Indeks Integritas (Hasil SPI)		-	-	75	75,18	0,24

No	Jenis Evaluasi	Satuan	Hasil Evaluasi				Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2021	2022	2023	2024	
5	Rata – Rata Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		75,01	70,79	66,81	63,58	-5,36
6	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai	69,15	67,44	68,03	3,297	-63,74
7	Skor Kapabilitas APIP	Skor	2	3	3,31	3,32	18,40
8	Skor <i>Monitoring Center for Prevention (MCP)</i> KPK	Skor	74,13	87,19	88	89,31	6,41

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2025

Inspektorat Kota Dumai persentase yang selesai ditindaklanjuti masih di bawah 100% adapun persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2019—2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 135 Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2020—2024

Uraian	Persentase Rekomendasi yang Selesai					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	72,48	83,72	86,09	85,07	82,75	3,37

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2025

Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan di Kota Dumai menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentase tindak lanjut baru mencapai 72,48%, kemudian meningkat signifikan menjadi 83,72% (2021), 86,09% (2022), 85,07% (2023), dan mencapai 82,75% pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3,37% mencerminkan adanya peningkatan kapasitas dan kesadaran organisasi perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, baik dari Inspektorat maupun lembaga pemeriksa lainnya. Hal ini menjadi indikator positif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif terhadap temuan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Peningkatan persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam memperkuat sistem akuntabilitas dan pengawasan internal. Namun demikian, masih terdapat

ruang untuk perbaikan, khususnya dalam menjaga konsistensi tindak lanjut dan mendorong capaian menuju 100%. Diperlukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kapasitas SDM pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan mengevaluasi tindak lanjut secara lebih sistematis dan *real time*.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Target dari indikator kinerja sasaran adalah memperoleh nilai indeks *e-government* sebesar 2,85 dengan realisasi 3,43 atau capaian sebesar 83%. Pencapaian terget tersebut melebihi target yang ditelah ditetapkan pada tahun 2024, indeks 3,90 tersebut mendapatkan predikat baik. Nilai indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dilakukan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik tahun 2023 untuk memperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah.

Target SPBE dapat tercapai karena dukungan Kegiatan Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan beberapa sub kegiatan antara lain: Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Tabel 2. 136 Capaian Indeks SPBE di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Capaian Indeks SPBE	Indeks	2,25	2,56	2,63	3,34	3,9	14,74

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025

Indeks SPBE Kota Dumai menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten dan signifikan selama lima tahun terakhir. Dimulai dari angka 2,25 pada tahun 2020, indeks ini meningkat menjadi 2,56 (2021), 2,63 (2022), 3,34 (2023), dan akhirnya mencapai 3,90 pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 14,74% mencerminkan adanya komitmen

kuat dari Pemerintah Kota Dumai dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan.

Kenaikan tajam terutama terlihat pada periode 2022 ke 2023, dengan lonjakan sebesar 0,71 poin. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari penguatan infrastruktur teknologi informasi, perbaikan layanan digital publik, serta peningkatan kapasitas SDM dan sistem tata kelola yang terintegrasi. Indeks SPBE yang semakin tinggi menunjukkan bahwa layanan pemerintahan semakin berbasis elektronik dan efisien, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Capaian ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju pemerintahan digital yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Peningkatan signifikan Indeks SPBE Kota Dumai dari tahun ke tahun merupakan pencapaian strategis dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital. Namun demikian, untuk menjaga momentum ini, perlu diiringi dengan penguatan regulasi, peningkatan interoperabilitas sistem, serta pemenuhan standar keamanan data dan perlindungan privasi pengguna. Ke depan, Pemerintah Kota Dumai perlu memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung melalui layanan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 Index kepuasan layanan masyarakat telah menjadi survei kepuasan masyarakat oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan layanan publik.

Dalam mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan perlu dilakukan evaluasi terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dilakukan dengan survei kepuasan masyarakat yang wajib dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. IKM Kota Dumai sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 137 Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2020 - 2024

Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83	81,11	85,03	88,75	89,78	1,98
	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan data dari tahun 2020-2024 dapat dilihat bahwa indeks kepuasan layanan masyarakat pada tahun 2024 dengan memperoleh nilai 89,79 dengan kategori Sangat Baik dan naik dari 83 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Dumai dalam kategori baik.

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1. Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan PERDA merupakan perbandingan antara Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dengan Jumlah pelanggaran PERDA. Adapun realisasi persentase penegakan PERDA pada tahun 2019 adalah sebesar 91,67% dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2023. Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan non Perizinan di Kota Dumai dengan target pengawasan sebesar 100 Pengusaha terealisasi juga 100 pengusaha dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2021 sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota dengan target jumlah usaha yang memiliki izin lengkap di Kota Dumai dengan target 100 usaha dapat direalisasikan 100 usaha dengan Capaian kinerja 100%. Sedangkan pada tahun 2024 target jumlah usaha yang memiliki izin lengkap di Kota Dumai dengan target 100 usaha dapat direalisasikan 100 usaha dengan Capaian kinerja 100%. Pertumbuhan jumlah PERDA selama tahun 2019-2024 sebesar 95,66% per tahun dengan persentase penegakan dengan pertumbuhan sebesar 2,27%.

Tabel 2. 138 Persentase Penegakan PERDA dan Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Perda	5	8	1	6	12	24,47
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	5	8	1	6	12	24,47
Persentase Penegakan Perda	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00
Jumlah Polisi Pamong Praja	98	111	122	141	147	10,67
Jumlah penduduk per 10.000*	31,68	32,35	33,18	33,81	34,94	2,48
Rasio jumlah pamong praja	3,09	3,43	3,68	4,17	4,21	8,04

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, 2024

Data menunjukkan bahwa jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang ditegakkan di Kota Dumai selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 terdapat 5 perda, meningkat menjadi 8 pada 2021, kemudian turun drastis menjadi hanya 1 perda pada 2022, sebelum kembali naik menjadi 6 pada 2023 dan melonjak menjadi 12 pada tahun 2024. Meskipun jumlah perda yang ditegakkan bervariasi, **tingkat penyelesaian penegakan Perda selalu berada pada angka 100%** setiap tahun. Artinya, seluruh perda yang tercatat selalu berhasil ditegakkan secara optimal sesuai target tahunan.

Capaian persentase penegakan perda sebesar 100% secara konsisten menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam aspek penegakan hukum dan regulasi daerah. Namun, fluktuasi jumlah perda per tahun perlu menjadi perhatian, karena dapat mencerminkan dinamika kebijakan atau prioritas legislasi yang berubah-ubah. Ke depan, diperlukan perencanaan legislasi yang lebih stabil dan terarah agar penegakan perda tidak hanya efektif, tetapi juga selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah Posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya dengan memperhatikan semua faktor-faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta seberapa jauh daerah tersebut dapat merealisasikan potensi dari faktor-faktor tersebut. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai daya saing daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta faktor-faktor pendorongnya.

Tabel 2. 139 Indeks Daya Saing Daerah di Kota Dumai Tahun 2022-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun			Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2022	2023	2024	
1	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,02	3,04	3,74	11,28
2	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	1,39	2,12	2,15	24,37

Sumber: BRIN, 2024

Indeks Daya Saing Kota Dumai menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dari 3,02 pada tahun 2022 menjadi 3,04 pada 2023, dan meningkat signifikan menjadi 3,74 pada tahun 2024. Lonjakan pada tahun 2024 mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam beberapa aspek pendukung daya saing, seperti infrastruktur, kualitas SDM, inovasi, serta efisiensi birokrasi.

Peningkatan indeks daya saing Kota Dumai merupakan sinyal positif terhadap upaya penguatan kapasitas dan daya tarik daerah. Namun, posisi Kota Dumai yang masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional menunjukkan bahwa masih diperlukan percepatan dalam pembangunan sektor-sektor strategis yang mendukung daya saing. Untuk itu, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, dan pemanfaatan inovasi daerah secara lebih sistematis dan terukur.

2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Analisis kinerja setiap urusan pemerintahan daerah disusun berdasarkan capaian indikator yang tersedia dalam periode RPJMD. Namun, perlu disampaikan bahwa terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data indikator kinerja secara utuh dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya terkait perubahan dokumen RPJMD Kota Dumai.

Pada tahun 2020, pelaksanaan pembangunan daerah masih mengacu pada RPJMD Kota Dumai periode sebelumnya (2016–2021), sehingga indikator kinerja yang digunakan pada tahun tersebut berbeda dengan indikator yang dirumuskan dalam RPJMD hasil perubahan pada tahun-tahun berikutnya. Indikator pada tahun 2020 belum sepenuhnya sejalan dengan kerangka RPJMD yang disusun setelah terjadinya perubahan kepemimpinan daerah. Kemudian pada tahun 2021, terjadi perubahan RPJMD yang dilatarbelakangi oleh adanya transisi kepemimpinan daerah pasca pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan kepala daerah. Perubahan tersebut mengharuskan penyesuaian arah pembangunan, termasuk perumusan kembali visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi tolok ukur pembangunan daerah. Kondisi serupa kembali terjadi pada awal tahun 2024, di mana dilakukan

penyesuaian terhadap dokumen RPJMD sebagai respons terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan pembangunan terkini.

Akibat dari dua kali perubahan RPJMD dalam satu periode perencanaan jangka menengah ini, terjadi ketidakterhubungan antar indikator pada rentang tahun tertentu. Beberapa indikator yang sebelumnya digunakan tidak lagi dimasukkan ke dalam kerangka pengukuran kinerja pada tahun-tahun berikutnya karena telah digantikan atau disesuaikan dengan indikator baru. Hal ini berdampak pada terjadinya kekosongan data, khususnya untuk indikator yang tidak berkesinambungan, sehingga memengaruhi kelengkapan dan kesinambungan analisis kinerja tahunan pada setiap urusan pemerintahan.

Meskipun demikian, Pemerintah Kota Dumai tetap berupaya untuk menjaga validitas data dan metodologi pengukuran kinerja melalui harmonisasi indikator, agar tetap selaras dengan kerangka perencanaan nasional, provinsi, serta kebutuhan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembacaan terhadap capaian kinerja setiap urusan dalam dokumen ini perlu mempertimbangkan konteks perubahan tersebut, sebagai bagian dari dinamika perencanaan pembangunan daerah yang adaptif.

1. Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a) Pendidikan

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 140 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata lama sekolah	10,07	10,14	10,15	10,16	10,29
Harapan lama sekolah	13,12	13,31	13,32	13,33	13,35
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	108,86	107,65	107,04	106,41	103,19
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	88,66	92,32	86,69	89,93	92,08
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,00	98,95	98,86	98,84	98,85
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	83,24	83,96	84,45	83,31	81,92
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV PAUD		43,90	42,00	72,70	52,42

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD	92,60	84,75	97,96	92,48	93,66
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP	95,40	90,88	99,55	95,88	97,73
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	9,38	8,79	9,08	8,88	25,82
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	7,84	7,54	8,35	7,46	20,07
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5-6 Tahun (PAUD)		55,38	54,48	50,90	55,87
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun (Pendidikan Sekolah Dasar)		99,53	98,86	99,85	99,63
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 13-15 Tahun (Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)		97,25	93,97	94,74	96,45
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-18 Tahun (Pendidikan Nonformal/Kesetaraan)		10,28	13,43	27,96	37,26

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai, 2025

b) Kesehatan

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 141 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dinas Kesehatan					
Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	7,35	8,26	9,96	11,36	9,33
Angka Kematian Balita per 1.000 KH	8,81	9,82	11,13	13,42	11,53
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	36,73	36,73	58,56	103,23	73,4
Umur Harapan Hidup	72,88	72,9	73,18	73,31	73,5
Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	0,01	0,01	0,02	0,02	0,026
Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA	66,57	66,57	41,42	72	71,57
Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Berisiko	2,03	2,03	0,16	0,17	0,19
Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	114,27	114,27	56,64	195,94	229,34

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Balita dengan Gizi Buruk	1,49	0,88	1,26	1,07	1,62
Persentase Balita dengan Gizi Kurang	0,41	0,38	0,69	1,1	1,62
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	85.52	-	95,8	100,02	100.02
Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	-	60,42	100	-	-
RSUD					
BOR , Persentase Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD	63	76,68	71,15	83,23	66,82
AVLOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	5,02	4,54	4,38	3,96	3,71
TOI, Rata-rata di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	3,12	1,53	1,97	1	2
BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	43,69	13,88	53,46	70,74	58,97
GDR (<i>Gross Death Rate</i>), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	44,68	36,25	42,5	35,32	31,5
NDR , Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	27,35	23,23	23,38	19,65	16,35

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai dan LKPJ Kota Dumai tahun 2020-2024, 2025

c) Pekerjaan Umum

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 142 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah tangga pengguna air	0,71	1,28	5,18	13,94	18,08
Persentase kemantapan jalan	47,9	47,9	56,41	53,09	55,4
Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	33,48	33,48	44,30	45,86	49,05

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, 2025

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 143 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	82,31	84,76	75,63	81,3	86,16
Persentase Rumah Tangga yang berdasarkan Sumber Air Minum Bersih	90,7	90,39	94,05	86,9	97,66
Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak	88,25	89,76	90,07	90,47	92,24
Rasio Rumah Layak Huni	26,4	25,88	25,73	25,44	18,82
Jumlah Drainase Lirkungan Terbangun	33	33	39	40	43

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

e) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 144 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasio jumlah pamong praja	3,09	3,43	3,68	4,17	4,21
Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	97,25	100	100	100	100
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	178	238	1.164	1.755	1886
Banyak Kejadian Kebakaran Rumah Penduduk	20 Kasus	29 Kasus	48 Kasus	46 Kasus	-
Banyak Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan	138,95 Ha	159,45 Ha	51,7 Ha	119,85 Ha	234,15 Ha
Banyak kejadian Banjir		5 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	7 Lokasi
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	16	22	17	21	22

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

f) Sosial

Capaian Kinerja Urusan Sosial Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 145 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial						
Penduduk rawan Sosial dan Sarana:						
1) Anak Jalanan	Jiwa	0	0	0	0	0
2) Gepeng (Gembel dan Pengemis)	Jiwa	10	0	48	93	57
3) Fakir Miskin	KK	21,008	41,419	47,346	44,779	46,789
4) Bayi Terlantar	Jiwa	307	307	0	0	0
5) Anak Terlantar	Jiwa	25	5	7	16	7
6) Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	423	303	121	1,714	1571
7) Penyandang Cacat Jiwa	Jiwa	347	186	595	460	111
8) Penyandang Cacat Ganda	Jiwa	0	0	34	112	21
9) Tuna Susila	Jiwa	0	0	0	0	0
10) Bekas Narapidana	Jiwa	0	0	4	0	0
11) Pengidap HIV/AIDS	Jiwa	0	0	15	0	0
12) Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jiwa	196	0	0	0	0
Jumlah Panti Asuhan		13	12	12	0	11
1) Panti Sosial Asuhan Anak	Buah	12	11	11	11	11
2) Panti Sosial Bina Remaja	Buah	0	0	0	0	0
3) Panti Sosial Tresna Wirda	Buah	1	1	1	1	1
Rumah singgah	Buah	1	1	1	1	1
Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun (RPSSS)	Buah	0	0	0	0	1
Jumlah PPKS	Orang	80,299	43,247	49206	47,174	48,556
1) PPKS Yang Tertangani	Orang	250	106	132	141	106
2) PPKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	78,862	41,419	47,346	44,779	46,789
3) PPKS Yang Diberikan Bantuan	KK	18,214	31,019	24,702	26,567	23,664
4) Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	94,07	70,75	52,17	59	50,58
5) Persentase PPKS yang tertangani	%	27,04	46,9	100	100	100
1) Karang Taruna	KT	33	33	33	36	28

Uraian	Satuan	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2) Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	Orang	7	7	7	7	7
3) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	66	66	72	74	74
4) Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang	51	48	48	46	41
5) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	LKS	11	11	11	11	11
6) Pekerja Sosial dan Pendamping PKH	Orang	30	30	25	24	24
7) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga	1	1	1	1	1
8) Keluarga Pioner	Buah	0	0	0	1	0
9) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Buah	4	4	4	4	4
10) Penyuluh Sosial	Orang	11	11	11	11	11
11) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	Orang	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial Kota Dumai, 2025

2. Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a) Tenaga Kerja

Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 146 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pencari Kerja yang Ditempatkan	112,22%	4,21%	12,18%	41,76%	21,30%
Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha	38	55	17	42	20
Persentase Pekerja Lulusan S1 / S2 / S3 (%)	0,26	0,26	0,19	0,2	0,19
Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih	0	0	71,43%	32,05%	100%
TPT (%)	8,19	6,29	5,38	5,15	4,66
Kesempatan Kerja (%)	91,81	93,71	94,62	94,85	95,34

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai tahun, 2025

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 147 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pegawai di Lembaga Pemerintah	3.946	3.936	3.950	3.785	3.785
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah PNS	2.615	2.642	2.681	2.575	2.575
Partisipasi perempuan dilembaga Swasta	66,27	67,12	67	76,64	76,64
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	6,67	6,67	7	6,67	6,67
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	49.437	5.481	51.223	48.355	51.196
Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja	9	4	23	62	50
Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja	15	3	56	62	50
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,86	90,66	90,72	90,72	91,35
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	52,97	52,97	52,54	52,58	52,2
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,31	0,41	0,46	0,41	0,28
Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	4,57	5,82	10,37	12,05	8,17
Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota	0,06	0,09	0,1	0,09	0,09
Rasio kekerasan terhadap perempuan. termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10,29	19,69	19,77	12,27	17,32

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tahun, 2025

c) Pangan

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) dibagi dengan jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama ini perlu menjadi perhatian karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang, Persentase ketersediaan pangan utama di Kota Dumai dari tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 148 Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai
Tahun 2020-2024**

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ketersediaan Pangan Utama	6,98	21,88	11,42	33,41	45,35

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2025

Persentase ketersediaan pangan utama meningkat dari 21,88% tahun 2020 naik menjadi 45,35% ditahun 2024. Penurunan terjadi di tahun 2022 yang disebabkan oleh rendahnya produksi beras di Kota Dumai yang salah satunya disebabkan oleh banjir yang merupakan kejadian tahunan yang harus dihadapi oleh para petani. Disisi lain keterbatasan lahan pertanian untuk proses produksi menjadi kendala yang sangat mempengaruhi rendahnya ketersediaan pangan utama (beras) di Kota Dumai. Lahan yang sempit membuat hasil produksi tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat akan konsumsi beras di Kota Dumai. Berikut adalah tabel pencapaian skor pola harapan pangan Kota Dumai.

**Tabel 2. 149 Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai
Tahun 2020-2024**

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Skor PPH	82,85	83	82,9	87,9	87,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Dumai, 2025

Disisi lain, rendahnya produksi pangan khususnya beras terjadi karena terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Sementara untuk menambah luasan kawasan pertanian ini sangat sulit dikarenakan kebanyakan lahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian merupakan kawasan hutan.

Agar luas kawasan pertanian ini ke depannya tidak semakin berkurang, maka sebaiknya lahan pertanian yang ada ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi atau berkelanjutan. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka tidak dialih fungsikan ke sektor non pertanian.

d) Pertanahan

Penyelesaian kasus permasalahan pertanahan yang sesuai kewenangan Kabupaten/Kota yang telah selesai diatasi, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 150 Permasalahan Pertanahan yang Sudah Diselesaikan Tahun 2024

No	Objek Permasalahan	Keterangan
1	Pembahasan lanjutan tentang surat permohonan mediasi oleh Saudara ALmizar selaku penerima kuasa dari Nurhayati, S.H. (surat kepemilikan lahan No. 80/AJB/BK/1984) terkait sengketa lahan yang bersangkutan dengan pihak sepadan (Doni Samuel Sembiring)	Sudah Selesai
2	Koordinasi dan Persamaan Presepsi Permasalahan Tanah di wilayah RT.07 Kelurahan Kampung Baru	Sudah Selesai

Sumber : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tahun 2025

e) Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 151 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020-2024

No	Indeks	Tahun					R/Tahun
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Indeks Kualitas Air	-	-	50	45,6	50,83	0,83
2.	Indeks Kualitas Udara	-	91,37	92,7	89,7	87,97	-1,26
3.	Indeks Kualitas Lahan	54,25	54,94	53,3	57	58,52	1,91
4.	Indeks Kualitas lingkungan Hidup	11,88	49,04	68,05	66,66	67,56	54,43

Sumber: KLHS RPJMD Kota Dumai 2025-2029

f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 152 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kepemilikan KTP (%)	96	96,21	96,65	99,01	99,53
Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skala nasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
Pemanfaatan data kependudukan	3 OPD	3 OPD	8 OPD	10 Opd	13 Opd
Pelayanan dokumen Kependudukan (KIA dan Akta kelahiran)	2 OPD	3 OPD	8 OPD	10 Opd	13 Opd
Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki KIA (%)	30.2	41.85	42.28	34.97	54.06

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai tahun, 2025

g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Beberapa indikator terkait aspek pemberdayaan masyarakat di antaranya: (1) Jumlah kelompok binaan PKK; (2) Posyandu aktif; (3) Kualitas sumber daya lembaga masyarakat; dan (4) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat, Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 153 Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jumlah kelompok binaan PKK	99	99	100	100	100
Jumlah PKK	41	44	44	586	1645
Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100
Jumlah Posyandu	197	197	198	198	201
Persentase Posyandu Aktif	100	100	100	100	100
Persentase LSM yang Dibina	90	90	100	-	-
Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	97	97	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025

h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 154 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TFR	4,9	3,33	2,22	2,22	2,3
Cakupan peserta KB aktif	35,923	34,475	23,49	30,301	34,015
Keluarga PraSejahtera	6.369	3.803	0	0	0
Keluarga Sejahtera I	0	0	591	591	396

Sumber: LKPJ Kota Dumai tahun 2020-2024, 2025

i) Perhubungan

(1)Jumlah Arus Penumpang Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Tabel di bawah ini menyajikan data jumlah arus penumpang umum di Kota Dumai.

Tabel 2. 155 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Terminal	Berangkat	0	5.680	7.474	0	0	0,00
	Datang	0	4.906	5.925	0	0	0,00
Pelabuhan	Berangkat	24.587	46.886	48.750	155.081	120.120	48,67
	Datang	24.691	4.693	24.490	96.178	135.498	53,06
Bandara	Berangkat	14.082	292	223	39	0	-85,96
	Datang	14.957	260	22	39	0	-86,24
Jumlah keberangkatan (Orang)		38.669	52.858	56.447	155.120	120.120	32,76
Jumlah Kedatangan (Orang)		39.648	9.859	30.637	96.217	135.498	35,97
Jumlah keberangkatan (%)		49,37	84,28	64,82	61,72	46,99	-1,23
Jumlah Kedatangan (%)		50,63	15,72	35,18	38,28	53,01	1,16

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui Terminal, Pelabuhan dan Bandara dalam rentang waktu 2020-2024 berfluktuasi. Apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (Pelabuhan) masih mendominasi di antara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun 2020-2024 jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal dan bandar

udara. Dan pada tahun 2023 bandara secara resmi tidak melayani untuk komersil sehingga tidak ada arus penumpang yang melalui bandar udara.

(2)Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Adanya pelabuhan laut, udara, dan terminal bus dapat dikatakan menjadi salah satu sarana perhubungan yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah. Kota Dumai memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu “pintu masuk” bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan ini.

Dari Tabel di bawah diketahui bahwa terdapat masing-masing satu buah pelabuhan penumpang yakni Pelindo, satu buah pelabuhan ro-ro, satu buah bandara yakni Pinang Kampai, serta satu buah terminal penumpang yakni yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Di samping dari keempat tersebut masih terdapat beberapa pelabuhan dan terminal di Kota Dumai, di antaranya tiga buah pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Caltex/Chevron yang khusus untuk mengangkut minyak mentah dan BBM. Pelabuhan Pertamina yang juga dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK. Selain itu juga terdapat terminal barang yang terletak di Bukit Jin, Jalan Kelurahan Bukit Datuk.

Tabel 2. 156 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pelabuhan Penumpang	2	2	2	2	2
Pelabuhan Ro-Ro	1	1	1	1	1
Bandara	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang	1	1	1	1	1

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024)

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat dua buah pelabuhan penumpang yakni Pelabuhan Pelindo, satu buah Pelabuhan Ro-Ro, satu buah bandara yakni Bandara Pinang

Kampai, serta satu buah terminal penumpang yakni Terminal Penumpang Tipe A yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Di samping itu masih terdapat beberapa pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Pertamina yang dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK.

(3)Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang

Beberapa aspek yang mempengaruhi angkutan umum dan barang adalah keberadaan terminal atau pelabuhan, angkutan umum dan ketertiban dalam berlalu lintas. Tabel di bawah menggambarkan kondisi aspek-aspek tersebut.

Tabel 2. 157 Aspek Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Terminal Type C	0	0	0	0	0	0,00
Angkutan Kota (Oplet)	35	35	35	32	32	-2,22
Becak Motor	54	54	54	54	54	0,00
Angkutan Online	0	0	274	252	360	14,62
Pelabuhan Rakyat	9	9	9	9	9	0,00
Jumlah Kecelakaan	53	71	81	99	79	10,49
Jumlah Pelanggaran	9.941	5.465	6.083	3.221	3.388	-23,59

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa kondisi angkutan kota (oplet), becak motor serta pelabuhan rakyat yang ada di Kota Dumai tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2023 serta untuk kondisi jumlah angkutan *online* yang terdata di Kota Dumai pada Tahun 2024 sebanyak 360 unit. Sedangkan untuk data jumlah kecelakaan dan jumlah pelanggaran selama 2 tahun terakhir tidak dapat disajikan disebabkan data resmi dikeluarkan oleh Polresta Dumai bukan Dinas Perhubungan Kota Dumai.

(4)Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi peningkatan sebanyak 2.268 Kir pada tahun 2022, terjadinya peningkatan tersebut dikarenakan pengujian KIR tidak terikat batasan administrasi sehingga kendaraan dari luar kota dapat melakukan pengujian KIR di Kota Dumai. UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor pun terus meningkatkan akreditasi serta kapasitas SDM Penguji, meskipun di tahun 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 158 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	9952	1728	3.996	3664	624	-49,96

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025)

(5)Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Dari tabel d ibawah dapat dilihat bahwa kepemilikan Kir angkutan umum menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan penurunan dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 159 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.708	9.369	2.661	4.121	624	-49,65

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025)

(6)Penerangan Jalan Umum (PJU)

Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalandimalam hari sehingga mempermudah pengguna

jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan. Fungsi utama lampu penerangan jalan umum (PJU) adalah memberikan pencahayaan buatan bagi pengguna jalan sehingga mereka merasa aman dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari. Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan barang-barang elektronik yang rentan atau dapat dikatakan memiliki umur pakai yang pendek, sehingga kegiatan perbaikan dan pemeliharaan mutlak dibutuhkan. Perbaikan dapat meliputi perbaikan jaringan, penggantian lampu yang mati, atau pun pengecekan kondisi PJU. Berikut disajikan perkembangan penyediaan PJU di Kota Dumai tahu 2019-2024.

**Tabel 2. 160 Perkembangan Penyediaan PJU Kota Dumai
Tahun 2020-2024**

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Ruas Jalan Dengan Sarana Penerangan Jalan Umum	Ruas Jalan	435	445	470	528	746	14,44
Jumlah PJU Terbangun	Lokasi	23	10	25	58	218	75,46

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025)

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif seperti terlihat dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah ruas jalan yang telah dilengkapi dengan sarana penerangan jalan umum, begitu juga dengan jumlah PJU yang terbangun pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan komitmen Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mendukung Program Khidmat Penerangan.

**Tabel 2. 161 Pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL)
di Kota Dumai Tahun 2020-2024**

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Pelanggaran	42	26	148	181	139	34,88

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025)

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Dumai dalam rentang waktu 2019-2014 mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2024 hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi di Kota Dumai serta seringnya dilakukan penertiban/pengawasan terhadap angkutan barang di jalan guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di jalan.

j) Komunikasi dan Informatika

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 162 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Layanan SPBE	2,25	2,56	2,63	3,34	3,9
Akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	-	36	111	221	98,93
Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang di Sampaikan Melalui Media	-	82	85	88	
Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektor	-	-	75	80	100
Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	-	-	75	80	80

Sumber: LKPJ Kota Dumai tahun 2020-2024, 2025

k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 163 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Koperasi Aktif	66,53	60,1	62,5	65,17	67,27
Usaha Mikro dan Kecil	16,116	6,515	8,779	11,274	12,534
Jumlah Pendamping UKM	7	7	7	7	7

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai, 2025

l) Penanaman Modal

(1)Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

PMA (Penanaman Modal Asing) merupakan pembentukan modal bisnis di Indonesia yang ditujukan untuk investor asing,

dengan sepenuhnya menggunakan modal asing atau sebagian dengan investor domestik. PMDN merupakan bentuk entitas bisnis terpopuler dan paling banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. Jumlah nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional di Kota Dumai mengalami perkembangan yang yang fluktuatif selama periode 2020 – 2024. Nilai investasi PMA tahun 2020 sebesar Rp. 5.844.192.480.000 kemudian turun menjadi Rp.2.750.961.828.217 juta tahun 2024. Nilai investasi PMDN tahun 2020 sebesar Rp. 7.117.105.500.000 kemudian naik menjadi Rp.7.473.162.700.000 tahun 2024. Berikut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada Tabel berikut.

**Tabel 2. 164 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Dumai
Tahun 2020-2024**

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PMA (Rp. Trl)	5.844.192.480. 000	8.709.022.640 .000	6.647.653.285 .000	2.740.817.920 .000	2,750,961,828 ,217
PMDN (Rp. Trl)	7.117.105.500. 000	1.444.720.200 .000	6.411.175.100 .000	1.789.228.800 .000	7,473,162,700 ,000
Jumlah	12.961.297.980 .000	10.153.742.84 0.000	13.058.828.38 5.000	4.530.046.720 .000	10,224,124,52 8,217

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun,
2025

(2) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio daya serap tenaga kerja di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuatif dengan perkembangan naik-turun. Jumlah perusahaan tidak menentukan jumlah tenaga kerja yang tinggi juga di Kota Dumai, karena ada beberapa perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi ada perusahaan yang hanya menyerap tenaga kerja yang sedikit. Perusahaan PMDN dan PMA ini jugamelibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

**Tabel 2. 165 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Dumai
Tahun 2020-2024**

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perusahaan PMA/PMDN	142	279	290	356	331
Jumlah TKI/TKA	1495	2704	3998	2499	795
Rasio Daya Serap Tenaga kerja	10,53	9,69	13,79	7,02	3,2

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025)

m) Kepemudaan dan Olahraga

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 166 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota
Dumai Tahun 2020-2024**

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah organisasi pemuda	47	47	55	55	55
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	3	2	4	4	3
Jumlah organisasi olahraga	29	29	29	29	40
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	3	2	2	3	3
Jumlah kegiatan olahraga	4	3	4	7	9
Wirausaha Muda Pemula	60	0	22	72	72
Cabor yang dilakukan pembinaan	36	40	40	40	40
Pelatih yang Bersertifikasi	30	30	30	30	30

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025

n) Statistik

Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 2. 167 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Dumai
Tahun 2020-2024**

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	75%	75%	75%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai
Tahun 2025

o) **Persandian**

Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 168 Capaian Kinerja Urusan Persandian Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	75%	75%	75%	75%	75%

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025

p) **Kebudayaan**

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2020-2024 menunjukkan angka yang stabil. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 jumlah festival seni dan budaya berjumlah 5 kegiatan sedangkan pada tahun 2023 berjumlah 6 kegiatan kemudian pada tahun 2024 jumlah festival seni dan budaya berjumlah 5 kegiatan. Adapun bentuk dari penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahun 2020-2024 adalah panggung seni rakyat, festival lampu colok, festival layang dan gasing, festival masakan tradisional, dan malam resepsi kenegaraan. Ini membuktikan bahwa upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya yang diwujudkan melalui festival dan lomba mulai menumbuhkan minat dan antusiasme masyarakat dalam melestarikan kebudayaan melayu.

Tabel 2. 169 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2020 - 2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	5	5	5	6	5

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

q) **Perpustakaan**

(1)**Jumlah Perpustakaan**

Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2020 hingga tahun 2024 cenderung mengalami

perkembangan yang fluktuatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 170 Jumlah Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Kota Dumai Tahun 2024

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan	Jumlah Pustakawan	Jumlah Yang Sudah Terakreditasi
I	Perpustakaan Umum	34	97	6	1
	Perpustakaan Kab/Kota	1	17	6	1
	Perpustakaan Kecamatan	6	7	0	0
	Perpustakaan Desa/Kelurahan	15	49	0	0
	Taman Bacaan Masyarakat	12	24	0	0
II	Perpustakaan Sekolah	210	394	0	28
	Perpustakaan SD (Negeri/Swasta)	108	214	0	11
	Perpustakaan SMP (Negeri/Swasta)	38	100	0	9
	Perpustakaan SMA (Negeri/Swasta)	16	32	0	5
	Perpustakaan SMK (Negeri/Swasta)	16	16	0	2
	Perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah	7	7	0	0
	Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah	16	16	0	1
	Perpustakaan Madrasah Aliyah	9	9	0	0
III	Perpustakaan Perguruan Tinggi	7	12	2	0
IV	Perpustakaan Khusus	13	29	0	0
	Perpustakaan Instansi/OPD	8	11	0	0
	Perpustakaan Rumah Ibadah	0	0	0	0
	Perpustakaan Pondok Pesantren	5	18	0	0
Total		264	532	8	29

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2025)

(2)Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan Kota Dumai tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan yang fluktuatif sebanyak 9.100 pengunjung ditahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 33.672 pengunjung.

Sedangkan untuk jumlah anggota perpustakaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 171 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	9.100	11.630	33.301	33.418	33.672
Jumlah Anggota Perpustakaan	90	97	253	6.716	7.400

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2025

(3) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kota Dumai dari rentang waktu tahun 2020-2024 sebanyak 54.976, baik melalui pembelian buku oleh perpustakaan daerah sendiri maupun hibah buku keperpustakaan daerah oleh pihak lain. Berikut disajikan jumlah koleksi buku perpustakaan Kota Dumai

Tabel 2. 172 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah	53.557	54.202	54.202	54.723	54.976
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	0	0	64,6	0	64,46
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	0	61,87	68,42	70
Nilai Pengawasan Kearsipan	63,01	30,92	36,55	45,65	35,01

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2025

r) Kearsipan

Pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan. Kegiatan pengelolaan arsip secara baku yang dilakukan oleh perangkat daerah yang ada di Kota Dumai, berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan

Arsip untuk persentase arsip daerah yang dapat dikelola seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 173 Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokumen Arsip	3.549	3.549	3.549	3.549	3.399

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2025)

3. Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan

a) Kelautan dan Perikanan

Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 174 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Konsumsi Ikan (Kg per Perkapita)	44,75	45,19	49,64	44,83	44,83
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	293,78	311,77	382,69	344,07	292,44
Cakupan Binaan Kelompok Nelayan (kelompok)	29	32	18	23	25
Cakupan Binaan Kelompok Pembudidayaan Ikan (kelompok)	34	37	31	47	44
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	978,52	710,57	1.020,30	1.057,43	1.280,27

Sumber: Dinas Perikanan, 2025

b) Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan domestik dari tahun 2020-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 23,65% per tahun. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dampak pandemi Covid-19 di mana pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 12.908 jiwa sedangkan pada tahun 2024 mencapai 13.500 jiwa. Berikut disajikan tabel kunjungan wisatawan Kota Dumai.

Tabel 2. 175 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					R (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Wisatawan Domestik	81.202	39.325	46.258	78.481	95.300	4,08

Indikator	Tahun					R (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Wisatawan Mancanegara	12.908	3.834	5.040	6.031	13.500	1,13
Jumlah	94.110	43.159	51.298	84.512	108.800	3,69

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun, 2025

c) Perdagangan

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 176 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB ADHB	14,48	14,7	14,09	13,97	14,43
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB ADHK	-10,3	9,02	3,33	6,44	7,52
Net Ekspor Barang dan Jasa (USD Juta)	3,961.57	7,480.15	9,161.79	10,387.08	11,637.15

Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025

d) Perindustrian

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Dumai selama tahun 2020-2024, di mana pada tahun 2020 sebesar 59,96% kemudian naik menjadi 60,42% tahun 2024 pada PDRB ADHB dengan pertumbuhan sebesar 0,92% per tahun sedangkan pada PDRB ADHK turun dari 3,01 tahun 2020 menjadi 3,95% tahun 2024.

Kondisi ini menggambarkan terjadinya percepatan pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa serta harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor lainnya. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Dumai dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 177 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan PDRB - ADHB	59.96	60.82	61.79	61.25	60.42
Industri Pengolahan PDRB - ADHK	3.01	6.56	7.72	5.87	3.95

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

4. Kinerja Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan

a) Perencanaan dan Kelitbangan

Capaian Kinerja Urusan Perencanaan dan Kelitbangan Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 178 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan dan Kelitbangan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	-	-	79,85	96,4	95,02
Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi	100	100	100	100	100
Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100	100	100	100	100
Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100	100	100	100	100
Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	-	-	20	25	-

Sumber: LKPJ Kota Dumai tahun 2020-2024, 2025

b) Keuangan

Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kota Dumai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 179 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PAD (Rp. Miliar)	378,8	366,69	464	566,03	604,72
Pajak Daerah (Rp. Miliar)	165,26	185,98	226,33	358,51	400
Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	17,08	12,54	21,7	58,4	11,57
Retribusi Daerah (Rp. Miliar)	32,67	23,78	32,21	43,13	51,54
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah (%)	5,05	-27,21	35,45	33,9	19,5
Penerimaan PBB (Rp. Miliar)	91,4	97,36	134,83	161,19	278,8
Persentase Peningkatan PBB (%)	11,12	6,52	38,49	19,55	72,96

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

c) Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Indikator pada aspek kepegawaian antara lain: (1) Persentase pelanggaran disiplin; (2) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; (3) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.

Pasca disahkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka indikator kinerja terkait aspek kepegawaian di antaranya: (1) Persentase pelanggaran disiplin; (2) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; (3) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah. Adapun jumlah ASN yang mendapat teguran karena melakukan pelanggaran disiplin selama periode 2020-2024 dan jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 2. 180 Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin dan Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM) Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ASN yang Melakukan Pelanggaran Disiplin	5	4	6	6	7
Jumlah ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM)					
- PIM II	0	0	2	9	3
- PIM III	0	0	34	26	0
- PIM IV	0	0	0	0	0

Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2025

d) Pendukung Pemerintahan

Capaian Kinerja Urusan Pendukung Pemerintahan Kota Dumai tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 181 Capaian Kinerja Urusan Pendukung Pemerintahan Kota Dumai Tahun 2021-2024

Indikator	Realisasi Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya Kerja sama Antar Daerah	-	6	2	7
Terlaksananya Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ke Tiga	-	7	6	15
Terlaksananya Kerja Sama dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	-	0	1	0
Tercapainya Pembinaan BUMD	-	3	3	3
Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	-	15	30	70
Jumlah Kerja sama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	-	2	6	5
Persentase Capaian Penegasan batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	-	25	29.2	33.30
Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan	-	24	30	0
Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	92	95	95	95
Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat kelengkapan DPRD satuan RKT	Ada	Ada	85	85
Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada	Ada	95	95
Terintegrasinya program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada	95	95

Sumber: LKPJ Kota Dumai tahun 2021-2024, 2025

e) Pengawasan

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Dumai merupakan salah satu indikator pada aspek pengawasan. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Riau atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan oleh

Pemerintah Kota Dumai. Adapun hasil penilaian SAKIP Kota Dumai tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2. 182 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	61,33	63,77	64,2	64,99	65,48
Predikat	B	B	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Dumai Tahun, 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Agar terwujud pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Indikator lainnya pada aspek pengawasan adalah persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan jumlah dokumen yang *direview* setiap tahunnya. Kedua indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai mulai tahun 2016. Berdasarkan data dari Inspektorat Kota Dumai, pada tahun 2020 persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 72,48%, naik menjadi 82,75% pada tahun 2024.

Jumlah rekomendasi temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau tahun 2024 adalah sebanyak 80 rekomendasi, sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 6. Sedangkan jumlah rekomendasi temuan Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah sebanyak 261 rekomendasi, sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 161.

Tabel 2. 183 Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	72,48	83,72	86,09	85,07	82,75

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2025

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kota Dumai telah menyesuaikan pengelolaan keuangannya berdasarkan regulasi tersebut. Berbagai aturan lain yang berkaitan dengan keuangan daerah juga menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan fiskal.

APBD Kota Dumai disusun berdasarkan hasil musyawarah yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan menjadi instrumen utama dalam mendukung pembangunan daerah. Sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Riau, strategi pembangunan ekonomi kota ini diarahkan untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas serta merata, dengan tujuan utama mengatasi permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Untuk itu, berbagai sektor strategis, termasuk jasa, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), serta pertanian, terus dikembangkan agar lebih produktif dan kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Setiap tahun, penyusunan APBD bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara kebijakan ekonomi makro dan pemanfaatan sumber daya daerah, sekaligus mengalokasikan anggaran secara efektif agar selaras dengan kebijakan pemerintah. Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi prioritas, terutama dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang, seperti perkembangan teknologi informasi, guna mempercepat pembangunan daerah. Selain itu, sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih efektif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

2.5.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada periode lima tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, kondisi keuangan daerah Kota Dumai mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Beberapa komponen sumber pendapatan daerah Kota Dumai dalam lima tahun terakhir, mengalami variasi yang dipengaruhi oleh perubahan alokasi dana dari pemerintah pusat, dinamika perekonomian lokal, serta pengelolaan potensi pendapatan asli daerah.

Belanja daerah juga mengalami penyesuaian untuk mendukung program pembangunan, pelayanan publik, serta pemeliharaan infrastruktur yang ada. Kondisi tersebut mencerminkan tantangan dan pencapaian dalam pengelolaan keuangan daerah. Kinerja APBD Kota Dumai dapat dilihat pada tabel realisasi APBD berikut.

Tabel 2. 184 Kinerja APBD Kota Dumai

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN					
	A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	378.738.044.466,72	366.696.884.199,75	464.003.743.318,86	566.032.061.798,00	606.665.799.254,66
	B. PENDAPATAN TRANSFER	1.046.035.527.839,61	879.612.437.425,39	906.194.705.147,00	1.344.163.895.683,00	1.185.534.647.301,00
	C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.900.800.000,00	40.695.763.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.465.674.372.306,33	1.287.005.084.625,14	1.370.198.448.465,86	1.910.195.957.481,00	1.792.200.446.555,66
2	BELANJA DAERAH					
	BELANJA OPERASI	1.061.632.401.624,52	1.105.414.852.748,84	1.246.579.389.430,03	1.453.409.582.381,98	1.438.582.957.069,90
	BELANJA MODAL	244.706.629.874,33	199.818.329.751,39	260.201.936.711,64	493.541.316.697,68	370.176.158.802,84
	BELANJA TAK TERDUGA	116.895.885.135,00	9.056.476.757,00	260.289.017,00	102.160.723,00	324.551.700,00
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-
	Jumlah Belanja	1.423.234.916.633,85	1.314.289.659.257,23	1.507.041.615.158,67	1.947.053.059.802,66	1.809.083.667.572,74
	Surplus (Defisit)	42.439.455.672,48	(27.284.574.632,09)	(136.843.166.692,81)	(36.857.102.321,66)	(16.883.221.017,08)
3	Pembiayaan					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	154.444.291.622,69	195.481.309.973,34	262.260.776.307,14	107.418.609.614,33	25.561.967.507,67
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	18.000.000.000,00	45.000.000.000,00	-
	Pembiayaan Netto	154.444.291.622,69	195.481.309.973,34	280.260.776.307,14	152.418.609.614,33	25.561.967.507,67
	Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan	195.481.309.973,34	168.196.735.341,25	107.392.513.090,33	25.561.507.292,67	8.678.746.490,59

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai, 2025 (data diolah)

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam hal struktur pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah yang meliputi : a. pajak daerah, b. retribusi daerah, c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- Pendapatan Transfer yang meliputi : a. transfer Pemerintah Pusat, dan b. transfer antar-daerah; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang meliputi : a. hibah, b. dana darurat, atau c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tabel realisasi pendapatan daerah Kota Dumai tahun 2020–2024, terlihat bahwa pendapatan daerah tumbuh rata-rata 13,75% per tahun. Pertumbuhan tertinggi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik signifikan hingga 30,51%, terutama ditopang oleh pajak daerah yang melonjak dari Rp165,26 miliar (2020) menjadi Rp531,75 miliar (2024). Hal ini menunjukkan meningkatnya kemampuan fiskal daerah dalam menggali sumber pendapatan lokal. Namun, kontribusi pendapatan transfer masih mendominasi meski pertumbuhannya hanya 8,28%, dengan porsi terbesar dari transfer pemerintah pusat. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah berhenti dicatat setelah 2021, sehingga sumber pendapatan semakin terfokus pada PAD dan transfer. Di sisi lain, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah masih memberikan kontribusi relatif kecil, dengan rata-rata hanya sekitar Rp.7–65 miliar per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ketergantungan pada transfer pusat mulai berkurang, Kota Dumai masih perlu mengoptimalkan retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah sebagai sumber PAD alternatif agar struktur pendapatan lebih berimbang. Adapun lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

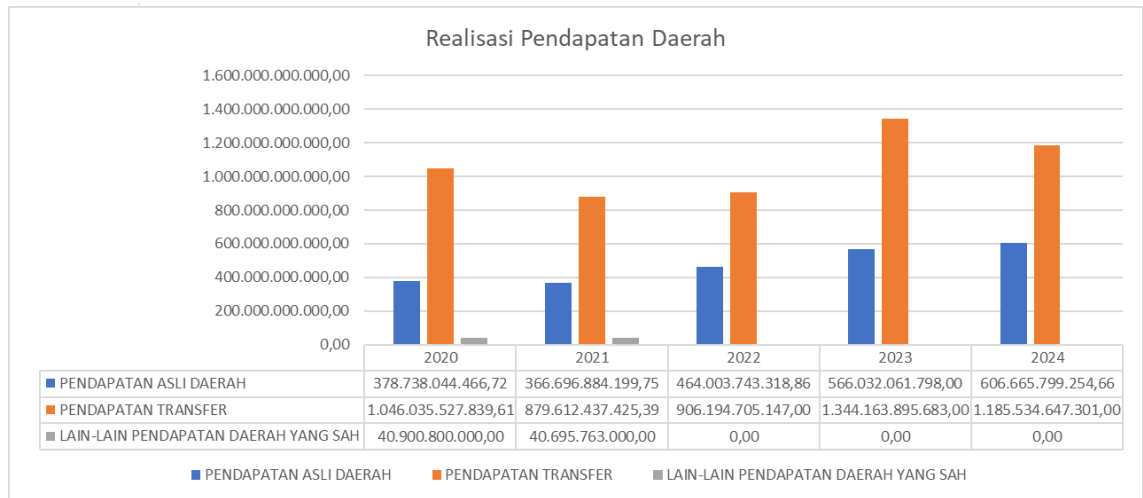
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2. 185 Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan
PENDAPATAN DAERAH	1.465.674.372.306,33	1.287.005.084.625,14	1.370.198.448.465,86	1.910.195.957.481,00	1.792.200.446.555,66	5,16
PENDAPATAN ASLI DAERAH	378.738.044.466,72	366.696.884.199,75	464.003.743.318,86	566.032.061.798,00	606.665.799.254,66	12,50
Pendapatan Pajak Daerah	165.259.957.085,00	185.979.625.987,00	226.332.093.315,36	358.508.134.419,00	400.061.670.918,00	
Pendapatan Retribusi Daerah	32.672.832.980,00	23.776.863.396,46	32.206.368.295,17	43.131.076.576,00	51.540.371.040,00	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.242.457.348,00	1.415.125.255,00	1.079.761.191,00	1.215.970.725,00	1.160.105.174,00	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	179.562.797.053,72	155.525.269.561,29	204.385.520.517,33	163.176.880.078,00	153.903.652.122,66	
PENDAPATAN TRANSFER	1.046.035.527.839,61	879.612.437.425,39	906.194.705.147,00	1.344.163.895.683,00	1.185.534.647.301,00	3,18
Tranfer Pemerintah Pusat	917.175.087.631,00	763.025.612.681,00	778.721.000.729,00	1.176.303.738.791,00	1.084.022.143.800,00	4,27
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	243.996.573.029,00	145.468.956.587,00	167.642.355.626,00	504.507.844.598,00	387.786.806.620,00	
Dana Alokasi Umum (DAU)	424.090.440.000,00	429.427.931.000,00	427.742.257.138,00	448.604.069.635,00	489.493.057.306,00	
Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	203.368.509.602,00	156.525.480.094,00	61.389.147.488,00	47.075.071.699,00	38.187.983.525,00	
Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	-	-	101.586.344.477,00	129.642.361.859,00	134.963.209.349,00	
Dana Insentif Daerah	45.719.565.000,00	31.603.245.000,00	20.360.896.000,00	46.474.391.000,00		
Insentif Fiskal					33.591.087.000,00	
Transfer antar Daerah	128.860.440.208,61	116.586.824.744,39	127.473.704.418,00	167.860.156.892,00	101.512.503.501,00	-5,79
Pendapatan bagi hasil	88.124.940.208,61	108.598.824.744,39	119.057.454.418,00	160.348.644.092,00	89.233.503.501,00	
Bantuan keuangan	40.735.500.000,00	7.988.000.000,00	8.416.250.000,00	7.511.512.800,00	12.279.000.000,00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.900.800.000,00	40.695.763.000,00	0,00	0,00	0,00	
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	40.900.800.000,00	40.695.763.000,00	-	-		

Sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai 2024; Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 2024 (data diolah)

Pada gambar berikut ini digambarkan perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Dumai dari tahun 2020-2024.

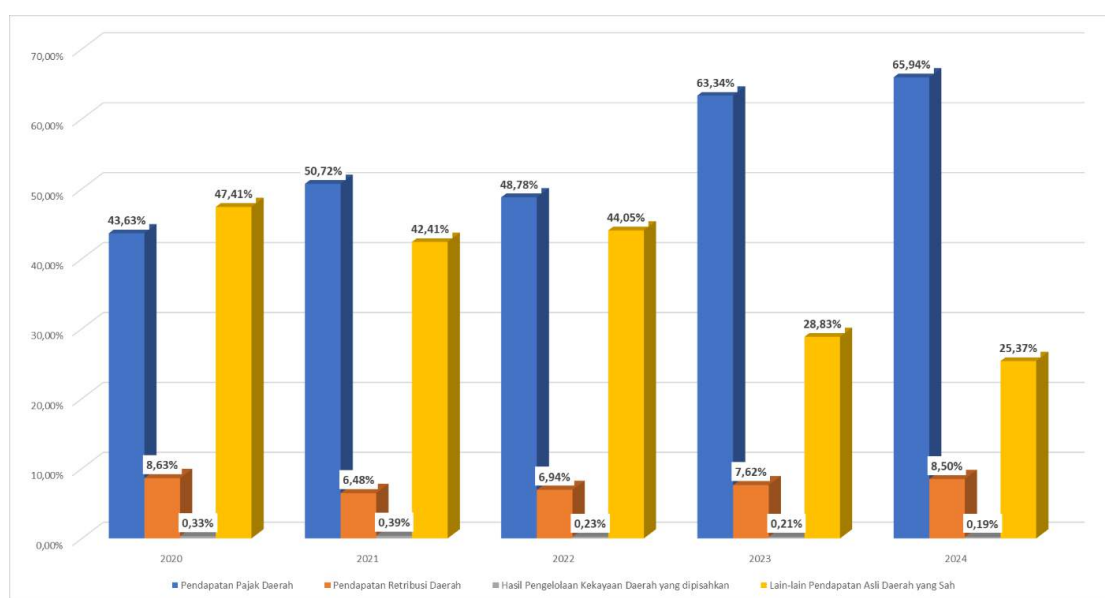


Gambar 2. 39 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Dumai dari Tahun 2020-2024

Sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai 2024; Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 2024 (data diolah)

Selama tahun 2020 hingga 2024 Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai mengalami peningkatan signifikan. selama periode tersebut PAD Kota Dumai meningkat menjadi senilai Rp 1.792.200.446.555,66 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,16% per tahun selama periode 2020-2024. Pendapatan Daerah tahun 2020–2024 menunjukkan tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 5,16%. Kenaikan terutama ditopang oleh PAD yang tumbuh rata-rata 12,50%, dengan kontribusi terbesar dari pajak daerah yang naik signifikan hingga Rp400,1 miliar pada 2024. Pendapatan transfer tetap menjadi sumber utama meskipun berfluktuasi, terutama dari Dana Bagi Hasil dan DAU, sementara DAK Fisik cenderung menurun. Adapun pos lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya terealisasi hingga 2021 dan tidak tercatat lagi pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan kontribusi pajak daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti melemahnya aktivitas ekonomi lokal, misalnya pada sektor perdagangan, jasa, maupun industri yang berdampak langsung pada basis pajak. Kedua, tingkat kepatuhan wajib pajak yang menurun, baik karena kesulitan ekonomi masyarakat maupun lemahnya sistem pengawasan dan penegakan aturan. Ketiga, adanya potensi kebocoran penerimaan pajak akibat keterbatasan sistem digitalisasi dan transparansi dalam pemungutan.

Adapun pos lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya terealisasi hingga 2021 dan tidak tercatat lagi pada tahun-tahun berikutnya. Retribusi daerah memberikan kontribusi relatif kecil, hanya berkisar 6–10% sepanjang periode, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hampir tidak berkontribusi dengan angka 0–1%. Kondisi ini menunjukkan bahwa PAD Kota Dumai masih bertumpu pada pajak daerah, sementara potensi retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah belum tergarap optimal, sehingga diversifikasi sumber PAD perlu diperkuat guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Secara lebih jelas, struktur PAD Kota Dumai 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut,



Gambar 2. 40 Grafik Struktur Pendapatan Daerah Kota Dumai tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai 2024; Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 2024 (data diolah)

Kondisi kemandirian fiskal daerah dapat dilihat dari perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kota Dumai dalam lima tahun terakhir. Data berikut menampilkan tren realisasi pendapatan, transfer, dan PAD yang mencerminkan tingkat ketergantungan keuangan daerah. Kapasitas fiskal daerah Kota Dumai tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa mencapai rata-rata 0,32 atau berkisar antara 0,25-0,50. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kota Dumai terklasifikasi tidak mandiri. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Dumai terhadap pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi atau dengan kata lain peranan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam keuangan daerah Kota Dumai masih dominan. Selain itu, kondisi Kapasitas Fiskal Daerah Kota Dumai dipengaruhi oleh rendahnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan dan Pendapatan Retribusi Daerah. Rendahnya retribusi biasanya disebabkan keterbatasan objek pungutan, tarif yang relatif kecil, serta tingkat kepatuhan masyarakat yang belum optimal. Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah cenderung minim karena kinerja BUMD belum maksimal, skala usaha masih terbatas, dan penyertaan modal pemerintah daerah relatif kecil sehingga dividen atau laba yang diterima tidak signifikan. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2. 186 Kapasitas Fiskal Daerah Kota Dumai tahun 2020-2024

URAIAN	PENDAPATAN DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPATAN TRANSFER	KFD
2020	1.465.674.372.306,33	378.738.044.466,72	1.046.035.527.839,61	0,26
2021	1.287.005.084.625,14	366.696.884.199,75	879.612.437.425,39	0,28
2022	1.370.198.448.465,86	464.003.743.318,86	906.194.705.147,00	0,34
2023	1.910.195.957.481,00	566.032.061.798,00	1.344.163.895.683,00	0,30
2024	1.792.200.446.555,66	606.665.799.254,66	1.185.534.647.301,00	0,34

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai 2024; Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 2024 (data diolah)Belanja Daerah

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- Belanja Operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- Belanja Modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
- Belanja Transfer yaitu pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

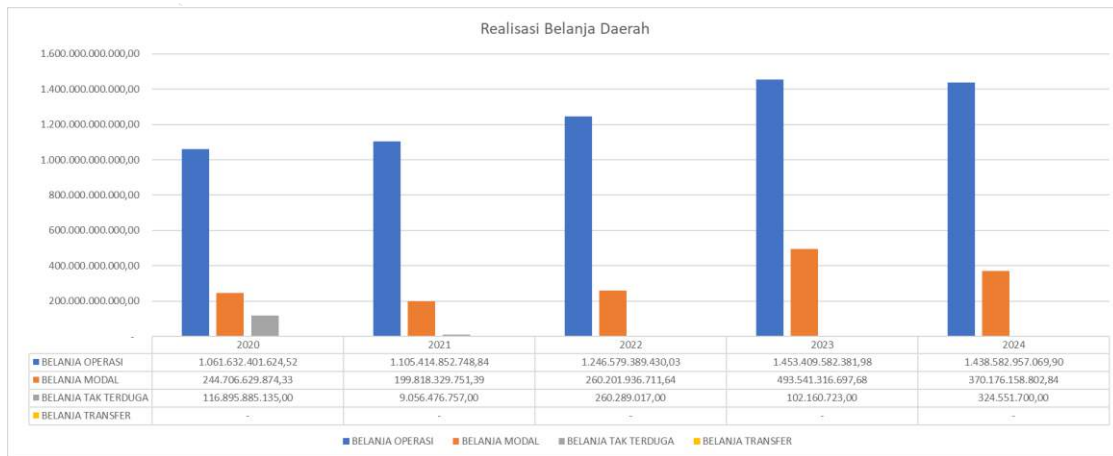
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2. 187 Realisasi Belanja Kota Dumai Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi Belanja					Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA DAERAH	1.423.234.916.633,85	1.314.289.659.257,23	1.507.041.615.158,67	1.947.053.059.802,66	1.809.083.667.572,74	6,18
BELANJA OPERASI	1.061.632.401.624,52	1.105.414.852.748,84	1.246.579.389.430,03	1.453.409.582.381,98	1.438.582.957.069,90	7,89
Belanja Pegawai	516.330.812.752,00	587.860.841.072,00	649.325.852.373,00	676.986.867.844,60	725.984.432.646,00	
Belanja Barang dan Jasa	505.749.913.372,52	481.698.811.775,84	559.998.434.987,95	700.247.720.233,49	612.399.464.331,11	
Belanja Bunga	-	-	1.060.377.070,00	4.139.515.445,00	1.813.245.312,00	
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
Belanja Hibah	35.706.875.500,00	35.855.199.901,00	23.282.916.899,08	67.168.778.858,89	88.943.514.780,79	
Belanja Bantuan Sosial	3.844.800.000,00	-	12.911.808.100,00	4.866.700.000,00	9.442.300.000,00	
BELANJA MODAL	244.706.629.874,33	199.818.329.751,39	260.201.936.711,64	493.541.316.697,68	370.176.158.802,84	10,90
Belanja Tanah	417.533.120,94	17.000.000,00	3.534.281.800,00	4.474.680.000,00	19.706.460,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	79.237.744.886,87	84.487.469.177,00	91.334.440.997,63	99.265.340.501,15	54.840.692.076,00	
Belanja Gedung dan Bangunan	70.743.218.181,13	52.685.031.521,31	87.322.813.477,02	125.625.416.264,67	86.543.178.916,80	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.745.131.364,39	56.397.085.845,08	73.340.485.070,99	258.451.537.963,86	222.453.961.255,04	
Belanja Asset Tetap Lainnya	15.563.002.321,00	6.231.743.208,00	4.669.915.366,00	5.724.341.968,00	6.218.649.055,00	
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	99.971.040,00	
BELANJA TAK TERDUGA	116.895.885.135,00	9.056.476.757,00	260.289.017,00	102.160.723,00	324.551.700,00	-77,05
Belanja Tak Terduga	116.895.885.135,00	9.056.476.757,00	260.289.017,00	102.160.723,00	324.551.700,00	
BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	
Transfer /Bagi Hasil Ke Desa	-	-	-	-	-	
Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	
Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	
Transfer/Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	
Transfer Bantuan Keuangan Ke Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-	-	-	-	-	
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	
Surplus (Defisit)	42.439.455.672,48	-27.284.574.632,09	-136.843.166.692,81	-36.857.102.321,66	-16.883.221.017,08	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai, 2025

Gambar berikut ini digambarkan perkembangan realisasi belanja daerah Kota Dumai dari tahun 2020-2024.

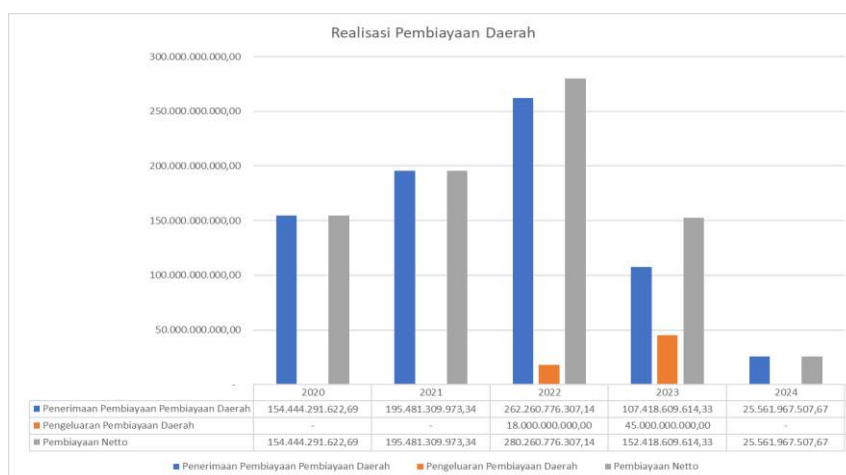


Gambar 2. 41 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kota Dumai dari Tahun 2020-2024

Sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai, 2024 (data diolah)

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Gambaran Pembiayaan Daerah Kota Dumai lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.



Gambar 2. 42 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Dumai dari Tahun 2020-2023

Sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai,2024 (data diolah)

4. Neraca Daerah

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada pasal 320 disebutkan kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Salah satu laporan keuangan tersebut adalah Neraca daerah. Laporan Neraca terdiri dari akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas dana.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Sedangkan analisis rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Tabel di bawah menggambarkan perkembangan neraca daerah Kota Dumai selama kurun waktu 2019-2023.

Tabel 2. 188 Perkembangan Neraca Daerah Kota Dumai

Uraian	Tahun					Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	180.523.375.691,57	141.438.187.794,38	99.365.595.756,32	18.485.389.928,90	197.024.772,64	
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	334.000,00	60.277.437,00	72.800.000,00	741.962.075,00	
Kas di Bendahara Penerimaan	6.754,00	-	-	1.378.000,00	151.360,00	
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	14.858.775.821,60	26.691.058.326,87	7.902.462.768,01	4.855.759.658,77	6.210.457.206,95	
Kas di Badan Layanan Umum Daerah Lainnya	-	-	-	-		
Kas di Bendahara BOS	111.096.469,33	68.938.982,00	115.792.949,51	78.391.220,00	78.233.974,00	
Kas Dana BOK Puskesmas	-	-	-	2.067.788.485,00	1.271.977.052,00	
Kas Lainnya		168.578.067,00	295.262.912,00	404.280.306,00	401.512.866,00	
Investasi Jangka Pendek	-	-		-		
Piutang Pajak Daerah	109.841.111.109,45	119.990.864.839,45	123.461.182.102,15	135.299.814.472,45	151.263.653.072,45	
Piutang Retribusi	1.995.132.229,09	1.906.918.879,09	1.938.872.529,09	1.857.328.129,09	1.854.339.729,09	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	418.563.386,64	71.374.492.248,15	29.085.651.138,52	33.180.760.381,52	28.826.566.654,33	
Piutang Dana Bagi Hasil	-	-				
Piutang Dana Alokasi Umum	-	-				
Piutang Dana Alokasi Khusus	-	-				
Piutang Transfer - DBH Provinsi	-	9.656.723.625,00	29.390.520.807,00	19.681.848.146,00	64.947.113.894,00	
Piutang Lainnya	30.563.991.102,55	291.428.679,64	-			
Penyisihan Piutang	-69.718.264.795,67	-90.643.237.451,68	-83.863.366.847,86	-87.097.106.400,64	-98.356.226.354,54	
Persediaan	29.624.460.779,82	50.892.554.145,49	33.459.430.232,56	32.036.048.271,66	29.845.201.227,88	
Beban Dibayar Dimuka	156.888.851,49	114.500.000,00	-			
JUMLAH ASET LANCAR	298.375.137.399,87	331.951.342.135,39	241.211.681.784,30	160.924.480.598,75	187.281.967.529,80	-10,99
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-			

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Uraian	Tahun					Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Investasi Dalam Surat Utang Negara	-	-	-			
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	-	-	-			
Dana Bergulir	-	-	-			
Investasi Non Permanen Lainnya	8.888.580.000,00	8.623.980.000,00	8.620.480.000,00	8.619.480.000,00	8.618.980.000,00	
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	-8.655.580.000,00	-8.390.980.000,00	-8.620.480.000,00	-8.619.480.000,00	-8.618.980.000,00	
Jumlah Investasi Non Permanen	233.000.000,00	233.000.000,00	-	-		
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	71.113.217.241,69	57.769.848.837,39	51.088.523.186,33	47.730.883.255,82	47.547.723.757,82	
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-		
Jumlah Investasi Permanen	71.113.217.241,69	57.769.848.837,39	51.088.523.186,33	47.730.883.255,82	47.547.723.757,82	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	71.113.217.241,69	57.769.848.837,39	51.088.523.186,33	47.730.883.255,82	47.547.723.757,82	-9,57
ASET TETAP						
Tanah	653.472.484.715,03	661.486.214.865,96	663.869.747.203,42	641.616.223.493,36	636.758.496.414,79	
Peralatan dan Mesin	699.978.979.229,79	776.533.030.032,11	847.100.176.538,41	936.849.267.226,53	987.223.878.337,63	
Gedung dan Bangunan	936.675.745.669,98	1.014.947.165.081,88	1.081.480.906.107,57	1.260.305.445.581,62	1.438.147.053.681,68	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.331.528.624.882,91	2.390.039.096.680,91	2.457.323.337.875,90	2.761.894.391.338,97	3.124.256.958.303,31	
Aset Tetap Lainnya	50.807.956.455,74	56.223.639.963,74	59.805.527.274,44	64.641.022.906,44	71.161.854.646,44	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	211.542.081.250,59	217.661.117.431,33	259.619.088.807,87	235.261.100.237,63	274.875.995.096,04	
Akumulasi Penyusutan	-2.263.702.156.187,90	-2.437.848.269.174,51	-2.599.700.211.378,08	-2.787.224.599.317,67	-2.990.125.135.294,28	
JUMLAH ASET TETAP	2.620.303.716.016,14	2.679.041.994.881,42	2.769.498.572.429,53	3.113.342.851.466,88	3.542.299.101.185,61	7,83
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-		
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-		
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran	69.300.000,00	69.300.000,00	69.300.000,00	69.300.000,00	69.300.000,00	
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	846.288.500,00	846.288.500,00	1.073.670.980,27	203.761.657,27	203.761.657,27	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Uraian	Tahun					Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	8.683.960.421,47	16.325.594.848,86	9.030.597.849,07	9.030.597.849,07	20.395.263.559,07	
Aset Tidak Berwujud	6.435.043.468,09	6.964.930.368,09	7.430.279.868,09	8.517.530.024,09	8.817.401.064,09	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-5.392.197.955,60	-5.871.337.443,09	23.258.105.780,09	-6.952.562.062,59	-7.551.082.924,09	
Aset Lain-lain	20.784.237.194,01	16.550.872.161,10	-6.341.856.161,84	21.075.241.667,21	21.306.527.261,35	
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-15.757.905.497,43	-14.217.295.851,08	-21.177.088.977,29	-18.644.856.929,73	-17.053.496.333,63	
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	32.420.424.598,00	45.459.012.000,00	8.327.130.000,00	
JUMLAH ASET LAINNYA	15.668.726.130,54	20.668.352.583,88	45.763.433.936,39	58.758.024.205,32	34.514.804.284,06	21,83
PROPERTI INVESTASI						
Properti Investasi Tanah	-	-	-	26.228.662.910,06	26.228.662.910,06	
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	-	-	-	433.992.000,00	433.992.000,00	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-315.823.487,19	-321.319.697,09	
JUMLAH PROPERTI INVESTASI				26.346.831.422,87	26.341.335.212,97	
JUMLAH ASET	3.005.460.796.788,24	3.089.431.538.438,08	3.107.562.211.336,55	3.407.103.070.949,64	3.837.984.931.970,26	6,30
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	11.944.763,33	1.783.762,00	26.497.308,51	-	222.572.816,00	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya	-	168.578.067,00	295.284.900,00	404.280.306,00		
Utang Bunga	-	-	-	-		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	31.060.540.965,89	31.060.540.965,89	
Pendapatan Diterima Dimuka	11.459.946.072,33	1.049.253.734,31	1.386.340.133,35	1.257.834.619,34	1.352.502.995,02	
Utang Belanja	35.097.760.585,00	110.527.089.088,00	41.310.011.511,00	47.749.681.751,56	397.955.150.474,77	
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.621.963.908,00	3.380.372.298,00	-	-		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48.191.615.328,66	115.127.076.949,31	43.018.133.852,86	80.472.337.642,79	430.590.767.251,68	72,89
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Uraian	Tahun					Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	-	-	76.060.540.965,89			
Utang Dalam Negeri-Obligasi	-	-	-			
Utang Pemerintah Pusat	-	-	-			
Utang Pemerintah Provinsi	-	-	-			
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-			
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan	-	-	-			
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	-	-	-			
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	76.060.540.965,89	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	48.191.615.328,66	115.127.076.949,31	119.078.674.818,75	80.472.337.642,79	430.590.767.251,68	72,89
EKUITAS	2.957.502.181.459,58	2.974.537.461.488,77	2.988.483.536.517,80			
EKUITAS	2.957.502.181.459,58	2.974.537.461.488,77	2.988.483.536.517,80	3.326.630.733.306,82	3.407.394.164.718,57	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.005.693.796.788,24	3.089.664.538.438,08	3.107.562.211.336,55	3.407.103.070.949,61	3.837.984.931.970,25	6,30

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai 2025

Selanjutnya untuk memahami kemampuan keuangan daerah Kota Dumai, dapat dilihat dari rasio keuangan meliputi Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas. Tabel berikut menggambarkan rasio keuangan daerah Kota Dumai tahun 2020-2024.

Tabel 2. 189 Rasio Keuangan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Indikator Keuangan	Tahun					Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Rasio Likuiditas						
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	6,191	2,883	5,607	2,000	0,435	-48,52
Rasio Quick (<i>Quick Ratio</i>)	5,577	2,441	4,829	1,602	0,366	-49,40
Rasio Solvabilitas						
Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,016	0,037	0,038	0,024	0,112	62,64
Rasio Hutang terhadap Modal	0,016	0,039	0,040	0,024	0,126	66,88

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai 2025 (data diolah).

Analisis terhadap indikator keuangan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya dinamika signifikan, khususnya pada aspek likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas, yang mencerminkan kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, mengalami penurunan tajam. Rasio Lancar (*Current Ratio*) turun dari 6,191 pada tahun 2020 menjadi hanya 0,435 pada tahun 2024, dengan rata-rata penurunan sebesar 48,52% per tahun. Demikian pula, Rasio Quick (*Quick Ratio*), yang tidak memperhitungkan persediaan sebagai aset lancar, juga menunjukkan tren menurun dari 5,577 menjadi 0,366 pada periode yang sama, dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 49,40%. Penurunan tersebut mengindikasikan semakin berkurangnya kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, serta menunjukkan potensi risiko likuiditas yang perlu segera mendapatkan perhatian.

Sementara itu, dari sisi solvabilitas, terjadi peningkatan pada rasio total utang terhadap total aset serta rasio utang terhadap modal. Rasio total utang terhadap total aset meningkat dari 0,016 pada tahun 2020 menjadi 0,112 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 62,64% per tahun. Kenaikan yang serupa juga terlihat pada rasio utang terhadap modal, yang naik dari 0,016 menjadi 0,126 dalam periode yang sama, dengan rata-rata pertumbuhan 66,88% per tahun. Meskipun nilai kedua rasio ini masih berada dalam batas wajar, peningkatan tajam dalam satu tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran struktur pembiayaan yang cenderung



bergantung pada sumber eksternal (utang), yang apabila tidak dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan tekanan terhadap kestabilan keuangan jangka panjang. Secara keseluruhan, kondisi likuiditas mengalami kemunduran signifikan, sementara solvabilitas menunjukkan peningkatan risiko meskipun masih dalam batas toleransi.

2.5.2. Proyeksi Keuangan Daerah 5 (Lima) Tahun Mendatang

Keuangan daerah harus dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, proyeksi keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Proyeksi keuangan daerah bertujuan untuk merencanakan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Tabel proyeksi keuangan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 190 Proyeksi Keuangan Daerah Kota Dumai

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1	PENDAPATAN	1.792.200.446.555,66	2.388.014.930.191,00	2.805.778.051.578,00	2.750.669.948.893,00	2.766.838.875.069,00	2.482.691.037.470,00
	A. Pendapatan Asli Daerah	606.665.799.254,66	1.104.077.672.378,00	1.123.800.517.537,00	1.125.800.517.537,00	1.127.300.517.537,00	1.128.300.517.537,00
	B. Pendapatan Transfer	1.185.534.647.301,00	1.283.937.257.813,00	1.681.977.534.041,00	1.624.869.431.356,00	1.639.538.357.532,00	1.354.390.519.933,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.792.200.446.555,66	2.388.014.930.191,00	2.805.778.051.578,00	2.750.669.948.893,00	2.766.838.875.069,00	2.482.691.037.470,00
2	BELANJA	1.809.083.667.572,74	2.613.014.930.191,00	2.747.028.051.578,00	2.701.919.948.893,00	2.728.088.875.069,00	2.503.941.037.470,00
	A. Belanja Operasi	1.438.582.957.069,90	1.689.563.055.733,10	1.723.370.208.740,90	1.763.142.266.380,88	1.807.519.372.382,30	1.830.572.507.725,33
	B. Belanja Modal	370.176.158.802,84	903.451.874.457,90	1.003.657.842.837,10	918.777.682.512,12	900.569.502.686,70	653.368.529.744,67
	C. Belanja Tak Terduga	324.551.700,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	D. Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	1.809.083.667.572,74	2.613.014.930.191,00	2.747.028.051.578,00	2.701.919.948.893,00	2.728.088.875.069,00	2.503.941.037.470,00
	SURPLUS/DEFISIT	(16.883.221.017,08)	(225.000.000.000,00)	58.750.000.000,00	48.750.000.000,00	38.750.000.000,00	(21.250.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN	25.561.967.507,67	425.000.000.000,00	108.750.000.000,00	98.750.000.000,00	88.750.000.000,00	28.750.000.000,00
	A. Penerimaan	25.561.967.507,67	325.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	B. Pengeluaran	-	100.000.000.000,00	83.750.000.000,00	73.750.000.000,00	63.750.000.000,00	3.750.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	25.561.967.507,67	425.000.000.000,00	108.750.000.000,00	98.750.000.000,00	88.750.000.000,00	28.750.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	25.561.967.507,67	225.000.000.000,00	(58.750.000.000,00)	(48.750.000.000,00)	(38.750.000.000,00)	21.250.000.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai, 2025 (data diolah)

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja Pendapatan Daerah Kota Dumai yang positif dari tahun 2020 hingga 2024, maka diproyeksikan pendapatan daerah Kota Dumai lima tahun ke depan yakni dari 2026 sampai dengan 2030 sebagaimana disajikan pada Tabel di atas. Berdasarkan tabel tersebut pendapatan daerah Kota Dumai lima tahun ke depan diproyeksikan akan mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp 1.792.200.446.556,- menjadi Rp 2.482.691.037.470,00,- pada tahun 2030.

Jika melihat kondisi belanja daerah, secara keseluruhan diproyeksikan meningkat dari Rp. 1.809.083.667.573 pada tahun 2024 hingga mencapai Rp. 2.503.941.037.470,00 pada tahun 2030. Kenaikan belanja daerah ini disebabkan adanya belanja untuk penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur yang terkait dengan pengendalian banjir di Kota Dumai.

Pada tahun 2024 jumlah belanja pegawai yang dialokasikan sebesar Rp725.984.432.646,00 atau 40,13% dari total belanja daerah. Pada tahun 2026 proporsi belanja pegawai diproyeksikan menurun menjadi 35,05% dari total belanja daerah sebesar Rp2.613.014.930.191,00. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Dumai untuk terus berupaya dalam menurunkan proporsi belanja pegawai menjadi 30% selambat-lambatnya ditahun 2027 sesuai dengan amanat UU No. 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Namun demikian, upaya ini belum dapat tercapai mengingat kemampuan fiskal daerah yang masih dalam kategori tidak mandiri dan adanya kebijakan nasional terkait pengangkatan Non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengakibatkan peningkatan jumlah belanja pegawai secara berkala.

Sejalan dengan itu proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik diproyeksikan meningkat dengan fokus utama membangun infrastruktur pengendalian banjir dan infrastruktur jalan. Dikarenakan untuk mendanai belanja infrastruktur sebagaimana dimaksud, pada tahun 2026 belanja daerah mengalami defisit sebesar Rp225.000.000.000,00. Untuk menutupi defisit tersebut dilakukan pinjaman daerah sebesar Rp 300.000.000.000,-.

Tahun 2027 sampai dengan 2030 memungkinkan adanya dana alokasi umum tambahan sebagai sumber tambahan pendapatan transfer sebagai dampak dari Kota Dumai dijadikan sebagai Kawasan Kawasan pertumbuhan di Provinsi Riau sesuai Perpres 12 Tahun 2024 tentang RPJMN 2025-2029. Kawasan pertumbuhan tersebut berfokus pada Kawasan Perkotaan Dumai &

Kawasan Pengembangan Industri sehingga terdapat indikasi intervensi untuk Kota Dumai antara lain Pengembangan SPAM, Pengembangan layanan unggulan dan Fasilitas Kesehatan (RSUD Dumai), Pembangunan Jalan Lingkar Barat Dumai (Bukit Timah–Parit Kitang–Lubukgaung), reservasi jalan ruas Dumai–Bagan Siapiapi dan Dumai–Sungai Pakning dan peningkatan ketahanan banjir perkotaan Dumai.

Selain itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah diperlukan adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri Syariah.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah merupakan komponen fundamental dalam dokumen RPJMD karena menjadi landasan utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Penyajian analisis komprehensif harus mampu mengidentifikasi dan menjelaskan secara detail butir-butir krusial dari isu-isu strategis yang akan menentukan arah dan kinerja pembangunan dalam periode lima tahun ke depan. Analisis permasalahan pembangunan daerah ini dihasilkan melalui evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja pembangunan periode 2020-2024, dengan mengkaji berbagai indikator pembangunan, hambatan implementasi, serta efektivitas program yang telah dilaksanakan. Hal ini kemudian dipadukan dengan perspektif mandatori pembangunan yang berasal dari kebijakan pemerintah nasional serta dinamika lingkungan global yang terus berubah, sehingga keduanya menjadi tantangan sekaligus peluang yang perlu dikelola secara strategis dan sistematis dalam konteks pembangunan daerah.

Isu-isu strategis yang lebih berorientasi pada masa depan, merupakan kondisi atau keadaan yang berpotensi menjadi permasalahan signifikan ataupun menjadi peluang berharga bagi daerah di masa mendatang. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum teridentifikasi atau terkelola secara optimal, yang apabila dimanfaatkan dan dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan daerah. Analisis isu strategis yang menyeluruh dan mendalam sangat diperlukan untuk menghasilkan

rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif, adaptif, dan responsif terhadap berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan, sehingga kontinuitas pembangunan dapat terjaga dan tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dapat dicapai secara optimal meskipun dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Dengan demikian, pemahaman yang akurat terhadap permasalahan dan isu strategis akan menjamin efektivitas strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang diformulasikan dalam RPJMD.

2.6.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan daerah

- **Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

- a Pendidikan**

- Rendahnya daya saing SDM dalam berkompetisi di era keterbukaan, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas, kreativitas dalam penguasaan IPTEK, serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi yang memiliki nilai tambah.
- Menurunnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP yang terlihat dari Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kota Dumai sebesar 81,92% pada tahun 2024 yang cenderung menurun sebesar 0,40%;
- Ketimpangan dalam kemampuan literasi dan numerasi di Kota Dumai, baik di jenjang SD maupun SMP.
- Ketimpangan dalam rasio guru terhadap siswa dan variasi kualifikasi guru di seluruh kecamatan, menunjukkan adanya ketimpangan dalam ketersediaan, distribusi, dan kualitas pendidikan.
- Masih terdapat sekolah yang menerapkan sistem *double shift* dalam proses belajar mengajar.
- Belum optimalnya layanan perpustakaan serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar.
- Berdasarkan data Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Dumai tahun 2021 hingga 2024, terdapat masih rendahnya APS pada kelompok usia 5–6 tahun. Meskipun terjadi peningkatan APS 5-6 tahun dari 50,90% pada tahun 2023 menjadi 55,87% pada tahun 2024, tingkat partisipasi pada kelompok usia ini masih tergolong rendah dibandingkan kelompok usia lainnya yang secara umum telah menunjukkan capaian yang tinggi dan stabil.

b Kesehatan

- Belum optimalnya rasio tenaga kesehatan dan sebaran yang tidak merata.
- Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kota Dumai masih belum memenuhi standar sesuai peraturan yang berlaku.
- Kesulitan akses pelayanan kesehatan di beberapa wilayah, terutama di Kecamatan Sungai Sembilan, Kelurahan Batu Teritip, akibat keterbatasan transportasi, listrik, dan jaringan komunikasi.
- Tingginya prevalensi kasus penyakit tidak menular seperti Hipertensi, Diabetes Melitus, Penyakit Jantung, dan Stroke.
- Meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS dan kasus kanker, jantung, stroke, serta uronefrologi (KJSU).
- Belum optimalnya pencapaian prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita.

c Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Tingginya risiko banjir di Kota Dumai akibat topografi yang rendah dan pengaruh pasang surut laut.
- Masih terbatas nya akses penyediaan air minum bagi penduduk dan rendahnya kualitas air.

d Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi rumah tangga miskin di Kota Dumai.
- Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh dan masih rendahnya kualitas PSU.
- Adanya risiko kebakaran di kawasan permukiman.

e Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- Belum optimalnya pelaksanaan ketertiban dan ketentraman umum di Kota Dumai, ditandai dengan rendahnya rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, kualitas patroli Satpol PP yang belum sepenuhnya efektif, dan kurangnya peningkatan jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- Meningkatnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang belum teratasi dengan baik.

f Sosial

- Laju penurunan kemiskinan yang melambat, meningkatnya ketimpangan dan keparahan di antara penduduk miskin, serta kenaikan garis kemiskinan yang melebihi laju inflasi, sehingga membebani masyarakat miskin dengan biaya hidup yang semakin tinggi.
- Stagnasi lembaga kesejahteraan sosial dan menurunnya jumlah pendamping PKH, mengakibatkan program kesejahteraan sosial di Kota Dumai belum berjalan efektif.

• Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**a Tenaga Kerja**

- Rendahnya kompetensi pencari kerja di Kota Dumai menyebabkan banyak lowongan pekerjaan tidak terisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Belum optimalnya pengoperasian Rumah Terampil untuk pelatihan kerja, disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan di Kota Dumai.
- Belum optimalnya cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberian kesempatan kerja, terlihat dari cakupan jaminan ketenagakerjaan yang masih rendah.

b Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- Menurunnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencerminkan rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan politik.
- Meningkatnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan masih terjadinya ketimpangan gender di Kota Dumai.

c Pangan

- Terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lain yang berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
- Rendahnya pemenuhan kebutuhan pangan dari sisi produksi lokal
- Belum optimalnya penanganan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan.

d Pertanahan

- Belum jelasnya penyelesaian sengketa pada lahan konsesi dan kawasan hutan yang menyebabkan konflik pertanahan antara masyarakat lokal dan perusahaan.

e Lingkungan Hidup

- Masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan, yang mengindikasikan belum optimalnya upaya mitigasi dan pengendalian risiko bencana.
- Terjadinya degradasi lingkungan, alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan efek gas rumah kaca yang berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup.
- Indeks risiko bencana Kota Dumai masih dalam kategori kelas risiko sedang.

f Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan, masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP dan layanan yang belum merata di semua kecamatan.
- Belum maksimalnya pemanfaatan dan integrasi database kependudukan, sehingga data penduduk kurang akurat dan tidak terintegrasi dengan baik dalam sistem layanan publik.

g Pemberdayaan Masyarakat

- Belum optimalnya peningkatan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti PKK, Posyandu, dan LSM, sehingga pencapaian kuantitas yang tinggi belum sepenuhnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

h Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Kurangnya pemahaman pasangan usia subur terhadap informasi metode kontrasepsi yang aman dan efektif, serta manfaat jangka panjang dari pengendalian kelahiran.
- Rendahnya cakupan kesadaran tentang Keluarga Berencana (KB) pada PUS, dengan penurunan dari 75,51% pada tahun 2020 menjadi 70,34% pada tahun 2024.
- Akses dan kualitas pelayanan KB yang belum maksimal dan masih tingginya *unmet need*.

i Perhubungan

- Minimnya ketersediaan moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.
- Kurangnya infrastruktur pendukung untuk angkutan umum, seperti terminal, halte, dan fasilitas penunjang lainnya.

- Kurangnya perlengkapan dan prasarana jalan yang memadai, termasuk pedestrian, alat penerangan jalan, rambu lalu lintas, dan fasilitas keselamatan jalan lainnya.
- Meningkatnya pelanggaran *Over Dimension Over Loading* (ODOL) kendaraan angkutan barang, serta meningkatnya jumlah kecelakaan akibat ruas jalan yang bersinggungan dengan aktivitas masyarakat.

j Komunikasi dan Informatika

- Masih terbatasnya fasilitas dan SDM teknologi informasi serta komunikasi dalam mendukung pelayanan publik.
- Belum optimalnya integrasi aplikasi layanan publik, tata kelola, dan ekosistem eGovernment.
- Kurangnya pemahaman, kesadaran, dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi.

k Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Terjadinya penurunan persentase koperasi aktif, penurunan jumlah UMKM, dan rendahnya rasio kredit UMKM terhadap PDRB.

l Penanaman Modal

- Pertumbuhan investasi asing (PMA) dan penurunan rasio daya serap tenaga kerja masih rendah.

m Kepemudaan dan Olah Raga

- Belum maksimalnya prestasi olahraga di Kota Dumai, menunjukkan kurangnya pembinaan dan pengembangan bakat olahraga di kalangan pemuda.

n Statistik

- Masih rendahnya integrasi, penyebarluasan, dan kualitas data statistik sektoral, menyebabkan kurang akuratnya data yang mendukung pengambilan kebijakan publik di Kota Dumai.

o Persandian

- Kurangnya pemahaman, kesadaran, dan tata kelola terkait persandian dan keamanan informasi, yang berdampak pada rentannya data pemerintah terhadap risiko kebocoran informasi dan serangan siber.

p Kebudayaan

- Terdapat objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya di Kota Dumai yang perlu mendapatkan perlindungan lebih baik.

- Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi terkait kebudayaan, yang mengakibatkan kurangnya promosi dan pengembangan potensi budaya lokal.
- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mengurangi kohesi sosial di masyarakat.

q Perpustakaan

- Belum optimalnya layanan perpustakaan, serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar, menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat dan terbatasnya akses informasi.
- Kurangnya inovasi dalam layanan perpustakaan, termasuk digitalisasi koleksi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan bacaan.

r Kearsipan

- Belum optimalnya layanan kearsipan, serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar di Kota Dumai.
- Belum maksimalnya pemanfaatan dan integrasi sistem kearsipan digital, yang mengakibatkan kesulitan dalam pencarian dan pengelolaan dokumen pemerintahan.
- Rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan aparatur tentang pentingnya kearsipan, yang berdampak pada rendahnya tingkat keamanan dan kelengkapan dokumen-dokumen penting daerah.

• Urusan Pemerintahan Bidang Pilihan**a Perikanan**

- Masih rendahnya konsumsi ikan pada rumah tangga di Kota Dumai, menunjukkan perlunya peningkatan edukasi gizi masyarakat dan promosi konsumsi hasil laut lokal.

b Pariwisata

- Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, menyebabkan potensi pariwisata lokal belum tergarap maksimal.
- Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan tata kelola destinasi pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif.

c Pertanian

- Terbatasnya SDM pertanian dalam mendukung pengembangan sektor pertanian modern yang berkelanjutan.
- Terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lain, mempengaruhi ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi lokal.
- Perubahan iklim global yang berdampak negatif terhadap kualitas lahan dan produksi pertanian, menghambat peningkatan produktivitas komoditas pertanian lokal.

d Perdagangan

- Belum optimalnya ekspor perdagangan dan akses pangsa pasar internasional, sehingga produk lokal sulit bersaing di pasar global.
- Belum optimalnya penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri, serta belum lancarnya distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok.
- Belum optimalnya perlindungan konsumen, terutama pada penggunaan UTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapan).
- Belum optimalnya ekspor perdagangan dan akses pangsa pasar terhadap pasar internasional.
- Belum optimalnya penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri, serta belum lancarnya distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok.

e Perindustrian

- Peran sektor industri pengolahan pada PDRB Kota Dumai masih dominan, namun pertumbuhan kontribusinya cenderung stagnan dan masih rendahnya peran industri kecil menengah dalam rantai pasok industri pengolahan.
- Sektor-sektor turunan industri pengolahan seperti konstruksi, perdagangan, transportasi, dan jasa keuangan tidak memiliki keunggulan kompetitif meskipun terspesialisasi di Kota Dumai.

• Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Penunjang**a Administrasi Pemerintahan**

- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Dumai.

- Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, sehingga pelayanan publik belum merata di semua kecamatan.

b Perencanaan Pembangunan

- Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah berbasis risiko di Kota Dumai.

c Keuangan

- Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, yang berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

d Kepegawaian

- Belum optimalnya penerapan merit sistem dalam kebijakan manajemen ASN, sehingga masih terjadi ketimpangan dalam penempatan dan pengembangan karir ASN.
- Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN Kota Dumai, menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur sipil negara.

e Pengawasan

- Perlunya penguatan pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal.
- Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengakibatkan kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- Masih kurangnya pendampingan pelaksanaan pembangunan, berdampak pada kurang efektifnya realisasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

2.6.2. Pemusatan Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual yang dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.

2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif terhadap masyarakat dan daerah.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka secara umum permasalahan pembangunan daerah di Kota Dumai dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
2. Demografi
3. Ekonomi
4. Tata Kelola
5. Keamanan dan Stabilitas Daerah
6. Pemanfaatan Ruang
7. Lingkungan Hidup

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan diklasifikasikan menjadi permasalahan pokok dan permasalahan, serta akar penyebab masalahnya. Perumusan masalah dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2025–2029 meramu dari evaluasi capaian kinerja urusan pemerintahan hingga tahun 2024 yang kemudian digabungkan dengan telaah visi-misi kepala daerah terpilih.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa permasalahan utama daerah dijawab dengan visi dan permasalahan pokok daerah dijawab dengan misi. Oleh karena itu telaah visi misi kepala daerah terpilih dijadikan dasar perumusan permasalahan pokok daerah. Visi misi kepala daerah terpilih, merefleksikan permasalahan pokok kota yang hendak diprioritaskan dalam kurun 2025-2029. Permasalahan pokok daerah Kota Dumai yang diprioritaskan yaitu:

- 1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menghambat daya saing Kota Dumai.** Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kota Dumai, terlihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat yang belum optimal. Hal ini menghambat terciptanya masyarakat yang tangguh, kreatif, dan mampu bersaing di era globalisasi. Menurunnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP yang terlihat dari Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kota Dumai sebesar 81,92% pada tahun 2024 yang cenderung menurun sebesar 0,40% dan belum optimalnya

pengoperasian Rumah Terampil untuk pelatihan kerja akibat terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan.

2. Ketidakmerataan pertumbuhan penduduk yang mengancam keberlanjutan pembangunan. Kota Dumai menghadapi tantangan dalam mengatasi pertumbuhan penduduk yang tidak merata dan pengelolaan migrasi penduduk yang belum efektif. Akibatnya, terjadi tekanan pada layanan publik dan infrastruktur kota, serta munculnya kesenjangan sosial di masyarakat. Permasalahan ini diperkuat dengan data menurunnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan meningkatnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

3. Melambatnya pertumbuhan perekonomian Kota Dumai yang berdampak pada rendahnya produktivitas. Perekonomian Kota Dumai masih menghadapi kendala dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari Terjadinya penurunan persentase koperasi aktif, penurunan jumlah UMKM, dan rendahnya rasio kredit UMKM terhadap PDRB. Pertumbuhan investasi asing (PMA) dan penurunan rasio daya serap tenaga kerja masih rendah.

4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak pada efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Masih terdapat birokrasi yang panjang, kurangnya transparansi, dan minimnya kolaborasi antar lembaga, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal dan tidak merata. Kondisi ini tercermin dari Belum optimalnya penerapan merit sistem dalam kebijakan manajemen ASN, sehingga masih terjadi ketimpangan dalam penempatan dan pengembangan karir ASN. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengakibatkan kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah serta masih kurangnya pendampingan pelaksanaan pembangunan, berdampak pada kurang efektifnya realisasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

5. Ancaman terhadap keamanan dan stabilitas daerah

Keamanan dan stabilitas daerah di Kota Dumai masih menghadapi tantangan, antara lain belum optimalnya pelaksanaan ketertiban dan ketentraman umum yang ditandai dengan rendahnya rasio Polisi Pamong Praja 4,21 per 10.000 penduduk, kualitas patroli Satpol PP yang belum sepenuhnya efektif, dan kurangnya peningkatan jumlah

petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), meningkatnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang belum teratasi dengan baik. Selain itu dalam peningkatan kualitas pangan dan energi, terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lain yang berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Rendahnya pemenuhan kebutuhan pangan dari sisi produksi lokal, dan belum optimalnya penanganan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan.

6. Kualitas infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang belum optimal.

Pemanfaatan ruang dan tata kota di Kota Dumai belum optimal dalam mendukung pengembangan wilayah yang terencana dan berkelanjutan. Masih terdapat masalah dalam penataan infrastruktur, penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, serta kurangnya ruang publik yang memadai bagi masyarakat. Kondisi ini tercermin dari Minimnya ketersediaan moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Kurangnya infrastruktur pendukung untuk angkutan umum, seperti terminal, halte, dan fasilitas penunjang lainnya. Kurangnya perlengkapan dan prasarana jalan yang memadai, termasuk pedestrian, alat penerangan jalan, rambu lalu lintas, dan fasilitas keselamatan jalan lainnya. Meningkatnya pelanggaran *Over Dimension Over Loading* (ODOL) kendaraan angkutan barang, serta meningkatnya jumlah kecelakaan akibat ruas jalan yang bersinggungan dengan aktivitas masyarakat. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh dan masih rendahnya kualitas PSU.

7. Adanya kerentanan daerah terhadap bencana dan kerusakan lingkungan.

Indeks risiko bencana Kota Dumai masih dalam kategori kelas risiko sedang. Beberapa permasalahan yang harus dipecahkan terkait dengan kondisi lingkungan hidup di Kota Dumai adalah tingkat pencemaran dan pengelolaan limbah yang belum memadai, masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan, yang mengindikasikan belum optimalnya upaya mitigasi dan pengendalian risiko bencana. Selain itu masih terjadinya degradasi lingkungan, alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan efek gas rumah kaca yang berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup.

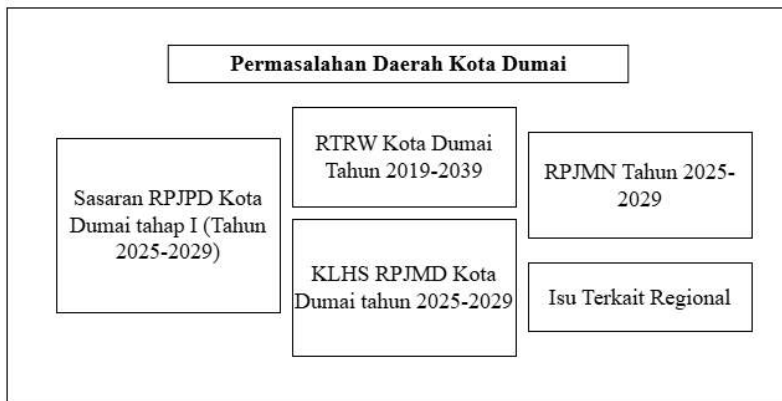
2.6.3. Isu Strategis Daerah

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan daerah, provinsi, kebijakan nasional dan internasional. Hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik.
- Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
- Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.
- Janji politik dalam penyampaian Visi dan Misi serta Program Unggulan Wali Kota Terpilih yang perlu diwujudkan selama proses Pilkada Kota Dumai Tahun 2024.

Perumusan isu strategis mendasarkan pada hasil evaluasi kinerja RPJMD 2020–2024, permasalahan daerah, tantangan isu RPJPD Kota Dumai tahap I (2025-2029), isu dari RPJMN 2025-2029, RTRW, dan KLHS RPJMD, dipadukan dengan Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Keterkaitan komponen untuk merumuskan isu strategis Kota Dumai tersaji pada bagan berikut ini:

Permasalahan daerah berdasar evaluasi Capaian Urusan Pembangunan dan telaah atas Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Terpilih



ISU STRATEGIS KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

Gambar 2. 43 Komponen untuk Merumuskan Isu Strategis Kota Dumai

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025 Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

1. Isu Strategis Berdasarkan Permasalahan Daerah

Isu strategis adalah suatu kondisi yang dampaknya signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa depan. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap Pembangunan di kota Dumai. Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum isu – isu strategis di Kota Dumai adalah:

1) Isu Terkait Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan kesetaraan gender serta inklusi sosial dalam mewujudkan kompetensi persaingan global dimasa yang akan datang seperti produktivitas yang tinggi, penguasaan teknologi dan kemampuan digital, keahlian dan inovasi serta kemampuan adaptasi dengan perubahan yang cepat dimasa yang akan datang;
- Belum merata nya mutu dan akses pendidikan di Kota Dumai;
- Rendahnya minat baca masyarakat Kota Dumai;
- Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga;
- Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kota Dumai;

- Belum optimalnya Anggaran Responsif Gender (ARG);
- Belum optimalnya partisipasi perangkat daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- Belum optimalnya perlindungan perempuan serta belum optimalnya lembaga penyedia layanan termasuk jejaring dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

2) Isu Demografi

- Pertambahan jumlah populasi kota Dumai, keterbatasan luas lahan yang bisa dimanfaatkan serta pergeseran trend perdagangan dan urbanisasi merupakan fenomena yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan jangka Panjang yang berkelanjutan;
- Belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai masih belum optimal secara kualitas dan kuantitas, masih didominasi oleh tenaga Non ASN serta penyebarannya belum merata masih terkonsentrasi di perkotaan;
- Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat;
- Belum optimal nya pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah, terutama di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau di Kota Dumai;
- Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kota Dumai masih belum memenuhi standar sesuai peraturan yang berlaku. Masih ada 9 kelurahan dari 36 kelurahan atau sebesar 75% yang belum memiliki fasilitas pelayanan kesehatan (ILP) karena ketidaktersediaan lahan atau karena dampak pemekaran kelurahan;
- Belum optimalnya penanganan penyakit tidak menular di Kota Dumai;
- Belum optimalnya upaya pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) yang menyeluruh di Kota Dumai;
- Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan.

3) Isu Kemampuan dan Kesejahteraan Ekonomi

- Peningkatan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat serta kemudahan akses

pelayanan perizinan dan keuangan bagi stakeholder pembangunan dalam menghadapi tantangan persaingan global untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas;

- Belum optimalnya layanan kesehatan dan rehabilitasi yang khusus dan terpadu untuk menangani disabilitas;
- Belum Optimalnya Pemenuhan standar pelayanan minimal PPKS;
- Belum Optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
- Penurunan kemiskinan melalui peningkatan pelayanan publik dan pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- Belum optimalnya pengelolaan sektor pertanian dan penjaminan pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal);
- Belum optimalnya pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Belum optimalnya Pengelolaan dan Penyebaran Informasi yang berkualitas kepada Masyarakat terkait Program Kegiatan Pemerintah Daerah;
- Belum optimalnya Pengamanan aplikasi Pemerintah Kota Dumai;
- Belum optimalnya Reformasi, Birokrasi tata kelola satu data yang akurat mutakhir terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- Belum optimalnya Pemberdayaan Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro;
- Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pengelolaan pelayanan dan perkeretaapian;
- Belum optimalnya ketersediaan, distribusi, stabilisasi harga, serta aksesibilitas ikan, ditambah dengan rendahnya budaya makan ikan di Kota Dumai;
- Belum optimalnya pelayanan perumahan dan kawasan permukiman;
- Optimalisasi penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor padat karya, peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar, serta diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu. Selain itu, diperlukan penyesuaian kebijakan upah dan perbaikan kondisi kerja guna menarik lebih banyak angkatan kerja, serta peningkatan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas dan konektivitas ke pasar kerja.

- Belum optimalnya pembangunan kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif;
- Belum optimalnya pengelolaan kawasan perindustrian.

4) Isu Tata Kelola

- Optimalisasi implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang;
- Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik;
- Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan, peningkatan pemanfaatan dan integrasi *database*, perluasan cakupan KIA, serta peningkatan kualitas dan cakupan pemanfaatan data kependudukan untuk memperkuat efektivitas pelayanan publik dan perlindungan hak-hak administratif penduduk;
- Belum optimalnya Pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dan *online* sebagai *Single Identity Number*;
- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
- Belum optimalnya Kapabilitas APIP sebagai *strategic partner, quality assurance, and consulting*;
- Belum optimalnya Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta pembangunan zona integritas;
- Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

5) Isu Keamanan dan Stabilitas Daerah

- Jaminan terhadap ketentraman, ketertiban, keamanan dan stabilitas Kota Dumai sebagai daerah kota industri dan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan;
- Belum optimalnya peningkatan daya tarik investasi asing melalui perbaikan iklim investasi dan infrastruktur, serta kemudahan perizinan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- Belum optimalnya peran sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;

- Optimalisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian kelitbangan dan inovasi teknologi dalam pembangunan;
- Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya IPTEK untuk mendukung pembangunan daerah;
- Belum optimalnya peran sumber daya aparatur peneliti;
- Penguatan Identitas Primordial Budaya Masyarakat terhadap pengaruh negatif budaya asing;
- Perlindungan Terhadap Keberagaman Ekspresi Budaya Dan Hak Berkebudayaan Masyarakat, Khususnya Situs, Ritus, Adat Istiadat, Kesenian, Dan Folklor menghadapi Gelombang Modernitas;
- Belum optimalnya kapasitas dan jumlah personel Polisi Pamong Praja dan Linmas, perbaikan kualitas patroli dan penegakan hukum yang lebih efektif, serta penanganan yang lebih komprehensif terhadap peningkatan kasus pelanggaran ketertiban dan ketentraman guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih baik di Kota Dumai;
- Belum optimalnya pelaksanaan trantibumlinmas guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih baik di Kota Dumai.

6) Isu Pemanfaatan Ruang

- Konflik ruang dan penggunaan lahan dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Pencegahan konflik ruang dan penggunaan lahan dalam aktivitas sosial dan ekonomi merupakan hal yang penting untuk menciptakan harmoni, stabilitas, dan keberlanjutan dalam pembangunan masyarakat dan ekonomi. Konflik terkait penggunaan lahan dapat muncul karena adanya persaingan kepentingan antara sektor-sektor berbeda, seperti pertanian, industri, infrastruktur, dan konservasi lingkungan;
- Belum optimalnya pembangunan jalan di Kota Dumai;
- Terhambatnya aksesibilitas menuju akses layanan dasar serta pendukung aktifitas perekonomian dan sosial;
- Masih minimnya ketersediaan sumber air baku untuk kebutuhan pelayanan air minum di Kota Dumai;
- Belum optimalnya pengendalian banjir di Kota Dumai;
- Belum optimalnya penyelesaian konflik pertanahan di Kota Dumai;
- Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Ruang;

- Tingginya jumlah sampah dan timbunan sampah domestik dan non domestik;
- Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).

7) Kerawanan Terhadap Bencana dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- Peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana alam, non alam dan teknologi serta perubahan lingkungan hidup. Peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana alam, non-alam, dan teknologi serta perubahan lingkungan hidup adalah hal yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan;
- Belum optimalnya pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
- Belum optimalnya rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk dan sistem pengangkutan sampah menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan sampah, penumpukan sampah di TPS, serta keterlambatan dalam pengolahan di tempat pembuangan akhir (TPA);
- Masih rendahnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Dumai;
- Terjadinya Penurunan kualitas air, udara dan tanah;
- Belum dilaksanakannya Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK).

2. Isu Strategis Berdasarkan RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039, dijelaskan bahwa isu strategis penataan ruang Kota Dumai dikelompokkan ke dalam 2 aspek yaitu aspek lingkungan dan aspek sosial ekonomi. Adapun penjabaran kedua aspek tersebut adaah sebagai berikut:

1. Aspek Lingkungan

Isu-isu pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan aspek lingkungan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Degradasi dan alih fungsi hutan

- 1) Degradasi dan alih fungsi hutan akibat rendahnya kepedulian komunitas dunia usaha dan masyarakat.

b. Konversi dan alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan

- 1) Sering terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan ke perkebunan kelapa sawit dan tambang.
- c. Kualitas dan cadangan air baku
 - 1) Pada tahun 2020 diperkirakan Kota Dumai akan mengalami kekurangan ketersediaan air bersih. Pada saat ini sumber air bersih Kota Dumai berasal dari air tanah dangkal maupun air tanah dalam yang kondisinya kurang baik (payau). Satu-satunya sumber air bersih di utara Kota Dumai juga dipakai oleh PT. Pertamina.
- d. Potensi banjir di dataran rendah
 - 1) Ancaman limpasan air pasang laut terhadap wilayah permukiman penduduk.
- e. Kualitas udara
 - 1) Rencana Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih belum menghasilkan arahan penetapan kawasan yang jelas, dikarenakan banyaknya lahan terbangun di kawasan RTH yang belum ditindak sesuai peraturan terkait, sehingga rencana pola ruang harus mencakup batasan yang jelas untuk peruntukan kawasan RTH yang sesuai dengan fungsinya. Dengan tidak sesuainya proporsi RTH akan mempengaruhi kualitas udara.

2. Aspek Sosial Ekonomi

Isu-isu pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Aspek sosial

- 1) Tingginya arus migrasi dari berbagai wilayah *hinterland* dan provinsi tetangga sebagai konsekuensi wilayah bandar dan pusat kegiatan industri dan perdagangan.
- 2) Belum optimal pengelolaan keragaman etnis sehingga menimbulkan kerentanan terhadap letupan konflik horisontal antar etnis dengan keragaman berjumlah 16 suku.
- 3) Beban psikologi sebagian besar masyarakat Dumai akibat ancaman ledakan pipa sepanjang 60 km membelah wilayah kota dan kemungkinan terjadi ledakan pada unit *refinery* pengolahan BBM dengan radius 25 km pemerataan pembangunan.
- 4) Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berkaitan langsung dengan Malaysia, Thailand dan Singapura. Oleh

karena itu, Kota Dumai menjadi tempat penyeberangan atau pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Sebagai kota yang berhubungan langsung dengan luar negeri, maka kapal-kapal luar negeri pada saatnya nanti akan hilir-mudik di perairan Kota Dumai.

- 5) Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat koleksi distribusi produksi antardaerah. Barang-barang produksi pertanian industri hulu harus dikirim dalam bentuk bahan mentah atau terolah, sedangkan Kota Dumai masih belum mempunyai terminal khusus untuk menampungnya.
- 6) Beberapa tahun ke depan diperkirakan kawasan tengah Kota Dumai akan menjadi kawasan padat sehingga dirasakan perlu mencari kawasan khusus untuk pengembangan industri karena salah satu potensi pengembangan ekonomi yang dimiliki Kota Dumai adalah di bidang industri. Selain penyediaan lahan juga perlu disediakan prasarana dan sarana pendukung lainnya untuk mempermudah proses produksi sampai distribusi hasil industri nantinya.
- 7) Kota Dumai direncanakan sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia yang akan berhubungan langsung dengan dunia perdagangan internasional, sedangkan prasarana dan sarana pendukungnya masih belum memadai baik kualitas maupun kuantitas.
- 8) Jaringan transportasi darat Kota Dumai sudah tidak memadai. Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Dumai dengan kota-kota lainnya di tingkat regional masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan lagi baik kualitas maupun fungsi jalannya, daya tampung dan daya dukungnya, yang nantinya akan sangat berguna dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerahnya sendiri serta pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya.
- 9) Pemanfaatan limbah dari adanya pembangunan Jalan Tol yang menghubungkan Pekanbaru – Duri – Dumai untuk mempercepat pergerakan penumpang dan barang dari dan ke Dumai melalui sistem transportasi darat bebas hambatan.
- 10) Selain itu, volume kendaraan sudah mencapai batas jenuh daya tampung (kapasitas) jalan. Dalam sistem transportasi nasional, saat ini pemerintah Kota Dumai berencana menghidupkan kembali

jalur kereta api Pekan Baru – Duri – Dumai – Rantau Prapat untuk angkutan barang/ kargo.

- 11) Terjadinya penumpukan barang di pelabuhan Kota Dumai karena kapal yang tersedia hanya kapal biasa yang tidak dapat mengangkut dalam jumlah besar. Oleh karena itu dibutuhkan kapal berukuran besar (RORO) yang mampu membawa kontainer sekaligus juga menyesuaikan kapasitas dermaganya.
 - 12) Bandara Pinang Kampai sebagai pusat penyebaran tersier yang merupakan satu-satunya bandara di Kota Dumai adalah milik PT. Pertamina yang tidak dapat dipakai umum sehingga dapat menghambat kelancaran dalam berhubungan dengan dunia internasional. Bandara internasional yang terdekat adalah Hang Nadim di Batam dan Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru.
 - 13) Pengembangan pembangunan Pelabuhan berskala internasional penunjang kegiatan transportasi laut.
 - 14) Pembangunan Roro Dumai-Melaka untuk menunjang aktifitas Perdagangan dan jasa antar negara.
 - 15) Peningkatan dan percepatan akses Dumai Rupat dalam rangka menunjang pengembangan sektor pariwisata Rupat.
- b. Aspek ekonomi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat
- 1) Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Lubuk Gaung dan Pelintung serta pengembangan kawasan industri lainnya.
 - 2) Peningkatan dan percepatan keterlibatan IKM dalam Kawasan industri yang sudah berjalan saat ini.
 - 3) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja di Kota Dumai sedangkan untuk saat mendatang dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi untuk mampu mendukung perkembangan Kota Dumai yang sangat pesat yang salah satunya akan direncanakan sebagai pusat jasa dan perdagangan, sehingga mampu bersaing dengan daerah lainnya.
 - 4) Peningkatan produktivitas tanaman baik pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan masyarakat kota terutama adanya peluang terhadap pangsa bagi pekerja sektor industri yang terus mengalami peningkatan.

3. Isu Strategis Berdasarkan RPJPD Kota Dumai

Berdasarkan isu strategis yang tertuang dalam RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045, secara umum isu – isu strategis di Kota Dumai adalah:

1) Isu Terkait Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesetaraan gender serta inklusi sosial dalam mewujudkan kompetensi persaingan global dimasa yang akan datang seperti produktivitas yang tinggi, penguasaan teknologi dan kemampuan digital, keahlian dan inovasi serta kemampuan adaptasi dengan perubahan yang cepat dimasa yang akan datang

2) Isu Keamanan dan Stabilitas Daerah

Jaminan terhadap ketentraman, ketertiban, keamanan dan stabilitas Kota Dumai sebagai daerah kota industri dan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan;

3) Kerawanan Terhadap Bencana dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana alam, non alam dan teknologi serta perubahan lingkungan hidup. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan keberlanjutan, konservasi, dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya alam yang ada. Peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana alam, non-alam, dan teknologi serta perubahan lingkungan hidup adalah hal yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan;

4) Isu Demografi

Pertambahan jumlah populasi kota Dumai, keterbatasan luas lahan yang bisa dimanfaatkan serta pergeseran tren perdagangan dan urbanisasi merupakan fenomena yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan jangka Panjang yang berkelanjutan;

5) Isu Pemanfaatan Ruang

Konflik ruang dan penggunaan lahan dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Pencegahan konflik ruang dan penggunaan lahan dalam aktivitas sosial dan ekonomi merupakan hal yang penting untuk menciptakan harmoni, stabilitas, dan keberlanjutan dalam pembangunan masyarakat dan ekonomi. Konflik terkait penggunaan lahan dapat muncul karena adanya persaingan kepentingan antara sektor-sektor berbeda, seperti pertanian, industri, infrastruktur, dan konservasi lingkungan;

6) Isu Kemampuan dan Kesejahteraan Ekonomi

Peningkatan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat serta kemudahan akses pelayanan perizinan dan keuangan bagi *stakeholder* pembangunan dalam menghadapi tantangan persaingan global untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas;

7) Isu Tata Kelola

Optimalisasi implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang.

4. Isu Strategis Berdasarkan Regional

Salah satu data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah informasi yang berkenaan dengan RPJMD daerah yang berbatasan langsung. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Dumai yang diwakili oleh Bappeda Kota Dumai dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diwakili oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang diwakili oleh Bappeda Kabupaten Rokan Hilir yang pada saat bersamaan juga sedang menyusun RPJMD, didapat kesimpulan bahwa isu pembangunan daerah dengan kabupaten yang berbatasan langsung adalah sebagai berikut:

a. Isu pembangunan daerah dengan Kabupaten Bengkalis

1) Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah

1. Perbedaan Konfigurasi Pola ruang Kota Dumai dengan daerah perbatasan Kabupaten Bengkalis
2. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan Dumai-Sepahat
3. Penguatan kerja sama SPAM Regional DUROLIS
4. Konektivitas Antar Pulau (Ro-Ro)
5. Penetapan batas wilayah
6. Kebakaran hutan dan lahan
7. Pencemaran lingkungan
8. Pengembangan pemukiman
9. Kapasitas eksisting jalan tidak sesuai dengan tonase kendaraan yang akan melewati Ro-Ro Peningkatan sarana dan prasarana Ro-Ro
10. Manajemen antrian barang dan orang yang akan masuk ke kapal di Ro-Ro

2) Bidang Sosial dan Budaya

1. Kerja sama Even Olahraga Dan Pariwisata
2. Hutang Klaim BPJS Bengkalis Ke RSUD Kota Dumai
3. Ketersediaan Kamar / Ruang Perawatan Di RSUD Kota Dumai Untuk Pasien Rujukan
4. Hutang Jampersal (Jaminan Persalinan) Di RSUD Kota Dumai
5. Zonasi Sekolah Di Daerah Perbatasan
6. Kerja sama Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Narkoba

3) Bidang Ekonomi

1. Pengembangan PPI Kota Dumai menjadi sarana prasarana pelabuhan perikanan menjadi pusat pengembangan perikanan tangkap di wilayah pesisir Provinsi Riau
2. Peningkatan kapasitas dan jadwal roro dumai-rupat terkait distribusi bahan pokok, sawit serta mendukung pariwisata
3. Promosi dan pengembangan daerah wisata di Rupat
4. Rupat sebagai sentra pertanian (sawah) dan peternakan
5. Pembudidayaan udang vaname dan pengembangan perikanan di Rupat
6. Kerja sama regional kedua daerah

b. Isu Pembangunan Daerah dengan Kabupaten Rokan Hilir

1) Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah

1. Perbedaan Konfigurasi Pola ruang Dumai dengan Rohil didaerah perbatasan
2. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dumai-rohil (lb. Gaung-Sinaboi)
3. Penguatan kerja sama SPAM Regional DUROLIS
4. Kebakaran hutan dan lahan

2) Bidang Sosial dan Budaya

1. Penguatan Kerja sama Sekolah Kejuruan (Perikanan)
2. Penyelesaian Tapal Batas Administrasi Kabupaten Rokan Hilir Dan Kota Dumai

3) Bidang Ekonomi

1. Peningkatan industri hilir perikanan laut
2. Banyaknya alih fungsi lahan tanaman pangan ke perkebunan kelapa sawit. Perlunya peraturan yang lebih jelas terkait sanksi ini.
3. Rohil sebagai penyangga ketahanan pangan Kota Dumai
4. Perdagangan lintas batas negara

5. Isu Strategis Berdasarkan RPJMN 2025-2029

RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025. Selanjutnya, pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan RPJP Nasional 2025-2045. RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen ini akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Berikut isi Asta Cita yang tertuang dalam RPMN Tahun 2025-2029:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

6. Isu-Isu Strategis Kota Dumai

Perencanaan pembangunan daerah menuntut berbagai macam intervensi dan penanganan yang termanifestasi dalam program dan penganggaran, ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, di mana isu strategis, berbeda dengan permasalahan biasa, mencakup potensi dampak yang dapat ditimbulkan serta signifikansi dari dampak tersebut terhadap pembangunan dan operasional daerah yang dinilai berdasarkan urgensi, luasan, intensitas dan jumlah masyarakat yang terdampak, serta memiliki cakupan lebih umum dengan keterkaitan antar isu baik secara longitudinal (horizontal) maupun hirarkikal (vertikal), sehingga perumusan isu strategis menjadi sangat krusial dalam perencanaan daerah sebagai landasan dalam memperkirakan tren dan tantangan yang dapat muncul di masa mendatang, berkaitan dengan proyeksi, tujuan serta mitigasi suatu daerah, yang dirumuskan berdasarkan permasalahan terkait program pembangunan daerah (prioritas utama) dan disinergikan dengan isu nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Isu strategis Kota Dumai dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan hasil sintesis dari berbagai masalah dan potensi yang bisa menjadi peluang di masa mendatang. Dokumen ini mencakup isu-isu yang relevan dari tingkat internasional hingga level provinsi, termasuk evaluasi hasil pembangunan dari RPJMD sebelumnya serta masalah yang muncul dari berbagai bidang urusan. Tujuannya adalah merumuskan fokus perencanaan pembangunan untuk waktu yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan berbagai dokumen yang relevan.

Perumusan isu strategis mendasarkan pada hasil evaluasi kinerja RPJMD 2020–2024, permasalahan daerah, tantangan isu RPJPD Kota Dumai tahap I (2025-2029), isu dari RPJMN 2025-2029, RTRW, dan KLHS RPJMD, dipadukan dengan Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Sejalan dengan Isu Nasional, Regional, dan Provinsi Riau, serta memperhatikan permasalahan utama yang harus diselesaikan, maka dirumuskan isu strategis Kota Dumai sebagai berikut:

1. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Menghadapi Era Globalisasi;
2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat;
3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi Pelayanan Publik;
4. Penguatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Energi Berkelanjutan sebagai Fondasi Pembangunan;
5. Optimalisasi Penataan Ruang Kota yang Terintegrasi, Harmonis, dan Berkelanjutan;
6. Mitigasi Risiko Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Kota Tangguh.

Tabel 2. 191 Perumusan Isu Strategis RPJMD Kota Dumai

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional Provinsi Riau	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi pengembangan SDM berkualitas dengan penguasaan teknologi digital dan kemampuan adaptasi untuk daya saing global	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul	peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan Penguatan karakter dan budaya lokal	Polarisasi Sosial	<i>Aging Population</i> Negara Maju	Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul Dan Sejahtera	Pengembangan Kapasitas dan daya saing sumberdaya manusia untuk menghadapi era globalisasi
Potensi optimalisasi tata ruang kota melalui perencanaan yang efisien menghadapi pertumbuhan populasi dan urbanisasi	Pemerataan pertumbuhan penduduk dan berkelanjutan	peningkatan kesejahteraan SDM Ketahanan Pangan	<i>Involuntary migration</i> Krisis sumber daya alam	<i>Aging Population</i> Negara Maju	Kurang pengamalan budaya dalam kehidupan bermasyarakat Masih tingginya pengaruh ekonomi global dan regional	penguatan ketahanan pangan dan diversifikasi energi berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan
Potensi pengembangan infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan daya saing daerah dan kemudahan akses pelayanan	Pertumbuhan perekonomian di Kota Dumai yang Produktif	Penguatan sektor ekonomi unggulan lokal	<i>cyber insecurity</i> dampak buruk teknologi Ai Krisis sumber daya alam	Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Posistif bagi Perekonomian Indonesia	Belum optimalnya pengembangan nilai tambah ekonomi yang produktif	akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
Potensi keamanan dan stabilitas wilayah sebagai kota industri strategis di perbatasan untuk	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel	Perbaikan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	misinformasi dan disinformasi	Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	Belum optimalnya tatakelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional Provinsi Riau	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
meningkatkan investasi	Keamanan dan stabilitas warga kota yang berkeadilan dan inklusif	Peningkatan pelayanan publik	misinformasi dan disinformasi			pelayanan publik
Potensi harmonisasi pemanfaatan ruang untuk mencegah konflik penggunaan lahan dan mendukung pembangunan berkelanjutan	Peningkatan kualitas infrastruktur dan pemanfaatan ruang	Peningkatan Infrastruktur wilayah Pengendalian dan penataan alih fungsi lahan	Krisis sumber daya alam	Transisi Energi untuk Mendorong Pemerataan	Masih tinggi ketimpangan pembangunan wilayah	mitigasi penataan ruang kota yang terintegrasi, harmoni, dan berkelanjutan
Potensi ketahanan bencana dan lingkungan melalui sistem adaptasi dan mitigasi yang terintegrasi	Daerah yang aman dan nyaman dari bencana dan kerusakan lingkungan	ancaman degradasi lingkungan ketahanan dan mitigasi bencana	cuaca ekstrem perubahan kritikal terhadap iklim Biodiversitas Loss dan gangguan ekosistem	Penerapan Standar <i>Sustainability</i> yang Tinggi di Level Global	Adanya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup	mitigasi risiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kota tangguh

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025 Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

INDONESIA
EMAS

2045

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA DUMAI TAHUN 2025 - 2029

BAB III | VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1. Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029

Visi dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pernyataan umum yang menggambarkan kondisi ideal bagi masyarakat/daerah yang ingin dicapai (*clarity of direction*) pada akhir periode perencanaan. Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka visi pembangunan ini akan dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun. Visi bukan sekedar harapan, tetapi komitmen antara kondisi saat ini dan masa depan yang diinginkan.

Sebagai panduan utama dalam pembangunan daerah, visi harus dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat mencerminkan kepentingan bersama dan menjawab berbagai permasalahan serta tantangan strategis yang dihadapi. Selain itu, visi pembangunan daerah dibuat selaras dengan arah kebijakan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan diterjemahkan ke dalam serangkaian misi, tujuan serta program pembangunan yang terukur. Dalam konteks pemerintahan daerah, visi yang diusung oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan serta menentukan prioritas pembangunan selama masa jabatannya.

Visi Pembangunan Kota Dumai tahun 2025-2029 dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang kemudian dirumuskan sebagai berikut,

**Kota Industri yang Unggul, Sejahtera dan Berkelanjutan
Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029**

Secara filosofi, visi tersebut mencerminkan makna dan harapan besar bagi Kota Dumai untuk berkembang menjadi pusat industri yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan

kesejahteraan rakyat, kelestarian lingkungan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Melayu. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dumai sebagai **Kota Industri yang Unggul** menunjukkan bahwa Kota Dumai ingin menjadi kota industri yang kompetitif, efisien, dan inovatif. Keunggulan ini dapat diukur berdasarkan daya saing sektor industri, penerapan teknologi modern, keberlanjutan ekonomi, serta kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan potensi sebagai kota Pelabuhan dan pusat industri pengolahan, Kota Dumai diharapkan mampu menarik investasi, meningkatkan produktivitas industri dan menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif.
2. Dumai sebagai kota industri yang **Sejahtera** mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Industri yang berkembang harus berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat, baik melalui peningkatan lapangan kerja, pendapatan yang layak, maupun fasilitas umum yang memadai. Sejahtera juga mencakup aspek sosial, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kota Dumai.
3. Dumai sebagai Kota Industri yang **Berkelanjutan** berarti menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Kota Dumai diharapkan dapat mengembangkan industri yang ramah lingkungan, mengelola sumber daya alam secara bijaksana serta mengadopsi prinsip ekonomi hijau agar pembangunan industri tidak merusak lingkungan dan tetap memberi manfaat bagi generasi mendatang.
4. Dumai yang **Berlandaskan Budaya Melayu** mencerminkan Kota Dumai dengan akar budaya Melayu yang kuat ingin memastikan bahwa pembangunan kota tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal. Berlandaskan budaya Melayu berarti menjadikan adat, norma, dan kearifan lokal sebagai landasan dalam tata kelola pemerintahan, kehidupan sosial, serta pengembangan industri.
5. **Tahun 2029** menjadi target pencapaian visi pembangunan tersebut, menandakan periode perencanaan dan implementasi strategi pembangunan. Dalam rentan waktu ini, diharapkan

terdapat kemajuan signifikan dalam aspek industri, kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta pelestarian budaya, sehingga Kota Dumai dapat mencapai posisi yang diharapkan.

Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lain sehingga terlihat konsistensi dan hubungan dengan visi RPJPN Tahun 2025-2029, Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, visi RPJPD Provinsi Riau tahun 2025-2045, dan visi RPJPD Kota Dumai tahun 2025-2045.

Visi RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 adalah “Kota Idaman Maju dan Berkelanjutan”. Dalam rangka mendukung (*promote*) pelaksanaan tagline pembangunan Daerah dumai Kota Idaman, maka Pemerintah Kota Dumai merumuskan beberapa program aksi dalam bentuk program Khidmat Pembangunan Daerah yang merupakan bagian dari operasionalisasi Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun program Khidmat pembangunan daerah tersebut terdiri dari :

- 1) Khidmat Bidang Persampahan dan Pariwisata. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dan pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan. Adapun sasaran dari khidmat bidang persampahan dan pariwisata adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah.
- 2) Khidmat Bidang Infrastruktur yang terdiri dari penanganan banjir/drainase/rutin jalan dan penerangan jalan. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi. Adapun sasaran dari Khidmat Bidang Penanganan Banjir/Drainase/Rutin Jalan adalah meningkatnya infrastruktur kota.
- 3) Khidmat Bidang Tertib Administrasi. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun sasaran dari khidmat bidang tertib administrasi adalah

- meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- 4) Khidmat Bidang Sosial dan KESRA. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu. Adapun sasaran dari Khidmat Bidang Sosial dan KESRA adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota dumai dan Meningkatkan penerapan budaya melayu.
 - 5) Khidmat Bidang Pembangunan Manusia. Adapun sasaran dari khidmat bidang pembangunan manusia adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kota Dumai.

Adapun keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Keterkaitan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan lain

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

3.1.2. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029

Misi merupakan perincian dari visi yang berfungsi sebagai panduan dalam mengimplementasikan langkah-langkah untuk mewujudkan visi tersebut. Perumusan misi menggambarkan visi yang ingin dicapai serta menguraikan berbagai upaya yang perlu dilakukan. Misi dirancang untuk memberikan kerangka dalam penetapan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang akan ditempuh guna mencapai visi.

Dalam penyusunannya, misi mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan strategis, baik dari sisi internal maupun eksternal, yang dapat memengaruhi pencapaian visi. Selain itu, aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pembangunan daerah juga turut diperhitungkan. Dengan demikian, misi bertujuan untuk memperjelas langkah-langkah yang harus diambil guna merealisasikan visi secara optimal. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Dumai Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Berdaya Saing,
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan,
3. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Produktif,
4. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.



Gambar 3. 2 Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029
Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025



Penjabaran masing-masing misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama periode pemerintahan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Berdaya Saing

Misi pertama bertujuan untuk menciptakan masyarakat Kota Dumai yang memiliki kompetensi tinggi, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, serta memiliki daya saing dalam berbagai bidang, baik di tingkat regional, nasional, maupun global. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi faktor utama dalam mendukung terwujudnya Kota Dumai sebagai kota industri yang unggul, sejahtera, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap teknologi modern agar mereka siap menghadapi tantangan dunia kerja serta perkembangan industri yang semakin dinamis.

Dalam implementasinya, misi ini dijalankan dengan mengedepankan aspek peningkatan kualitas pendidikan formal maupun nonformal, pemberdayaan tenaga kerja, serta penguatan karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai budaya Melayu. Pemerintah juga mendorong penguasaan teknologi dan inovasi agar SDM yang dihasilkan tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kreatif dan solutif. Selain itu, penguatan nilai-nilai keagamaan, etos kerja, serta jiwa kewirausahaan menjadi bagian integral dari strategi peningkatan SDM, sehingga masyarakat Dumai tidak hanya menjadi tenaga kerja yang kompetitif, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan di era industri modern.

Misi 2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.

Misi kedua berfokus pada pengembangan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai. Infrastruktur yang memadai menjadi fondasi utama dalam mendorong kelancaran aktivitas industri, perdagangan, dan sektor lainnya. Oleh

karena itu, pemerintah berkomitmen untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, sanitasi, serta fasilitas telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Dengan pembangunan infrastruktur yang merata, diharapkan konektivitas antarwilayah dapat diperkuat, sehingga distribusi barang dan jasa semakin lancar serta mendorong pemerataan pembangunan.

Selain itu, aspek keberlanjutan menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang dilakukan akan mengedepankan prinsip ramah lingkungan dengan memanfaatkan teknologi hijau serta memperhatikan daya dukung lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem. Pemerintah juga akan mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, guna menciptakan sistem infrastruktur yang efisien dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim serta bencana alam. Dengan adanya infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, Kota Dumai dapat tumbuh sebagai kota industri yang unggul dengan daya saing tinggi, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakatnya.

Misi 3. Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif

Misi ketiga bertujuan untuk menciptakan perekonomian Kota Dumai yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan perkembangan industri, diperlukan strategi yang mampu mendorong produktivitas di berbagai sektor, seperti industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, dengan menyediakan akses terhadap permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta kemudahan regulasi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Selain itu, pembangunan ekonomi yang produktif juga akan diarahkan pada pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing daerah. Pemerintah



akan mendorong digitalisasi ekonomi, memperkuat rantai pasok industri lokal, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional. Prinsip keberlanjutan juga menjadi perhatian utama dalam pertumbuhan ekonomi, dengan memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dilakukan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Kota Dumai dapat menjadi kota industri yang unggul dengan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Misi 4. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel

Misi keempat bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, reformasi birokrasi akan terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), digitalisasi layanan publik, serta penyederhanaan regulasi guna mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Selain itu, akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran akan dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan juga akan ditingkatkan guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan tata kelola yang baik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin meningkat, serta tercipta lingkungan yang kondusif bagi pembangunan Kota Dumai yang unggul, sejahtera, dan berkelanjutan.

Sebagaimana visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029, untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 juga berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Misi RPJPD Provinsi Riau tahun 2025-2045, dan Misi RPJPD Kota Dumai tahun 2025-2045.

Berikut keselarasan dan konsistensi serta hubungan antara misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 3. 1 Keterkaitan Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029

MISI RPJMN TAHUN 2025-2029	MISI RPJMD PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029	MISI RPJMD KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (Ham)	5. Mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik dan Berintegritas Serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Dengan Dukungan Aparatur yang Kompeten dan Profesional menuju Pemerintahan yang Berkelas dunia (<i>world class government</i>)	4. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	2. Meningkatkan Perekonomian, Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumber daya secara Optimal dalam Kerangka Pembangunan yang Berkelanjutan.	3. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Produktif
3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong kewirausahaan , Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan algoritma Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif kooperatif	3. Memperkuat Infrastruktur yang Handal Guna Kemudahan Akses, Pelayanan Masyarakat dan Perekonomian serta Peningkatan Konektifitas Antar Wilayah.	2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) Dan Penyandang Disabilitas	1. Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada Disabilitas dan kelompok marjinal	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Berdaya Saing

MISI RPJMN TAHUN 2025-2029	MISI RPJMD PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029	MISI RPJMD KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
5. Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	6. Memperkuat riset dan inovasi serta kerja sama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui <i>multi helix partnership</i> , kerja sama antar daerah maupun kerja sama global	3. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Produktif
6. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Memerangi Kemiskinan, Pengangguran dan Kesenjangan Antar Masyarakat dan Antar Wilayah serta Menjaga Keseimbangan dan Pemerataan Pembangunan	3. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Produktif
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang berkelas dunia (<i>world class government</i>)	4. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
8. Memperkuat Penelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	7. Mewujudkan Kebudayaan Melayu sebagai Alat Pemersatu dan Perwujudan Nilai Nilai Kearifan Lokal serta Mendorong Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman dan Adil untuk Semua	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Berdaya Saing

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

3.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan capaian strategis yang mencerminkan tingkat kinerja tertinggi dalam pembangunan daerah. Perumusannya didasarkan pada visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah sebagai landasan utama dalam menyusun strategi, kebijakan, dan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah untuk periode lima tahun. Tujuan pembangunan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun sebagai dampak dari keberhasilan berbagai program prioritas daerah. Tujuan ini disusun untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan

Sementara itu, sasaran pembangunan merupakan hasil konkret yang ingin dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran dirancang agar terukur, spesifik, realistis, dan dapat diwujudkan dalam periode lima tahun, sehingga dapat menjadi indikator pencapaian *outcome* dari berbagai program perangkat daerah. Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran yang tepat akan memastikan arah pembangunan daerah lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil yang nyata.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan Kota Dumai adalah sebagai berikut,

1. Tujuan 1: **Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk yang sejalan dengan penambahan penduduk dan arus urbanisasi.**

Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Berdaya Saing. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-1:

- a. Kesehatan untuk semua
- b. Pendidikan berkualitas yang merata
- c. Perlindungan sosial yang adaptif

2. Tujuan 2: **Terwujudnya Masyarakat yang Tangguh**

Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Berdaya Saing. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-1:

- a. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

3. Tujuan 3: **Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur**

Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-2 antara lain:

- a. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dari Pusat Kota Hingga ke Kelurahan

4. Tujuan 4: **Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas**

Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.

Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-3 antara lain:

- a. Lingkungan hidup yang berkualitas
- b. Berketahanan air, energi dan kemandirian pangan
- c. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

5. Tujuan 5: **Terwujudnya Perekonomian Kota Dumai yang Maju dan Berdaya Saing.**

Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 3 Mewujudkan Perekonomian Kota yang Produktif. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-5:

- a. Stabilitas Ekonomi Makro
- b. Integrasi ekonomi domestik dan global
- c. Produktivitas ekonomi

6. Tujuan 6: **Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas.**

Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 4 Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-6 antara lain:

- a. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

Lebih lengkapnya kerangka penjabaran visi dan misi ke level tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta indikator dan target pencapaiannya hingga periode akhir RPJMD pada tabel berikut,

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029

VISI / MISI		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VISI	Kota Industri yang Unggul, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029										
MISI 1	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Berdaya Saing	1.1 Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk yang Sejalan Dengan Penambahan Penduduk dan Arus Urbanisasi		Indeks Pembangunan Manusia	77,70	78,35	79,02	79,67	80,33	82,95	
				Tingkat Kemiskinan	2,48- 2,70	2,41-2,63	2,34-2,56	2,27-2,49	2,20 - 2,42	2,13 - 2,35	
				Rasio Gini (Indeks)	0,322-0,340	0,317-0,335	0,313-0,330	0,309-0,325	0,305-0,320	0,300-0,315	
			1.1.1 Kesehatan untuk Semua	Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,66	73,81	73,97	74,13	74,28	74,44	
				Jumlah Kelahiran Hidup	9.914	10.305	10.712	11.135	11.575	12.032	
				Jumlah Kematian Balita Absolut	138	136	134	132	129	129	
				Jumlah Kematian Ibu Absolut	9	8	7	6	5	5	
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,8	16,5	16	15,5	15	14	
				Penanganan Tuberkulosis:							
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%);	80	83	85	87	90	92	
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	95,2	97,48	98	98,2	98,4	98,6	
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100	100	100	100	100	100	
				Cakupan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	80	85	90	93	95	95	

VISI / MISI		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	
				<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,29	2,27	2,26	2,24	2,19	2,18	
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	7,9	7,8	7,6	7,1	6,9	6,9	
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive (mCPR)</i>	71	71,2	72,5	73	73,2	73,5	
			1.1.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Skor Kemampuan Literasi jenjang pendidikan di Kota Dumai:							
				a. SD	a. 65,77	a. 68,27	a. 70,77	a. 73,27	a. 75,77	a. 78,27	
				b. SMP	b. 75,75	b. 76,85	b. 77,95	b. 79,05	b. 80,15	b. 81,25	
				Skor Kemampuan Numerasi jenjang pendidikan di Kota Dumai:							
				a. SD	a. 56,14	a. 59,04	a. 61,94	a. 64,84	a. 67,74	a. 70,64	
				b. SMP	b. 65,89	b. 67,39	b. 68,89	b. 70,39	b. 71,89	b. 73,39	
				Rata-rata lama sekolah	10,27	10,33	10,38	10,44	10,50	10,55	
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,42	13,43	13,44	13,44	13,45	13,45	
				Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	18,00 - 19,00	19,20-20,25	20,40-21,50	21,60-22,75	22,80-24,00	24,00-25,25	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

VISI / MISI		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.1.3 Perlindungan Sosial yang Adaptif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai (%)		71,75	73,15	74,55	75,95	77,35	78,75	
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)		1,00	2,25-2,75	3,5-4,50	4,75-6,25	6,00 - 8,00	6,00 - 8,00	
			Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)		57,94	58,44	58,94	59,44	59,94	60,44	
		1.2 Terwujudnya Masyarakat yang Tangguh	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0.39	0,385-0,39	0,385-0,39	0,375-0,39	0,37-0,39	0,37-0,39	
			1.2.1 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67	67,5	68	68,5	69	70	
				Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	27,27	33,33	39,00	45,00	51,00	57,00	
MISI 2	2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	2.1 Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah (IID)		66,43	67,17	68,06	68,95	69,64	70,73	
			2.1.1 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dari Pusat Kota Hingga Ke Kelurahan	Tingkat kemantapan jalan (%)	54,91	58,15	61,65	64,88	67,56	71,86	
				Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak (%)	79,93	77,59	75,32	73,12	70,98	68,93	

VISI / MISI		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.2 Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	86,26	86,43	86,60	86,76	86,90	87,00	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,37	58,58	58,79	59,00	59,22	59,43	
				Penurunan intensitas Emisi GRK	10,11	11,02	11,93	12,79	13,48	14,16	
				2.2.1 Lingkungan Hidup yang Berkualitas							
				Pengelolaan Sampah:							
				a. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	76,17	76,66	77,13	77,59	78,04	78,04	
				b. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	76,17	76,66	77,13	77,59	78,04	78,04	
				2.2.2 Berketahanan air, energi dan kemandirian pangan							
				Kemandirian Pangan: Prevalensi Tidak cukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	11,42	10,92	10,42	9,92	9,42	9,42	
				Ketahanan Air							
				Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,84	0,85	0,87	0,88	0,89	0,9	
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Layak Perpipaan (%)	19,3	21,38	23,43	25,44	27,42	29,36	
				2.2.3 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim							
				Indeks Risiko Bencana (IRB)	95,46	92,31	89,43	86,78	84,34	82,09	
MISI 3		3.1 Terwujudnya Perekonomian Kota		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,04-6,12	5,06-6,14	5,08-6,16	5,10-6,18	5,12-6,20	5,14-6,22	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

VISI / MISI		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3. Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif	Dumai yang Maju dan Berdaya Saing	3.1.1 Stabilitas Ekonomi Makro	Indeks Daya Saing Daerah		3,76	3,79	3,81	3,84	3,87	3,89	
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		60,43 - 60,54	60,44 - 60,65	60,45 - 60,77	60,46 - 60,88	60,47 - 61,00	60,48 - 61,12	
			PDRB per Kapita		152,29-169,20	159,46-172,6	166,64-176	173,81-179,4	180,99-182,81	180,99-182,81	
			Kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi Riau (%)		4.85	4,85-4,8575	4,85-4,865	4,85-4,8725	5	5	
			Tingkat Inflasi (%)		2,9-3,0	2,8-3,0	2,7-3,0	2,6-3,0	2,50-3,00	2,50-3,00	
			Indeks Kapabilitas Inovasi		2,29	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	
			Indeks Inovasi Daerah		56,2	57,7	59,2	60,7	62,2	63,70	
		3.1.2 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		41,06-41,82	41,08-41,86	41,1-41,9	41,12-41,94	41,14-41,98	41,14-41,98	
			Rasio Ekspor Non Migas Terhadap Total Ekspor Perdagangan Luar Negeri		94,20	94,25	94,30	94,34	94,39	94,44	
		3.1.3 Produktivitas Ekonomi	Pengembangan Pariwisata:								
			a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*		0,83 - 0,85	0,85 - 0,86	0,86 - 0,89	0,88 - 0,92	0,90 - 0,95	0,92 - 0,97	
			b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara		6615	6615-6958	6615-7301	6615-7644	6615-7988	6615-7988	
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		2,9-3,0	2,8-3,00	2,7-3,00	2,6-3,00	2,50-3,00	2,50-3,00	

VISI / MISI		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Kota Dumai (%)	94,20-94,27	94.27-94.34	94.33-94.40	94.40-94.47	94.47-94.54	94.54-94.60	
				Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi Kota Dumai (%)	99	99	99	99	99	99	
				Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,70 - 4,77	4.64-4.71	4.57-4.64	4.51-4.58	4.45-4.51	4.38-4.45	
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0.55	0,55-0,615	0,55-0,68	0,55-0,745	0,55-0,81	0,55-0,81	
				Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik: Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,94 - 4,66	3,74 - 4,46	3,54 - 4,26	3,34-4,06	3,14-3,86	2,94-3,66	
				Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal	94,90 - 95,30	95,16 - 95,65	95,42 - 96,00	95,68 - 96,35	95,94 - 96,70	96,20 - 97,05	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	46,25	47,74	49,28	50,88	52,52	54,22	
				Koefisien Variasi Harga Antarwilayah	11,39	11,08	10,77	10,45	10,14	9,83	
MISI 4	4. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	4.1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas		Indeks Integritas	75	75-77	75-79	75-81	75,01 - 83,00	75,01-83,00	
			4.1.1 Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks SPBE	3,92	-	-	-	-	-	
				Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	-	2,16	2,35	2,55	2,74	2,94	

VISI / MISI		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Indeks Reformasi Hukum	80,00 - 85,00	81,25-86,25	82,5-87,5	83,75-88,75	85,00 - 90,00	85,00 - 90,00	
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,01-1,12	1,03-1,14	1,05-1,17	1,06-1,19	1,08-1,21	1,08-1,21	
				Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	5,15	5,16	5,17	5,17	5,18	5,19	
				Indeks Kualitas Kebijakan	65	67,8	70,6	73,4	76,2	79	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	90,28	90,78	91,28	91,78	92,28	92,78	
				Indeks Zakat Nasional	0,58	0,6	0,62	0,64	0,66	0,68	

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas

Strategi dan arah kebijakan merupakan perencanaan menyeluruh yang dirancang agar pemerintah daerah dapat mencapai tujuan serta sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Dalam arsitektur perencanaan pembangunan daerah, terdapat dua jenis perencanaan, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis berfokus pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta bertujuan untuk menginterpretasikan visi dan misi kepala daerah. Sementara itu, perencanaan operasional lebih menitikberatkan pada pencapaian kinerja layanan di setiap urusan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dibahas pada bab sebelumnya, strategi untuk setiap sasaran RPJMD disusun guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

3.2.1. Strategi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan

berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis di Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai mengintegrasikan pendekatan *Ekologi Fiscal Transfer* (EFT) atau Alokasi Kinerja Ekologi (ALAKE) dalam RPJMD 2025–2029. Pendekatan ini memberikan insentif fiskal berbasis kinerja lingkungan kepada kelurahan melalui pengalokasian Dana Kelurahan Berbasis Kinerja, yang terdiri atas tiga komponen utama: alokasi dasar (50%), alokasi formula (20%) yang mempertimbangkan jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan angka stunting, serta alokasi kinerja (30%) yang dihitung berdasarkan Indeks Kinerja Kelurahan (IKK).

Indeks Kinerja Kelurahan (IKK) adalah indeks komposit yang menggabungkan penilaian atas tiga aspek utama: tata kelola pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup. Proses penilaian dilakukan secara bertahap mulai dari sosialisasi kebijakan ALAKE, pelaksanaan penilaian mandiri oleh kelurahan, verifikasi dokumen oleh tim penilai di BAPPEDA, hingga penetapan hasil penilaian sebagai dasar alokasi anggaran.

Pengintegrasian ALAKE dalam RPJMD dilakukan dengan menjadikannya sebagai bagian dari strategi dan arah kebijakan pembangunan lingkungan. Program-program yang mendukung ALAKE antara lain peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), penyediaan IPAL komunal, pengelolaan sampah, penurunan indeks pencemaran air dan udara, serta peningkatan kapasitas kelurahan dalam penanggulangan kebakaran lahan dengan pendekatan ramah lingkungan. Selain itu, kegiatan sosialisasi, *assessment*, serta evaluasi rutin juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam strategi implementasi ALAKE.

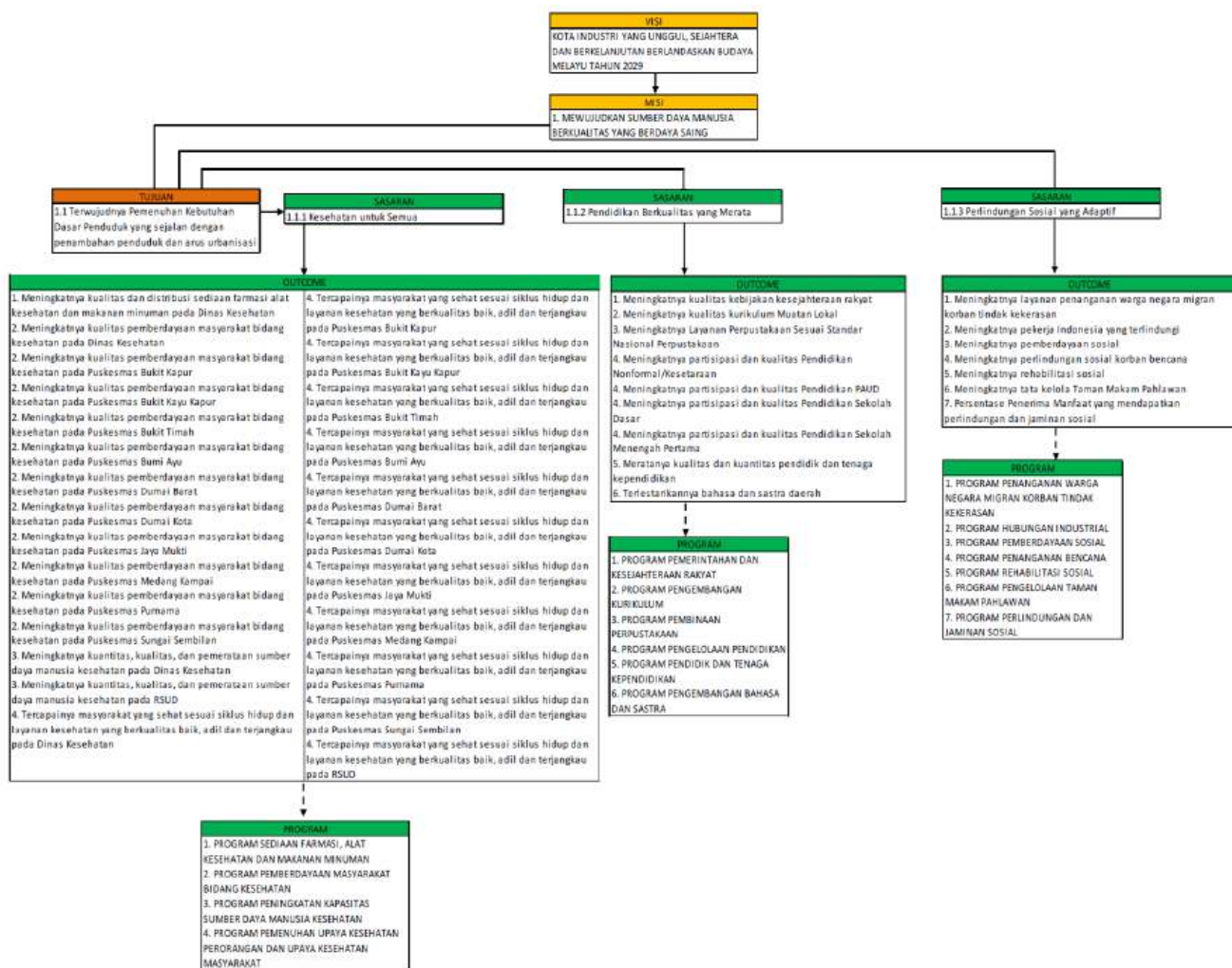
Keterlibatan lintas OPD seperti BAPPEDA, DPMK, DLH, dan BPBD menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini, baik dari sisi perencanaan, pelatihan, pengawasan, hingga penganggaran. Melalui integrasi ini, Pemerintah Kota Dumai berharap dapat meningkatkan partisipasi kelurahan dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan yang berbasis pada insentif dan kinerja

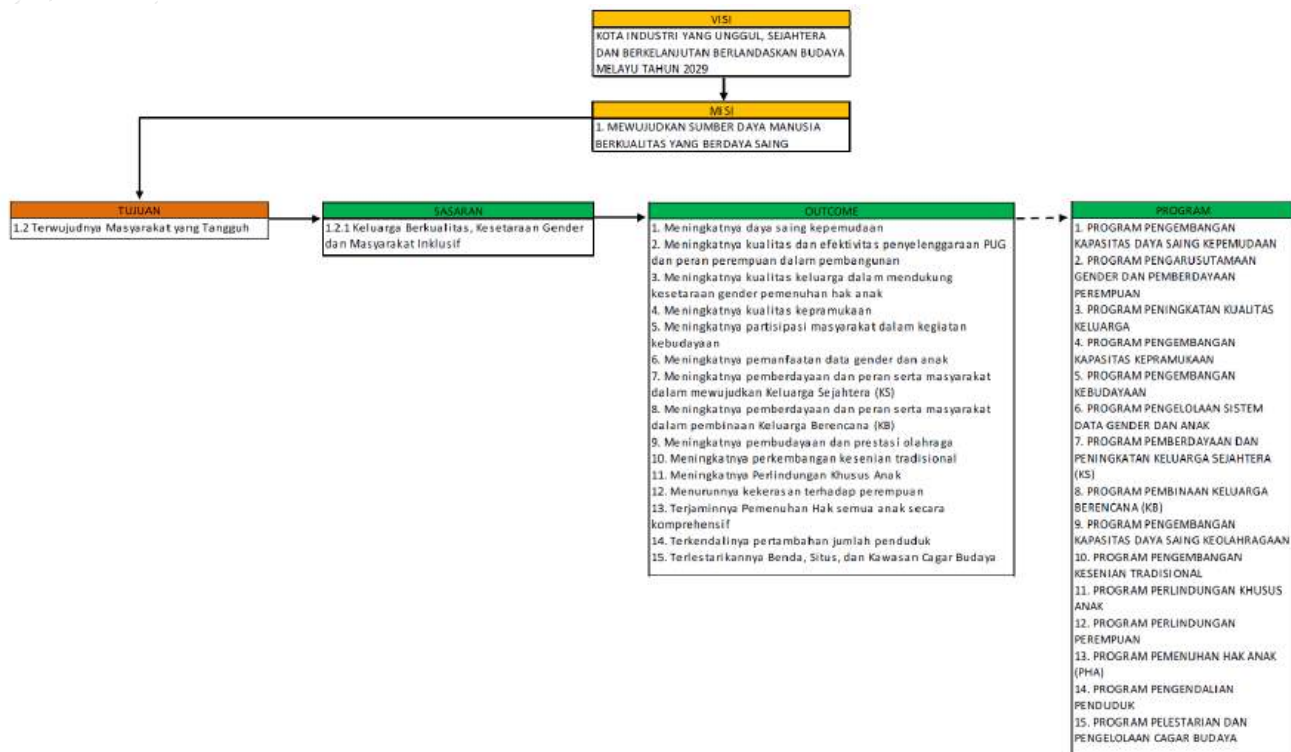


Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka strategi pembangunan daerah Kota Dumai tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. MISI I: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS YANG BERDAYA SAING dengan strategi:

- Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas
- Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai sosial kemasyarakatan.



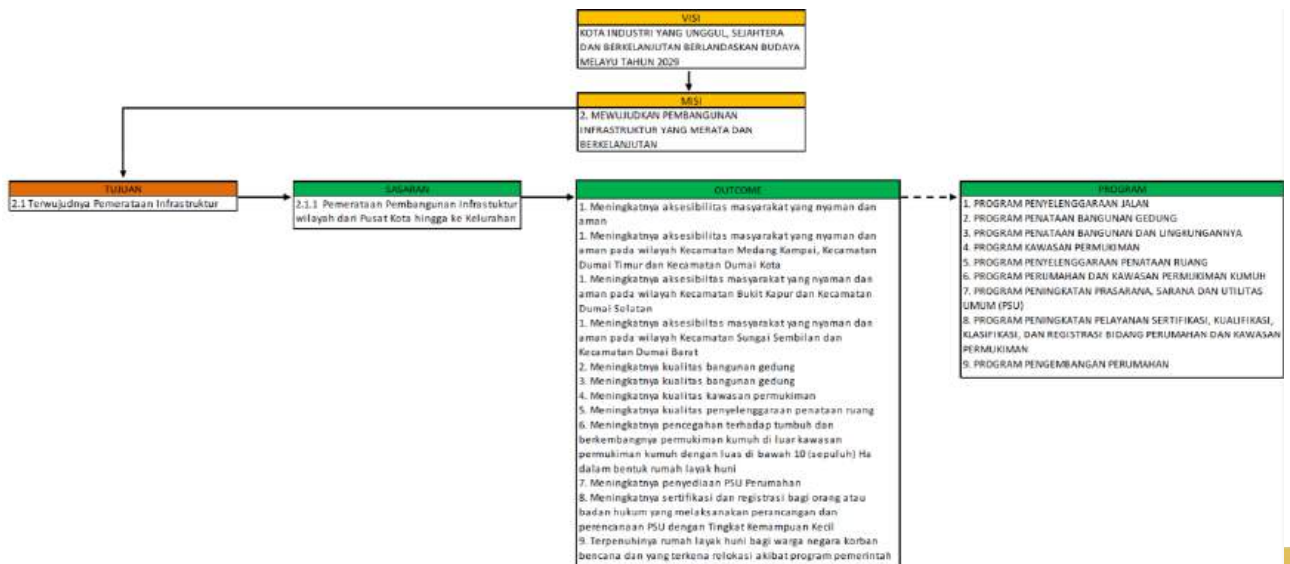


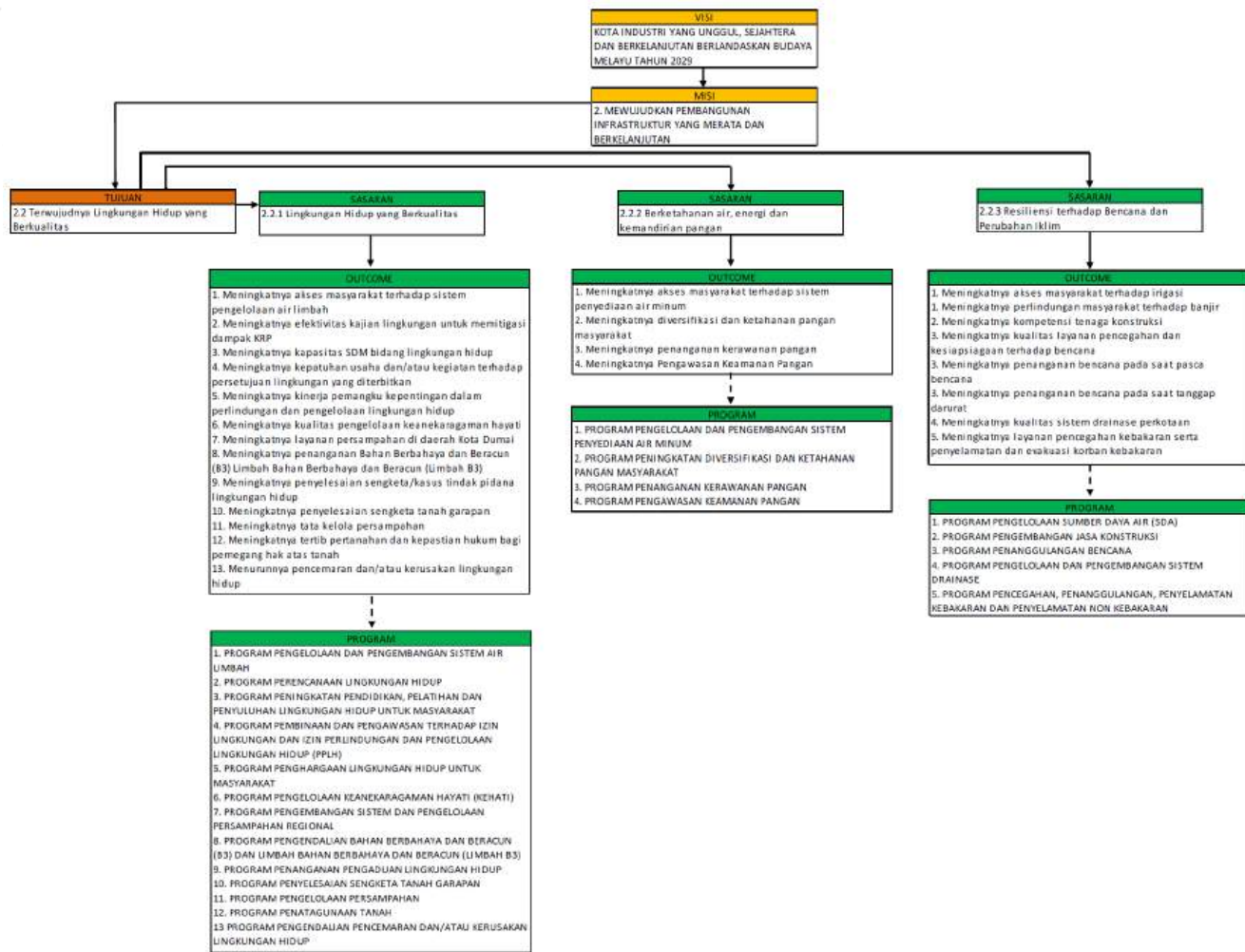
Gambar 3. 3 Diagram Alir Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Indikator pada Misi 1

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

2. **MISI II: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN** dengan strategi:

- Peningkatan sarana penunjang aktivitas ekonomi daerah
- Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- Pelaksanaan transfer anggaran yang pro lingkungan
- Peningkatan upaya dan koordinasi serta sinergitas sektor untuk ketersediaan air, energi, dan pangan daerah
- Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim



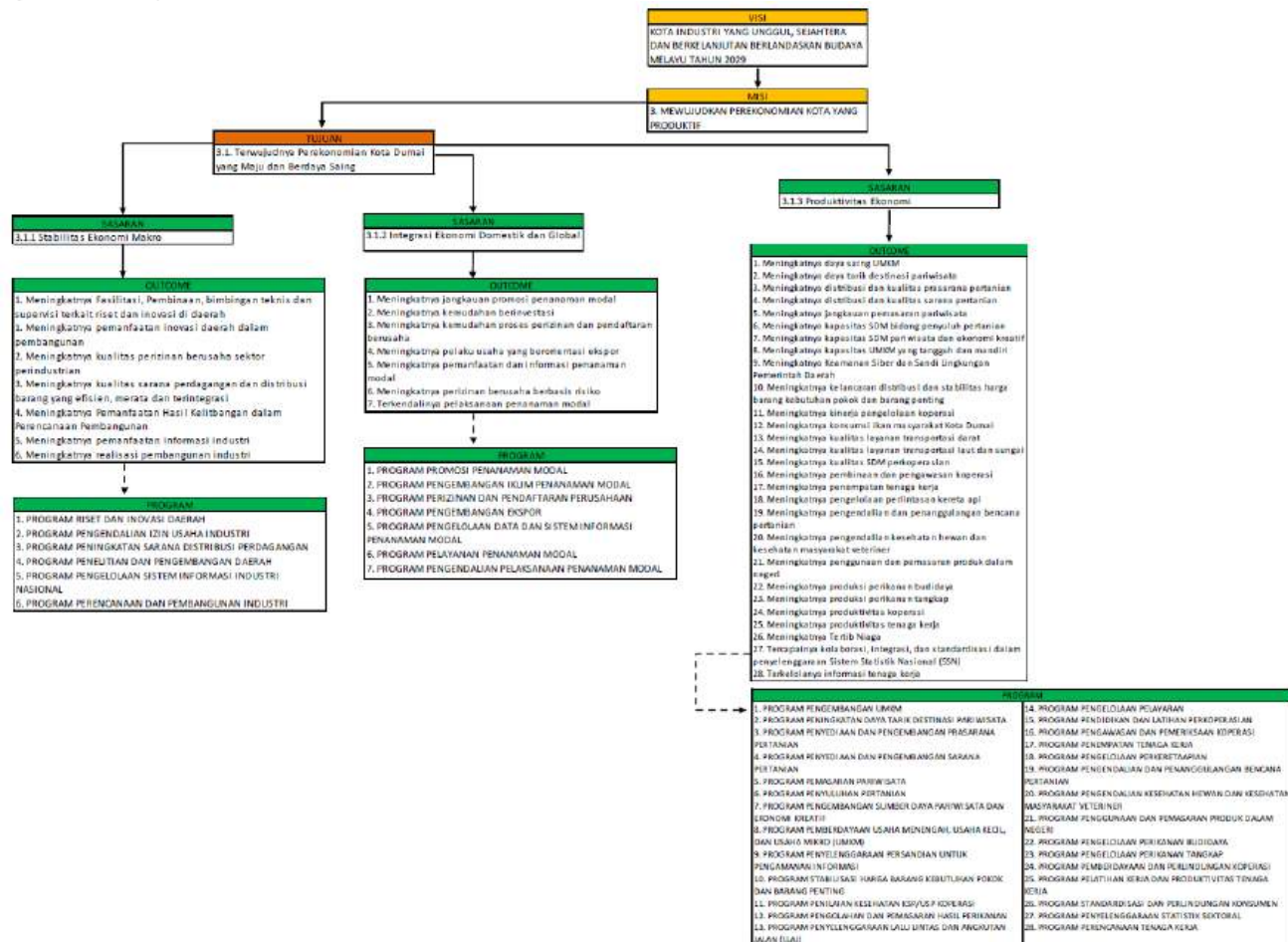


Gambar 3. 4 Diagram Alir Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Indikator pada Misi 2

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

3. MISI III: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG PRODUKTIF dengan strategi:

- Optimalisasi peran seluruh *stakeholder* dalam pembangunan daerah
- Peningkatan ekosistem riset dan inovasi daerah
- Peningkatan kerja sama daerah dalam pembangunan ekonomi
- Percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri serta pengembangan komoditas berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan

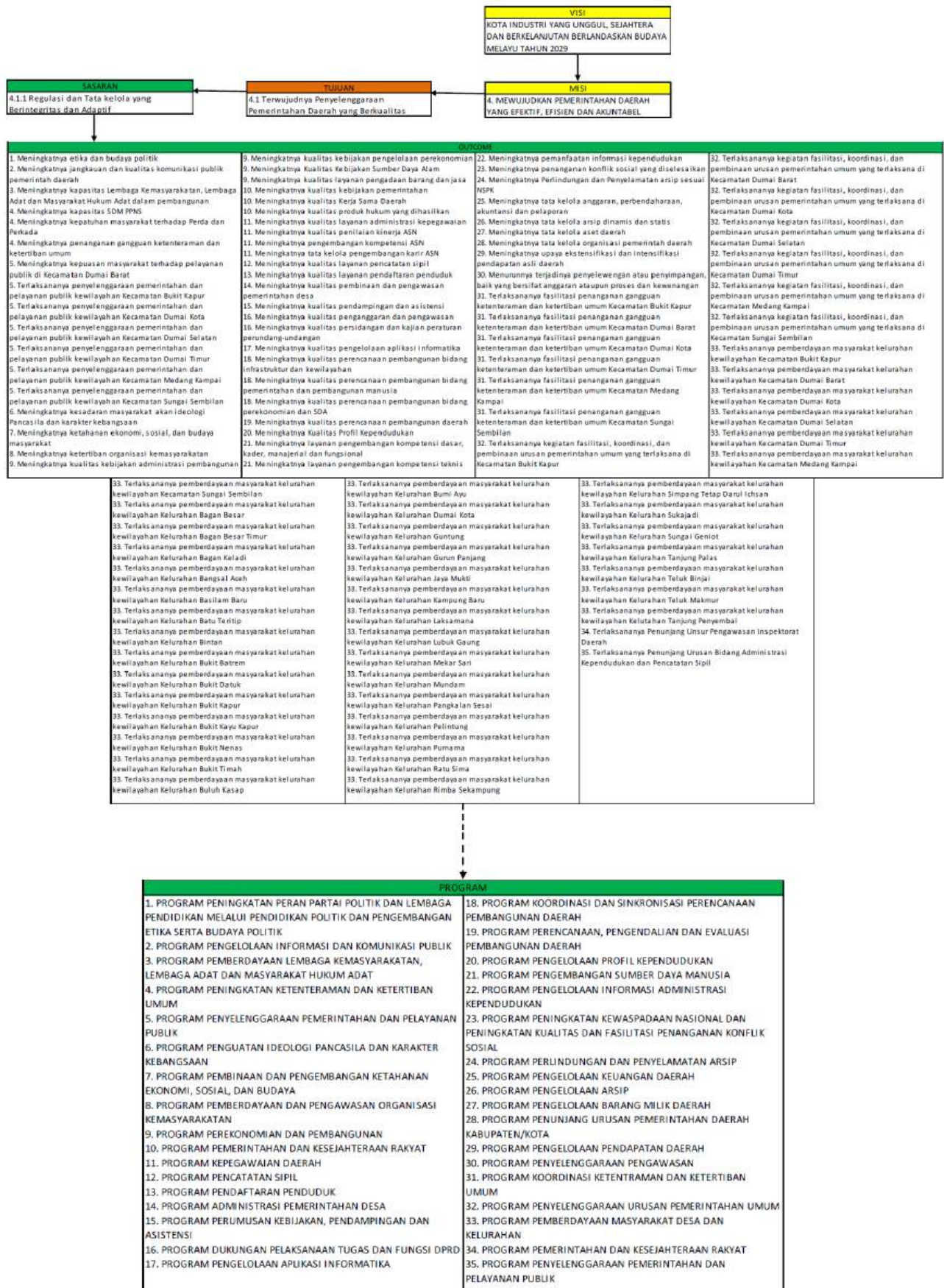


Gambar 3. 5 Diagram Alir Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Indikator pada Misi 3

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

4. **MISI IV: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL** dengan strategi:

- Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah



Gambar 3. 6 Diagram Alir Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Indikator pada Misi 4

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

3.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029

Pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah diwujudkan melalui strategi yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan sebagai program prioritas dalam pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan yang difokuskan pada pencapaian prioritas tujuan dan sasaran misi pembangunan. Sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan perencanaan pembangunan, arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah agar lebih efektif dalam menetapkan dan mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Selain itu, arah kebijakan juga menjadi panduan dalam merumuskan strategi yang dipilih agar tetap selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan dalam kurun waktu lima tahun. Perumusan arah kebijakan bertujuan untuk merasionalkan pilihan strategi sehingga lebih fokus dan sesuai dengan mekanisme pelaksanaannya.

Dalam memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029 adalah **Gerbang Integrasi Ekonomi dan Penumpu Ketahanan Bioindustri di Provinsi Riau**, kemudian jika dijabarkan dalam lima tahun ke depan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat SDM dan infrastruktur dalam meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan
2. Memantapkan sistem, sarana, dan sumber daya dalam mewujudkan kota industri yang unggul
3. Meningkatkan daya saing melalui hilirisasi industri dan ekonomi kreatif
4. Membangun Dumai yang tangguh dengan pembangunan inklusif dan berkelanjutan

5. Mewujudkan Dumai sebagai kota industri unggul dan berkelanjutan



Gambar 3. 7 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

Tabel 3. 3 Penahapan Pembangunan RPJMD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Menguatkan SDM dan Infrastruktur dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan	Memantapkan Sistem, Sarana, dan Sumber Daya dalam Mewujudkan Kota Industri yang Unggul	Meningkatkan Daya Saing Dumai melalui Hilirisasi Industri dan Ekonomi Kreatif	Membangun Dumai yang Tangguh dengan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan Dumai Sebagai Kota Industri dan Berkelanjutan
Penataan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas	Pengembangan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas	Penguatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas	Pemantapan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas	Pematangan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas
Penataan peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas	Pengembangan peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas	Penguatan peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas	Pemantapan peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas	Pematangan peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas
Penataan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Penguatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pemantapan peningkatan kesejahteraan masyarakat	pematangan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Penataan peningkatan perlindungan,	Pengembangan peningkatan perlindungan,	Penguatan peningkatan perlindungan,	Pemantapan peningkatan perlindungan,	Pematangan peningkatan perlindungan,



TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai sosial kemasyarakatan	pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai sosial kemasyarakatan	Penguatan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai sosial kemasyarakatan	Pemantapan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai sosial kemasyarakatan	Pematangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai sosial kemasyarakatan
Penataan peningkatan sarana penunjang aktivitas ekonomi daerah	Pengembangan peningkatan sarana penunjang aktivitas ekonomi daerah	Penguatan peningkatan sarana penunjang aktivitas ekonomi daerah	Pemantapan peningkatan sarana penunjang aktivitas ekonomi daerah	Pematangan peningkatan sarana penunjang aktivitas ekonomi daerah
Penataan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengembangan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pematangan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Penataan Pelaksanaan Transfer Anggaran yang Pro Lingkungan	Pengembangan Pelaksanaan Transfer Anggaran yang Pro Lingkungan	Penguatan Pelaksanaan Transfer Anggaran yang Pro Lingkungan	Pemantapan Pelaksanaan Transfer Anggaran yang Pro Lingkungan	Pematangan Pelaksanaan Transfer Anggaran yang Pro Lingkungan
Penataan Peningkatan upaya dan koordinasi serta sinergi sektor untuk ketersediaan air, energi dan pangan daerah	Pengembangan Peningkatan upaya dan koordinasi serta sinergi sektor untuk ketersediaan air, energi dan pangan daerah	Penguatan Peningkatan upaya dan koordinasi serta sinergi sektor untuk ketersediaan air, energi dan pangan daerah	Pemantapan Peningkatan upaya dan koordinasi serta sinergi sektor untuk ketersediaan air, energi dan pangan daerah	Pematangan Peningkatan upaya dan koordinasi serta sinergi sektor untuk ketersediaan air, energi dan pangan daerah
Penataan peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pengembangan peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Penguatan peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemantapan peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pematangan peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
Penataan optimalisasi peran seluruh <i>stakeholder</i> dalam pembangunan daerah	Pengembangan optimalisasi peran seluruh <i>stakeholder</i> dalam pembangunan daerah	Penguatan optimalisasi peran seluruh <i>stakeholder</i> dalam pembangunan daerah	Pemantapan optimalisasi peran seluruh <i>stakeholder</i> dalam pembangunan daerah	Pematangan optimalisasi peran seluruh <i>stakeholder</i> dalam pembangunan daerah
Penataan peningkatan ekosistem riset dan inovasi daerah	Pengembangan peningkatan ekosistem riset dan inovasi daerah	Penguatan peningkatan ekosistem riset dan inovasi daerah	Pemantapan peningkatan ekosistem riset dan inovasi daerah	Pematangan peningkatan ekosistem riset dan inovasi daerah
Penataan peningkatan kerja sama daerah dalam pembangunan ekonomi	Pengembangan peningkatan kerja sama daerah dalam pembangunan ekonomi	Penguatan peningkatan kerja sama daerah dalam pembangunan ekonomi	Pemantapan peningkatan kerja sama daerah dalam pembangunan ekonomi	Pematangan peningkatan kerja sama daerah dalam pembangunan ekonomi
Penataan percepatan tumbuh kembang Dunia	Pengembangan percepatan tumbuh kembang Dunia	Penguatan percepatan tumbuh kembang Dunia	Pemantapan percepatan tumbuh kembang Dunia	Pematangan percepatan tumbuh kembang Dunia

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Usaha dan dunia industri serta pengembangan komoditas berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan	Usaha dan dunia industri serta pengembangan komoditas berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan	Usaha dan dunia industri serta pengembangan komoditas berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan	Usaha dan dunia industri serta pengembangan komoditas berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan	Usaha dan dunia industri serta pengembangan komoditas berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan
Penataan peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah	Pengembangan peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah	Penguatan peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah	Pemantapan peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah	Pematangan peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah

Pembangunan Kota Dumai dalam periode RPJMD 2025-2029 dirancang melalui pendekatan bertahap yang sistematis dan terintegrasi, terdiri dari lima tahap strategis yang saling berkesinambungan. Tahap pertama (2025) fokus pada penguatan fondasi pembangunan melalui peningkatan SDM dan infrastruktur dalam meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan. Tahap kedua (2026) dilanjutkan dengan pemantapan sistem, sarana, dan sumber daya guna mewujudkan kota industri yang unggul. Tahap ketiga (2027) mengonsentrasikan upaya pada peningkatan daya saing Dumai melalui akselerasi industri dan ekonomi kreatif, yang kemudian diikuti tahap keempat (2028) dengan membangun Dumai yang tangguh dengan fokus pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Tahap kelima atau tahap akhir (2029) merupakan puncak dari seluruh proses pembangunan yang bertujuan mewujudkan Dumai sebagai kota industri yang unggul dan berkelanjutan.

Setiap tahap memiliki fokus prioritas yang spesifik namun tetap terintegrasi dengan tahap lainnya, sehingga pada akhir periode 2029, Kota Dumai diharapkan telah bertransformasi menjadi kota industri yang modern, berbudaya Melayu, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan dalam arah kebijakan Kota Dumai tahun 2025-2029 setiap misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditargetkan. Adapun uraian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 3. 4 Rumusan Arah Kebijakan RPJMD

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1. MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS YANG BERDAYA SAING	Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan;	
2		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;	
3		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;	
4		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya;	
5		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan;	
6		Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan serta pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan di kecamatan perbatasan;	
7		Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting;	
8		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat serta pengendalian terhadap produksi konsumsi dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat;	
9		Percepatan eliminasi penyakit menular, tidak menular dan penyakit tropis terabaikan.	
10		Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun prasekolah dan 9 tahun pendidikan dasar);	
11		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah;	
12		Penguatan upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan dan pemerataan akses serta perluasan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik;	
13		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar yang adaptif berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah serta Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK;	
14		Penguatan upaya peningkatan kecakapan literasi numerasi dan manajemen talenta serta prestasi peserta didik;	
15		Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta pemberian insentif khusus bagi guru dan tenaga kependidikan yang ditugaskan di kecamatan perbatasan.	
16		Penguatan pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan serta perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas secara inklusif;	
17		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & highvalue economy</i>),	



NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
		serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi;	
18		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> ;	
19		Peningkatan <i>government induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;	
20		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien;	
21		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	
22		Peningkatan Pemajuan Kebudayaan Melayu sebagai Payung Negeri	
23		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	
24		Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan stimulasi dini	
25		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	
26		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	
27		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	
28	2. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN	Penguatan regulasi dan ketahanan sosial ekologi serta pembangunan kewilayahan yang terintegrasi;	
29		<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i> , terutama pada kawasan perkotaan;	
30		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha;	
31		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;	
32		Dukungan pengembangan multi-infrastructure <i>backbone & maritime backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Dumai-Rupat-Malaka (di Selat Malaka);	



NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
33		Dukungan peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan Bandar Udara Pinang Kampai;	
34		Dukungan Penguatan infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis industri Medan-Dumai (yang menjadi bagian klaster industri pengolahan sawit, kelapa, kopi, karet dan hasil perkebunan lainnya) yang diarahkan sebagai koridor ekonomi industri berbasis SDA dan hub-ekonomi biru barat Indonesia;	
35		Dukungan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Dumai dan lingkaran Pekanbaru.	
36		Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.	
37		Dukungan Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan <i>dry port</i> untuk KA logistik), terutama pada ruas Rantauprapat-Kotapinang-Dumai-Pekanbaru.	
38		Dukungan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama bertaraf <i>global port</i> , terutama di Pelabuhan Dumai.	
39		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada kawasan perkotaan Dumai;	
40		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;	
41		Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
		pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan;	
42		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami;	
43		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan;	
44		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas <i>intraregion</i> ;	
45		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;	
46		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan;	
47		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>early warning system</i> berbasis IT dan pendekatan hybrid (<i>green & grey infrastructure</i>) pada kawasan perkotaan;	
48		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi serta proteksi kebakaran pada kawasan perumahan dan permukiman;	
49		Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	
50		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	
51		Dukungan percepatan pelaksanaan reforma agraria.	
52		Dukungan pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Medan-Dumai	
53		Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb) yang adaptif.	
54		Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	



NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
55	3. MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG PRODUKTIF	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, dsb);	
56		Pengendalian inflasi daerah;	
57		Dukungan peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut;	
58		Dukungan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	
59		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah;	
60		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing;	
61		Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	
62		Peningkatan produktivitas BUMD;	
63		Dukungan penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon;	
64		Penguatan hilirisasi sektor industri pengolahan, UMKM; dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penguatan riset dan inovasi daerah;	
65		Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, sarana prasarana dan lainnya);	
66		Penguatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;	
67		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;	
68		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya;	
69		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;	



NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
70		Dukungan pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri hilirisasi <i>bioproduct</i> , industri hilirisasi sumber daya mineral, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi);	
71		Dukungan percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi);	
72		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan <i>grid</i> tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja;	
73		Dukungan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kisaran-Aek Kanopan-Rantauprapat-Kotapinang-Duri-Dumai;	
74		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan dan daerah pinggiran;	
75		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital);	
76		Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile</i>	



NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
		connection pada area- area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan;	
77		Persiapan pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dengan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga.	
78	4. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL	Penguatan Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	
79		Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah;	
80		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;	
81		Penguatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respons terhadap laporan masyarakat dan penguatan aspek pemerintahan digital;	
82		Penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Dumai yang profesional dan bebas korupsi;	
83		Penguatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja;	
84		Dukungan Penguatan integritas partai politik;	
85		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;	
86		Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko;	
87		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota Dumai.	
88		Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	
89		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	
90		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
91		Penguatan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat	
92		Peningkatan kehidupan kerukunan beragama	
93		Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	

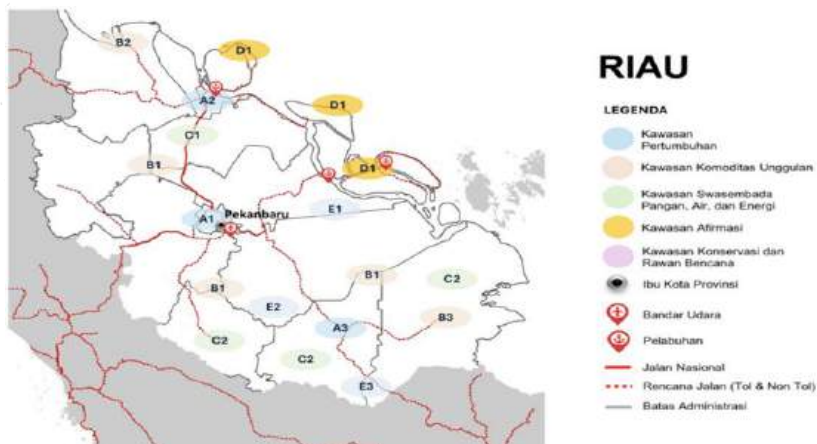
NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
94		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	
95		Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi	
96		Mendorong peluang inovasi pendanaan daerah	
97		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .	
98		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBU, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	
99		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal;	
100		Penguatan dana sosial syariah guna mendukung perlindungan sosial nasional dilakukan melalui akselerasi bauran zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF) dan keuangan syariah, dengan penyempurnaan bentuk kelembagaan dan skema bisnis bank wakaf serta penguatan tata kelola dan literasi ZISWAF	

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

3.2.3. Program Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029

3.2.3.1. Program Prioritas Turunan Nasional

Perwujudan visi Kota Dumai sebagai "Kota Industri yang Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029", selaras dengan program prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 yang berupa langkah-langkah strategis yang terarah dan terukur. Secara jelas, RPJMN tahun 2025-2029 telah menetapkan program prioritas pembangunan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kota Dumai selama periode 2025-2029.



Gambar 3.8 Kawasan Provinsi Riau dalam RPJMN Tahun 2025-2029

A. Kawasan Pertumbuhan

- 1 Kawasan Perkotaan Pekanbaru
- 2 Kawasan Perkotaan Dumai & Kawasan Pengembangan Industri Dumai
- 3 Kawasan Perkotaan Rengat

(Amanah RPJMN Tahun 2025-2029 dalam konteks pembangunan Dumai)

Berdasarkan amanat di atas, disebutkan bahwa Kota Dumai dijadikan sebagai kawasan pertumbuhan di Provinsi Riau. Kawasan pertumbuhan tersebut berfokus pada kawasan perkotaan Dumai dan kawasan pengembangan industri. Kota Dumai sebagai kawasan perkotaan memiliki peran sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional di kawasan A2. Selain itu, Kota Dumai diharapkan menjadi pusat fasilitas pendidikan, kesehatan, dan simpul transportasi.

Kota Dumai sebagai kawasan pengembangan industri memiliki makna bahwa Kota Dumai direncanakan sebagai kawasan industri di bidang pengolahan hasil sawit (CPO). Selain itu, Kota Dumai juga sudah menjadi kawasan industri di bidang minyak bumi. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa objek vital nasional pengolah minyak dan gas bumi di Kota Dumai, seperti Pertamina.

Secara rinci, diturunkan juga beberapa indikasi intervensi untuk Kota Dumai dalam lima tahun mendatang sebagai berikut :

- Pengembangan dan Penataan Kawasan Perkotaan Dumai.
- Pengembangan Koridor Industri Pekanbaru–Dumai.
- Hilirisasi sawit, karet, dan kelapa.
- Pengembangan dan Pembangunan Kilang Minyak Dumai.
- Pengembangan Pelabuhan Dumai.

- Pembangunan perumahan murah dengan infrastruktur sanitasi yang baik.
- Pengembangan SPAM.
- Pengembangan layanan unggulan dan fasilitas kesehatan (RSUD Dumai).
- Pembangunan Jalan Tol Dumai–Kota Pinang–Rantauprapat–Kisaran.
- Pembangunan Jalan Lingkar Barat Dumai (Bukit Timah–Parit Kitang–Lubukgaung).
- Reservasi jalan ruas Dumai–Bagan Siapiapi dan Dumai–Sungai Pakning.
- Pembangunan pipa transmigrasi gas bumi Sumatra utara–Dumai.
- Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Dumai.
- Pengembangan politeknik kelautan dan perikanan Dumai.
- Peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Terlepas dari amanah sebagai lokus atau lokasi pertumbuhan ekonomi dan kawasan pengembangan industri di Provinsi Riau, Program prioritas nasional Kota Dumai juga mencakup program prioritas Presiden Indonesia Tahun 2025-2029. Program prioritas ini merupakan turunan langsung dari Asta Cita sebagai visi pembangunan nasional yang menjadi prioritas utama pemerintahan periode 2025-2029. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan prioritas pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari misi Presiden, yang selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional menjadi struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan

struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Asta Cita memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) sejumlah 8 program. Keseluruhan upaya tersebut dirancang untuk memberikan dampak pembangunan yang signifikan dalam jangka menengah sekaligus memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka pendek. Program prioritas ini mencakup berbagai aspek pembangunan mulai dari ketahanan pangan, energi, dan air, reformasi tata kelola pemerintahan, pemberantasan kemiskinan dan korupsi, hingga penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.



Gambar 3. 9 Program Prioritas Nasional & 8 Program Hasil Terbaik Cepat

Sumber: Bappenas, 2025

3.2.3.2. Program Prioritas Turunan Provinsi

Program Prioritas Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 merupakan wilayah pengembangan bernilai sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam minyak/gas bumi dan kawasan industri terpadu. Selanjutnya, jika melihat prioritas provinsi yang terkait dengan Kota Dumai terdiri dari Riau Mantap, Riau Berdaya Saing, Riau Membangun Desa Majukan Kota, Riau Sejahtera, Riau Cerdas, Riau Sehat. Secara lebih rinci, turunan kebijakan provinsi yang diamanah kedalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dapat diamati pada bagian berikut.

Tabel 3. 5 Program Prioritas Provinsi Riau Tahun 2025-2029

ARAHAN PROVINSI		
PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	KEBIJAKAN PROVINSI	PRIORITAS PROVINSI
Wilayah Pengembangan (WP) Bernilai sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam minyak/gas bumi dan Kawasan industri terpadu meliputi: 1. Kabupaten Bengkalis 2. Kabupaten Rokan Hulu 3. Kabupaten Rokan Hilir 4. Kota Dumai	1. Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: • Konektivitas lintas provinsi yaitu: Peningkatan ruas jalan dan jembatan Sinaboi - Lubuk Gaung. Lanjutan pembangunan jalan tol Duri - Rantau Prapat. • Preservasi jalan Trans Bengkalis. • Pembangunan Jalan Lingkar Barat Dumai (Bukit Timah-Parit Kitang-Lubuk Gaung). • Peningkatan fasilitas penyeberangan Ro-Ro Dumai-Rupat. • Penyiapan jalur kereta api penunjang industri dan perekonomian masyarakat. • Mendorong Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah.	RIAU MANTAP
	2. Pemenuhan kebutuhan air baku melalui: Penyediaan dan pengelolaan unit produksi dan unit air baku SPAM Regional Dumai-Rokan-Bengkalis.	RIAU MANTAP
	3. Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui: Dukungan penyelesaian masalah banjir dan rob.	RIAU MANTAP
	4. Kegiatan pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan untuk: • Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub sektor perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan tangkap. • Pengembangan industri hilir sawit dan migas pada skala besar. • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap.	RIAU BERDAYA SAING RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA

ARAHAN PROVINSI		
PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	KEBIJAKAN PROVINSI	PRIORITAS PROVINSI
	- Pengembangan input produksi, sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat. Pengembangan Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu: - Pengembangan Kawasan Bekanhulir (Bengkalis, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir). - Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Perindustrian Selinsing di Dumai. - Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Wisata Pulau Rupat. - Pengembangan Kawasan Industri Bandar Bukit. - Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi. - Pengembangan Kawasan strategis pariwisata Dumai – Rupat dan Pengembangan Kawasan parwisata religi dan budaya di Rokan Hulu dan Rokan Hilir. - Pembangunan Kawasan perkotaan Dumai sebagai PKN dan Kawasan pengembangan perdagangan, industri dan jasa.	
	5. Kesejahteraan Masyarakat diarahkan untuk: - Peningkatan Angka Partisipasi Murni SMA. Angka Partisipasi Murni SMA tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 52,6 persen dan Kota Dumai sebesar 67,6 persen. - Penurunan prevalensi stunting. Prevalensi stunting tahun 2023 di kabupaten bengkalis sebesar 17,90 persen, Kabupaten Rokan Hilir sebesar 16,60 persen, Kabupaten Rokan Hulu sebesar 15,90 dan Kota Dumai sebesar 14,90 persen.	RIAU SEJAHTERA RIAU CERDAS RIAU SEHAT

Sumber: Ranwal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, 2025

3.2.3.3. Program Prioritas Kota Dumai

Program yang menjadi fokus utama kepala daerah dalam menjalankan visi dan misinya, sesuai dengan janji politik dan agenda pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Beberapa program prioritas tersebut secara lebih rinci, adalah sebagi berikut.

- Pemberian beasiswa penuh kepada tenaga dokter menjadi dokter spesialis untuk 10 orang



2. Penyediaan akomodasi dan konsumsi gratis bagi keluarga pasien yang dirujuk ke rumah sakit rujukan di Pekanbaru
3. Penginapan gratis bagi keluarga pasien yang berdomisili jauh dari pusat Kota Dumai yang dirawat di RSUD dr.Suhatman (RSUD Kota Dumai)
4. Peningkatan fasilitas rawat inap yang nyaman di RSUD yaitu: kelas III maksimal 4 (empat) tempat tidur, kelas II maksimal 2 (dua) tempat tidur, kelas I maksimal 1 (satu) tempat tidur
5. Pendidikan kesetaraan gratis untuk SD, SMP, atau SMA bagi masyarakat yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan dan ijazah
6. Puskesmas rawat inap baru di Kecamatan Dumai Timur
7. Rumah Sakit Umum Daerah type D/Puskesmas Rawat Inap Terpadu di Sungai Geniot, Kecamatan Sungai Sembilan
8. Pelayanan pengantaran obat gratis
9. Masterplan pengembangan RSUD
10. Peningkatan tipe RSUD ke tipe A
11. Kebijakan *outsourcing* untuk TKS
12. Bantuan kepada masyarakat miskin di luar program pemerintah pusat
13. Pendataan yang transparan akuntabel masyarakat miskin untuk penyaluran bantuan
14. Pengadaan lahan untuk sekolah di Dumai Timur, Dumai Barat dan Dumai Selatan
15. Pemberian beasiswa bagi siswa/i kurang mampu dan siswa/i berprestasi untuk jenjang S-1/D3
16. Pembangunan perpustakaan daerah
17. Penyediaan perlengkapan sekolah gratis bagi anak tidak mampu
18. Penyediaan transportasi publik gratis untuk anak sekolah
19. Pembangunan asrama bagi mahasiswa putra putri yang tidak mampu di Pekanbaru
20. Pengembangan agro - eduwisata di Kelurahan Pehtung, Kecamatan Medang Kampai
21. Pemerataan pembangunan jalan sampai tingkat kelurahan
22. Penyediaan akses internet gratis di sarana publik



23. Percepatan pembangunan akses jalan dari Kecamatan Bukit Kapur - Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Bukit Kapur - Sungai Sembilan
24. Pembangunan panti rehab total narkoba yang mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial dan peningkatan skill
25. Pembangunan ruang terbuka publik di Putri Tujuh
26. Pemasangan jaringan PDAM sambungan rumah baru gratis bagi masyarakat miskin/tidak mampu
27. Perluasan pelayanan jaringan air bersih perpipaan
28. Pengendalian banjir di Kota Dumai
29. Pemberian bantuan untuk peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan masyarakat
30. Pengembangan peternakan sapi dan kambing
31. Peningkatan skill dan produktivitas UMKM melalui *e-Commerce*
32. Pemberian bantuan modal usaha untuk UMKM sampai dengan Rp 15 Juta
33. Penyediaan fasilitas pelatihan tenaga kerja sesuai standar sertifikasi internasional
34. Pelatihan sesuai kebutuhan industri dan pelabuhan di Kota Dumai dengan memfungsikan 4 Rumah Terampil di Dumai Timur, Sungai Sembilan, Medang Kampai dan Bukit Kapur
35. Revitalisasi Pasar Pulau Payung
36. Peniadaan Retribusi Pasar
37. Pembentukan Badan Pengelolaan MPP, Pembangunan rumah dinas di Komplek perkantoran wali Kota Dumai Bagan Besar
38. Revitalisasi kantor camat dan lurah (Bukit Kapur, Dumai Timur, Dumai Kota)
39. Pembentukan unit Reaksi Cepat Terpadu Kegawatdaruratan dan Penyelamatan
40. Pembangunan Kantor Damkar di Bagan Besar
41. Pembangunan Kantor Unit Damkar di Kec. Bukit Kapur, Sungai Sembilan, Dumai Selatan
42. Rencana LP2B di Kampung Bayang dan Sungai Geniot seluas 200ha
43. Digitalisasi Sistem Kepegawaian



44. *Review Masterplan* kawasan perkantoran dan rumah dinas

Selain program prioritas berdasarkan janji politik Walikota Kota Dumai Tahun 2025-2029, terdapat beberapa program opd yang berkaitan langsung dengan pencapaian indikator visi misi Walikota Kota Dumai Tahun 2025-2029 yang mana program tersebut kemudian disebut sebagai program prioritas berdasarkan kewenangan Perangkat Daerah. Secara lebih jelas, program prioritas berdasarkan kewenangan OPD di Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6. Program Prioritas Kota Dumai Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
20252029 - KOTA INDUSTRI YANG UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU TAHUN 2029 - 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Berdaya Saing - 2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan - 3. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Produktif - 4. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1. Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk yang sejalan dengan penambahan penduduk dan arus urbanisasi			Tingkat Kemiskinan(%)		
				Rasio Gini(Indeks)		
				Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)		
		1.1.1. Kesehatan untuk Semua		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
				Cakupan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap (%)		
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)		
				b. Jumlah Kematian Ibu Absolut (Jiwa)		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		
				a. Jumlah Kelahiran Hidup (Jiwa)		
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)		
				Total Fertility Rate (TFR) (%)		
				Kesehatan Ibu dan Anak: - Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)		
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) ((%))		
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>) (%)		
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) ((%))		
				Cakupan ke peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI,	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			alat kesehatan dan makanan minuman pada Dinas Kesehatan	Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Kapur	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Timah	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bumi Ayu	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Dumai Barat	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Dumai Kota	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Jaya Mukti	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Medang Kampai	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Purnama	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Sungai Sembilan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan pada Dinas Kesehatan	Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	
					DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			sumber daya manusia kesehatan pada RSUD	sesuai standar (Persentase)	KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Dinas Kesehatan	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit kapur	Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit Timah	Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase desa/kelurahan sanitasi	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				total berbasis masyarakat (%)	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Dumai Barat	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Dumai Kota	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Jaya Mukti	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Medang Kampai	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Purnama	Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Sungai Sembilan	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		1.1.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Skor Kemampuan Numerasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SD (Skor)		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Skor Kemampuan Numerasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SMP (Skor)		
				Skor Kemampuan Literasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SD (Skor)		
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))		
				Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
				Skor Kemampuan Literasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SMP (Skor)		
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kurikulum Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meratanya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Pemerataan Guru SD (Indeks)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Indeks Pemerataan Guru SMP (Indeks)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Terselenggaranya Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) (Event)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
		1.1.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai (%) (%)		
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))		
				Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)		
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang ditingkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			Persentase Penerima Manfaat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	1.2. Terwujudnya Masyarakat yang Tangguh			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)(Indeks)		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		1.2.1. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)		
				Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan (%)		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGGUP KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Event)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan,	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang berprestasi (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya perkembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan (%)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	
			Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Layanan Komprehensif (%)		
			Terjaminnya Pemenuhan Hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
			Terlestarikannya Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
	2.1. Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur			Indeks Infrastruktur Daerah(Angka)		
		2.1.1 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dari Pusat Kota hingga ke Kelurahan		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
				Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak (%)		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman pada wilayah Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Kota	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman pada wilayah Kecamatan Bukit Kapur	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			dan Kecamatan Dumai Selatan			
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman pada wilayah Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Dumai Barat	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Kumuh di Bawah 10 ha di Kabupaten/Kota Ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kota Dumai (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			dalam bentuk rumah layak huni			
			Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan PSU dengan Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	2.2. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana atau terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Penurunan intensitas emisi GRK((%))		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah(Indeks)		
		2.2.1. Lingkungan Hidup yang Berkualitas		Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))		
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya layanan persampahan di daerah Kota Dumai	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KET (07)
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.2.2. Berketahanan air, energi dan kemandirian pangan		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)		
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)		
				Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
		2.2.3. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
				Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
				kesiapsiagaan terhadap bencana	Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
	3.1. Terwujudnya Perekonomian Kota Dumai yang Maju dan Berdaya Saing			Indeks Daya Saing Daerah(Angka)		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		3.1.1. Stabilitas Ekonomi Makro		Pertumbuhan Ekonomi (%)		
				Indeks Inovasi Daerah (Indeks)		
				Tingkat Inflasi (%)		
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
				PDRB per kapita (Rp Juta) (Rp. Juta Per Tahun)		
				Kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi Riau (%)		
				Indeks Kapabilitas Inovasi (Indeks)		
			Meningkatnya Fasilitas, Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri Kecil Menengah yang Diterbitkan (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	



VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KET (07)
				Implementasi Pembangunan (Persentase)		
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil Menengah (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
		3.1.2. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Rasio Ekspor Non Migas terhadap total Ekspor Perdagangan Luar Negeri (%)		
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Nilai Ekspor Non Migas (%)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		3.1.3. Produktivitas Ekonomi		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) (%)		
				Koefisien Variasi Harga Antarwilayah (Koefisien)		
				Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)		
				Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi Kota Dumai (%)		
				Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan Orang)		
				Rasio Kewirausahaan Daerah (%) (%)		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal (%)		
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) (%)		
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) (%)		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (%)		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kota Dumai	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut dan sungai	Konektivitas Laut dan Sungai (%)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api	Cakupan Perlindungan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KET (07)
			Meningkatnya tertib niaga	Persentase Pelaku Usaha yang melakukan Tera/Tera Ulang (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
	4.1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	4.1.1. Regulasi dan Tata kelola yang berintegritas dan adaptif		Indeks Integritas (Indeks)		
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))		
				Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
				Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)		
				Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
				Indeks SPBE (Indeks)		
				Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Indeks)		
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survey) (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang Aktif (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Dumai Barat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Barat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Sumber Daya Alam	Efektivitas Kebijakan Sumber Daya Alam (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas Kerja Sama Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahnya (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi sebagai implementasi dari kebijakan teknis yang disusun (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan tahun n-1 (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Bukit Kapur	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Bukit Kapur (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Barat	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Kota	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Selatan	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Selatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Timur	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Timur (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Medang Kampai	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Medang Kampai (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Sungai Sembilan	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Bukit Kapur	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Bukit Kapur (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Barat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Kota	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Selatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Selatan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Timur	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Timur (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Medang Kampai	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Medang Kampai (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Sungai Sembilan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Kota	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Medang Kampai	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Medang Kampai (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Sungai Sembilan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bagan Besar	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bagan Besar Timur	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bagan Keladi	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bangsal Aceh	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Basilam Baru	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Batu Teritip	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bintan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Batrem	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Datuk	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Kapur	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				kelurahan yang terlaksana (%)		
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Nenas	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Timah	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Buluh Kasap	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bumi Ayu	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Dumai Kota	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Guntung	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Gurun Panjang	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Jaya Mukti	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Kampung Baru	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Laksamana	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Lubuk Gaung	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Mekar Sari	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Mundam	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Pangkalan Sesai	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Pelintung	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Purnama	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Ratu Sima	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Rimba Sekampung	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Sukajadi	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			kelurahan kewilayahan Kelurahan Sungai Geniot	desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Tanjung Palas	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Teluk Binjai	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Teluk Makmur	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Tanjung Penyembal	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya Penunjang Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah	Persentase Penunjang Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah (%)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	kewilayahan kecamatan Bukit Kapur (%)		
			Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			kewilayahan Kecamatan Dumai Kota	kewilayahan kecamatan Dumai Kota (%)		
			Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Selatan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Timur (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Medang Kampai	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Medang Kampai (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Sungai Sembilan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan daftar program di atas, telah dikaitkan juga dengan program nasional hingga program prioritas Perangkat Daerah di Kota Dumai Tahun 2025-2029. Secara lebih jelas, keterkaitan tersebut dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 3. 7 Keterkaitan Program Prioritas Kota Dumai dengan Prioritas Di atasnya

ARAHAN NASIONAL		ARAHAN PROVINSI			PROGRAM PRIORITAS KOTA DUMAI	
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	DELAPAN PROGRAM QUICK WINS RPJMN TAHUN 2025-2029	PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	KEBIJAKAN PROVINSI	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA	PROGRAM PRIORITAS PD
KAWASAN PERTUMBUHAN : Kawasan Perkotaan Dumai Dan Kawasan Pengembangan Industri Dumai	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi z, dan masyarakat berpenghasilan rendah	Wilayah Pengembangan (WP) Bernilai sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam minyak/gas bumi dan Kawasan industri terpadu meliputi: 1. Kabupaten Bengkalis 2. Kabupaten Rokan Hulu 3. Kabupaten Rokan Hilir 4. Kota Dumai	1. Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: ➢ Konektivitas lintas provinsi yaitu: Peningkatan ruas jalan dan jembatan Sinaboi - Lubuk Gaung. ➢ Lanjutan pembangunan jalan tol Duri - Rantau Prapat. ➢ Preservasi jalan Trans Bengkalis. ➢ Pembangunan Jalan Lingkar Barat Dumai (Bukit Timah-Parit Kitang-Lubuk Gaung). ➢ Peningkatan fasilitas penyeberangan Ro-Ro Dumai-Rupat. ➢ Penyiapan jalur kereta api penunjang industri dan perekonomian masyarakat. ➢ Mendorong Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah.	RIAU MANTAP	✓ Pemerataan pembangunan jalan sampai tingkat kelurahan ✓ Percepatan pembangunan akses jalan dari Kecamatan Bukit Kapur - Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Bukit Kapur - Sungai Sembilan	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 4. Program Pengelolaan Pelayaran 5. Program Pengelolaan Perkeretaapian

ARAHAN NASIONAL		ARAHAN PROVINSI			PROGRAM PRIORITAS KOTA DUMAI	
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	DELAPAN PROGRAM QUICK WINS RPJMN TAHUN 2025-2029	PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	KEBIJAKAN PROVINSI	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA	PROGRAM PRIORITAS PD
	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi z, dan masyarakat berpenghasilan rendah		2. Pemenuhan kebutuhan air baku melalui: Penyediaan dan pengelolaan unit produksi dan unit air baku SPAM Regional Dumai-Rokan-Bengkalis.	RIAU MANTAP	✓ Pemberian subsidi Rp 250.000 untuk Sambung Rumah (SR) PDAM di 4 (empat) kecamatan ✓ Perluasan pelayanan jaringan air bersih perpipaan	1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
			3. Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui: Dukungan penyelesaian masalah banjir dan rob.	RIAU MANTAP	✓ Pengendalian banjir di Kota Dumai ✓ Pembangunan Ruang Terbuka Publik di Putri Tujuh	1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 3. Program Perencanaan Lingkungan 4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
	Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional Melanjutkan dan menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan		Kegiatan pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan untuk : ➢ Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub sektor perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan tangkap ➢ Pengembangan industri hilir sawit dan migas pada skala besar.	❖ RIAU BERDAYA SAING ❖ RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA	✓ Pemberian bantuan untuk peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan masyarakat (bantuan ayam dan bioflok ✓ Rencana LP2B di Kampung Bayang dan Sungai Geniot seluas 200 ha	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh) Program Pengembangan Umkm Program Pengelolaan

ARAHAN NASIONAL		ARAHAN PROVINSI			PROGRAM PRIORITAS KOTA DUMAI	
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	DELAPAN PROGRAM QUICK WINS RPJMN TAHUN 2025-2029	PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	KEBIJAKAN PROVINSI	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA	PROGRAM PRIORITAS PD
			➤ Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap. ➤ Pengembangan input produksi, sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat.. ➤ Pengembangan Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ➤ pertumbuhan ekonomi yaitu: 1) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Perindustrian Selinsing di Dumai. 2) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Wisata Pulau Rupat. 3) Pengembangan Kawasan Industri Bandar Bukit. 4) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi. 5) Pengembangan Kawasan strategis pariwisata Dumai – Rupat dan Pengembangan Kawasan pariwisata religi dan budaya di Rokan Hulu dan Rokan Hilir. 6) Pembangunan Kawasan perkotaan Dumai sebagai PKN dan Kawasan pengembangan perdagangan, industri dan jasa.		✓ Pengembangan peternakan sapi dan kambing ✓ Pengembangan agro eduwisata di Kelurahan Pehtung, Kecamatan Medang Kampai ✓ Pemberian bantuan modal usaha untuk UMKM sampai dengan Rp 15 Juta ✓ Peningkatan skill dan produktivitas UMKM melalui e Commerce ✓ Penyediaan fasilitas pelatihan tenaga kerja sesuai standar sertifikasi internasional	Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	1. Memberikan makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta		Kesejahteraan Masyarakat diarahkan untuk:	RIAU SEJAHTERA	✓ Penyediaan transportasi publik gratis untuk anak sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

ARAHAN NASIONAL		ARAHAN PROVINSI			PROGRAM PRIORITAS KOTA DUMAI	
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	DELAPAN PROGRAM QUICK WINS RPJMN TAHUN 2025-2029	PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	KEBIJAKAN PROVINSI	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA	PROGRAM PRIORITAS PD
	bantuan gisi untuk anak balita dan ibu hamil 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten/Kota 3. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan Penyuluh)		➤ Peningkatan Angka Partisipasi Murni SMA. Angka Partisipasi Murni SMA tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 52,6 persen dan Kota Dumai sebesar 67,6 persen. ➤ Penurunan prevalensi stunting. Prevalensi stunting tahun 2023 di kabupaten bengkalis sebesar 17,90 persen, Kabupaten Rokan Hilir sebesar 16,60 persen, Kabupaten Rokan Hulu sebesar 15,90 dan Kota Dumai sebesar 14,90 persen.	RIAU CERDAS RIAU SEHAT	✓ Penyediaan perlengkapan sekolah gratis bagi anak tidak mampu ✓ Pendidikan kesetaraan gratis untuk SD, SMP, atau SMA bagi masyarakat yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan dan ijazah ✓ Pemberian beasiswa penuh di bidang kedokteran sampai spesialis untuk 10 orang ✓ Pemberian beasiswa berprestasi untuk jenjang S-1/D3 untuk 2.000 orang ✓ Pengadaan lahan untuk sekolah di Dumai Timur, Dumai Barat dan Dumai Selatan ✓ Pembangunan asrama bagi mahasiswa putra putri yang tidak mampu di Pekanbaru ✓ Peningkatan fasilitas rawat inap yang nyaman di RSUD yaitu: kelas III maksimal 4 (empat) tempat tidur, kelas II maksimal 2 (dua) tempat tidur, kelas I maksimal 1 (satu) tempat tidur	Kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025



PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGAAN PEMERINTAH DAERAH



RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA DUMAI TAHUN 2025 - 2029

BAB IV | PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan terkait program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Program perangkat daerah diuraikan per urusan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah. Kemudian, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dituangkan dalam penetapan indikator kinerja daerah yang dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi indikator kunci pada akhir periode masa jabatan.

4.1 Rencana Program Perangkat Daerah

4.1.1. Rincian Program Perangkat Daerah

Penerjemahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan ke dalam bentuk konkret memerlukan penyusunan program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai 2025-2029. Program ini diimplementasikan melalui berbagai urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, dengan tetap mengacu pada misi, tujuan, dan sasaran RPJMD. Perencanaan ini mencakup target indikator kinerja pada awal dan akhir periode serta alokasi pagu indikatif program yang menjadi dasar dalam perencanaan anggaran.

Pagu indikatif program mencerminkan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan. Sumber pendanaan berasal dari belanja daerah, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis serta menjabarkannya lebih lanjut ke dalam kegiatan prioritas dan kebutuhan anggarannya.

Setiap perangkat daerah memiliki minimal satu program utama yang berkaitan langsung dengan urusan yang diampunya, salah satunya

adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Pencapaian target kinerja program di berbagai urusan tidak hanya bergantung pada pendanaan dari APBD Kota Dumai, tetapi juga didukung oleh berbagai sumber pembiayaan lain, seperti APBN, APBD Provinsi, serta sumber pendanaan lainnya. Sinergi dan integrasi antara berbagai level pemerintahan menjadi aspek krusial untuk memastikan pembangunan Kota Dumai berjalan optimal dan selaras dengan pembangunan di tingkat Provinsi Riau serta nasional.

Pelaksanaan program prioritas menjadi tanggung jawab Kepala OPD dan kepala daerah, terutama untuk program yang bersifat strategis. Program prioritas yang mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih tidak serta-merta mengesampingkan urusan pemerintahan wajib yang harus dijalankan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Penyusunan program dilakukan secara sistematis, dimulai dari evaluasi kinerja pembangunan daerah hingga identifikasi permasalahan di seluruh sektor, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Pendekatan ini memastikan pembangunan Kota Dumai berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penegasan secara eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Wali Kota Dumai periode 2030-2034. Adapun program perangkat daerah berdasarkan urusan di Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut,

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					495.359.371.177,00		497.029.471.177,00		496.739.471.177,00		496.649.471.177,00		496.644.471.177,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					387.765.938.316,00		389.746.053.375,00		389.856.053.375,00		389.766.053.375,00		389.766.053.375,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah n Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (%)	100	100	100	387.765.938.316,00	100	389.746.053.375,00	100	389.856.053.375,00	100	389.766.053.375,00	100	389.766.053.375,00	1.01.2.22.0.00. 02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					106.793.432.861,00		106.483.417.802,00		106.083.417.802,00		106.083.417.802,00		106.078.417.802,00	
Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 (%)	99.64	99.71	99.79	60.401.000.000,00	99.87	59.877.700.000,00	99.92	59.877.700.000,00	99.92	59.877.700.000,00	99.92	59.912.800.000,00	1.01.2.22.0.00. 02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	76.64	77.3	78.2		79.1		80		80.9		81.8		1.01.2.22.0.00. 02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	74.33	75.33	76.33		77.33		78.33		79.33		80.33		1.01.2.22.0.00. 02.0000 - DINAS PENDIDIKAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
														DAN KEBUDAYAAN				
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	58.91	61.41	63.91				66.41				68.91			71.41		73.91	1.01.2.22.0.00. 02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 (%)	96.45	97.2	97.94	33.032.400.000,00	98.69	33.091.600.000,00	99.25	33.091.600.000,00	99.25	33.091.600.000,00	99.25	33.027.400.000,00	1.01.2.22.0.00. 02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	73.03	74.57	76.07				77.57				79.07			80.57		82.07	1.01.2.22.0.00. 02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	73.54	74.54	75.54				76.54				77.54			78.54		79.54	1.01.2.22.0.00. 02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	60.61	63.01	65.41				67.81				70.21			72.61		75.01	1.01.2.22.0.00. 02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5- 6 Tahun (%)	55.88	59.06	62.64	8.135.832.861,00	65.42	8.246.732.861,00	68.61	8.246.732.861,00	71.79	8.246.732.861,00	74.83	8.270.832.861,00	1.01.2.22.0.00. 02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Proporsi Guru PAUD dengan	52.42	58.25	59				59.75				60.5			61.25		62	1.01.2.22.0.00. 02.0000 - DINAS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kualifikasi S1/D4 (%)													PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	48.44	64.79	81.81		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Kesetaraan (%)	37.26	42.24	47.22	5.224.200.000,00	52.19	5.267.384.941,00	57.17	4.867.384.941,00	62.15	4.867.384.941,00	67.12	4.867.384.941,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal (%)	100	100	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meratanya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Pemerataan Guru SD (Indeks)	0.56	0.6	0.7	100.000.000,00	0.8	100.000.000,00	0.85	100.000.000,00	0.9	100.000.000,00	0.95	100.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Indeks Pemerataan	1	1	1		1		1		1		1		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Guru SMP (Indeks)													PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Terselenggaranya Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) (Event)	1	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					492.144.319.898,00		513.184.311.398,00		523.184.311.398,00		471.169.799.010,00		461.169.799.010,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					357.992.454.910,00		369.769.964.680,00		368.772.994.905,00		371.148.995.224,00		365.461.276.412,00	
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	219.891.990.605,00	100	219.623.586.655,00	100	218.711.174.905,00	100	218.952.410.224,00	100	212.796.886.412,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD)	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD) (%)	100	100	100	117.725.693.025,00	100	128.504.348.025,00	100	127.818.620.000,00	100	129.495.135.000,00	100	129.495.210.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0013 - RSUD
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Dumai Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang	100	100	100	2.550.000.000,00	100	2.600.000.000,00	100	2.650.000.000,00	100	2.650.000.000,00	100	2.650.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Dumai Kota

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kesehatan (DINKES) (%)													
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Dumai Barat	Persentase Penunjang Urusan Pemerintaha n Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	1.800.000.000,00	100	1.900.000.000,00	100	1.910.000.000,00	100	1.915.000.000,00	100	1.920.000.000,00	1.02.0.00.0.00. 01.0015 - Puskesmas Dumai Barat
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bukit kapur	Persentase Penunjang Urusan Pemerintaha n Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	1.796.500.000,00	100	1.950.000.000,00	100	2.050.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.150.000.000,00	1.02.0.00.0.00. 01.0016 - Puskesmas Bukit Kapur
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Sungai Sembilan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintaha n Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	3.109.295.000,00	100	3.171.480.000,00	100	3.234.900.000,00	100	3.299.590.000,00	100	3.365.580.000,00	1.02.0.00.0.00. 01.0024 - Puskesmas Sungai Sembilan
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Medang Kampai	Persentase Penunjang Urusan Pemerintaha n Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	1.501.099.000,00	100	1.577.000.000,00	100	1.655.000.000,00	100	1.738.000.000,00	100	1.825.000.000,00	1.02.0.00.0.00. 01.0017 - Puskesmas Medang kampai
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bumi Ayu	Persentase Penunjang Urusan Pemerintaha n Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	1.550.000.000,00	100	1.580.000.000,00	100	1.610.000.000,00	100	1.640.000.000,00	100	1.670.000.000,00	1.02.0.00.0.00. 01.0018 - Puskesmas Bumi Ayu

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bukit Timah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	966.000.000,00	100	1.235.000.000,00	100	1.297.000.000,00	100	1.362.000.000,00	100	1.430.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0019 - Puskesmas Bukit Timah
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Jaya Mukti	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	3.255.000.000,00	100	3.628.000.000,00	100	3.670.000.000,00	100	3.680.000.000,00	100	3.685.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0021 - Puskesmas Jaya Mukti
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Purnama	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	1.750.000.000,00	100	1.780.000.000,00	100	1.810.000.000,00	100	1.830.000.000,00	100	1.850.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Purnama
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	1.861.450.000,00	100	1.954.550.000,00	100	2.052.300.000,00	100	2.154.860.000,00	100	2.262.600.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0022 - Puskesmas Bukit Kayu Kapur
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Air Kelas A	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	235.427.280,00	100	266.000.000,00	100	304.000.000,00	100	332.000.000,00	100	361.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0023 - UPT Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					131.087.057.638,00		139.363.233.368,00		150.154.203.143,00		95.757.690.436,00		92.539.409.248,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Dinas Kesehatan	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0	0.6	0.6	52.599.142.970,00	0.6	62.136.272.700,00	0.6	72.441.514.450,00	0.6	61.736.029.131,00	0.6	57.417.822.943,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	6.97	23.4	23.4		23.4		23.4		23.4		23.4		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	81.12	82	84		85		85		86		87		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83		85		87		90		92		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan	58.33	58.33	58.33		58.33		66.67		66.67		66.67		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	terakreditasi paripurna (%)													1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	92	92.5	93		93		93.5		94		94		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0	50	50		50		58.33		66.67		75		
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	0	12.4	12		12		11		10		10		
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	0	75	76		77		78		80		83		
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada RSUD	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	85	85		85		72.681.576.018,00		87		71.420.622.018,00		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	711.363.750,00	85	711.363.750,00	87	711.363.750,00	90	711.363.750,00	92	711.363.750,00	1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Dumai Kota

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				2026		2027		2028		2029		2030					
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
dan terjangkau pada Puskesmas Dumai Kota																	
	Persentase desa/kelura han sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100				100				100			100		1.02.0.00.0.00. 01.0014 - Puskesmas Dumai Kota
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76				76				76			76		1.02.0.00.0.00. 01.0014 - Puskesmas Dumai Kota
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Dumai Barat	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	474.684.650,00	85	474.684.650,00	87	474.684.650,00	90	474.684.650,00	92	474.684.650,00	1.02.0.00.0.00. 01.0015 - Puskesmas Dumai Barat			
	Persentase desa/kelura han sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100				100				100			100		1.02.0.00.0.00. 01.0015 - Puskesmas Dumai Barat
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76				76				76			76		1.02.0.00.0.00. 01.0015 - Puskesmas Dumai Barat

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				2026		2027		2028		2029		2030					
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit kapur	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	451.238.000,00	85	451.238.000,00	87	451.238.000,00	90	451.238.000,00	92	451.238.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Bukit Kapur			
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100				100				100			100		1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Bukit Kapur
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76				76				76			76		1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Bukit Kapur
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Sungai Sembilan	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	832.237.800,00	85	832.237.800,00	87	832.237.800,00	90	832.237.800,00	92	832.237.800,00	1.02.0.00.0.00.01.0024 - Puskesmas Sungai Sembilan			
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100				100				100			100		1.02.0.00.0.00.01.0024 - Puskesmas Sungai Sembilan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76		76		76		76		76		1.02.0.00.0.00.01.0024 - Puskesmas Sungai Sembilan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Medang Kampai	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	418.337.950,00	85	418.337.950,00	87	418.337.950,00	90	418.337.950,00	92	418.337.950,00	1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Medang kampai
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Medang kampai
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76		76		76		76		76		1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Medang kampai
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bumi Ayu	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	687.183.500,00	85	687.183.500,00	87	687.183.500,00	90	687.183.500,00	92	687.183.500,00	1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Bumi Ayu

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Bumi Ayu
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76		76		76		76		1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Bumi Ayu		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit Timah	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	476.384.500,00	85	476.384.500,00	87	476.384.500,00	90	476.384.500,00	92	476.384.500,00	1.02.0.00.0.00.01.0019 - Puskesmas Bukit Timah
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0019 - Puskesmas Bukit Timah		
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76		76		76		76		76		1.02.0.00.0.00.01.0019 - Puskesmas Bukit Timah
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	511.932.000,00	85	511.932.000,00	87	511.932.000,00	90	511.932.000,00	92	511.932.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Purnama

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Purnama																		
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100				100				100				100		1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Purnama
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76				76				76				76		1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Purnama
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Jaya Mukti	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	660.035.000,00	85	660.035.000,00	87	660.035.000,00	90	660.035.000,00	92	660.035.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0021 - Puskesmas Jaya Mukti				
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100				100				100			100		1.02.0.00.0.00.01.0021 - Puskesmas Jaya Mukti	
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76				76				76			76		1.02.0.00.0.00.01.0021 - Puskesmas Jaya Mukti	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				2026		2027		2028		2029		2030					
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	582.941.500,00	85	582.941.500,00	87	582.941.500,00	90	582.941.500,00	92	582.941.500,00	1.02.0.00.0.00.01.0022 - Puskesmas Bukit Kayu Kapur			
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100				100				100			100		1.02.0.00.0.00.01.0022 - Puskesmas Bukit Kayu Kapur
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76				76				76			76		1.02.0.00.0.00.01.0022 - Puskesmas Bukit Kayu Kapur
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					2.147.681.000,00		2.949.987.000,00		3.151.987.000,00		3.153.987.000,00		2.055.987.000,00				
Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan pada Dinas Kesehatan	Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	60	60	70	1.147.681.000,00	80	1.149.987.000,00	90	1.151.987.000,00	100	1.153.987.000,00	100	1.155.987.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN			
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai	100	100	100				100				100			100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	standar (Persentase)													
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	4.73	4.80	4.85		4.90		4.95		5		5		
Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan pada RSUD	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	100	100	100	1.000.000.000,00	100	1.800.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	900.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0013 - RSUD
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					548.887.000,00		663.887.000,00		663.887.000,00		663.887.000,00		663.887.000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman pada Dinas Kesehatan	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	54.45	55	60	548.887.000,00	65	663.887.000,00	70	663.887.000,00	80	663.887.000,00	90	663.887.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					368.239.350,00		437.239.350,00		441.239.350,00		445.239.350,00		449.239.350,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.pada Dinas Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	310.174.000,00	72.5	379.174.000,00	73.5	383.174.000,00	75.5	387.174.000,00	75.5	391.174.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Dumai Kota	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	59.5	71.5	7.390.000,00	72.5	7.390.000,00	73.5	7.390.000,00	75.5	7.390.000,00	75.5	7.390.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Dumai Kota
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Dumai Barat	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	2.987.350,00	72.5	2.987.350,00	73.5	2.987.350,00	75.5	2.987.350,00	75.5	2.987.350,00	1.02.0.00.0.00.01.0015 - Puskesmas Dumai Barat
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Kapur	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	5.940.000,00	72.5	5.940.000,00	73.5	5.940.000,00	75.5	5.940.000,00	75.5	5.940.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Bukit Kapur
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Sungai Sembilan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	9.495.500,00	72.5	9.495.500,00	73.5	9.495.500,00	75.5	9.495.500,00	75.5	9.495.500,00	1.02.0.00.0.00.01.0024 - Puskesmas Sungai Sembilan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Medang Kampai	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	190.000,00	72.5	190.000,00	73.5	190.000,00	75.5	190.000,00	75.5	190.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Medang kampai
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bumi Ayu	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	2.915.000,00	72.5	2.915.000,00	73.5	2.915.000,00	75.5	2.915.000,00	75.5	2.915.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Bumi Ayu
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Timah	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	9.160.000,00	72.5	9.160.000,00	73.5	9.160.000,00	75.5	9.160.000,00	75.5	9.160.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0019 - Puskesmas Bukit Timah
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Jaya Mukti	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	7.650.000,00	72.5	7.650.000,00	73.5	7.650.000,00	75.5	7.650.000,00	75.5	7.650.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0021 - Puskesmas Jaya Mukti
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Purnama	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	3.046.500,00	72.5	3.046.500,00	73.5	3.046.500,00	75.5	3.046.500,00	75.5	3.046.500,00	1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Purnama

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	9.291.000,00	72.5	9.291.000,00	73.5	9.291.000,00	75.5	9.291.000,00	75.5	9.291.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0022 - Puskesmas Bukit Kayu Kapur
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					653.874.761.453,00		755.516.748.887,00		695.332.003.298,00		769.796.004.303,00		541.685.484.798,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.987.886.884,00		38.511.901.928,00		31.261.901.928,00		30.961.901.928,00		30.861.901.928,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan (%)	100	100	100	12.741.189.688,00	100	13.641.189.688,00	100	13.441.189.688,00	100	13.241.189.688,00	100	13.041.189.688,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum (%)	100	100	100	15.246.697.196,00	100	24.870.712.240,00	100	17.820.712.240,00	100	17.720.712.240,00	100	17.820.712.240,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					265.928.264.561,00		335.473.337.399,00		293.714.311.682,00		368.511.231.458,00		115.416.027.148,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Persentase Peningkatan Perlindungan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	0	45	48	265.428.264.561,00	51	331.473.337.399,00	54	289.214.311.682,00	57	364.511.231.458,00	60	111.416.027.148,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	0	20	23	500.000.000,00	26	4.000.000.000,00	29	4.500.000.000,00	62	4.000.000.000,00	65	4.000.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					15.945.000.000,00		40.308.042.086,00		50.480.252.800,00		39.772.803.443,00		39.772.803.443,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak (%)	14.67	19.30	21.38	15.945.000.000,00	23.43	40.308.042.086,00	25.44	50.480.252.800,00	27.42	39.772.803.443,00	29.36	39.772.803.443,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)	0.69	2.09	3.46		4.82		6.13		7.43		8.70		1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					12.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan persampahan di daerah Kota Dumai	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	76.17	76.17	76.66	12.000.000.000,00	77.13	5.000.000.000,00	77.59	5.000.000.000,00	78.04	5.000.000.000,00	78.04	5.000.000.000,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.785.055.214,00		2.250.000.000,00		1.650.000.000,00		2.650.000.000,00		2.050.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak (%)	82.41	79.93	77.59	1.785.055.214,00	75.32	2.250.000.000,00	73.12	1.650.000.000,00	70.98	2.650.000.000,00	68.93	2.050.000.000,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman (%)	0	0	0		0.972		1.922		2.855		2.827		1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					69.679.858.037,00		49.050.000.000,00		49.050.000.000,00		49.050.000.000,00		40.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	50	53	69.679.858.037,00	56	49.050.000.000,00	59	49.050.000.000,00	62	49.050.000.000,00	65	40.000.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					71.433.629.569,00		89.455.881.340,00		74.955.881.340,00		97.455.881.340,00		94.205.881.340,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	92.82	91.36	87.85	71.433.629.569,00	87.28	89.455.881.340,00	86.79	74.955.881.340,00	86.36	97.455.881.340,00	85.98	94.205.881.340,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					-		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0.14	0.40	0	-	0.83	500.000.000,00	1.05	500.000.000,00	1.26	500.000.000,00	1.48	500.000.000,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					186.584.083.028,00		191.470.186.134,00		185.150.186.134,00		172.250.186.134,00		210.080.186.134,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	51.45	54.91	58.15	151.978.746.606,00	61.65	157.061.599.712,00	64.88	150.741.599.712,00	67.56	137.841.599.712,00	71.86	175.671.599.712,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman pada wilayah Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Kota	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	51.45	54.91	58.15	10.594.925.729,00	61.65	10.594.925.729,00	64.88	10.594.925.729,00	67.56	10.594.925.729,00	71.86	10.594.925.729,00	1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman pada wilayah Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Dumai Barat	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	51.45	54.91	58.15	11.234.159.805,00	61.65	11.087.409.805,00	64.88	11.087.409.805,00	67.56	11.087.409.805,00	71.86	11.087.409.805,00	1.03.0.00.0.00.01.0002 - UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAA N JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman pada wilayah Kecamatan Bukit Kapur dan Kecamatan Dumai Selatan	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	51.45	54.91	58.15	12.776.250.888,00	61.65	12.726.250.888,00	64.88	12.726.250.888,00	67.56	12.726.250.888,00	71.86	12.726.250.888,00	1.03.0.00.0.00.01.0003 - UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAA N JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					200.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0	9.52	12.70	200.000.000,00	14.29	400.000.000,00	17.46	400.000.000,00	19.05	400.000.000,00	26.98	400.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.330.984.160,00		3.097.400.000,00		3.169.469.414,00		3.244.000.000,00		3.398.684.805,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kota Dumai (%)	30	32	34	2.330.984.160,00	36	3.097.400.000,00	38	3.169.469.414,00	40	3.244.000.000,00	42	3.398.684.805,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.710.899.046,00		14.659.176.648,00		15.449.176.648,00		15.569.176.648,00		15.609.176.648,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.538.399.046,00		5.586.676.648,00		5.586.676.648,00		5.586.676.648,00		5.586.676.648,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Penunjang Urusan Pemerintaha n Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	100	100	100	5.538.399.046,00	100	5.586.676.648,00	100	5.586.676.648,00	100	5.586.676.648,00	100	5.586.676.648,00	1.04.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					990.000.000,00		910.000.000,00		910.000.000,00		910.000.000,00		910.000.000,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana atau terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	990.000.000,00	100	910.000.000,00	100	910.000.000,00	100	910.000.000,00	100	910.000.000,00	1.04.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.535.000.000,00		2.345.000.000,00		2.345.000.000,00		2.345.000.000,00		2.345.000.000,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	70.15	70.42	74.54	1.535.000.000,00	78.34	2.345.000.000,00	80.65	2.345.000.000,00	82.85	2.345.000.000,00	86.36	2.345.000.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.707.500.000,00		1.707.500.000,00		1.707.500.000,00		1.707.500.000,00		1.707.500.000,00	
Meningkatnya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	15.677	15.62	15.57	1.707.500.000,00	15.51	1.707.500.000,00	15.45	1.707.500.000,00	15.39	1.707.500.000,00	15.34	1.707.500.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					920.000.000,00		4.090.000.000,00		4.880.000.000,00		5.000.000.000,00		5.040.000.000,00	
Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	0	0	0.60	920.000.000,00	6.06	4.090.000.000,00	9.09	4.880.000.000,00	12.12	5.000.000.000,00	15.15	5.040.000.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan PSU dengan Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	45.65	45.65	50.00	20.000.000,00	54.35	20.000.000,00	56.52	20.000.000,00	58.70	20.000.000,00	60.87	20.000.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					39.277.988.620,00		40.647.512.887,00		39.515.922.887,00		39.270.151.020,00		40.686.483.987,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					34.302.428.320,00		35.061.735.720,00		34.099.945.720,00		33.590.575.720,00		33.770.575.720,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (DAMKAR)	Persentase Penunjang Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (DAMKAR) (%)	100	100	100	12.401.220.980,00	100	12.401.220.980,00	100	12.401.220.980,00	100	12.401.220.980,00	100	12.401.220.980,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (SATPOL PP)	Persentase Penunjang Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (SATPOL PP) (%)	100	100	100	14.261.040.620,00	100	14.661.040.620,00	100	14.261.040.620,00	100	14.261.040.620,00	100	14.261.040.620,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)	Persentase Penunjang Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD) (%)	100	100	100	7.640.166.720,00	100	7.999.474.120,00	100	7.437.684.120,00	100	6.928.314.120,00	100	7.108.314.120,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.329.351.500,00		1.329.351.500,00		1.329.351.500,00		1.329.351.500,00		2.655.167.600,00	
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100	717.351.500,00	100	673.141.500,00	100	673.141.500,00	100	673.141.500,00	100	1.998.957.600,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	612.000.000,00	100	624.644.000,00	100	624.644.000,00	100	624.644.000,00	100	624.644.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	0	-	100	31.566.000,00	100	31.566.000,00	100	31.566.000,00	100	31.566.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.568.685.000,00		1.999.185.000,00		1.829.385.000,00		2.272.700.000,00		2.003.500.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	207.000.000,00	100	470.000.000,00	100	230.000.000,00	100	240.000.000,00	100	250.000.000,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	1.005.000.000,00	100	1.166.000.000,00	100	1.223.000.000,00	100	1.647.000.000,00	100	1.415.000.000,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	356.685.000,00	100	363.185.000,00	100	376.385.000,00	100	385.700.000,00	100	338.500.000,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.077.523.800,00		2.257.240.667,00		2.257.240.667,00		2.077.523.800,00		2.257.240.667,00	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	2.077.523.800,00	100	2.257.240.667,00	100	2.257.240.667,00	100	2.077.523.800,00	100	2.257.240.667,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100				100				100		
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					15.001.910.904,00		20.449.910.904,00		19.182.410.904,00		18.236.785.904,00		17.532.567.154,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.884.911.545,00		6.884.911.545,00		6.884.911.545,00		6.884.911.545,00		6.884.911.545,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Penunjang Urusan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (%)	100	100	100	6.884.911.545,00	100	6.884.911.545,00	100	6.884.911.545,00	100	6.884.911.545,00	100	6.884.911.545,00	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					993.869.280,00		993.869.280,00		993.869.280,00		993.869.280,00		993.869.280,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang ditingkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	100	993.869.280,00	100	993.869.280,00	100	993.869.280,00	100	993.869.280,00	100	993.869.280,00	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.200.695.729,00		1.188.695.729,00		1.198.695.729,00		1.208.695.729,00		1.218.695.729,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial (%)	100	100	100	1.200.695.729,00	100	1.188.695.729,00	100	1.198.695.729,00	100	1.208.695.729,00	100	1.218.695.729,00	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					5.295.972.000,00		10.755.972.000,00		9.468.472.000,00		8.502.847.000,00		7.778.628.250,00	
Persentase Penerima Manfaat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Fakir Miskin yang mendapatk an Perlindunga n dan Jaminan Sosial (%)	100	100	100	5.295.972.000,00	100	10.755.972.000,00	100	9.468.472.000,00	100	8.502.847.000,00	100	7.778.628.250,00	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					485.198.600,00		475.198.600,00		475.198.600,00		475.198.600,00		475.198.600,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani (%)	100	100	100	485.198.600,00	100	475.198.600,00	100	475.198.600,00	100	475.198.600,00	100	475.198.600,00	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					136.263.750,00		146.263.750,00		156.263.750,00		166.263.750,00		176.263.750,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	136.263.750,00	100	146.263.750,00	100	156.263.750,00	100	166.263.750,00	100	176.263.750,00	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					12.535.609.438,00		14.375.826.238,00		14.771.277.598,00		15.201.467.230,00		15.673.342.788,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.444.821.438,00		5.444.821.438,00		5.444.821.438,00		5.444.821.438,00		5.444.821.438,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Persentase Penunjang Urusan Bidang Tenaga Kerja (%)	100	100	100	5.444.821.438,00	100	5.444.821.438,00	100	5.444.821.438,00	100	5.444.821.438,00	100	5.444.821.438,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					499.320.000,00		249.320.000,00		249.320.000,00		249.320.000,00		249.320.000,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	90	90	499.320.000,00	90	249.320.000,00	90	249.320.000,00	90	249.320.000,00	90	249.320.000,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.090.927.000,00		4.181.143.800,00		4.576.595.160,00		5.006.784.792,00		5.478.660.350,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkatkan produktivitas nya (%)	10	10	10	2.090.927.000,00	10	4.181.143.800,00	10	4.576.595.160,00	10	5.006.784.792,00	10	5.478.660.350,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					462.393.750,00		462.393.750,00		462.393.750,00		462.393.750,00		462.393.750,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan (%)	35	10	10	462.393.750,00	10	462.393.750,00	10	462.393.750,00	10	462.393.750,00	10	462.393.750,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					4.038.147.250,00		4.038.147.250,00		4.038.147.250,00		4.038.147.250,00		4.038.147.250,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	85	20	20	4.038.147.250,00	20	4.038.147.250,00	20	4.038.147.250,00	20	4.038.147.250,00	20	4.038.147.250,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN					8.318.840.614,00		8.568.840.614,00		8.568.840.614,00		8.568.840.614,00		8.568.840.614,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERLINDUNGAN ANAK														
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.094.575.614,00		6.094.575.614,00		6.094.575.614,00		6.094.575.614,00		6.094.575.614,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Penunjang Urusan Bidang Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan an Anak (%)	100	100	100	6.094.575.614,00	100	6.094.575.614,00	100	6.094.575.614,00	100	6.094.575.614,00	100	6.094.575.614,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					541.332.750,00		791.332.750,00		791.332.750,00		791.332.750,00		791.332.750,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	20	25	30	541.332.750,00	30	791.332.750,00	30	791.332.750,00	35	791.332.750,00	35	791.332.750,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					332.742.000,00		332.742.000,00		332.742.000,00		332.742.000,00		332.742.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO	40	50	60	332.742.000,00	60	332.742.000,00	60	332.742.000,00	65	332.742.000,00	65	332.742.000,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYA AN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Mendapatka n Layanan Komprehensi f (%)													PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak anak	Pembelajara n Keluarga (Puspaga) yang Berperspekti f Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	90	90	90	100.000.000,00	90	100.000.000,00	90	100.000.000,00	90	100.000.000,00	90	100.000.000,00	2.08.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan , Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	45	50	53	200.000.000,00	53	200.000.000,00	53	200.000.000,00	54	200.000.000,00	54	200.000.000,00	2.08.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					572.667.250,00		572.667.250,00		572.667.250,00		572.667.250,00		572.667.250,00	
Terjaminnya Pemenuhan Hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	0	65	67	572.667.250,00	69	572.667.250,00	70	572.667.250,00	71	572.667.250,00	72	572.667.250,00	2.08.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PERLINDUNG AN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					477.523.000,00		477.523.000,00		477.523.000,00		477.523.000,00		477.523.000,00	
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindunga n Khusus yang Mendapatka n Layanan Komprehensi f (Persentase)	60	70	80	477.523.000,00	80	477.523.000,00	80	477.523.000,00	85	477.523.000,00	85	477.523.000,00	2.08.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					17.569.752.366,00		18.182.464.972,00		18.198.766.596,00		18.303.766.596,00		18.318.766.596,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.061.406.866,00		16.214.119.472,00		16.130.421.096,00		16.235.421.096,00		16.150.421.096,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian	Persentase Penunjang Urusan Pemerintaha n Bidang Pangan dan Pertanian (%)	100	100	100	16.061.406.866,00	100	16.214.119.472,00	100	16.130.421.096,00	100	16.235.421.096,00	100	16.150.421.096,00	2.09.3.27.0.00. 02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.408.345.500,00		1.828.345.500,00		1.928.345.500,00		1.928.345.500,00		2.028.345.500,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	87.90	88.78	89.67	1.408.345.500,00	90.56	1.828.345.500,00	91.47	1.928.345.500,00	92.38	1.928.345.500,00	93.31	2.028.345.500,00	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton)	15251	15632	16023		16424		16834		17255		17686		2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)	7620	7811	8006		8206		8411		8621		8837		2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					50.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	3.03	3.03	3.03	50.000.000,00	3.03	70.000.000,00	3.03	70.000.000,00	3.03	70.000.000,00	3.03	70.000.000,00	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					50.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaika nnya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	80	100	20	500.000.000,00	40	500.000.000,00	60	500.000.000,00	80	500.000.000,00	100	500.000.000,00	1.03.2.10.0.00. 01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	80	100	20	1.400.000.000,00	40	1.400.000.000,00	60	1.400.000.000,00	80	1.400.000.000,00	100	1.400.000.000,00	1.03.2.10.0.00. 01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					41.015.788.595,00		42.429.068.595,00		42.399.068.595,00		51.129.068.595,00		42.646.068.595,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.003.288.595,00		26.146.568.595,00		26.156.568.595,00		26.166.568.595,00		26.173.568.595,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	16.003.288.595,00	100	16.146.568.595,00	100	16.156.568.595,00	100	16.166.568.595,00	100	16.173.568.595,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya pelayanan BLUD UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A	Persentase Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	8.000.000.000,00	100	10.000.000.000,00	100	10.000.000.000,00	100	10.000.000.000,00	100	10.000.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0002 - UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendas i Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanj uti (%)	0	0	60	700.000.000,00	70	700.000.000,00	75	700.000.000,00	80	700.000.000,00	90	700.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					2.900.000.000,00		2.550.000.000,00		2.550.000.000,00		2.550.000.000,00		2.550.000.000,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	50.83	35.35	35.55	2.900.000.000,00	35.75	2.550.000.000,00	35.95	2.550.000.000,00	36.15	2.550.000.000,00	36.35	2.550.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	87.97	70.84	71.14		71.44		71.74		72.04		72.34		2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					7.635.000.000,00		7.255.000.000,00		7.215.000.000,00		15.915.000.000,00		7.405.000.000,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	65	65	66	7.635.000.000,00	67	7.255.000.000,00	68	7.215.000.000,00	69	15.915.000.000,00	70	7.405.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00		340.000.000,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	70	72	74	300.000.000,00	76	300.000.000,00	79	300.000.000,00	81	320.000.000,00	84	340.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	60	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pemerintah daerah Kab/Kota (%)													
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	-	0	50	600.000.000,00	50	600.000.000,00	50	600.000.000,00	55	600.000.000,00	60	600.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	-	0	50	300.000.000,00	50	300.000.000,00	50	300.000.000,00	55	300.000.000,00	60	300.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	90	80	85	250.000.000,00	87	250.000.000,00	90	250.000.000,00	93	250.000.000,00	95	250.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4.127.500.000,00		4.127.500.000,00		4.127.500.000,00		4.127.500.000,00		4.127.500.000,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	39.6	44.5	49.1	4.127.500.000,00	51.6	4.127.500.000,00	53	4.127.500.000,00	57.7	4.127.500.000,00	62.9	4.127.500.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					9.606.569.485,00		9.626.569.485,00		9.636.569.485,00		9.646.569.485,00		9.656.569.485,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.821.952.771,00		8.883.288.791,00		8.893.288.791,00		8.903.288.791,00		8.913.288.791,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	100	100	100	8.821.952.771,00	100	8.883.288.791,00	100	8.893.288.791,00	100	8.903.288.791,00	100	8.913.288.791,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					315.000.000,00		302.697.233,00		302.697.233,00		302.697.233,00		302.697.233,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependuduk an Digital (IKD) (%)	30	34	40	315.000.000,00	50	302.697.233,00	60	302.697.233,00	70	302.697.233,00	75	302.697.233,00	2.12.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS KEPENDUDUK AN DAN CATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	54	60	70		75		80		85		90		2.12.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS KEPENDUDUK AN DAN CATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					179.616.714,00		179.616.714,00		179.616.714,00		179.616.714,00		179.616.714,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99.15	100	100	179.616.714,00	100	179.616.714,00	100	179.616.714,00	100	179.616.714,00	100	179.616.714,00	2.12.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS KEPENDUDUK AN DAN CATATAN SIPIL
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99.15	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS KEPENDUDUK AN DAN CATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS KEPENDUDUK AN DAN CATATAN SIPIL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Melaporkan (Persentase)													
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					230.000.000,00		200.966.747,00		200.966.747,00		200.966.747,00		200.966.747,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependuduk an yang DImanfaatka n (Persentase)	100	100	100	230.000.000,00	100	200.966.747,00	100	200.966.747,00	100	200.966.747,00	100	200.966.747,00	2.12.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS KEPENDUDUK AN DAN CATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduk an (Persentase)	100	100	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	2.12.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS KEPENDUDUK AN DAN CATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					2.196.514.205,00		2.546.514.205,00		2.546.514.205,00		2.546.514.205,00		2.546.514.205,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					133.722.550,00		133.722.550,00		133.722.550,00		133.722.550,00		133.722.550,00	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahn ya (%)	100	100	100	133.722.550,00	100	133.722.550,00	100	133.722.550,00	100	133.722.550,00	100	133.722.550,00	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2.062.791.655,00		2.412.791.655,00		2.412.791.655,00		2.412.791.655,00		2.412.791.655,00	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan (LKK) yang Aktif (%)	100	100	100	2.062.791.655,00	100	2.412.791.655,00	100	2.412.791.655,00	100	2.412.791.655,00	100	2.412.791.655,00	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					10.019.876.215,00		10.019.876.215,00		10.019.876.215,00		10.019.876.215,00		10.019.876.215,00	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.554.602.215,00		5.554.602.215,00		5.554.602.215,00		5.554.602.215,00		5.554.602.215,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Penunjang Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	100	100	100	5.554.602.215,00	100	5.554.602.215,00	100	5.554.602.215,00	100	5.554.602.215,00	100	5.554.602.215,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					459.200.000,00		459.200.000,00		459.200.000,00		459.200.000,00		459.200.000,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2.5	2.29	2.27	459.200.000,00	2.26	459.200.000,00	2.24	459.200.000,00	2.19	459.200.000,00	2.18	459.200.000,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	8-8	7.9-7.9	7.8-7.8		7.6-7.6		7.1-7.1		6.9-6.9		6.9-6.9		2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.057.824.984,00		2.057.824.984,00		2.057.824.984,00		2.057.824.984,00		2.057.824.984,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Mod	70.3	71	71.2	2.057.824.984,00	72.5	2.057.824.984,00	73	2.057.824.984,00	73.2	2.057.824.984,00	73.5	2.057.824.984,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pembinaan Keluarga Berencana (KB)	ern Contraceptive (mCPR) (Persentase)													N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	7	6.9	6.8				6.7				6.6		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.948.249.016,00		1.948.249.016,00		1.948.249.016,00		1.948.249.016,00		1.948.249.016,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	44	45	46	1.948.249.016,00	47	1.948.249.016,00	48	1.948.249.016,00	49	1.948.249.016,00	50	1.948.249.016,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					96.250.300.332,00		93.125.300.332,00		97.425.300.332,00		87.956.300.332,00		82.556.300.332,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					42.117.550.332,00		39.192.550.332,00		39.192.550.332,00		39.092.550.332,00		39.092.550.332,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang	100	100	100	42.117.550.332,00	100	39.192.550.332,00	100	39.192.550.332,00	100	39.092.550.332,00	100	39.092.550.332,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perhubunga n (%)													
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					53.932.750.000,00		52.432.750.000,00		57.632.750.000,00		48.663.750.000,00		43.263.750.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	73	77	79	53.932.750.000,00	83	52.432.750.000,00	86	57.632.750.000,00	88	48.663.750.000,00	90	43.263.750.000,00	2.15.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PERHUBUNGA N
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					100.000.000,00		800.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut dan sungai	Konektivitas Laut dan Sungai (%)	0	0	20	100.000.000,00	40	800.000.000,00	60	100.000.000,00	80	100.000.000,00	100	100.000.000,00	2.15.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PERHUBUNGA N
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					100.000.000,00		700.000.000,00		500.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)	0	0	20	100.000.000,00	40	700.000.000,00	60	500.000.000,00	80	100.000.000,00	100	100.000.000,00	2.15.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PERHUBUNGA N
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					19.381.246.537,00		21.187.188.537,00		22.052.188.537,00		22.692.188.537,00		23.382.188.537,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.974.308.537,00		9.135.808.537,00		9.230.808.537,00		9.275.808.537,00		9.380.808.537,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian	Persentase Penunjang Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian (%)	100	100	100	8.974.308.537,00	100	9.135.808.537,00	100	9.230.808.537,00	100	9.275.808.537,00	100	9.380.808.537,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA , STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.980.000.000,00		3.280.000.000,00		3.680.000.000,00		3.880.000.000,00		4.280.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survey) (%)	100	100	100	2.980.000.000,00	100	3.280.000.000,00	100	3.680.000.000,00	100	3.880.000.000,00	100	4.280.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA , STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					7.426.938.000,00		8.771.380.000,00		9.141.380.000,00		9.536.380.000,00		9.721.380.000,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	147.15	96	97	7.426.938.000,00	98	8.771.380.000,00	99	9.141.380.000,00	100	9.536.380.000,00	100	9.721.380.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA , STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					8.476.400.867,00		9.556.400.867,00		9.556.400.867,00		9.556.400.867,00		9.556.400.867,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.146.165.200,00		7.146.165.200,00		7.146.165.200,00		7.146.165.200,00		7.146.165.200,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Bidang Perindustrian	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perindustrian (%)	100	100	100	7.146.165.200,00	100	7.146.165.200,00	100	7.146.165.200,00	100	7.146.165.200,00	100	7.146.165.200,00	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	35	40	45	200.000.000,00	50	200.000.000,00	55	200.000.000,00	60	200.000.000,00	65	200.000.000,00	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					109.842.000,00		109.842.000,00		109.842.000,00		109.842.000,00		109.842.000,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	65	68	69	109.842.000,00	70	109.842.000,00	71	109.842.000,00	72	109.842.000,00	72	109.842.000,00	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					100.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	35	40	41	100.000.000,00	42	110.000.000,00	43	110.000.000,00	44	110.000.000,00	44	110.000.000,00	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	20	20	21	215.000.000,00	22	215.000.000,00	23	215.000.000,00	24	215.000.000,00	24	215.000.000,00	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					565.393.667,00		1.305.393.667,00		1.305.393.667,00		1.305.393.667,00		1.305.393.667,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	20	25	30	565.393.667,00	35	1.305.393.667,00	40	1.305.393.667,00	45	1.305.393.667,00	50	1.305.393.667,00	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					140.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	5	7	10	140.000.000,00	13	470.000.000,00	16	470.000.000,00	19	470.000.000,00	21	470.000.000,00	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					13.090.341.896,00		13.852.545.896,00		12.981.497.197,00		13.481.497.197,00		12.881.497.197,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.945.178.696,00		11.182.382.696,00		11.182.382.696,00		11.182.382.696,00		11.082.382.696,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang penanaman modal	Persentase penunjang urusan pemerintaha n bidang Penanaman Modal (%)	100	100	100	10.945.178.696,00	100	11.182.382.696,00	100	11.182.382.696,00	100	11.182.382.696,00	100	11.082.382.696,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					770.163.200,00		1.020.163.200,00		270.163.200,00		770.163.200,00		270.163.200,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi (%)	44.29	10	10	770.163.200,00	10	1.020.163.200,00	10	270.163.200,00	10	770.163.200,00	10	270.163.200,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					400.000.000,00		550.000.000,00		428.951.301,00		428.951.301,00		428.951.301,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100	100	400.000.000,00	100	550.000.000,00	100	428.951.301,00	100	428.951.301,00	100	428.951.301,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					275.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	85	85	100	275.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					23.745.922.323,00		19.799.552.916,00		19.799.552.916,00		19.799.552.916,00		19.799.552.916,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.967.120.064,00		6.315.357.892,00		6.315.357.892,00		6.315.357.892,00		6.315.357.892,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Bidang Pariwisata	Persentase Penunjang Urusan Pemerintaha n Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (%)	80	80	90	5.967.120.064,00	80	6.315.357.892,00	85	6.315.357.892,00	90	6.315.357.892,00	90	6.315.357.892,00	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.278.802.259,00		2.384.195.024,00		2.384.195.024,00		2.384.195.024,00		2.384.195.024,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	80	80	90	2.278.802.259,00	90	2.384.195.024,00	90	2.384.195.024,00	95	2.384.195.024,00	95	2.384.195.024,00	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					15.100.000.000,00		10.700.000.000,00		10.700.000.000,00		10.700.000.000,00		10.700.000.000,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang berprestasi (%)	80	80	90	15.100.000.000,00	90	10.700.000.000,00	90	10.700.000.000,00	95	10.700.000.000,00	95	10.700.000.000,00	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														DAN PARIWISATA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	0	0	75	400.000.000,00	80	400.000.000,00	85	400.000.000,00	90	400.000.000,00	95	400.000.000,00	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					380.000.000,00		470.000.000,00		510.000.000,00		540.000.000,00		580.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					380.000.000,00		470.000.000,00		510.000.000,00		540.000.000,00		580.000.000,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	0	2.77	3	380.000.000,00	3.2	470.000.000,00	3.3	510.000.000,00	3.5	540.000.000,00	3.5	580.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA , STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					350.000.000,00		420.000.000,00		490.000.000,00		525.000.000,00		580.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					350.000.000,00		420.000.000,00		490.000.000,00		525.000.000,00		580.000.000,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	80	100	100	350.000.000,00	100	420.000.000,00	100	490.000.000,00	100	525.000.000,00	100	580.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA , STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.683.000.000,00		2.673.000.000,00		2.963.000.000,00		3.053.000.000,00		3.058.000.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					2.530.000.000,00		2.410.000.000,00		2.710.000.000,00		2.790.000.000,00		2.790.000.000,00	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan	Penyelenggar aan Festival Seni dan Budaya (Event)	6	3	5	2.530.000.000,00	5	2.410.000.000,00	5	2.710.000.000,00	5	2.790.000.000,00	5	2.790.000.000,00	1.01.2.22.0.00. 02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					60.000.000,00		113.000.000,00		113.000.000,00		113.000.000,00		113.000.000,00	
Meningkatnya perkembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan (%)	14.81	25.93	40.74	60.000.000,00	55.56	113.000.000,00	70.37	113.000.000,00	85.19	113.000.000,00	100	113.000.000,00	1.01.2.22.0.00. 02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					93.000.000,00		150.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00	
Terlestarikannya Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang	21.21	27.27	33.33	93.000.000,00	39.00	150.000.000,00	45.00	140.000.000,00	51.00	150.000.000,00	57.00	155.000.000,00	1.01.2.22.0.00. 02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ditetapkan (%)													
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.744.003.724,00		5.399.241.724,00		5.849.241.724,00		5.399.241.724,00		5.399.241.724,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.034.003.724,00		4.836.003.724,00		5.286.003.724,00		4.836.003.724,00		4.836.003.724,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Perpustakaan, dan Bidang Kearsipan	Persentase Penunjang Urusan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan (%)	100	100	100	5.034.003.724,00	100	4.836.003.724,00	100	5.286.003.724,00	100	4.836.003.724,00	100	4.836.003.724,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					710.000.000,00		563.238.000,00		563.238.000,00		563.238.000,00		563.238.000,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	60.32	64.5	65	710.000.000,00	65.5	563.238.000,00	66	563.238.000,00	66.5	563.238.000,00	67	563.238.000,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					486.857.080,00		831.619.080,00		831.619.080,00		831.619.080,00		831.619.080,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					486.857.080,00		538.009.724,00		538.009.724,00		538.009.724,00		538.009.724,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	0	52	55	486.857.080,00	57	538.009.724,00	60	538.009.724,00	65	538.009.724,00	70	538.009.724,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														N DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					-		293.609.356,00		293.609.356,00		293.609.356,00		293.609.356,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindunga n dan Penyelamata n Arsip (Persentase)	0	0	10	-	15	293.609.356,00	20	293.609.356,00	25	293.609.356,00	30	293.609.356,00	2.23.2.24.0.00. 02.0000 - DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					9.120.778.810,00		9.901.507.000,00		9.906.507.000,00		10.206.507.000,00		10.375.000.000,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.694.271.810,00		6.225.000.000,00		6.015.000.000,00		6.215.000.000,00		6.235.000.000,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	Persentase Penunjang Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100	5.694.271.810,00	100	6.225.000.000,00	100	6.015.000.000,00	100	6.215.000.000,00	100	6.235.000.000,00	3.25.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					150.000.000,00		310.000.000,00		410.000.000,00		510.000.000,00		610.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1280. 27	1280	1290	150.000.000,00	1300	310.000.000,00	1310	410.000.000,00	1320	510.000.000,00	1330	610.000.000,00	3.25.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PERIKANAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					3.046.507.000,00		3.081.507.000,00		3.186.507.000,00		3.186.507.000,00		3.225.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	292.4 4	340.15	350.36	3.046.507.000,00	360.87	3.081.507.000,00	371.69	3.186.507.000,00	382.85	3.186.507.000,00	394.34	3.225.000.000,00	3.25.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					230.000.000,00		285.000.000,00		295.000.000,00		295.000.000,00		305.000.000,00	
Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kota Dumai	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	46.6	46.8	47	230.000.000,00	47.5	285.000.000,00	48	295.000.000,00	48.5	295.000.000,00	49	305.000.000,00	3.25.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					746.000.000,00		1.588.738.814,00		1.588.738.814,00		1.588.738.814,00		1.588.738.814,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					146.000.000,00		992.369.407,00		992.369.407,00		992.369.407,00		992.369.407,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuha n Kunjungan Wisatawan (Persentase)	80	80	80	146.000.000,00	80	992.369.407,00	85	992.369.407,00	90	992.369.407,00	90	992.369.407,00	2.19.3.26.0.00. 02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	80	80	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	85	100.000.000,00	90	100.000.000,00	90	100.000.000,00	2.19.3.26.0.00. 02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					500.000.000,00		496.369.407,00		496.369.407,00		496.369.407,00		496.369.407,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	80	80	80	500.000.000,00	80	496.369.407,00	85	496.369.407,00	90	496.369.407,00	90	496.369.407,00	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					6.422.500.000,00		6.117.500.000,00		6.105.000.000,00		6.005.000.000,00		6.155.000.000,00	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.717.500.000,00		2.117.500.000,00		2.205.000.000,00		2.205.000.000,00		2.255.000.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Perkebunan (Ton)	150986	152496	154021	1.717.500.000,00	155561	2.117.500.000,00	157116	2.205.000.000,00	158688	2.205.000.000,00	160275	2.255.000.000,00	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	3077	3231	3392		3562		3740		3927		4124		2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.305.000.000,00		2.550.000.000,00		2.400.000.000,00		2.300.000.000,00		2.350.000.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan	0	0	30	3.305.000.000,00	20	2.550.000.000,00	10	2.400.000.000,00	10	2.300.000.000,00	10	2.350.000.000,00	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Menjadi LP2B (Ha)													PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian (%)	11.27	12.21	14.08		14.56		15.02		16.43		16.43		2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	100	100	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	22.22	22.22	18.52		14.82		11.11		7.41		3.7		2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	2.09.3.27.0.00. 02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					750.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi (%)	40	40	50	750.000.000,00	57.14	800.000.000,00	62.50	850.000.000,00	66.67	850.000.000,00	70	900.000.000,00	2.09.3.27.0.00. 02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	50	45	0		0		0		0		0		2.09.3.27.0.00. 02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					13.569.267.807,00		12.459.267.807,00		12.359.267.807,00		12.359.267.807,00		12.359.267.807,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.916.267.807,00		9.866.267.807,00		9.766.267.807,00		9.766.267.807,00		9.766.267.807,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Perdagangan	Persentase Penunjang Urusan Bidang Perdagangan (%)	100	100	100	10.916.267.807,00	100	9.866.267.807,00	100	9.766.267.807,00	100	9.766.267.807,00	100	9.766.267.807,00	3.30.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PERDAGANGA N

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					243.000.000,00		183.000.000,00		183.000.000,00		183.000.000,00		183.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	30	35	40	243.000.000,00	45	183.000.000,00	50	183.000.000,00	55	183.000.000,00	60	183.000.000,00	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33.33	33.33	33.33	750.000.000,00	66.67	750.000.000,00	66.67	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Nilai Ekspor	3.4	3.5	3.6	660.000.000,00	3.7	660.000.000,00	3.8	660.000.000,00	3.9	660.000.000,00	4.0	660.000.000,00	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Non Migas (%)													PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya tertib niaga	Persentase Pelaku Usaha yang melakukan Tera/Tera Ulang (%)	16.67	16.67	80	300.000.000,00	82	300.000.000,00	84	300.000.000,00	86	300.000.000,00	88	300.000.000,00	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	25	30	35	250.000.000,00	40	250.000.000,00	45	250.000.000,00	50	250.000.000,00	55	250.000.000,00	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil Menengah (%)	5	10	12	310.000.000,00	14	310.000.000,00	16	310.000.000,00	18	310.000.000,00	20	310.000.000,00	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PERINDUSTRIAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri Kecil Menengah yang Diterbitkan (%)	5	7	8	60.000.000,00	10	60.000.000,00	11	60.000.000,00	12	60.000.000,00	14	60.000.000,00	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	5	8	10	90.000.000,00	11	90.000.000,00	12	90.000.000,00	13	90.000.000,00	14	90.000.000,00	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					114.880.172.940,00		114.235.237.507,00		112.940.237.507,00		111.480.237.507,00		114.770.237.507,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					57.275.603.746,00		52.192.103.746,00		52.192.103.746,00		52.192.103.746,00		56.942.103.746,00	
Terlaksananya Penunjang Unsur Pendukung Sekretariat Daerah	Persentasenya Penunjang Unsur Pendukung	100	100	100	56.525.603.746,00	100	51.442.103.746,00	100	51.442.103.746,00	100	51.442.103.746,00	100	56.192.103.746,00	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sekretariat Daerah (%)													
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	28.5	28.6	28.7	750.000.000,00	28.8	750.000.000,00	30	750.000.000,00	31.5	750.000.000,00	32.5	750.000.000,00	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					55.054.569.194,00		59.493.133.761,00		58.198.133.761,00		56.738.133.761,00		55.278.133.761,00	
Meningkatnya kualitas Kerja Sama Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	100	100	370.000.000,00	100	370.000.000,00	100	370.000.000,00	100	370.000.000,00	100	370.000.000,00	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	920.000.000,00	100	920.000.000,00	100	920.000.000,00	100	920.000.000,00	100	920.000.000,00	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100	52.894.569.194,00	100	57.333.133.761,00	100	56.038.133.761,00	100	54.578.133.761,00	100	53.118.133.761,00	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	85	85	85	870.000.000,00	85	870.000.000,00	85	870.000.000,00	85	870.000.000,00	85	870.000.000,00	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	86.44	86.50	86.80		86.85		86.90		88.50		90		4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.550.000.000,00		2.550.000.000,00		2.550.000.000,00		2.550.000.000,00		2.550.000.000,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	0	2	2	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	0	100	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Sumber Daya Alam	Efektivitas Kebijakan Sumber Daya Alam (%)	0	100	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					84.000.000.000,00		86.000.000.000,00		87.000.000.000,00		90.000.000.000,00		90.000.000.000,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					62.928.274.414,00		64.687.618.164,00		65.337.618.164,00		65.762.142.353,00		66.562.980.984,00	
Terlaksananya Penunjang Unsur Pendukung Sekretariat DPRD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat DPRD (%)	100	100	100	62.928.274.414,00	100	64.687.618.164,00	100	65.337.618.164,00	100	65.762.142.353,00	100	66.562.980.984,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN					21.071.725.586,00		21.312.381.836,00		21.662.381.836,00		24.237.857.647,00		23.437.019.016,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	13.528.094.086,00	100	13.539.400.336,00	100	13.739.400.336,00	100	15.814.876.147,00	100	14.972.145.366,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	0	100	7.543.631.500,00	100	7.772.981.500,00	100	7.922.981.500,00	100	8.422.981.500,00	100	8.464.873.650,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					14.099.337.788,00		16.035.837.788,00		14.913.837.788,00		14.685.837.788,00		15.325.837.788,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.371.210.960,00		11.507.710.960,00		10.865.710.960,00		10.757.710.960,00		10.757.710.960,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Perencanaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan (%)	100	100	100	10.371.210.960,00	100	11.507.710.960,00	100	10.865.710.960,00	100	10.757.710.960,00	100	10.757.710.960,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.428.126.828,00		1.928.126.828,00		1.528.126.828,00		1.528.126.828,00		1.968.126.828,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	95,985	100	100	1.428.126.828,00	100	1.928.126.828,00	100	1.528.126.828,00	100	1.528.126.828,00	100	1.968.126.828,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.300.000.000,00		2.600.000.000,00		2.520.000.000,00		2.400.000.000,00		2.600.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	600.000.000,00	100	900.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	900.000.000,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	995.000.000,00	100	995.000.000,00	100	1.055.000.000,00	100	995.000.000,00	100	995.000.000,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan	100	100	100	705.000.000,00	100	705.000.000,00	100	765.000.000,00	100	705.000.000,00	100	705.000.000,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kewilayahan (Persentase)													
5.02 - KEUANGAN					209.083.006.416,00		211.782.626.496,00		214.975.581.614,00		217.707.444.917,00		224.168.951.507,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					106.831.567.463,00		109.538.403.384,00		112.468.545.359,00		114.975.548.131,00		120.905.206.074,00	
Terlaksananya Penunjang Unsur Keuangan (BPKAD)	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Keuangan (BPKAD) (%)	100	100	100	56.034.589.673,00	100	56.034.589.673,00	100	56.034.589.673,00	100	56.034.589.673,00	100	56.034.589.673,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Terlaksananya Penunjang Unsur Keuangan (UPT. Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Kelas A)	Persentase Penunjang Unsur Keuangan (UPT. Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Kelas A) (%)	-	100	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	5.02.0.00.0.00.02.0001 - UPT. Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Kelas A
Terlaksananya Penunjang Unsur Keuangan (BAPENDA)	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Keuangan (BAPENDA) (%)	100	100	100	49.796.977.790,00	100	52.503.813.711,00	100	55.433.955.686,00	100	57.940.958.458,00	100	63.870.616.401,00	5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					62.785.000.000,00		62.535.000.000,00		62.535.000.000,00		62.535.000.000,00		62.535.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	20.46	21.56	22.72	62.785.000.000,00	40	62.535.000.000,00	40	62.535.000.000,00	40	62.535.000.000,00	40	62.535.000.000,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	36.54	40.25	38.80		30		30		30		30		5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	14.66	13.86	12.96		11.95		10.86		9.60		8.20		5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	63.43	65.05	66.55		67.80		68.82		69.62		70.12		5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					35.000.000.000,00		35.000.000.000,00		35.000.000.000,00		35.000.000.000,00		35.000.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	13.78	16.58	19.58	35.000.000.000,00	10.60	35.000.000.000,00	14.16	35.000.000.000,00	17.91	35.000.000.000,00	21.91	35.000.000.000,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					4.466.438.953,00		4.709.223.112,00		4.972.036.255,00		5.196.896.786,00		5.728.745.433,00	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	32	33	34	4.466.438.953,00	35	4.709.223.112,00	36	4.972.036.255,00	37	5.196.896.786,00	38	5.728.745.433,00	5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					9.041.275.053,00		10.642.310.043,00		10.642.310.043,00		10.642.310.043,00		10.642.310.043,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.484.847.453,00		7.847.310.043,00		7.847.310.043,00		7.847.310.043,00		7.847.310.043,00	
Terlaksananya Penunjang Unsur Kepegawaian, dan Unsur Pendidikan dan Pelatihan	Persentase penunjang urusan pemerintaha n unsur penunjang kepegawaian , pendidikan dan pelatihan (%)	100	100	100	7.484.847.453,00	100	7.847.310.043,00	100	7.847.310.043,00	100	7.847.310.043,00	100	7.847.310.043,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.556.427.600,00		2.795.000.000,00		2.795.000.000,00		2.795.000.000,00		2.795.000.000,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	60.9	61.4	60.4	690.000.000,00	61.6	1.265.000.000,00	61	1.265.000.000,00	60.9	1.265.000.000,00	60	1.265.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensin ya (Persentase)	1.5	1.6	2	62.920.000,00	2.3	360.000.000,00	2.4	360.000.000,00	2.5	360.000.000,00	2.6	360.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembang an Karir ASN sesuai dengan Kompetensin ya (Persentase)	3	8	8	150.000.000,00	12	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	96.65	96.7	96.75	653.507.600,00	96.8	870.000.000,00	96.85	870.000.000,00	96.9	870.000.000,00	97	870.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.546.034.990,00		945.000.000,00		945.000.000,00		945.000.000,00		945.000.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.546.034.990,00		945.000.000,00		945.000.000,00		945.000.000,00		945.000.000,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	100	100	100	2.466.034.990,00	100	845.000.000,00	100	845.000.000,00	100	845.000.000,00	100	845.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (%)	11.2	11.7	12.2	80.000.000,00	12.7	100.000.000,00	13.2	100.000.000,00	13.7	100.000.000,00	14.2	100.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					3.416.820.910,00		4.281.820.910,00		3.566.820.910,00		3.566.820.910,00		3.566.820.910,00	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.636.820.910,00		3.073.019.755,00		2.803.453.025,00		2.666.820.910,00		2.636.820.910,00	
Terlaksananya Penunjang Unsur Penelitian dan Pengembangan	Persentase Penunjang Unsur Penelitian dan Pengembangan an (%)	90	100	100	2.636.820.910,00	100	3.073.019.755,00	100	2.803.453.025,00	100	2.666.820.910,00	100	2.636.820.910,00	5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					780.000.000,00		1.010.433.270,00		565.000.000,00		695.000.000,00		725.000.000,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	10	12	36	780.000.000,00	50	1.010.433.270,00	64	565.000.000,00	74	695.000.000,00	100	725.000.000,00	5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					-		198.367.885,00		198.367.885,00		205.000.000,00		205.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	0	0	-	25	28.367.885,00	50	28.367.885,00	75	35.000.000,00	100	35.000.000,00	5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	0	0	0	-	42	170.000.000,00	44	170.000.000,00	46	170.000.000,00	48	170.000.000,00	5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					26.786.296.370,00		27.174.946.370,00		26.951.296.370,00		27.083.496.370,00		25.956.896.370,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.203.093.100,00		19.298.093.100,00		19.249.443.100,00		19.206.643.100,00		18.823.693.100,00	
Terlaksananya Penunjang Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah	Persentase Penunjang Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah (%)	100	100	100	19.203.093.100,00	100	19.298.093.100,00	100	19.249.443.100,00	100	19.206.643.100,00	100	18.823.693.100,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					3.437.203.270,00		3.522.203.270,00		3.477.203.270,00		3.522.203.270,00		3.412.203.270,00	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan tahun n-1 (%)	87	87	87.5	3.437.203.270,00	88	3.522.203.270,00	88.5	3.477.203.270,00	90	3.522.203.270,00	90.5	3.412.203.270,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					4.146.000.000,00		4.354.650.000,00		4.224.650.000,00		4.354.650.000,00		3.721.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi sebagai implementasi dari kebijakan teknis yang disusun (%)	100	100	100	4.146.000.000,00	100	4.354.650.000,00	100	4.224.650.000,00	100	4.354.650.000,00	100	3.721.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					114.297.264.470,00		118.016.217.404,00		118.716.440.905,00		118.560.022.396,00		119.364.750.747,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					73.195.928.461,00		76.638.435.421,00		77.312.758.922,00		77.148.400.413,00		77.909.330.213,00	
Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	Persentase Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat (%)	100	100	100	10.171.175.550,00	100	10.819.061.753,00	100	11.468.285.254,00	100	11.281.826.745,00	100	11.980.826.745,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUMAI BARAT
Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	Persentase Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur (%)	100	100	100	11.353.536.700,00	100	11.839.436.700,00	100	11.839.436.700,00	100	11.839.436.700,00	100	11.839.436.700,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN DUMAI TIMUR
Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	Persentase Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur (%)	100	100	100	10.723.554.770,00	100	11.684.054.770,00	100	11.684.054.770,00	100	11.684.054.770,00	100	11.684.054.770,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BUKIT KAPUR
Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota	Persentase penunjang urusan pemerintaha n unsur kewilayahan kecamatan kecamatan Dumai Kota (%)	100	100	100	11.086.852.942,00	100	11.359.787.436,00	100	11.359.787.436,00	100	11.359.787.436,00	100	11.359.787.436,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DUMAI KOTA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan	Persentase penunjang urusan pemerintaha n unsur kewilayahan kecamatan Dumai Selatan (%)	100	100	100	10.197.990.189,00	100	10.493.776.452,00	100	10.493.776.452,00	100	10.493.776.452,00	100	10.493.776.452,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DUMAI SELATAN
Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Medang Kampai	Persentase Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Medang Kampai (%)	100	100	100	7.487.682.640,00	100	7.637.182.640,00	100	7.637.182.640,00	100	7.637.182.640,00	100	7.637.182.640,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN MEDANG KAMPAI
Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Sungai Sembilan	Persentase Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Sungai Sembilan (%)	100	100	100	12.175.135.670,00	100	12.805.135.670,00	100	12.830.235.670,00	100	12.852.335.670,00	100	12.914.265.470,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					697.000.000,00		744.500.000,00		759.900.000,00		776.840.000,00		795.474.000,00	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Dumai Barat	Persentase penyelenggar aan pemerintaha n dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Barat (%)	100	100	100	145.000.000,00	100	154.000.000,00	100	169.400.000,00	100	186.340.000,00	100	204.974.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUMAI BARAT

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	Persentase penyelenggaran dan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Timur (%)	100	100	100	170.000.000,00	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN DUMAI TIMUR
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	Persentase penyelenggaran dan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Bukit Kapur (%)	100	100	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BUKIT KAPUR
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Dumai Kota	Persentase penyelenggaran dan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Kota (%)	100	100	100	77.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DUMAI KOTA
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan	Persentase penyelenggaran dan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan	100	100	100	95.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DUMAI SELATAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dumai Selatan (%)													
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Medang Kampai	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Medang Kampai (%)	100	100	100	85.000.000,00	100	60.500.000,00	100	60.500.000,00	100	60.500.000,00	100	60.500.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN MEDANG KAMPAI
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Sungai Sembilan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan (%)	100	100	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					39.598.599.895,00		39.628.045.869,00		39.633.045.869,00		39.633.045.869,00		39.634.210.420,00	
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	228.719.895,00	100	252.835.449,00	100	257.835.449,00	100	257.835.449,00	100	259.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUMAI BARAT

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Purnama	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0001 - Kelurahan Purnama
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Pangkalan Sesai	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0002 - Kelurahan Pangkalan Sesai
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0003 - Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bagan Keladi	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0004 - Kelurahan Bagan Keladi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	195.000.000,00	100	215.000.000,00	100	215.000.000,00	100	215.000.000,00	100	215.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN DUMAI TIMUR
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Jaya Mukti	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.265.400.000,00	100	1.265.400.000,00	100	1.265.400.000,00	100	1.265.400.000,00	100	1.265.400.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0001 - Kelurahan Jaya Mukti
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Buluh Kasap	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	570.821.000,00	100	570.821.000,00	100	570.821.000,00	100	570.821.000,00	100	570.821.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0002 - Kelurahan Buluh Kasap
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Tanjung Palas	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.148.630.000,00	100	1.148.630.000,00	100	1.148.630.000,00	100	1.148.630.000,00	100	1.148.630.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0003 - Kelurahan Tanjung Palas

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Batrem	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.164.098.000,00	100	1.164.098.000,00	100	1.164.098.000,00	100	1.164.098.000,00	100	1.164.098.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0004 - Kelurahan Bukit Batrem
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Teluk Binjai	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	897.564.000,00	100	897.564.000,00	100	897.564.000,00	100	897.564.000,00	100	897.564.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0005 - Kelurahan Teluk Binjai
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	225.000.000,00	100	225.000.000,00	100	225.000.000,00	100	225.000.000,00	100	225.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BUKIT KAPUR
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Nenas	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.026.371.000,00	100	1.026.371.000,00	100	1.026.371.000,00	100	1.026.371.000,00	100	1.026.371.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Bukit Nenas

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Kampung Baru	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.082.054.000,00	100	1.082.054.000,00	100	1.082.054.000,00	100	1.082.054.000,00	100	1.082.054.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0002 - Kelurahan Kampung Baru
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Gurun Panjang	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	898.248.000,00	100	898.248.000,00	100	898.248.000,00	100	898.248.000,00	100	898.248.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0003 - Kelurahan Gurun Panjang
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bagan Besar Timur	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.104.547.000,00	100	1.104.547.000,00	100	1.104.547.000,00	100	1.104.547.000,00	100	1.104.547.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Bagan Besar Timur
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	809.590.000,00	100	809.590.000,00	100	809.590.000,00	100	809.590.000,00	100	809.590.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0005 - Kelurahan Bukit Kayu Kapur

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bagan Besar	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	998.578.000,00	100	998.578.000,00	100	998.578.000,00	100	998.578.000,00	100	998.578.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Bagan Besar
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Kapur	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	777.480.000,00	100	777.480.000,00	100	777.480.000,00	100	777.480.000,00	100	777.480.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0007 - Kelurahan Bukit Kapur
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Kota	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	228.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DUMAI KOTA
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Laksamana	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.098.780.000,00	100	1.098.780.000,00	100	1.098.780.000,00	100	1.098.780.000,00	100	1.098.780.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0001 - Kelurahan Laksamana

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Sukajadi	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	685.130.000,00	100	685.130.000,00	100	685.130.000,00	100	685.130.000,00	100	685.130.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0002 - Kelurahan Sukajadi
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Dumai Kota	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	781.702.000,00	100	781.702.000,00	100	781.702.000,00	100	781.702.000,00	100	781.702.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0003 - Kelurahan Dumai Kota
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bintan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	822.313.000,00	100	822.313.000,00	100	822.313.000,00	100	822.313.000,00	100	822.313.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0004 - Kelurahan Bintan
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Rimba Sekampung	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	922.963.000,00	100	922.963.000,00	100	922.963.000,00	100	922.963.000,00	100	922.963.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0005 - Kelurahan Rimba Sekampung

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	239.000.000,00	100	244.000.000,00	100	244.000.000,00	100	244.000.000,00	100	244.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DUMAI SELATAN
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Timah	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.111.258.000,00	100	1.111.258.000,00	100	1.111.258.000,00	100	1.111.258.000,00	100	1.111.258.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0001 - Kelurahan Bukit Timah
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Datuk	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000.000,00	100	897.752.000,00	100	897.752.000,00	100	897.752.000,00	100	897.752.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0002 - Kelurahan Bukit Datuk
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Mekar Sari	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000.000,00	100	1.091.505.000,00	100	1.091.505.000,00	100	1.091.505.000,00	100	1.091.505.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0003 - Kelurahan Mekar Sari

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bumi Ayu	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000.000,00	100	965.155.000,00	100	965.155.000,00	100	965.155.000,00	100	965.155.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0004 - Kelurahan Bumi Ayu
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Ratu Sima	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.052.181.000,00	100	1.052.181.000,00	100	1.052.181.000,00	100	1.052.181.000,00	100	1.052.181.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0005 - Kelurahan Ratu Sima
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Medang Kampai	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Medang Kampai (%)	100	100	100	162.000.000,00	100	155.918.420,00	100	155.918.420,00	100	155.918.420,00	100	155.918.420,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN MEDANG KAMPAI
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Pelintung	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	877.456.000,00	100	877.456.000,00	100	877.456.000,00	100	877.456.000,00	100	877.456.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Pelintung

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Guntung	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.189.772.000,00	100	1.189.772.000,00	100	1.189.772.000,00	100	1.189.772.000,00	100	1.189.772.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0002 - Kelurahan Guntung
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Teluk Makmur	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.041.874.000,00	100	1.041.874.000,00	100	1.041.874.000,00	100	1.041.874.000,00	100	1.041.874.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0003 - Kelurahan Teluk Makmur
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Mundam	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.144.149.000,00	100	1.144.149.000,00	100	1.144.149.000,00	100	1.144.149.000,00	100	1.144.149.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0004 - Kelurahan Mundam
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Sungai Sembilan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	315.000.000,00	100	325.000.000,00	100	325.000.000,00	100	325.000.000,00	100	325.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Basilam Baru	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	772.973.000,00	100	772.973.000,00	100	772.973.000,00	100	772.973.000,00	100	772.973.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Basilam Baru
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bangsal Aceh	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	902.243.000,00	100	902.243.000,00	100	902.243.000,00	100	902.243.000,00	100	902.243.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Bangsal Aceh
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelutahan Tanjung Penyembal	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	2.002.876.000,00	100	2.002.876.000,00	100	2.002.876.000,00	100	2.002.876.000,00	100	2.002.876.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Tanjung Penyembal
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Lubuk Gaung	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.998.863.000,00	100	1.998.863.000,00	100	1.998.863.000,00	100	1.998.863.000,00	100	1.998.863.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Lubuk Gaung

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Sungai Geniot	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	926.894.000,00	100	926.894.000,00	100	926.894.000,00	100	926.894.000,00	100	926.894.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0005 - Kelurahan Sungai Geniot
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Batu Teritip	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100	931.072.000,00	100	931.072.000,00	100	931.072.000,00	100	931.072.000,00	100	931.072.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0006 - Kelurahan Batu Teritip
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					373.381.620,00		418.381.620,00		423.881.620,00		413.381.620,00		418.381.620,00	
Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Barat	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.500.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUMAI BARAT
Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Timur	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN DUMAI TIMUR

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dumai Timur (%)													
Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Bukit Kapur	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Bukit Kapur (%)	100	100	100	70.331.620,00	100	70.331.620,00	100	70.331.620,00	100	70.331.620,00	100	70.331.620,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BUKIT KAPUR
Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Kota	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota (%)	100	100	100	23.050.000,00	100	23.050.000,00	100	23.050.000,00	100	23.050.000,00	100	23.050.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DUMAI KOTA
Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Selatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Selatan (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DUMAI SELATAN
Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Medang Kampai	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN MEDANG KAMPAI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kecamatan Medang Kampai (%)													
Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Sungai Sembilan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					432.354.494,00		586.854.494,00		586.854.494,00		588.354.494,00		607.354.494,00	
Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Barat	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintaha n umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat (%)	100	100	100	95.000.000,00	100	103.500.000,00	100	103.500.000,00	100	105.000.000,00	100	124.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUMAI BARAT
Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Timur	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintaha n umum kewilayahan kecamatan Dumai Timur (%)	100	100	100	64.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN DUMAI TIMUR

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Bukit Kapur	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Bukit Kapur (%)	100	100	100	24.000.000,00	100	24.000.000,00	100	24.000.000,00	100	24.000.000,00	100	24.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BUKIT KAPUR
Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Kota	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota (%)	100	100	100	48.354.494,00	100	48.354.494,00	100	48.354.494,00	100	48.354.494,00	100	48.354.494,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DUMAI KOTA
Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Selatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Selatan (%)	100	100	100	35.000.000,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DUMAI SELATAN
Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Medang Kampai	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Medang Kampai (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN MEDANG KAMPAI
Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan	100	100	100	66.000.000,00	100	66.000.000,00	100	66.000.000,00	100	66.000.000,00	100	66.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kecamatan Sungai Sembilan	kecamatan Sungai Sembilan (%)													
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					14.425.899.862,00		14.685.899.862,00		14.695.899.862,00		14.705.899.862,00		30.729.464.052,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.470.667.726,00		4.559.176.102,00		4.569.176.102,00		4.579.176.102,00		4.589.176.102,00	
Terlaksananya Penunjang Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penunjang Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik (%)	88.37	100	100	4.470.667.726,00	100	4.559.176.102,00	100	4.569.176.102,00	100	4.579.176.102,00	100	4.589.176.102,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.388.508.376,00		655.435.000,00		655.435.000,00		655.435.000,00		655.435.000,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	70.48	100	100	1.388.508.376,00	100	655.435.000,00	100	655.435.000,00	100	655.435.000,00	100	655.435.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN					2.916.723.760,00		3.821.288.760,00		3.821.288.760,00		3.821.288.760,00		19.834.852.950,00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	95.15	90	90	2.916.723.760,00	90	3.821.288.760,00	90	3.821.288.760,00	90	3.821.288.760,00	90	19.834.852.950,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					3.630.000.000,00		3.630.000.000,00		3.630.000.000,00		3.630.000.000,00		3.630.000.000,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	68.00	90	90	3.630.000.000,00	90	3.630.000.000,00	90	3.630.000.000,00	90	3.630.000.000,00	90	3.630.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					470.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	84.80	90	90	470.000.000,00	90	470.000.000,00	90	470.000.000,00	90	470.000.000,00	90	470.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanak an (Persentase)													
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	71.03	100	100	1.550.000.000,00	100	1.550.000.000,00	100	1.550.000.000,00	100	1.550.000.000,00	100	1.550.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					2.603.014.930.191,00		2.750.778.051.578,00		2.705.669.948.893,00		2.731.838.875.069,00		2.507.691.037.470,00	

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

4.1.2. Rekap Anggaran Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan, penyusunan anggaran belanja daerah harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan serta kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks ini, masing-masing perangkat daerah memiliki peran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sub bab ini menyajikan rincian alokasi anggaran untuk setiap program yang dijalankan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Penyajian rincian anggaran ini mencakup informasi mengenai jumlah program dan jumlah alokasi anggaran yang dialokasikan dalam tahun anggaran berjalan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap distribusi sumber daya keuangan daerah sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut,

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Tabel 4. 2 Total Pagu Anggaran Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029

KODE SKPD	NAMA SKPD	TOTAL PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	498.042.371.177	499.702.471.177	499.702.471.177	499.702.471.177	499.702.471.177
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	300.737.050.855	311.459.341.355	321.459.341.355	311.459.341.355	301.459.341.355
1.02.0.00.0.00.01.0013	RSUD	191.407.269.043	201.724.970.043	201.724.970.043	159.710.457.655	159.710.457.655
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM	537.638.902.822	601.264.235.773	546.135.210.056	607.932.129.832	383.716.925.522
1.03.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	118.135.858.631	156.152.513.114	151.096.793.242	163.763.874.471	159.868.559.276
1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.710.899.046	14.659.176.648	15.449.176.648	15.569.176.648	15.609.176.648
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.590.392.120	15.990.392.120	15.590.392.120	15.590.392.120	16.916.208.220
1.05.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	14.478.744.780	14.658.461.647	14.658.461.647	14.478.744.780	14.658.461.647
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.208.851.720	9.998.659.120	9.267.069.120	9.201.014.120	9.111.814.120
1.06.0.00.2.13.05.0000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	17.198.425.109	22.996.425.109	21.728.925.109	20.783.300.109	20.079.081.359
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	12.535.609.438	14.375.826.238	14.771.277.598	15.201.467.230	15.673.342.788
2.08.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.318.840.614	8.568.840.614	8.568.840.614	8.568.840.614	8.568.840.614
2.09.3.27.0.00.02.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	23.992.252.366	24.299.964.972	24.303.766.596	24.308.766.596	24.473.766.596
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	41.015.788.595	42.429.068.595	42.399.068.595	51.129.068.595	42.646.068.595
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9.606.569.485	9.626.569.485	9.636.569.485	9.646.569.485	9.656.569.485
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.019.876.215	10.019.876.215	10.019.876.215	10.019.876.215	10.019.876.215
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	96.250.300.332	93.125.300.332	97.425.300.332	87.956.300.332	82.556.300.332
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	20.111.246.537	22.077.188.537	23.052.188.537	23.757.188.537	24.542.188.537
2.17.3.31.0.00.02.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	8.936.400.867	10.016.400.867	10.016.400.867	10.016.400.867	10.016.400.867
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.090.341.896	13.852.545.896	12.981.497.197	13.481.497.197	12.881.497.197
2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	24.491.922.323	21.388.291.730	21.388.291.730	21.388.291.730	21.388.291.730
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.230.860.804	6.230.860.804	6.680.860.804	6.230.860.804	6.230.860.804
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	9.120.778.810	9.901.507.000	9.906.507.000	10.206.507.000	10.375.000.000
3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN	13.569.267.807	12.459.267.807	12.359.267.807	12.359.267.807	12.359.267.807

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

KODE SKPD (01)	NAMA SKPD (02)	TOTAL PAGU				
		2026 (03)	2027 (04)	2028 (05)	2029 (06)	2030 (07)
4.01.5.06.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	114.880.172.940	114.235.237.507	112.940.237.507	111.480.237.507	114.770.237.507
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	84.000.000.000	86.000.000.000	87.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000
5.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.099.337.788	16.035.837.788	14.913.837.788	14.685.837.788	15.325.837.788
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	154.819.589.673	154.569.589.673	154.569.589.673	154.569.589.673	154.569.589.673
5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	54.263.416.743	57.213.036.823	60.405.991.941	63.137.855.244	69.599.361.834
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.587.310.043	11.587.310.043	11.587.310.043	11.587.310.043	11.587.310.043
5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	3.416.820.910	4.281.820.910	3.566.820.910	3.566.820.910	3.566.820.910
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	26.786.296.370	27.174.946.370	26.951.296.370	27.083.496.370	25.956.896.370
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN DUMAI BARAT	15.689.895.445	16.384.397.202	17.059.520.703	16.881.002.194	17.623.800.745
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN DUMAI TIMUR	16.929.049.700	17.580.949.700	17.580.949.700	17.580.949.700	17.580.949.700
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	17.754.754.390	18.715.254.390	18.715.254.390	18.715.254.390	18.715.254.390
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN DUMAI KOTA	15.774.145.436	16.062.079.930	16.062.079.930	16.062.079.930	16.062.079.930
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN DUMAI SELATAN	15.740.429.189	16.105.627.452	16.105.627.452	16.105.627.452	16.105.627.452
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12.187.933.640	8.053.601.060	8.053.601.060	8.053.601.060	8.053.601.060
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	20.221.056.670	20.861.056.670	20.886.156.670	20.908.256.670	20.970.186.470
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.425.899.862	14.685.899.862	14.695.899.862	14.705.899.862	30.729.464.052

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Indikator kinerja daerah ditetapkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi kepala daerah serta wakilnya dapat direalisasikan. Indikator ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan pencapaian target strategis daerah, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu periode kepemimpinan.

Penentuan indikator kinerja pembangunan daerah mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, serta berbagai pedoman teknis yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Kerangka regulasi ini memastikan bahwa evaluasi pencapaian pembangunan daerah dilakukan secara objektif, sistematis, dan berbasis standar yang telah ditetapkan secara nasional.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian tujuan, merangkum berbagai program dan kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi. Adapun penetapan indikator utama Kota Dumai Tahun 2025-2029 dituangkan dalam tabel berikut,

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Dumai Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	58,37	58,58	58,79	59	59,22	59,43	
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,7	78,35	79,02	79,67	80,33	82,95	
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04 - 6,12	5,06- 6,14	5,08- 6,16	5,10- 6,18	5,12- 6,20	5,14- 6,22	
4	Indeks Integritas	Indeks	75 - 75	75-77	75-79	75-81	75,01-83	75,01-83	
5	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	66,43	67,17	68,06	68,95	69,64	70,73	
6	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,76	3,79	3,81	3,84	3,87	3,89	
7	Tingkat Kemiskinan	%	2,48 - 2,70	2,41- 2,63	2,34- 2,56	2,27- 2,49	2,20- 2,42	2,13- 2,35	

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah ditetapkan sebagai alat ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan, sekaligus merangkum berbagai program dan kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi. Penentuan indikator kinerja daerah didasarkan pada kondisi awal tahun 2022, tren perkembangan di tahun-tahun sebelumnya, serta kapasitas keuangan daerah. Untuk memastikan pembangunan daerah dapat dievaluasi secara jelas dan terukur, target kinerja disusun dalam bentuk kuantitatif sejauh memungkinkan. Namun, untuk aspek tertentu yang sulit diukur secara angka, seperti agama dan budaya, pendekatan kualitatif tetap digunakan. Indikator kinerja dalam RPJMD ini diselaraskan dengan program dan kegiatan yang berlandaskan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan di Kota Dumai. Adapun penjelasan IKD Kota Dumai Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam tabel berikut,

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	66.43	67.17	68.06	68.95	69.64	70.73	
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.76	3.79	3.81	3.84	3.87	3.89	
3	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	54.91	58.15	61.65	64.88	67.56	71.86	
4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	60.43	60.44	60.45	60.46	60.47	60.48	
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	41.06	41.08	41.1	41.12	41.14	41.14	
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	0.83-0.85	0.85-0.86	0.86-0.89	0.88-0.92	0.90-0.95	0.92-0.97	
7	Rasio Ekspor Non Migas terhadap total Ekspor Perdagangan Luar Negeri	%	94.20	94.25	94.30	94.34	94.39	94.44	
8	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	6.615	6.958	7.301	7.644	7.988	7.988	
9	Kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi Riau (%)	%	4.85-4.85	4.85-4.8575	4.85-4.865	4.85-4.8725	5-5	5-5	
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	86.26	86.43	86.60	86.76	86.90	87	
11	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	%	2.9-3.0	2.8-3.00	2.7-3.00	2.6-3.00	2.5-3.00	2.5-3.00	
12	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	%	94.20	94.27	94.33	94.40	94.47	94.54	
13	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	1.01	1.03	1.05	1.06	1.08	1.08	
14	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi Kota Dumai	%	99	99	99	99	99	99	
15	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04 - 6,12	5.06-6.14	5.08-6.16	5.10-6.18	5.12-6.20	5.14-6.22	
16	Tingkat Inflasi (%)	%	2.9-3	2.8-3	2.7-3	2.6-3	2.5-3	2.5-3	
17	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	%	4.70-4.77	4.64-4.71	4.57-4.64	4.51-4.58	4.45-4.51	4.38-4.45	
18	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	0.55-0.55	0.55-0.615	0.55-0.68	0.55-0.745	0.55-0.81	0.55-0.81	
19	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah	Koefisien	11.39	11.08	10.77	10.45	10.14	9.83	
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	58.37	58.58	58.79	59.00	59.22	59.43	
2	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	10.11	11.02	11.93	12.79	13.48	14.16	
3	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	11.42	10.92	10.42	9.92	9.42	9.42	
4	Indeks Risiko Bencana	Indeks	95.46	92.31	89.43	86.78	84.34	82.09	
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	76.17	76.66	77.13	77.59	78.04	78.04	
6	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak	%	79.93	77.59	75.32	73.12	70.98	68.93	
7	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	0.84	0.85	0.87	0.88	0.89	0.90	
8	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	76.17	76.66	77.13	77.59	78.04	78.04	
9	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	19.3	21.38	23.43	25.44	27.42	29.36	
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Tingkat Kemiskinan	%	2.48-2.70	2.41-2.63	2.34-2.56	2.27-2.49	2.20-2.42	2.13-2.35	
2	Rasio Gini	Indeks	0.322-0.340	0.317-0.335	0.313-0.330	0.309-0.325	0.305-0.320	0.300-0.315	
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,7	78,35	79,02	79,67	80,33	82,95	
4	Skor Kemampuan Literasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SD	Skor	65.77	68.27	70.77	73.27	75.77	78.27	
5	Skor Kemampuan Literasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SMP	Skor	75.75	76.85	77.95	79.05	80.15	81.25	
6	Skor Kemampuan Numerasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SD	Skor	56.14	59.04	61.94	64.84	67.74	70.64	
7	Skor Kemampuan Numerasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SMP	Skor	65.89	67.39	68.89	70.39	71.89	73.39	
8	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	18	19.20	20.40	21.60	22.80	24.00	
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.27	10.33	10.38	10.44	10.50	10.55	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.42	13.43	13.44	13.44	13.45	13.45	
11	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	73.66	73.81	73.97	74.13	74.28	74.44	
12	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	9914	10305	10712	11135	11575	12032	
13	Jumlah Kematian Ibu Absolut	Jiwa	9-9	8-8	7-7	6-6	5-5	5-5	
14	Jumlah Kematian Balita Absolut	Jiwa	138	136	134	132	129	129	
15	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
16	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.29	2.27	2.26	2.24	2.19	2.18	
17	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	7.9	7.8	7.6	7.1	6.9	6.9	
18	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	71	71.2	72.5	73	73.2	73.5	
19	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	16.8	16.5	16	15.5	15	14	
20	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	80	83	85	87	90	92	
21	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	95.20	97.48	98	98.2	98.4	98.6	
22	Cakupan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	%	80	85	90	93	95	95	
23	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	67	67.5	68	68.5	69	70	
24	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.39-0.39	0.385-0.39	0.375-0.39	0.375-0.39	0.37-0.39	0.37-0.39	
25	PDRB per kapita (Rp Juta)	Rp. Juta Per Tahun	152.29-169.20	159.46-172.6	166.64-176	173.81-179.4	180.99-182.81	180.99-182.81	
26	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan	%	27.27	33.33	39.00	45.00	51.00	57.00	
27	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57.94	58.44	58.94	59.44	59.44	60.44	
28	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0.58	0.6	0.62	0.64	0.66	0.68	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
29	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	100	100	100	100	100	100	
30	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	3.94-4.66	3.74-4.88	3.54-4.26	3.34-4.06	3.14-3.86	2.94-3.66	
31	Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal	%	94.90-95.30	95.16-95.65	95.42-96.00	95.68-96.35	95.94-96.70	96.20-97.05	
32	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai (%)	%	71.35-71.35	73.15-73.15	74.55-74.55	75.95-75.95	77.35-77.35	78.75-78.75	
33	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	1	2.75	4.50	6.25	8.00	8.00	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Integritas	Indeks	75-75	75-77	75-79	75-81	75.01-83	75.01-83	
2	Indeks SPBE	Indeks	3.92	-	-	-	-	-	
3	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Indeks	-	2.16	2.35	2.55	2.74	2.94	
4	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	80	81.25	82.5	83.75	85	85	
5	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	5.15	5.16	5.17	5.17	5.18	5.19	
6	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	65	67.8	70.6	73.4	76.2	79	
7	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	2.29	2.38	2.48	2.57	2.66	2.75	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90.28	90.78	91.28	91.78	92.28	92.78	
9	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	56.2	57.7	59.2	60.7	62.2	63.70	
1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	Skor Kemampuan Literasi SD	Skor	65.77	68.27	70.77	73.27	75.77	78.27	
2	Skor Kemampuan Numerasi SD	Skor	56.14	59.04	61.94	64.84	67.74	70.64	
3	Skor Kemampuan Literasi SMP	Skor	75.75	76.85	77.95	79.05	80.15	81.25	
4	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Skor	65.89	67.39	68.89	70.39	71.89	73.39	
5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	100	100	100	100	100	
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	%	97.2	97.94	98.69	99.25	99.25	99.25	
7	Indeks Pemerataan Guru SD	Indeks	0.6	0.7	0.8	0.85	0.9	0.95	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Kesetaraan	%	42.24	47.22	52.19	57.17	62.15	67.12	
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	%	99.71	99.79	99.87	99.92	99.92	99.92	
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun	%	59.06	62.64	65.42	68.61	71.79	74.83	
11	Terselenggaranya Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI)	Event	1	1	1	1	1	1	
12	Indeks Pemerataan Guru SMP	Indeks	1	1	1	1	1	1	
13	Iklim Keamanan SMP	Nilai	74.57	76.07	77.57	79.07	80.57	82.07	
14	Iklim Keamanan SD	Nilai	77.3	78.2	79.1	80	80.9	81.8	
15	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	74.54	75.54	76.54	77.54	78.54	79.54	
16	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	58.25	59	59.75	60.5	61.25	62	
17	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	75.33	76.33	77.33	78.33	79.33	80.33	
18	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	61.41	63.91	66.41	68.91	71.41	73.91	
19	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	63.01	65.41	67.81	70.21	72.61	75.01	
20	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	64.79	81.81	100	100	100	100	
AB	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan	%	25.93	40.74	55.56	70.37	85.19	100	
2	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	3	5	5	5	5	5	
3	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan	%	27.27	33.33	39.00	45.00	51.00	57.00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN									
IV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	75	76	77	78	80	83	
2	Prevalensi obesitas > 18 tahun	%	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	
3	Prevalensi depresi pada usia > 15 tahun	%	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
4	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	50	50	50	58.33	66.67	75	
6	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	80.5	80.5	81.5	81.5	82.5	83.5	
7	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
8	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	
9	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	82	84	85	85	86	87	
10	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
11	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	58.33	58.33	58.33	66.67	66.67	66.67	
14	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	92.5	93	93	93.5	94	94	
15	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	75	76	77	78	80	83	
16	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	12.4	12	12	11	10	10	
17	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Per 1000 Penduduk	4.80	4.85	4.90	4.95	5	5	
18	Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	60	70	80	90	100	100	
19	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
20	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	Persentase	55	60	65	70	80	90	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
21	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	
1.02.0.00.0.00.01.0013 - RSUD									
VI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	85	85	87	87	89	91	
1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Dumai Kota									
VIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	59.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	
3	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
1.02.0.00.0.00.01.0015 - Puskesmas Dumai Barat									
X	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	
3	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Bukit Kapur									
XII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	
3	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
4	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Medang kampai									
XIV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	
3	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Bumi Ayu									
XVI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	
3	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
4	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
1.02.0.00.0.00.01.0019 - Puskesmas Bukit Timah									
XVIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
4	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Purnama									
XX	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
3	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	
4	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
1.02.0.00.0.00.01.0021 - Puskesmas Jaya Mukti									
XXII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	
3	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
1.02.0.00.0.00.01.0022 - Puskesmas Bukit Kayu Kapur									
XXIV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	
3	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
1.02.0.00.0.00.01.0024 - Puskesmas Sungai Sembilan									
XXVI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
4	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM									
XXVIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persentase	20	23	26	29	62	65	
2	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persentase	45	48	51	54	57	60	
3	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase	9.52	12.70	14.29	17.46	19.05	26.98	
4	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	54.91	58.15	61.65	64.88	67.56	71.86	
5	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	50	53	56	59	62	65	
1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A									
XXX	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	54.91	58.15	61.65	64.88	67.56	71.86	
1.03.0.00.0.00.01.0002 - UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A									
XXXII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	54.91	58.15	61.65	64.88	67.56	71.86	
1.03.0.00.0.00.01.0003 - UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A									
XXXIV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	54.91	58.15	61.65	64.88	67.56	71.86	
1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG									
XXXVI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak	%	19.30	21.38	23.43	25.44	27.42	29.36	
2	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	91.36	87.85	87.28	86.79	86.36	85.98	
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	76.17	76.66	77.13	77.59	78.04	78.04	
4	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak	%	79.93	77.59	75.32	73.12	70.98	68.93	
5	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kota Dumai	%	32	34	36	38	40	42	
6	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak	%	19.30	21.38	23.43	25.44	27.42	29.36	
7	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman	%	0	0	0.972	1.922	2.855	2.827	
8	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	0.40	0	0.83	1.05	1.26	1.48	
9	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	2.09	3.46	4.82	6.13	7.43	8.70	
AB	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	Persentase Terselaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persentase	100	20	40	60	80	100	
2	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persentase	100	20	40	60	80	100	
1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
XXXVIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase warga negara korban bencana atau terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	70.42	74.54	78.34	80.65	82.85	86.36	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
3	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persentase	45.65	50.00	54.35	56.52	58.70	60.87	
4	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	15.62	15.57	15.51	15.45	15.39	15.34	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0	0.60	6.06	9.09	12.12	15.15	
6	Persentase warga negara korban bencana atau terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	
1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
XL	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100	0	100	100	100	100	
3	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	Indeks	100	100	100	100	100	100	
1.05.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN									
XLII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
XLIV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks	62	66	76	81	86	96	
2	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	
1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
XLVI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang ditingkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persentase	100	100	100	100	100	100	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
AB	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahnya	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA									
XLVIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	20	20	20	20	20	20	
2	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	10	10	10	10	10	10	
3	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	10	10	10	10	10	10	
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	90	90	90	90	90	90	
2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
L	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91.50	91.60	91.70	91.80	91.90	92	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0.41	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	70.20	70.30	70.40	70.50	70.60	70.70	
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	50	60	60	60	65	65	
5	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	65	67	69	70	71	72	
6	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	70	80	80	80	85	85	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
7	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	25	30	30	30	35	35	
8	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Persentase	50	53	53	53	54	54	
9	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	90	90	90	90	90	90	
2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN									
LII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	88.78	89.67	90.56	91.47	92.38	93.31	
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	7811	8006	8206	8411	8621	8837	
3	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	Skor	88.78	89.67	90.56	91.47	92.38	93.31	
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	
6	Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton)	Ton	15632	16023	16424	16834	17255	17686	
7	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)	Ton	7811	8006	8206	8411	8621	8837	
AB	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular	%	22.22	18.52	14.82	11.11	7.41	3.7	
2	Persentase Penanganan Bencana Pertanian		100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	0	30	20	10	10	10	
4	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	100	100	100	100	100	100	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
5	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	%	40	50	57.14	62.50	66.67	70	
6	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan		45	0	0	0	0	0	
7	Peningkatan Produksi Perkebunan	Ton	152496	154021	155561	157116	158688	160275	
8	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	12.21	14.08	14.56	15.02	16.43	16.43	
9	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular	%	22.22	18.52	14.82	11.11	7.41	3.7	
10	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Ton	3231	3392	3562	3740	3927	4124	
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
LIV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	0	50	50	50	55	60	
2	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	0	60	70	75	80	90	
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	44.5	49.1	51.6	53	57.7	62.9	
4	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	80	85	87	90	93	95	
5	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	0	50	50	50	55	60	
6	Persentase RTH	Persentase	65	66	67	68	69	70	
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	72	74	76	79	81	84	
9	Indeks Kualitas Air	Indeks	35.35	35.55	35.75	35.95	36.15	36.35	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
10	Indeks Kualitas Udara	Indeks	70.84	71.14	71.44	71.74	72.04	72.34	
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									
LVI	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	90	91	92	93	94	95	
LVII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	34	40	50	60	70	75	
2	Persentase Informasi Kependudukan yang Di manfaatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	60	70	75	80	85	90	
6	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
LIX	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	45	46	47	48	49	50	
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	71	71.2	72.5	73	73.2	73.5	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
3	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.29	2.27	2.26	2.24	2.19	2.18	
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.4	
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	7.9-7.9	7.8-7.8	7.6-7.6	7.1-7.1	6.9-6.9	6.9-6.9	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
LXI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
1	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Persentase	0	20	40	60	80	100	
2	Konektivitas Laut dan Sungai	%	0	20	40	60	80	100	
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	77	79	83	86	88	90	
2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN									
LXIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	96	97	98	99	100	100	
2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survey)	%	100	100	100	100	100	100	
AB	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2.77	3	3.2	3.3	3.5	3.5	
AC	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Persentase Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN									
LXV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	68	69	70	71	72	72	
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	40	45	50	55	60	65	
3	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	25	30	35	40	45	50	
4	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Persentase	7	10	13	16	19	21	
5	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	40	41	42	43	44	44	
6	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	20	21	22	23	24	24	
AB	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil Menengah	%	10	12	14	16	18	20	
2	Persentase Izin Usaha Industri Kecil Menengah yang Diterbitkan	%	7	8	10	11	12	14	
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	8	10	11	12	13	14	
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
LXVII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	triliun rupiah	13.6	15	16.5	18	20	22	
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	85	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100	100	100	100	100	100	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	%	10	10	10	10	10	10	
2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA									
LXIX	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	0	75	80	85	90	95	
2	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	80	90	90	90	95	95	
3	Persentase Atlet yang berprestasi	%	80	90	90	90	95	95	
AB	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	80	80	80	85	90	90	
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	80	80	80	85	90	90	
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	80	80	80	85	90	90	
2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									
LXXI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	70.5	71	71.5	72	72.5	73	
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	64.5	65	65.5	66	66.5	67	
AB	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	55	57	60	65	70	75	
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	0	10	15	20	25	30	
3	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	52	55	57	60	65	70	
3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN									
LXXIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	105	107	109	112	115	118	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	100	102	104	106	108	110	
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	340.15	350.36	360.87	371.69	382.85	394.34	
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1280	1290	1300	1310	1320	1330	
5	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	46.8	47	47.5	48	48.5	49	
3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN									
LXXV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	35	40	45	50	55	60	
2	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persentase	30	35	40	45	50	55	
3	Persentase Nilai Ekspor Non Migas	%	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	
4	Persentase Pelaku Usaha yang melakukan Tera/Tera Ulang	%	16.67	80	82	84	86	88	
5	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	35	40	45	50	55	60	
6	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	33.33	33.33	66.67	66.67	100	100	
7	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	%	30	35	40	45	50	55	
4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH									
LXXVII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH								
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	2	2	3	3	3	3	
2	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	85	85	85	85	85	85	
4	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	28.6	28.7	28.8	30	31.5	32.5	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
5	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
6	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	100	100	100	100	100	100	
7	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
8	Efektivitas Kebijakan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100	100	
9	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
10	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	86.50	86.80	86.85	86.90	88.50	90	
4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD									
LXXIX	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	4.02 - SEKRETARIAT DPRD								
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	0	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
LXXXI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	5.01 - PERENCANAAN								
1	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
LXXXIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	5.02 - KEUANGAN								
1	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	65.05	66.55	67.80	68.82	69.62	70.12	
2	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	40.25	38.80	30	30	30	30	
3	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	21.56	22.72	40	40	40	40	
4	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	13.86	12.96	11.95	10.86	9.60	8.20	
5	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	16.58	19.58	10.60	14.16	17.91	21.91	
6	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH									
LXXXV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	5.02 - KEUANGAN								
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	33	34	35	36	37	38	
5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
LXXXVII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	5.03 - KEPEGAWAIAN								
1	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	96.7	96.75	96.8	96.85	96.9	97	
2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	1.6	2	2.3	2.4	2.5	2.6	
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	8	8	12	15	15	15	
4	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	61.4	60.4	61.6	61	60.9	60	
AB	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	
5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH									
LXXXIX	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase	0	0	42	44	46	48	
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	12	36	50	64	74	100	
3	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan		0	0	25	50	75	100	
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH									
XCI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH								
1	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi sebagai implementasi dari kebijakan teknis yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan tahun n-1	%	87	87.5	88	88.5	90	90.5	
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUMAI BARAT									
XCIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	7.01 - KECAMATAN								
1	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat	%	100	100	100	100	100	100	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Barat	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN DUMAI TIMUR									
XCV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	7.01 - KECAMATAN								
1	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Timur	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Timur	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Timur	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BUKIT KAPUR									
XCVII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	7.01 - KECAMATAN								
1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Bukit Kapur	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Bukit Kapur	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Bukit Kapur	%	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DUMAI KOTA									
XCIX	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	7.01 - KECAMATAN								
1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Kota	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota	%	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DUMAI SELATAN									
CI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	7.01 - KECAMATAN								
1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Selatan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Selatan	%	100	100	100	100	100	100	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Selatan	%	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN MEDANG KAMPAI									
CIH	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	7.01 - KECAMATAN								
1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Medang Kampai	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Medang Kampai	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Medang Kampai	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Medang Kampai	%	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN									
CV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	7.01 - KECAMATAN								
1	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
CVII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	90	90	90	90	90	90	
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	90	90	90	90	90	90	
4	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	90	90	90	90	90	90	

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB V

PENUTUP



RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA DUMAI TAHUN 2025 - 2029

BAB V | PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis yang menjembatani visi pembangunan jangka panjang dengan implementasi konkret pada periode lima tahunan. Dokumen ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi secara sistematis dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2025-2045 hingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045.

Fungsi utama RPJMD ini adalah memberikan kerangka acuan yang komprehensif dan terukur bagi seluruh pemangku kepentingan daerah dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan. Dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih luas, RPJMD Kota Dumai memastikan adanya keselarasan dan konsistensi arah pembangunan antara level daerah, provinsi, dan nasional.

Melalui RPJMD tahun 2025-2029, Pemerintah Kota Dumai berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas program pembangunan. Dokumen ini tidak sekadar menjadi panduan administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pencapaian visi dan misi kepemimpinan daerah, dengan fokus pada transformasi berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai *blueprint* pembangunan daerah, RPJMD Kota Dumai 2025-2029 diharapkan mampu mengarahkan seluruh potensi dan sumber daya daerah secara optimal, menciptakan terobosan inovatif, dan menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Keberhasilan implementasi rencana ini akan sangat tergantung pada koordinasi lintas stakeholder, komitmen yang kuat, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika perubahan internal dan eksternal yang terus berkembang.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang mencakup periode lima tahun sejak pelantikan pemerintahan daerah hingga berakhirnya masa RPJMD sesuai ketentuan perundang-undangan. Dokumen ini menjadi panduan komprehensif bagi Pemerintah Kota Dumai dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Keberhasilan implementasi RPJMD akan diukur melalui pencapaian target-target yang telah ditetapkan secara terukur dan akuntabel.

1. RPJMD Kota Dumai Tahun 2026–2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
3. Walikota berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah ditetapkan kepada masyarakat, melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
4. Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.
5. Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah agar menjabarkan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
6. Pemerintah Daerah dan semua Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan baik RKPD maupun Renja PD harus berpedoman pada RPJMD.

5.2. Skema Monitoring dan Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dalam rangka pengendalian proses pembangunan daerah serta pemantauan capaian target pembangunan sebagaimana telah dalam dokumen RPJMD ini. Terdapat tiga jenis monitoring dan evaluasi yang harus dilaksanakan, yaitu proses monitoring yang dilakukan setiap tahun yang juga diselaraskan dengan proses pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) setiap tahunnya, proses peninjauan kembali yang dapat dilakukan ketika terjadi kondisi *force majeure* selama masa pembangunan, dan proses evaluasi yang harus dilakukan sebelum proses perencanaan RPJMD pada periode selanjutnya. Detail proses monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 Skema Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029

No	Jenis	Waktu					Target
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Monitoring	V	V	V	V		Penyelarasan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD dengan RKPD; beserta monitoring capaian indikator kinerja dalam RPJMD dan RKPD
2	Peninjauan Kembali			V			Review terhadap dokumen RPJMD dapat dilakukan jika terjadi kondisi <i>force majeure</i> yang tidak bisa terhindarkan.
3	Evaluasi					V	Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target arah pembangunan dan pencapaian target indikator pembangunan, sebelum proses perencanaan RPJMD periode selanjutnya dilaksanakan.

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD nantinya harus dilakukan dengan prinsip demokratis, artinya dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. Hal ini difungsikan untuk meningkatkan partisipasi pembangunan oleh berbagai pihak. Beberapa forum dapat dirancang dalam upaya meningkatkan partisipasi pembangunan untuk dapat mengevaluasi ketercapaian pembangunan setiap tahunnya. Beberapa indikasi forum untuk monitoring dan



evaluasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Jenis Forum Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029

No	Jenis Forum Monev	Sasaran Forum Monev	Waktu Pelaksanaan
1	Forum Monitoring Lintas OPD	Pelaksanaan forum dilakukan pada internal Pemerintah Daerah antar OPD	Dilaksanakan pada setiap tahun dan bertepatan dengan awal tahun anggaran
2	Forum Pengendalian Pembangunan Daerah	Forum ini disusun untuk memberikan ruang partisipasi pembangunan kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah baik dari sisi eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, akademisi, serta media, dll.	Forum dillaksanakan setiap tahun pasca hasil monitoring kinerja setiap OPD dilaksanakan.
3	Publikasi dan Sosialisasi Hasil Pembangunan Daerah	Skema ini dilaksanakan dengan sasaran melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan	Dilaksanakan setelah dua forum pengendalian pembangunan daerah.

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029, 2025

Berasarkan pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen ini tidak sekadar menjadi pedoman administratif, melainkan merupakan komitmen strategis untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Keberhasilan implementasi RPJMD mensyaratkan sinergi dan dedikasi komprehensif dari seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat. Diperlukan sikap mental yang konstruktif, mencakup kerja keras, integritas tinggi, dan disiplin yang konsisten dari aparatur pemerintah, unsur masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

Visi dan misi Pemerintah Kota Dumai yang telah dijabarkan dalam dokumen RPJMD akan diterjemahkan melalui serangkaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian target-target pembangunan membutuhkan komitmen bersama, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika perubahan internal dan eksternal.

Proses implementasi RPJMD akan senantiasa memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Setiap tahapan pembangunan akan dikawal melalui mekanisme evaluasi berkala, memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tetap sejalan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Dumai.

5.3. Manajemen Risiko

Dalam upaya pencapaian target pembangunan daerah, terdapat potensi risiko apabila indikator kinerja yang ditetapkan tidak dapat tercapai sesuai rencana. Salah satu indikator yang memiliki potensi risiko cukup tinggi adalah penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kota Dumai sebagai daerah industri dengan aktivitas transportasi yang padat, masih memiliki ketergantungan besar pada energi fosil, khususnya dari sektor migas dan industri pengolahan. Hal ini menyebabkan kontribusi emisi relatif tinggi, sementara pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan masih terbatas. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung, kapasitas kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pengendalian emisi belum sepenuhnya optimal. Rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengadopsi pola hidup ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan transportasi rendah emisi, juga menjadi faktor penghambat signifikan. Dengan kondisi tersebut, risiko tidak tercapainya target



penurunan emisi GRK menjadi nyata meskipun intervensi program telah dijalankan.

Secara lebih umum, risiko kegagalan pencapaian target indikator pembangunan daerah lainnya juga dapat terjadi apabila terdapat keterbatasan sumber daya, baik dalam aspek pendanaan, kapasitas kelembagaan, maupun kualitas sumber daya manusia. Faktor eksternal seperti fluktuasi perekonomian global, perubahan kebijakan nasional, dinamika pasar komoditas, serta potensi terjadinya bencana alam atau perubahan iklim ekstrem, turut memengaruhi tingkat pencapaian target indikator. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi risiko yang menyeluruh, antara lain melalui penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi, peningkatan efektivitas alokasi pendanaan, serta pengembangan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi eksternal. Dengan penerapan manajemen risiko yang terencana, diharapkan potensi kegagalan dalam pencapaian target, baik penurunan intensitas emisi GRK maupun indikator pembangunan daerah lainnya, dapat diminimalisir sehingga arah pembangunan Kota Dumai tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan.



WALIKOTA DUMAI

H. PAISAL SKM, MARS



PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAMPIRAN



RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029



METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA RPJMD KOTA DUMAI
TAHUN 2025-2026

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup																				
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu																				
Rumus Perhitungan	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ IKLH terdiri dari tiga indikator utama, yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perhitungan IKLH di tingkat kabupaten/kota berbeda dengan di tingkat provinsi atau nasional. Pada tingkat kabupaten/kota, kontribusi indeks kualitas air laut tidak dimasukkan ke dalam IKLH																				
Interpretasi	IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. IKLH digunakan untuk memberikan gambaran umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <table><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr></table>			Nomor	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2	Baik	$70 \leq x < 90$	3	Sedang	$50 \leq x < 70$	4	Kurang	$25 \leq x < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Nomor	Kategori	Angka Rentang																			
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																			
2	Baik	$70 \leq x < 90$																			
3	Sedang	$50 \leq x < 70$																			
4	Kurang	$25 \leq x < 50$																			
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																			
Sumber Data	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan																				
Frekuensi	Tahunan																				

2. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya atau dengan kata lain mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah dalam tiga dimensi pembangunan yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat Pendidikan dan standard hidup layak
Rumus Perhitungan	$\sqrt[3]{I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pengeluaran}} \times 100$ $I_{\text{pendidikan}} = \frac{I \text{ HLS} + I \text{ RLS}}{2}$ $I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ maks} - HLS \text{ min}}$ $I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$ $I \text{ HLS} : \text{harapan lama sekolah}, I \text{ RLS} : \text{rata-rata lama sekolah}$



	$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ AHH : Angka Harapan Hidup $I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ Pengeluaran : Pengeluaran perkapita yang disesuaikan
Interpretasi	Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik
Sumber Data	BPS Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

3. Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	Perkembangan Produksi Barang dan Jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan
Rumus Perhitungan	Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menghitung perubahan /pertambahan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tahun 2010
Interpretasi	Suatu wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi jika PDRB atas dasar harga konstan yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya
Sumber Data	BPS Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

4. Indeks Integritas

Nama Indikator	Indeks Integritas
Definisi	Indeks Integritas adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan lembaga/pemerintah daerah (L/PD).
Rumus Perhitungan	Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Eksper (0,367) – Faktor Koreksi (0,2)
Interpretasi	Indeks Integritas digunakan sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Lembaga/pemerintah daerah
Sumber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Tahunan

5. Indeks Infrastruktur Daerah

Nama Indikator	Indeks Infrastruktur Daerah
Definisi	Indeks infrastruktur adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah atau sektor tertentu. Indeks ini biasanya dihitung berdasarkan berbagai indikator yang mencerminkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas infrastruktur dasar



	seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Infrastruktur} = \sum_{i=1}^n w_i \times I_i$ Keterangan: I_i = Nilai indikator ke -I (setelah dinormalisasi ke skala 0-100) W_i = Bobot indikator ke-I (ditentukan oleh pentingnya indikator) Hasil Akhir : Skala 0-100, makin tinggi makin baik
Interpretasi	Indeks infrastruktur digunakan untuk mengukur Kesejahteraan Masyarakat terhadap Akses dan kualitas pelayanan publik
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

6. Indeks Daya Saing Daerah

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah
Definisi	Instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.
Rumus Perhitungan	$Skori_d = (N_{i,d} - N_{RiNTi} - N_{Ri}) \times 5,$ Dimana: Skor id adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; Nid adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d Nri adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; dan Nti adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i Hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95).
Interpretasi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan dan kondisi suatu daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. IDSD dapat diartikan sebagai refleksi tingkat kemajuan, kemandirian, produktivitas, dan persaingan suatu daerah. IDSD dapat digunakan sebagai alat ukur atau potret keberhasilan pembangunan daerah secara luas. Tujuannya adalah untuk mendorong kemandirian dan penguatan daya saing daerah dalam mencapai target pembangunan. Aspek-aspek daya saing daerah yang diukur melalui IDSD, antara lain: Kemampuan ekonomi daerah, Fasilitas wilayah atau infrastruktur, Iklim berinvestasi, Sumber daya manusia.
Sumber Data	BRIN
Frekuensi	Tahunan

7. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM)



	dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan



METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD

A. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Indeks Infrastruktur Daerah

Nama Indikator	Indeks Infrastruktur Daerah
Definisi	Indeks infrastruktur adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah atau sektor tertentu. Indeks ini biasanya dihitung berdasarkan berbagai indikator yang mencerminkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Infrastruktur} = \sum_{i=1}^n w_i \times I_i$ Keterangan: I_i = Nilai indikator ke -I (setelah dinormalisasi ke skala 0-100) W_i = Bobot indikator ke-I (ditentukan oleh pentingnya indikator) Hasil Akhir : Skala 0-100, makin tinggi makin baik
Interpretasi	Indeks infrastruktur digunakan untuk mengukur Kesejahteraan Masyarakat terhadap Akses dan kualitas pelayanan publik
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

2. Indeks Daya Saing Daerah

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah
Definisi	Instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.
Rumus Perhitungan	$Skori_i = (N_i - N_{Ri} / (N_{Ti} - N_{Ri})) \times 5,$ Dimana: Skor id adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; Nid adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d Nri adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; dan Nti adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i Hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95).
Interpretasi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan dan kondisi suatu daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. IDSD dapat diartikan sebagai refleksi tingkat kemajuan, kemandirian, produktivitas, dan persaingan suatu daerah. IDSD dapat digunakan sebagai alat ukur atau potret keberhasilan pembangunan daerah secara luas. Tujuannya adalah untuk mendorong kemandirian dan penguatan daya saing daerah dalam mencapai target pembangunan. Aspek-aspek daya saing daerah yang diukur melalui IDSD, antara lain: Kemampuan ekonomi daerah, Fasilitas wilayah atau infrastruktur, Iklim berinvestasi, Sumber daya manusia.
Sumber Data	BRIN
Frekuensi	Tahunan



3. Tingkat Kemantapan Jalan

Nama Indikator	Tingkat Kemantapan Jalan
Definisi	Kondisi mantap jalan (%): merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km). Ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu (Permen PU No. 13/PRT/M/2011).
Rumus Perhitungan	$KMJ = \frac{PJ_{bs}}{TPJ} \times 100\%$ Keterangan: KMJ = Kondisi Mantap Jalan PJ_{bs} = panjang Jalan yang memenuhi Kategori Kondisi Baik dan Sengah TPJ = Total Panjang Jalan
Interpretasi	Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum
Frekuensi	Tahunan

4. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan
Definisi	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Metode Perhitungan	<i>Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan</i> $= \frac{\text{Nilai sektor Industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kota Dumai}} \times 100$
Interpretasi	Rasio sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



5. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi
Rumus Perhitungan	$\text{Pembentukan PMTB (\%PDRB)} = \frac{\text{PMTB}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

6. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Metode Perhitungan	Rasio PDRB Penyediaan Akmamin $\frac{\text{Nilai tambah penyediaan akmamin}}{\text{Nilai PDRB Kota Dumai}} \times 100$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan



7. Rasio Ekspor Non Migas terhadap total Ekspor Perdagangan Luar Negeri

Nama Indikator	Rasio Ekspor Non Migas terhadap total Ekspor Perdagangan Luar Negeri
Definisi	Ekspor nonmigas merupakan agregasi ekspor barang di luar komoditas minyak dan gas. Kelompok ekspor barang nonmigas dicatat berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{nilai ekspor non migas}}{\text{total ekspor perdagangan luar negeri}}$
Interpretasi	Ekspor impor menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan
Sumber Data	Dinas Perdagangan
Frekuensi	Tahunan

8. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah tertentu.
Metode Perhitungan	<i>Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara</i>
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional.
Sumber Data	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

9. Kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi
Definisi	Kontribusi PDRB Provinsi adalah share PDRB Provinsi terhadap PDB Nasional.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB} = \frac{\text{Nilai PDRB ADHB Kota Dumai}}{\text{Nilai PDRB ADHB Provinsi Riau}} \times 100$
Interpretasi	Sebagai upaya mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antar wilayah yang saat ini masih didominasi KBI. Sebagai upaya mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

10. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Definisi	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan



	berkelanjutan memenuhi: - Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat - Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: - Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, - Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m² - Memiliki akses air minum layak - Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	- Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT \times 100}$ - PHLTB: Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; - JRTHLTB: jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; - JRT: Jumlah rumah tangga - Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).$PHLTB \text{ (proksi)} = \frac{JRTHLTB(\text{proksi})}{JRT \times 100}$ - PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; - JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; - JRT: Jumlah rumah tangga - Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran.
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin



	tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/ Kota)
Frekuensi	Tahunan

11. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif																		
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: <table><tr><td>1. Fesyen Visual</td><td>10. Desain Komunikasi</td></tr><tr><td>2. Kuliner</td><td>11. Televisi dan Radio</td></tr><tr><td>3. Kriya</td><td>12. Seni Rupa</td></tr><tr><td>4. Film, Animasi dan Video</td><td>13. Desain Produk</td></tr><tr><td>5. Pengembang Permainan</td><td>14. Periklanan</td></tr><tr><td>6. Aplikasi</td><td>15. Penerbitan</td></tr><tr><td>7. Musik</td><td>16. Arsitektur</td></tr><tr><td>8. Seni Pertunjukan</td><td>17. Desain Interior</td></tr><tr><td>9. Fotografi</td><td></td></tr></table>	1. Fesyen Visual	10. Desain Komunikasi	2. Kuliner	11. Televisi dan Radio	3. Kriya	12. Seni Rupa	4. Film, Animasi dan Video	13. Desain Produk	5. Pengembang Permainan	14. Periklanan	6. Aplikasi	15. Penerbitan	7. Musik	16. Arsitektur	8. Seni Pertunjukan	17. Desain Interior	9. Fotografi	
1. Fesyen Visual	10. Desain Komunikasi																		
2. Kuliner	11. Televisi dan Radio																		
3. Kriya	12. Seni Rupa																		
4. Film, Animasi dan Video	13. Desain Produk																		
5. Pengembang Permainan	14. Periklanan																		
6. Aplikasi	15. Penerbitan																		
7. Musik	16. Arsitektur																		
8. Seni Pertunjukan	17. Desain Interior																		
9. Fotografi																			
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif}}{\Sigma \text{PDRB 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Regional}} \times 100\%$																		
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.																		
Sumber Data	Badan Pusat Statistik daerah																		
Frekuensi	Tahunan																		

12. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Kota Dumai

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Kota Dumai
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi UKM} = \frac{\text{Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha}} \times 100\%$



Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

13. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	• Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. • PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. • Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$RPDRB_t = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}_t}{PDRB_t} \times 100$ Keterangan: RPDRB_t : Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD); Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

14. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi Kota Dumai

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	Proporsi IKM : $\frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}} \times 100\%$



Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

15. Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	Perkembangan Produksi Barang dan Jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan
Rumus Perhitungan	Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menghitung perubahan /pertambahan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tahun 2010
Interpretasi	Suatu wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi jika PDRB atas dasar harga konstan yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya
Sumber Data	BPS Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

16. Tingkat Inflasi

Nama Indikator	Tingkat Inflasi
Definisi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Inflasi (\%)} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK.
Interpretasi	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: 1. Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). 2. Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. 3. Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi year-on-



	year September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (catatan: Hingga saat ini BPS tidak me-release data inflasi tingkat Provinsi, melainkan inflasi tingkat Kabupaten/Kota IHK. Sehingga perlu mendorong BPS untuk dapat mempublikasi tingkat inflasi di tingkat Provinsi)
Frekuensi	Tahunan

17. Rasio Kewirausahaan Daerah

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan Daerah
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Rumus Rasio Kewirausahaan Daerah Berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{Total Angkatan Kerja Daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

18. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah 1 . Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Volume Usaha Koperasi Daerah}}{\text{PDRB ADHB Kota Dumai}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	• Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai • Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan

19. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah

Nama Indikator	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah
Definisi	Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di antara Kabupaten/Kota di dalam Satu Provinsi
Rumus Perhitungan	$\text{KVH (bapokting1)} = (\text{simpangan baku} / \text{rata-rata})$ $\text{antarkab/kota pada bapokting1}$ $\text{KVH antarwilayah} = \text{rata-rata KVH seluruh bapokting Formulasi}$ Akhir : $\text{KVH antarwilayah} = (\text{KVH}(\text{barang 1}) + \text{KVH}(\text{barang2}) + \text{KVH}(\text{barang}_n)) / \text{jumlah bapokting}$
Interpretasi	Korelasi terhadap Biaya Logistik Nasional (%) Semakin rendah KVH antarwilayah di Tingkat Provinsi menunjukkan bahwa tingkat harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di antara Kabupaten/Kota pada satu Provinsi semakin konvergen. Hal ini menjadi salah satu dampak langsung dari perbaikan kinerja logistik di masing-masing provinsi.
Sumber Data	Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota Kementerian Perdagangan, melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)
Frekuensi	Tahunan

B. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah																							
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).																							
Rumus Perhitungan	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ IKLH terdiri dari tiga indikator utama, yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perhitungan IKLH di tingkat kabupaten/kota berbeda dengan di tingkat provinsi atau nasional. Pada tingkat kabupaten/kota, kontribusi indeks kualitas air laut tidak dimasukkan ke dalam IKLH																							
Interpretasi	<table><tr><th colspan="3">Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</th></tr><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr></table>			Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Nomor	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2	Baik	$70 \leq x < 90$	3	Sedang	$50 \leq x < 70$	4	Kurang	$25 \leq x < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup																								
Nomor	Kategori	Angka Rentang																						
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																						
2	Baik	$70 \leq x < 90$																						
3	Sedang	$50 \leq x < 70$																						
4	Kurang	$25 \leq x < 50$																						
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																						
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																							
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun; KLHS																							

2. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Nama Indikator	Penurunan Intensitas Emisi GRK
Definisi	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antaraupaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.
Rumus Perhitungan	Intensitas emisi GRK (ton CO2e/2010 IDR) $IE_t = TE_t / PDRB_t$ IE_t = Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) TE_t = Total tingkat emisi GRK pada tahun t (ton CO2e) $PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun t (2010 IDR miliar) t = titik tahun perhitungan Penurunan intensitas emisi GRK (%) $\%IE_t = (IE_t - IE_{Bt}) / IE_{Bt}$ $\%IE_t$ = Persentase intensitas emisi GRK pada tahun t IE_t = Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) IE_{Bt} = Intensitas emisi GRK baseline tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) t = titik tahun perhitungan
Interpretasi	Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) berarti penurunan besaran emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas tertentu
Sumber Data	1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Laporan AKSARA, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Produk Domestik Regional Bruto (Harga Konstan 2010): BPS. 3. Provinsi Riau
Frekuensi	Tahunan

3. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Nama Indikator	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
Definisi	- Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. - Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan



	konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary Energy Requirement). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik; Provinsi Riau
Frekuensi	Tahunan

4. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRB)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah



	• Indeks 13 - 144 adalah Sedang • Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB; BPBP Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

5. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Definisi	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau



	bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah. Diasumsikan bahwa semua sampah yang telah dikumpulkan akan langsung diolah.
Rumus Perhitungan	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut. $TS = 70\% \text{ dari rumah tangga} + 30\% \text{ dari non - rumah tangga}$ $TS = \frac{TSRT}{70\%}$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (ton/hari)



	TS : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$ Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Provinsi.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba) 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. SI INSAN Kementerian PUPR
Frekuensi	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes: Tahunan 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Tahunan 3. SI INSAN Kementerian PUPR: Tahunan

6. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak
Definisi	Akses Sanitasi Layak adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$PSL = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ PSL = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang layak serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari Masyarakat
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR



	3. Dinas PU Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

7. Kapasitas Air Baku (m³/detik)

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya
Sumber Data	1. Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) 2. Dinas PU Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

8. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) RT

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) RT
Definisi	Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Catatan: Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima



	layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: Persentase Rumah tangga Cara Perhitungan: $PRTL P = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan: PRTLA : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya Sumber: - Diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021 - Rancangan Platform Pengelolaan Persampahan Nasional, 2023

9. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Layak Perpipaan

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Layak Perpipaan
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$ - PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. - JRTASMPP: Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. - JRT: Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS
Frekuensi	Tahunan



C. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

2. Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.
Rumus Penghitungan	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i + Y_{i-1})$ dimana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan



	pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect equality) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Tahunan

3. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya atau dengan kata lain mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah dalam tiga dimensi pembangunan yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat Pendidikan dan standard hidup layak
Rumus Perhitungan	$\sqrt[3]{I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pengeluaran}} \times 100$ $I \text{ pendidikan} = \frac{I \text{ HLS} + I \text{ RLS}}{2}$ HLS : harapan lama sekolah , RLS : rata-rata lama sekolah $I \text{ HLS} = \frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ maks} - HLS \text{ min}}$ $I \text{ RLS} = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$ $I \text{ Kesehatan} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$ AHH : Angka Harapan Hidup $I \text{ Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$ Pengeluaran : Pengeluaran perkapita yang disesuaikan
Interpretasi	Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik
Sumber Data	BPS Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

4. Skor Kemampuan Literasi Jenjang Pendidikan di Kota Dumai SD dan SMP



Nama Indikator	Skor Kemampuan Literasi Jenjang Pendidikan di Kota Dumai SD dan SMP
Definisi	Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. (Ka. BSKAP 018/M/H/2024)
Rumus Perhitungan	$\text{Kemampuan Literasi} = \frac{\sum \text{Skor Literasi Siswa}}{\sum \text{Siswa}}$ Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). (Ka. BSKAP 018/M/H/2024)
Interpretasi	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (pada Jenis Pelayanan Dasar: Pendidikan Menengah)
Sumber Data	PSKP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Frekuensi	Tahunan

5. Skor Kemampuan Numerasi Jenjang Pendidikan di Kota Dumai SD dan SMP

Nama Indikator	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang Pendidikan di Kota Dumai SD dan SMP
Definisi	Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. (Ka. BSKAP 018/M/H/2024)
Rumus Perhitungan	$\text{Kemampuan Numerasi} = \frac{\sum \text{Skor Numerasi Siswa}}{\sum \text{Siswa}}$ Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. (Ka. BSKAP 018/M/H/2024)
Interpretasi	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (pada Jenis Pelayanan Dasar: Pendidikan Menengah)
Sumber Data	PSKP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Frekuensi	Tahunan

6. Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
Definisi	• Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup: ◦ Diploma I-IV ◦ S1 ◦ S2



	○ S2 Terapan ○ S3
Rumus Perhitungan	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi: $\frac{\text{Jumlah penduduk 15 thn ke atas yang lulus atau berijazah pendidikan}}{\text{Jumlah Penduduk 15 thn ke atas di Kota Dumai}}$
Interpretasi	Positif Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

7. Rata-rata Lama Sekolah

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah
Definisi	Ukuran yang menunjukkan berapa tahun rata-rata penduduk suatu wilayah telah menempuh pendidikan formal. RLS biasanya dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena diasumsikan bahwa pada usia tersebut, pendidikan formal seseorang telah selesai. RLS digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat dan kualitas pendidikan dalam suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$RLS = \frac{\sum(\text{Jumlah tahun sekolah tiap individu usia 25+})}{\text{Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas}}$
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

8. Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	BPS Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

9. Usia Harapan Hidup (UHH)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan



	kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan; BPS Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

10. Jumlah Kelahiran Hidup

Nama Indikator	Jumlah Kelahiran Hidup
Definisi	Jumlah bayi yang lahir dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan
Rumus Perhitungan	Jumlah Kelahiran Hidup = $L/P \times 1.000$ L = jumlah kelahiran bayi yang lahir pada tahun tertentu, P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun, K = konstanta (1.000)
Interpretasi	Jumlah kelahiran hidup dapat diinterpretasikan melalui angka kelahiran kasar (CBR) yang menunjukkan jumlah kelahiran hidup per 1.000 orang dalam satu tahun. Angka kelahiran yang tinggi pada suatu wilayah dapat diartikan jika angka kelahirannya lebih dari 30 per tahun
Sumber Data	Dinas Kesehatan Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

11. Jumlah Kematian Ibu Absolut

Nama Indikator	Jumlah Kematian Ibu Absolut
Definisi	Banyaknya peristiwa kematian demografi yang terjadi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu = Σ kematian ibu pada saat nifas pada tahun tertentu
Interpretasi	Kematian ibu menurut WHO adalah kematian yang terjadi selama kehamilan atau dalam 42 hari setelah persalinan. Kematian ini disebabkan oleh semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cidera
Sumber Data	Dinas Kesehatan Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

12. Jumlah Kematian Balita Absolut

Nama Indikator	Jumlah Kematian Balita Absolut
Definisi	Banyaknya peristiwa kematian demografi yang terjadi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian balita = Σ kematian balita pada saat nifas pada tahun tertentu
Sumber Data	Dinas Kesehatan Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

13. Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Nama Indikator	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Definisi	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah



Perhitungan	kerjanya yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
Sumber Data	Dinas Kesehatan Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

14. *Total Fertility Rate (TFR)*

Nama Indikator	Total Fertility Rate (TFR)
Definisi	Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.
Rumus Perhitungan	$TFR = \frac{JK_{15-49}}{JP_{15-49}} \times 1000$ TFR : Total Fertility Rate (TFR) JK ₁₅₋₄₉ : Banyaknya Kelahiran dari Perempuan Umur 15-49 tahun selama periode tertentu JP ₁₅₋₄₉ : Jumlah Penduduk Perempuan Umur 15-49 tahun pada tahun pertengahan periode yang sama
Sumber Data	1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2. Badan Pusat Statistik (BPS) 3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi	Tahunan

15. *Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)*

Nama Indikator	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
Definisi	Angka kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok usia 15-19 Tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas umur MUD.
Rumus Perhitungan	$ASFR_{15-19} = K(15-19)/P(15-19) \times 1.000$ P ₁₅₋₁₉ : Jumlah Perempuan pada Kelompok Umur 15-19 tahun K ₁₅₋₁₉ : Jumlah Kelahiran pada Kelompok umur 15-19 tahun
Sumber Data	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Badan Pusat Statistik (BPS) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi	Tahunan

16. *Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)*

Nama Indikator	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)
Definisi	Penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Seluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan.
Rumus Perhitungan	$I = \frac{A}{B} \times 100\%$ I = Perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif yang saat ini menggunakan alat kontrasepsi modern dibagi dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama dikali 100%



	A= Jumlah PUS yang menjadi peserta KB aktif yang saat ini menggunakan alat kontrasepsi modern B = Jumlah seluruh PUS pada periode yang sama
Sumber Data	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi	Tahunan

17. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P \text{ stunting} = \frac{JAB(5)P \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan PAB(5) P : Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting) JAB(5) P stunting : Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP \text{ stunting} = \frac{JAB(5)SP \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan PAB(5) : Prevalensi anak balita yang SP stunting menderita sangat pendek (stunting) JAB(5) SP stunting : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) Prevalensi stunting = PAB(5) P + PAB(5) SP
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.



	3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

18. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

19. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.



Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

20. Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

Nama Indikator	Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
Definisi	Persentase bayi (0-11 bulan) yang mendapatkan imunisasi lengkap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu
Rumus Perhitungan	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi target bayi (0-11 bulan) dalam waktu yang sama dikali 100
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

21. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Definisi	Pengukuran perbandingan dari kualitas keluarga untuk semua wilayah di Indonesia, serta mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga maju, berkembang atau rentan
Rumus Perhitungan	$iBangga = \frac{1}{3} (\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}) \times 100$ Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu yaitu: a. Dimensi Ketentraman dengan indikator : 1. Kegiatan ibadah; 2. Legalitas keluarga; 3. Jaminan Kesehatan; 4. Jaminan Keuangan; 5. Keharmonisan Keluarga b. Dimensi Kemandirian dengan indikator : 1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar; 2. Keberlangsungan Pendidikan; 3. Kesehatan Keluarga; 4. Akses Informasi c. Dimensi Kebahagiaan dengan indikator : 1. Interaksi Keluarga; 2. Interaksi Sosial
Sumber Data	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Frekuensi	Tahunan

22. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta



	dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki$G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$$G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik$HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$$IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L} \right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik$G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender$Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender$IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ Keterangan: G_p = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki - MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan - MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_p, G_L)$ = Agregasi Indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik - IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi - IP = Indeks dimensi pemberdayaan - IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{p,L}$ = Agregasi Indeks dimensi dengan rata-rata geometrik - IKG = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei



	Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

23. PDRB per Kapita

Nama Indikator	PDRB per Kapita
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{POPULASI}$ Keterangan: PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

24. Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan

Nama Indikator	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

25. Indeks Kesejahteraan Sosial

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial
Definisi	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai aspek kehidupan sosial. IKS dibangun dari aspek-aspek kesejahteraan sosial yang mencakup dimensi-dimensi utama seperti: Ketahanan Keluarga, Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Sosial, Partisipasi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Layak, Perlindungan Sosial, Pekerjaan dan Pendapatan, dan Lingkungan Sosial. Setiap dimensi diukur menggunakan beberapa indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan dinilai dengan menggunakan skala tertentu.
Sumber Data	Dinas Sosia dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

26. Indeks Zakat Nasional

Nama Indikator	Indeks Zakat Nasional
Definisi	Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang



	kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik.
Rumus Perhitungan	Indeks Zakat Nasional (IZN) = $0,30X1 + 0,70X2$ Ket: X1 : Dimensi Makro (Regulasi, Dukungan APBN/APBD, Database Lembaga Zakat, Penguatan Jaringan, Literasi dan Dakwah Zakat) X2 : Dimensi Mikro (Tata Kelola, Dampak Zakat)
Sumber Data	Baznas
Frekuensi	Tahunan

27. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. $\text{Persentase Cakupan Kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah Peserta JKN}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Dumai}} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS Dinas Kesehatan Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

28. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif



	mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

29. Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal
Definisi	Penciptaan Lapangan Kerja Formal diukur melalui persentase tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai pekerja formal jika memenuhi salah satu kriteria berikut: Pekerja dengan Status Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, atau Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang Dibayar (status 1/2/3): - Memiliki pembukuan lengkap (laba/rugi; neraca keuangan) Pekerja dengan Status Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas di Sektor Pertanian, atau Pekerja Bebas Nonpertanian (status 4/5/6): - Menerima jaminan sosial dari pemberi kerja, atau - Memperoleh cuti tahunan tanpa pemotongan gaji pokok dan cuti sakit tanpa pemotongan gaji pokok, atau - Memiliki perjanjian/kontrak kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).
Rumus Perhitungan	$PPLKF = \left(\frac{\Sigma \text{Tenaga Kerja Formal}}{\Sigma \text{Tenaga Kerja}} \right) \times 100\%$ Keterangan: $PPLKF$ = Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) $\Sigma \text{Tenaga Kerja Formal}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang memenuhi kriteria tenaga kerja formal $\Sigma \text{Tenaga Kerja}$ = Total Tenaga Kerja
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja. Pekerjaan formal



	memberikan pekerja jaminan terhadap pendapatan dan kestabilan kerja serta manfaat lain seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, cuti, dan pensiun. Semakin tinggi nilai persentasenya, semakin mencerminkan perkembangan positif dalam pasar kerja karena dapat mendukung kemajuan sosial dan ekonomi di suatu negara.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Satu kali per tahun (Agustus)

30. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Penghitungan	$\frac{\text{Cakupan Jamsos Naker}}{\text{Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan}} \times 100$ Dimana: Peserta= Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah Semesta penduduk bekerja = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas.
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya.

31. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan



	berat.
Rumus Perhitungan	$\%PD\ formal = \frac{\Sigma PD\ formal}{\Sigma AKPD} \times 100\%$ Keterangan: PD formal : Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal AKPD : Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/ karyawan/ pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai; Dinas Sosial Kota Dumai; Provinsi Riau
Frekuensi	Tahunan

D. ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Indeks Integritas

Nama Indikator	Indeks Integritas
Definisi	Indeks Integritas adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah (K/L/PD).
Rumus Perhitungan	Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Eksper (0,367) – Faktor Koreksi (0,2)
Interpretasi	Hasil dari Indeks Integritas dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris.
Sumber Data	Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

2. Indeks SPBE

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ dimana:

	• NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

3. Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)

Nama Indikator	Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)
Sumber Data	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

4. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum																														
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.																														
Rumus Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%. c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reuiu, dengan bobot 35%. d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH: <table> <tr> <th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai/ Angka</th><th>Predikat</th></tr> <tr> <td>1</td><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Istimewa</td></tr> <tr> <td>2</td><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>3</td><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>4</td><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Cukup Baik</td></tr> <tr> <td>6</td><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Buruk</td></tr> <tr> <td>7</td><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Buruk</td></tr> </table> Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (self-assesment) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap self-assesment tersebut dan			No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	1	AA	>90 - 100	Istimewa	2	A	>80 - 90	Sangat Baik	3	BB	>70 - 80	Baik	4	B	>60 - 70	Cukup Baik	6	C	>30 - 50	Buruk	7	D	0 - 30	Sangat Buruk
No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat																												
1	AA	>90 - 100	Istimewa																												
2	A	>80 - 90	Sangat Baik																												
3	BB	>70 - 80	Baik																												
4	B	>60 - 70	Cukup Baik																												
6	C	>30 - 50	Buruk																												
7	D	0 - 30	Sangat Buruk																												



	mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM
Frekuensi	Tahunan

5. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Nama Indikator	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Definisi	Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0-10. Menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan.
Rumus Perhitungan	$IKAD_m = \left(\sum_{i=1}^{14} a_i Z_{im} \right) \times 10$ Dimana : merupakan dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

6. Indeks Kualitas Kebijakan

Nama Indikator	Indeks Kualitas Kebijakan
Sumber Data	Sekretariat Daerah Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

7. Indeks Kapabilitas Inovasi

Nama Indikator	Indeks Kapabilitas Inovasi
Definisi	Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Kapabilitas inovasi merupakan Akumulasi dan diversifikasi pengetahuan menawarkan peluang merekombinasi pengetahuan untuk menghasilkan ide inovatif dan model bisnis baru.
Rumus Perhitungan	Kapabilitas Inovasi melibatkan banyak aspek manajemen seperti, Keanekaragaman tenaga kerja; Pengembangan kluster; Publikasi ilmiah; Aplikasi kekayaan intelektual (KI); Belanja riset; Indeks keunggulan lembaga riset; Aplikasi merk dagang
Interpretasi	Menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas- visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru.
Sumber Data	BPS; Kementerian Perindustrian; Dinas Perdagangan; Kemenkum HAM; Kementerian Pertanian; Kementerian Dalam Negeri; Kemendikbudristek; BRIN
Frekuensi	Tahunan

8. Indeks Kepuasan Masyarakat

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat
Sumber Data	Sekretariat Daerah Kota Dumai dan Kecamatan se-Kota Dumai



Frekuensi	Tahunan

9. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah. IID merupakan bagian dari program Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Rumus Perhitungan	$IID = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum} \times 100$ Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). Skor Total Maksimum adalah 250. Skala IID adalah 0 s.d. 100. Dengan proporsi aspek sebagai berikut: - Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari: 1) 3 Variabel; 2) 15 Indikator; dan 3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%). - Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari: 1) 5 Variabel; 2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan 3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%).
Interpretasi	himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatanya
Sumber Data	Kemendagri
Frekuensi	Tahunan



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA DUMAI TAHUN 2025 - 2029**